

2

Penulis  
**Oman Sukmana**

# PERGULATAN *di* MEDAN LUMPUR

**“Potret Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo  
Dalam Melawan Dominasi Negara dan Korporasi”**





# **PERGULATAN DI MEDAN LUMPUR:**

**"Potret Gerakan Sosial Korban Bencana  
Lumpur Lapindo Dalam Melawan  
Dominasi Negara dan Korporasi"**

**Dr. Oman Sukmana, M.Si.**



**Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang**

# **PERGULATAN DI MEDAN LUMPUR:**

**"Potret Gerakan Sosial Korban Bencana  
Lumpur Lapindo Dalam Melawan  
Dominasi Negara dan Korporasi"**

---

Hak Cipta © Oman Sukmana, 2017

Hak Terbit pada UMM Press

---

Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

Telepon (0341) 464318 Psw. 140

Fax. (0341) 460435

E-mail: [ummpress@gmail.com](mailto:ummpress@gmail.com)

<http://ummpress.umm.ac.id>

Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

---

Cetakan Pertama, Januari 2017

---

ISBN : 978-979-796-234-0

---

xxii; 292 hlm.; 16 x 23 cm

---

Setting Layout : Septian R.

Design Cover : Andi Firmansah

---

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# MOTTO

"Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan"  
(Oman Sukmana)

# Prakata

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rakhmat, Hidayah, dan Nikmat-Nya, sehingga penulis memiliki kekuatan, kemampuan, dan motivasi untuk bisa menulis buku ini yang penulis beri judul “Pergulatan di Medan Lumpur: Potret Gerakan Perlawanan Korban Bencana Lumpur Lapindo Dalam Melawan Dominasi Negara dan Korporasi”. Buku ini merupakan potret “perlawanan” korban bencana Lumpur Lapindo atas ketidakadilan yang mereka rasakan terkait dengan upaya pemerintah dan korporasi dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan dampak bencana Lumpur Lapindo.

Peristiwa bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo merupakan bentuk dari praktek kebijakan dominatif negara (pemerintah) yang melakukan kerjasama (koalisi) dengan pihak korporasi, yakni pihak PT LBI, yang berdampak pada munculnya kesengsaraan bagi rakyat yang menjadi korban bencana. Bencana Lumpur Lapindo terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberikan izin kepada pihak PT LBI untuk melakukan eksplorasi Minyak dan Gas (Migas) di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kebijakan pemerintah ini telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo.

Materi buku ini merupakan pengembangan dari hasil Penelitian Fundamental yang dilaksanakan tahun 2014 (tahun pertama) dan 2015 (tahun kedua), yang dibiayai oleh Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Penelitian Nomor: E.6.k/035/DPPM-UMM/IV/2014, Tanggal: 07 April 2014. Tujuan diterbitkannya buku ini adalah sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Gerakan Sosial. Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, seperti di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Program Studi Sosiologi, terdapat mata kuliah Gerakan Sosial. Namun demikian, materi buku ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan praktisi yang tertarik untuk mengkaji fenomena gerakan sosial di masyarakat.

Penulisan buku ini disusun ke dalam 7 (Tujuh) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab Pertama;** merupakan Bab Pengantar dimana pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang terjadinya fenomena bencana Lumpur Lapindo yang mendorong munculnya aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Selain itu Bab ini juga menjelaskan beberapa perspektif teoritik seperti konsep tentang dominasi, pemetaan analisis studi gerakan sosial, gerakan sosial sebagai tindakan kolektif yang diorganisir, gerakan sosial dan tindakan perlawanan, dan perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald tentang tiga varian teoritik dalam studi gerakan sosial;

**Bab Kedua;** menguraikan tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Sidoarjo dan dampak bencana Lumpur Lapindo, yang meliputi penjelasan mengenai deskripsi umum wilayah Kabupaten Sidoarjo, Gambaran dan penjelasan terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di wilayah Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon, dan Deskripsi serta penjelasan terjadinya perubahan kehidupan masyarakat pada wilayah yang terkena dampak bencana Lumpur Lapindo di wilayah kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon;

**Bab Ketiga;** menjelaskan gambaran tentang bagaimana dominasi negara dan korporasi dalam areal bencana Lumpur Lapindo. Terjadinya peristiwa bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo,

Jawa Timur, merupakan dampak dari dominasi negara (pemerintah) yang mengeluarkan kebijakan pemberian izin kepada pihak korporasi (PT LBI) untuk melakukan aktivitas eksplorasi Migas di wilayah blok Brantas, khususnya di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Aktivitas eksplorasi Migas yang dilakukan oleh PT LBI tersebut, diindikasikan mengandung unsur pelanggaran, seperti pelanggaran atas RTRW Kabupaten Sidoarjo, dan pelanggaran HAM. Negara lebih memihak kepada kepentingan korporasi (PT LBI) daripada kepentingan rakyat;

**Bab Keempat;** menjelaskan tentang bagaimana kebijakan dominatif negara dan korporasi yang melahirkan ide gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Peta dinamika dan perkembangan gerakan sosial korban Bencana Lumpur Lapindo dapat di analisis pada periode pertama gerakan, dimana pada periode ini merupakan awal terjadinya bencana Lumpur Lapindo hingga munculnya kebijakan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007. Pada periode pertama ini dapat dikatakan sebagai fase munculnya ide aksi pra-Gerakan Sosial karena kelompok (organisasi) Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo belum terbentuk.

**Bab Kelima;** berisi penjelasan tentang bagaimanaproses pemantapan dan konsolidasi menuju aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Ketidakpuasan dan kekecewaan korban bencana Lumpur Lapindo terhadap pihak pemerintah dan PT LBI, serta ketidakpercayaan korban bencana Lumpur Lapindo terhadap pihak LSM, memunculkan kesadaran bahwa mereka harus mengorganisir diri untuk membangun kekuatan kolektif dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban bencana dalam mendapatkan ganti-rugi atas aset tanah dan bangunan milik mereka yang hancur tergenang oleh lumpur. Oleh karena itu, pada Bab ini diuraikan hal-hal yang terkait dengan: Situasi dan Kondisi yang Mendasari Munculnya Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo, Terbentuknya Kelompok (Organisasi) Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo, Aksi Tuntutan Kolektif Korban Bencana Lumpur Lapindo, dan Pembentukan Identitas Kolektif Sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo";



**Bab Keenam;** berisi penjelasan tentang gambaran proses penurunan (*Declining*) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami penurunan (*declining*) sebagai dampak dari terbitnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA). Keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperkuat bahwa fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo sebagai bencana alam, mengubah kondisi, konstalasi, dan strategi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Perubahan juga muncul dalam konteks peluang politik (*political opportunity*), struktur mobilisasi (*mobilizing structure*), dan pembingkaihan kultural (*cultural framing*) gerakan; dan

**Bab Ketujuh;** merupakan Bab Penutup yang berisi uraian penjelasan tentang pemetaan gerakan sosial korban bencana lumpur Lapindo, dinamika gerakan sosial korban bencana lumpur Lapindo, kesimpulan, dan implikasi Teoritis.

Dalam kesempatan ini ijinakan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan dukungan atas terbitnya buku ini. Pertama, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Kedua, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Kopertis Wilayah VII, Jawa Timur, Kemendikbud (sekarang menjadi Kemenristek-Dikti). Ketiga, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada UMMPress yang telah bersedia bekerjasama dalam penerbitan buku ini. Keempat, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan atas substansi buku ini, khususnya kepada Prof. Dr. Susetawan, SU. (FISIPOL UGM) dan Dr. Suharko (FISIPOL UGM), atas diskusi dan masukan konstruktifnya.

Buku ini secara khusus penulis persembahkan buat para korban bencana Lumpur Lapindo khususnya kepada para pemimpin kelompok korban bencana Lumpur Lapindo, seperti: pak Khoirul Huda (sekretaris GKLL), pak Sunarto (Ketua Paragekontrak), pak Pitanto (Wakil Ketua Pagarekontrak), pak KH Abdul Fatah (Ketua Gepres), pak Akhmadi Jauhari (Ketua Gempur 4-D), mas Bambang Sakri (Koordinator GKLL Siring), dsb.

Teristimewa, terimakasih buat keluarga, yakni istri tercinta Teti Rohaeti, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, pengertian

dan kasihn sayangnnya menemani penulis, serta anak-anak tersayang: AA Erisandhy, Ade Erinda, dan Kaka Fernando, serta mbak Anggi. Keluarga adalah segalanya. Terimakasih atas dukungan dan doanya.

Penulis

**OS**



# Daftar Isi

PRAKATA .....	v
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR SINGKATAN & AKRONIM .....	xix
BAB 1 PENGANTAR .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perspektif Teoritik .....	10
C. Kerangka Berpikir (Kerangka Konseptual) .....	35
D. Sistematika Penulisan .....	40
BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO & DAMPAK BENCANA LUMPUR LAPINDO .....	43
A. Deskripsi Umum Wilayah Kabupaten Sidoarjo .....	43
B. Deskripsi Terjadinya Bencana Lumpur Lapindo .....	57
C. Dampak Bencana Lumpur Lapindo dan Perubahan pada Wilayah Peta Area Terdampak (PAT) .....	70



D. Pembagian Wilayah Peta Area Terdampak Bencana Lumpur Lapindo: Dalam PAT dan Luar PAT .....	84
E. Bencana Lumpur Lapindo sebagai Arena Produksi Ketidakadilan .....	87
F. Simpulan .....	105
 BAB 3 DOMINASI NEGARA & KORPORASI DALAM ARENA BENCANA LUMPUR LAPINDO .....	107
A. Kebijakan Eskplorasi Migas di Wilayah Kecamatan Porong, Sidoarjo .....	107
B. Konstelasi Politik pada Latar Kebijakan Pemerintah Terkait Bencana Lumpur Lapindo .....	111
C. Kebijakan Eksplorasi Migas di Wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebagai Pelanggaran atas Penerapan RT/RW Wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo .....	113
D. Ketidakterbukaan dalam Proses Pembelian Tanah Warga Masyarakat.....	119
E. Indikasi Pelanggaran HAM dalam Eksplorasi Migas. ....	122
F. Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Munculnya Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Bagi para Korban Bencana .....	125
G. Pembagian Tanggungjawab Wilayah Peta Area Terdampak Bencana Lumpur Lapindo.....	131
H. Kebijakan Pemerintah Merugikan Korban Bencana ....	133
I. Simpulan .....	134
 BAB 4 KEBIJAKAN DOMINATIF NEGARA & KORPORASI YANG MELAHIRKAN IDE GERAKAN SOSIAL KORBAN BENCANA LUMPUR LAPINDO .....	137
A. Kegagalan Pihak Pemerintah dan PT LBI dalam Menghentikan Semburan Lumpur .....	138
B. Mobilisasi Massa Berbasis Komunitas Masyarakat Lokal .....	141

C. Dukungan dan Peran Advokasi Koalisi LSM .....	145
D. Aksi Tuntutan Korban Bencana Lumpur Lapindo .	160
E. Kesadaran Identitas Kolektif Sebagai “Korban Bencana Lumpur Lapindo” Belum Terbentuk .....	163
F. Simpulan .....	166
 BAB 5 PROSES PEMANTAPAN & KONSOLIDASI MENUJU AKSI GERAKAN SOSIAL KORBAN BENCANA LUMPUR .....	167
A. Situasi dan Kondisi yang Mendasari Munculnya Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo .....	168
B. Terbentuknya Kelompok (Organisasi) Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo .....	174
C. Aksi Tuntutan Kolektif Korban Lumpur Lapindo...	199
D. Pembentukan Identitas Kolektif Sebagai “Korban Bencana Lumpur Lapindo” .....	204
E. Simpulan .....	212
 BAB 6 PROSES PENURUNAN ( <i>DECLINING</i> ): GERAKAN SOSIAL SEBAGAI ALAT KEPENTINGAN PEMIMPIN .....	215
A. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Penurunan Peluang Gerakan Sosial .....	216
B. Re-Organisasi Kelompok Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo .....	220
C. Munculnya Relasi Pertukaran Sosial Antara Aktor Pemimpin Kelompok Gerakan Sosial dengan Pihak Korporasi .....	232
D. Bias Identitas Kolektif Antara “Korban Bencana Lumpur Lapindo” vs “Korban Bencana Lumpur Sidoarjo” ....	238
E. Simpulan .....	246
 BAB 7 PENUTUP .....	249
A. Pemetaan Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo .....	249

B. Dinamika Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo .....	250
C. Kesimpulan .....	261
D. Implikasi Teoritis .....	265
E. Agenda Studi Lanjutan .....	269
DAFTAR PUSTAKA .....	271
INDEKS .....	289
TENTANG PENULIS .....	292

# Daftar Tabel

1.1. Peristiwa Aksi Kolektif Korban Bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo Selama Tahun 2007 s/d 2011 .....	8
1.2. Empat Tradisi Analisis Gerakan Sosial .....	14
1.3. Dimensi Struktur Penggerak ( <i>Mobilizing Structure</i> ) .....	26
2.1. Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Lumpur Lapindo .....	66
2.2. Penduduk Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 .....	73
2.3. Perubahan Wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Dampak Semburan Lumpur Lapindo Berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 .....	75
2.4. Perubahan Wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Dampak Semburan Lumpur Lapindo Berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2008 .....	76
2.5. Perubahan Wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Dampak Semburan Lumpur Lapindo Berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2009 .....	76
2.6. Perubahan Wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Dampak Semburan Lumpur Lapindo Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2012 .....	77



2.7. Luas Wilayah yang Harus Dikosongkan Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon Menurut Perpres .....	79
6.1. Perbedaan Framing Berita Bencana TVOne dan Metro TV ..	242
6.2. Kontroversi Penggantian Aseta Tanah dan Bangunan .....	243
6.3. Kontroversi Penilaian Atas Sosok ARB (PT LBI) .....	246
7.1. Dinamika Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo ..	260

# Daftar Gambar

1.1.	Konstruksi Posisi Pemikiran McAdam, McCarthy dan Zald dalam Empat Tradisi Analisis Gerakan Sosial Crossley .....	36
1.2.	Kombinasi Antara 3 Teori Gerakan Sosial dalam Perspektif McAdam, McCarthy dan Zald .....	38
1.3.	Model Kerangka Berpikir .....	38
2.1.	Peta Wilayah Kabupaten Sidoarjo .....	45
2.2.	Lokasi Tempat Semburan Lumpur (TSL) Lapindo .....	59
2.3.	<i>Underground Blowout</i> (Semburan Liar Bawah Tanah) .....	60
4.1.	<i>Political Opportunity, Mobilizing Structure, dan Cultural Framing</i> pada Periode Pertama Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo .....	165
5.1.	Zoe Gray, Staf Officer dari COHRE Sedang Melakukan <i>Fact and Finding Mission</i> di Sidoarjo .....	197
5.2.	Warga para Korban Bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo Melakukan Koordinasi di Posko Tenda yang Terletak di Atas Tanggul .....	205
5.3.	Peneliti di Depan Posko Pengaduan Korban Lumpur Lapindo yang Terletak di Desa Siring .....	206
5.4.	Berbagai Spanduk dan Tulisan Mencerminkan Identitas Kolektif Warga Korban Lumpur Lapindo .....	207

5.5.	Beberapa Warga Korban Lumpur Lapindo Menunjukkan Identitas Kolektif Mereka Sebagai Korban Lapindo .....	207
5.6.	Status Sebagai Pengungsi Memperkuat Identitas Kolektif sebagai Korban Lumpur Lapindo .....	208
5.7.	Contoh Spanduk yang Mencerminkan Identitas Kolektif Sebagai Korban Lumpur Lapindo .....	209
5.8.	Gambar Patung ARB Sebagai Simbol Pihak Harus Dilawan oleh Warga Korban Lumpur Lapindo.....	209
5.9.	Slogan Perlawanan Warga Korban Lumpur Lapindo yang Memperkuat Basis Identitas Kolektif.....	210
5.10.	Beberapa Bentuk Simbol Dukungan dan Simpati Pihak Eskternal atas Warga Korban Lapindo yang Memperkuat Basis Identitas Kolektif .....	211
5.11.	<i>Political Opportunity, Mobilizing Structure, dan Cultural Framing</i> Periode Kedua Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo .....	212
6.1.	<i>Political Opportunity, Mobilizing Structure, dan Cultural Framing</i> Periode Ketiga Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo .....	246
7.1.	Dinamika Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo .	254

# Daftar Singkatan & Akronim

AAPG	: <i>American Association of Petroleum Geologists</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ARB	: Abu Rizal Bakrie
BJP-1	: Banjar Panji-1
BOP	: <i>Blow Out Preventer</i>
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPLS	: Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
BP Migas	: Badan Pelaksana Minyak dan Gas
BPS	: Biro Pusat Statistik
B-to-B	: <i>Buisness to Buisness</i>
COHRE	: <i>Center on Housing Rights and Evictions</i>
CnC	: <i>Cash and Carry</i>
CnR	: <i>Cash and Resettlement</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EMP	: Energy Mega Persada
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral



FKPBN	: Forum Kebersamaan Penanggulangan Bencana Negara
FKLL	: Forum Komunikasi Korban Lumpur Lapindo
Gebrak Lapindo	: Gerakan Masyarakat Sipil Menuntut Keadilan Korban Lapindo
GKLL	: Gabungan Korban Lumpur Lapindo
GKLL	: Gabungan Korban Luapan Lumpur
Gempur 4-D	: Gerakan Masyarakat Korban Lumpur 4 Desa
Gerbangkertosusila	: Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.
Geppres	: Gerakan Pendukung Perpres No. 14/2007
Golkar	: Golongan Karya
GPKLL	: Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo
GSB	: Gerakan Sosial Baru
HC	: Huda Centre
IMB	: Ijin Mendirikan Bangunan
Keppres	: Keputusan Presiden
K3L	: Koalisi Kelompok Korban Lapindo
KLM	: Korban Lumpur Menggugat
KK	: Kepala Keluarga
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KNV	: Kahuripan Nirwana Village
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Korlap	: Koordinator Lapangan
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Lula	: Lumpur Lapindo
Lusi	: Lumpur Sidoarjo
MA	: Mahkamah Agung
MADD	: <i>Mother Againsts Drunk Drivers</i>
Migas	: Minyak dan Gas
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak

NSM	: <i>New Social Movement</i>
Pagarekontrak	: Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak
Pagarekorlap	: Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo
Pansus	: Panitia Khusus
PAT	: Peta Area Terdampak
PBB	: Persatuan Bangsa Bangsa
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Perda	: Peraturan Daerah
Perumtas	: Perumahan Tanggul Angin Sejahtera
Perpres	: Peraturan Presiden
PN	: Pengadilan Negeri
POS	: <i>Political Opportunity Structure</i>
PT	: Pengadilan Tinggi
PT	: Perseroan Terbatas
PT LBI	: Perseroan Terbatas Lapindo Brantas Incorporated
PT MLJ	: Perseroan Terbatas Minarak Lapindo Jaya
RMT	: <i>Resource Mobilization Theory</i>
PPB	: Pasar Porong Baru
RT	: Rukun Tetangga
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUTR	: Rencana Umum Tata Ruang
RW	: Rukun Warga
Setgab	: Sekretariat Gabungan
SIT	: <i>Social Identity Theory</i>
SMOs	: <i>Social Movement Organization</i>
Sirtu	: Pasir dan Batu
SSWP	: Sub Satuan Wilayah Pengembangan
Timnas PSLS	: Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo

TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TKKP	: Tim Kajian Kelayakan Perumahan
TSL	: Tempat Semburan Lumpur
Walhi	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

# Bab 1

## Pengantar

### A. Latar Belakang

Studi tentang gerakan sosial sebagai manifestasi *social power*, berkembang dengan sangat pesat dalam area penelitian sosiologi<sup>1</sup>. Menurut Moghadam<sup>2</sup>, dalam konteks global fokus studi (kajian) gerakan sosial global (trans-nasional) terletak pada tiga bentuk gerakan sosial, yakni: (1) Gerakan perempuan dan jaringan feminist transnasional (*the global women's movement and transnational feminist networks*); (2) Gerakan dan Jaringan Islam transnasional (*transnational Islamist movements and networks*); dan (3) Gerakan ketidakadilan global (*the global justice movement*). Perkembangan studi gerakan sosial global dewasa ini karena adanya faktor ekonomi, politik, kultural, dan geografis yang mendorong terjadinya peningkatan mobilitas global (trans-nasional) dalam aspek kapital (*capital*), manusia (*people*), organisasi (*organizations*), gerakan (*movements*), ide-ide (*ideas*), dan sebagainya. Sementara dalam aspek komunikasi, munculnya internet dan teknologi informasi

---

<sup>1</sup> Della Porta, Donatella; & Diani, Mario. 2006. *Social Movements an Introduction*. Malden: Blackwell Publishing. Halaman 1.

<sup>2</sup> Moghadam, Valentine M. 2009. *Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement*. Maryland: Rowman& Littlefield Publishers, Inc. Halaman ix.

merupakan instrumen yang memungkinkan terjadinya percepatan komunikasi, transfer, dan mobilisasi transnasional. Disisi lain aspek-aspek terkait dengan hak buruh (*labor rights*), Hak asasi manusia (*human rights*), Hak perempuan (*women's rights*), dan perlindungan lingkungan (*environenmental protection*) semakin tercederai.

Di negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika Serikat, studi gerakan sosial berkisar seputar anti-rasialisme (*anti-racism*), anti-nukliarisme (*anti-nuclearism*), perlucutan senjata (*disarmament*), feminisme (*feminism*), lingkungan (*environmentalism*), regionalisme dan etnisitas (*regionalism and ethnicity*), kebebasan sipil (*civil libertarianism*), dan sebagainya, hingga ke isu-isu kebebasan personal dan perdamaian.

Sementara itu di negara-negara Dunia Ketiga, studi gerakan sosial pada umumnya berkaitan dengan respons (reaksi) terhadap pendekatan perubahan sosial yang dominan (*mainstream approach*), yakni perubahan sosial yang direkayasa oleh negara melalui apa yang disebut sebagai pembangunan (*development*). Namun, pembangunan dalam beberapa kasus dipandang oleh rakyat ternyata justru sebagai penyebab kemacetan ekonomi, krisis ekologis, serta berbagai kesengsaraan rakyat di Dunia Ketiga<sup>3</sup>.

Di Indonesia, pada umumnya fokus studi gerakan sosial lebih banyak diarahkan kepada bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat dan kelompok-kelompok marginal sebagai reaksi terhadap bentuk dominasi dan hegemoni yang dilakukan oleh negara. Terdapat tiga pilar kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat, yaitu kekuasaan negara (*state*), pasar (*market*), dan *civil society*. Negara memiliki *political power* (kekuasaan politik), pasar (*market*) memiliki *economic (market) power* (kekuasaan ekonomi/pasar), dan *civil society* memiliki *social power* (kekuatan sosial). Manifestasi dari *social power* (kekuatan sosial) adalah gerakan sosial. Relasi antara ketiga pilar kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan negara (*state*), pasar (*market*), dan *civil society*, harus berjalan selaras dan seimbang<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Fakih, Mansour. 2005. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: Insist Press. Halaman 35-36.

<sup>4</sup> Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 129.

Namun dalam beberapa kasus, seringkali hubungan antara ketiganya berjalan timpang, sehingga yang sering terjadi bukanlah sinergisme antara ketiganya melainkan ada elemen yang sangat kuat (dominan) dan sebaliknya ada elemen yang sangat lemah<sup>5</sup>. Kecenderungan praktek dominasi muncul karena menguatnya relasi antara kekuasaan negara (*state power*) dan kekuasaan pasar/korporasi (*market/corpoaret power*) yang banyak merugikan rakyat. Gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dipandang sebagai manifestasi dari kekuatan sosial dalam melawan dominasi dan hegemoni kekuasaan negara (pemerintah) dan korporasi.

Studi gerakan sosial yang memfokuskan kepada bagaimana perlawanan rakyat terhadap dominasi dan hegemoni koalisi antara negara dan korporasi belum banyak dilakukan, khususnya dalam konteks dan latar (arena) fenomena bencana.

Fenomena yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah fenomena gerakan sosial (*social movements*) korban bencana Lumpur Lapindo (Lula)<sup>6</sup> di Sidoarjo. Korban bencana Lumpur Lapindo membangun kekuatan kolektif (*collective power*) dan melakukan gerakan sosial untuk melawan dominasi negara (pemerintah) dan korporasi dalam kebijakan eksplorasi Migas di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya, Kabupaten Sidoarjo, yang menimbulkan dampak terjadinya bencana Lumpur Lapindo. Melalui aksi gerakan sosial yang berbasis kekuatan kolektif, korban bencana Lumpur Lapindo berhasil memaksa pihak pemerintah dan korporasi untuk membuka ruang negosiasi.

Bencana<sup>7</sup> Lumpur Lapindo di Sidoarjo terjadisejak tanggal 29 Mei 2006 karena adanya semburan lumpur panas sebagai akibat

---

<sup>5</sup> Febriasih, Happy Budi (peny.). 2009. *Bisnis dan Demokrasi*. Malang: Averroes Press. Halaman 17.

<sup>6</sup> Dalam konteks ini berkembang dua istilah penyebutan, yakni penyebutan Lumpur Lapindo (Lula) dan Lumpur Sidoarjo (Lusi). Istilah Lumpur Lapindo (Lula) mengacu kepada asumsi bahwa faktor penyebab terjadinya bencana semburan lumpur panas di wilayah Kecamatan Porong, Sidoarjo karena adanya kegiatan eksplorasi Migas oleh pihak PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI). Sedangkan istilah Lumpur Sidoarjo (Lusi) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 14/2007 yang secara resmi menyebut istilah Lumpur Sidoarjo karena berdasarkan ketetapan pihak pengadilan memutuskan bencana semburan lumpur panas di wilayah Kecamatan Porong, Sidoarjo sebagai bencana alam.

<sup>7</sup> Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau

dari kegiatan eksplorasi Minyak dan Gas (Migas) yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc. (PT. LBI). Lokasi pusat semburan lumpur panas terletak di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bencana semburan Lumpur Lapindo menimbulkan dampak yang luar biasa yang menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan yang ada di sekitar pusat semburan lumpur, yakni Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sidoarjo. Menurut data hasil penelitian, sekitar 1.071 hektar luas wilayah di tiga kecamatan tersebut harus dikosongkan, baik karena tenggelam oleh luapan lumpur maupun karena dinyatakan sudah tidak layak huni lagi. Sementara lebih dari sekitar 15.788 Kepala Keluarga (KK) atau 48.983 Jiwa harus pindah dari tempat tinggal asalnya ke tempat tempat tinggal yang baru. Pada awalnya, yakni antara tahun 2007 hingga 2009, korban bencana Lumpur Lapindo hanya mengungsi yang diperkirakan sifatnya sementara. Namun ternyata warga korban bencana tidak bisa menempati kembali tempat tinggal asalnya, sehingga terpaksa mereka harus pindah ke tempat tinggal baru.

Peristiwa bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo merupakan bentuk dari praktek kebijakan dominatif negara (pemerintah) yang melakukan kerjasama (koalisi) dengan pihak korporasi, yakni pihak PT LBI, yang berdampak pada munculnya kesengsaraan bagi rakyat yang menjadi korban bencana. Bencana Lumpur Lapindo terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberikan izin kepada pihak PT LBI untuk melakukan eksplorasi Minyak dan Gas (Migas) di wilayah Kecamatan Porong,

---

faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. (Lihat: UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kebijakan pemerintah ini telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2012, bahwa peruntukkan wilayah Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon diprioritaskan hanya untuk kawasan pemukiman, pertanian dan industri, bukan untuk kawasan eksploitasi minyak dan gas (pertambangan). Kemudian Perda Nomor 16 Tahun 2003 diperbaharui lagi dan terbit Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029, dimana dicantumkan bahwa wilayah Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan sebagian Kecamatan Tanggulangin, bersama dengan Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Krembung adalah termasuk ke dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) III, dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, konservasi geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional. Sejalan dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2003, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Jawa Timur 2005-2020 yang juga menyatakan antara lain bahwa kawasan Sidoarjo, khususnya wilayah Kecamatan Porong diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertanian, dan industri. Namun, Pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM dan BP Migas memberikan hak pengelolaan kawasan blok Brantas sebagai ladang eskplorasi Migas<sup>8</sup>. Dengan demikian, terjadi inkonsistensi fungsi peruntukkan wilayah kawasan Porong dan sekitarnya, dari fungsi utama sebagai kawasan pemukiman, pertanian, dan idustri menjadi kawasan eskplorasi Migas.

Muncul kontroversi dalam penetapan status bencana Lumpur Lapindo, apakah bencana Lumpur Lapindo merupakan bencana industri (*man-made disaster*)<sup>9</sup> ataupun merupakan bencana alam

---

<sup>8</sup> Hak penambangan (eksplorasi) Migas di kawasan blok Brantas diperoleh PT LBI berdasarkan surat BP Migas No. 424/BP00000/2005-SO, sebagai tindak lanjut dari surat persetujuan Presiden Suharto Nomor: B105/Pres/4/1990, tanggal 12 April 1990. Penjelasan lihat BAB III Disertasi ini.

<sup>9</sup> Bencana bisa bersumber dari alam (*natural*) atau manusia (*manmade*), serta bisa karena disengaja (*intentional*) atau tidak disengaja (*accidental*). Suatu bencana alam (*natural disaster*)



(*natural disaster*). Secara ilmiah-akademik, peristiwa bencana Lumpur Lapindo merupakan fenomena bencana industri (*man-made disaster*) karena penyebab terjadinya semburan lumpur sebagai akibat dari kegiatan eksplorasi Migas yang dilakukan oleh PT LBI<sup>10</sup>. Namun secara yuridis-formal, bencana Lumpur Lapindo ditetapkan sebagai bencana alam karena terjadinya fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo dipicu oleh peristiwa gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dua hari sebelumnya. Pemerintah dengan mengacu kepada keputusan pihak pengadilan menetapkan fenomena semburan Lula di Sidoarjo sebagai peristiwa bencana alam<sup>11</sup>.

Karena bencana Lumpur Lapindo dinyatakan sebagai bencana alam, bukan *man-made disaster*, maka pihak pemerintah dan pihak PT LBI (korporasi) dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari aspek hukum. Sebagai konsekuensinya penyelesaian permasalahan yang terkait dengan semburan Lula di Sidoarjo tidak menjadi tanggung jawab PT LBI, akan tetap menjadi tanggungjawab pemerintah yang anggaran biayanya dibebankan kepada APBN<sup>12</sup>. Pemerintah

---

disebabkan karena kekuatan alam (*the forces of nature*), seperti badai (*hurricane*), tornado (*tornado*), atau gempa bumi (*earthquake*). Sedangkan bencana buatan manusia (*manmade disaster*) dimungkinkan sebagai hasil dari tindakan teroris (*terrorist act*) atau kecelakaan industri (*industrial accident*). (Lihat: Beach, Michael. 2010. *Disaster Preparedness and Management*. Philadelphia: F.A. Davis Company).

<sup>10</sup> AAPG (*American Association of Petroleum Geologists*), pada tanggal 26-29 Oktober 2008 melaksanakan konferensi tahunan di Cape Town, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia. Dalam "*AAPG 2008 International Conference & Exhibition*", pandangan para ahli geologi dunia tentang penyebab terjadinya semburan lumpur terbagi menjadi empat kelompok, yakni: Pertama, sebanyak tiga ahli dari Indonesia mendukung gempa Yogya sebagai penyebabnya; Kedua, sebanyak 42 ahli dunia menyatakan aktivitas pemboran PT LBI sebagai penyebabnya; Ketiga, sebanyak 13 ahli yang menyatakan kombinasi gempa dan pemboran sebagai sumber penyebabnya; dan Keempat, ada 16 ahli yang menyatakan belum bisa menentukan pendapatnya.

<sup>11</sup> Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 27 November 2007 yang isinya menolak gugatan YLBHI, menyatakan bahwa pemerintah dan PT LBI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 13 Juni 2008 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa adanya kejadian semburan lumpur di Sidoarjo karena kecenderungan gejala alam lebih dominan, bukan sebagai kesalahan manusia. Selanjutnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), tanggal 3 April 2009, yang isinya menolak permohonan kasasi YLBHI, menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo merupakan fenomena alam dan bukan kesalahan industri dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

<sup>12</sup> Sesuai pasal 60 UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab antara pemerintah dan pemerintah daerah.

menetapkan bencana Lumpur Lapindo sebagai bencana nasional<sup>13</sup>. Penyebutan istilah bencana Lumpur Lapindo (Lula) kemudian diganti secara resmi oleh pemerintah menjadi bencana Lumpur Sidoarjo (Lusi)<sup>14</sup>.

Pemerintah dan pihak PT LBI kemudian melakukan kompromi dimana Peta wilayah yang terkena dampak semburan Lumpur Lapindo kemudian di bagi ke dalam dua kategori, yakni wilayah di dalam Peta Area Terdampak (dalam PAT) dan wilayah di luar Peta Area Terdampak (luar PAT). Penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari bencana semburan Lumpur Lapindo pada wilayah yang ada di dalam PAT menjadi tanggung jawab pihak PT LBI, sedangkan wilayah yang di luar PAT menjadi tanggung jawab pemerintah. Pihak PT LBI menyatakan bahwa keterlibatan pihaknya dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan bencana Lumpur Lapindo dasarnya hanya bersifat kemanusiaan saja, bukan sebagai bentuk pertanggung jawaban karena dinyatakan bersalah.

Korban bencana Lumpur Lapindo merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dan PT LBI. Warga yang menjadi korban bencana kemudian melakukan aksi gerakan sosial untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas aset tanah dan bangunan milik mereka yang hancur. Tuntutan ganti rugi aset tanah dan bangunan milik korban bencana Lumpur Lapindo ini ditujukan kepada pihak PT LBI yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya bencana Lumpur Lapindo. Dalam beberapa kesempatan, tuntutan korban bencana Lumpur Lapindo ini dilakukan melalui aksi kolektif seperti demonstrasi, blokir jalan, aksi protes massa, dan negosiasi. Sebagai contoh, hingga tahun 2011 saja data yang dihimpun dari berbagai sumber pemberitaan menunjukkan kurang lebih telah terjadi sekitar 49 kali tindakan kolektif, baik berupa aksi protes, aksi demonstrasi, aksi blokade jalan, dan sebagainya, yang dilakukan masyarakat korban bencana Lula di Sidoarjo. Secara rinci

---

<sup>13</sup> Sesuai Pasal 51 UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden.

<sup>14</sup> Dalam Peraturan Presiden (Perpres) selalu menyebutkan istilah “Bencana Lumpur Sidoarjo”.

data peristiwa aksi kolektif masyarakat korban bencana Lula di Sidoarjo dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1. Peristiwa Aksi Kolektif Korban Bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo Selama Tahun 2007 s/d 2011**

No	Tahun	Jumlah Peristiwa Aksi Kolektif	Bentuk Aksi
1.	2007	3	1 kali aksi protes, 2 kali aksi demonstrasi massa.
2.	2008	21	6 kali aksi protes & demonstrasi, 8 kali aksi blokir jalan, 1 kali aksi lobby, 1 kali aksi menyandera, 2 kali aksi dzikir & tahlilan, 3 kali aksi menduduki kantor.
3.	2009	8	2 kali aksi demonstrasi, 2 kali aksi penyerangan & pendudukan kantor, 4 kali aksi lobby.
4.	2010	2	1 kali aksi teatrikal & 1 kali aksi demonstrasi massa.
5.	2011	15	6 kali aksi blokir jalan & rel KA, 6 kali aksi protes & demonstrasi massa, 3 kali aksi lobby.
Jumlah		49	

Sumber: Data hasil penelitian, dihimpun dari Berbagai Sumber Berita Media Massa

Pada awalnya warga korban Lumpur Lapindo berharap dan meyakini bahwa pemerintah lokal setempat, seperti RT, RW, Desa dan Kecamatan akan mengambil peran nyata dalam memperhatikan dan memperjuangkan nasib warga korban. Namun ternyata pemerintah lokal setempat tidak bisa berbuat banyak karena organisasi pemerintahan mengalami kelumpuhan dan tidak bisa berjalan efektif. Warga juga berharap terhadap peran pihak LSM, yang pada awal kejadian bencana semburan lumpur Lapindo banyak LSM-LSM yang turun ke lokasi bencana melakukan advokasi terhadap warga korban bencana. Namun upaya advokasi yang dilakukan LSM-LSM juga mengalami kegagalan, para aktivis LSM ini hanya gegap gempita di saat awal-awal terjadinya peristiwa bencana saja, untuk selanjutnyamereka menghilang dan menarik diri. Oleh karena itu, warga korban bencana Lumpur Lapindo tidak bisa berharap kepada peran pemerintah lokal setempat (RT, RW,

Desa, dan Kecamatan) dan bantuan pihak LSM (orang luar) dalam memperjuangkan nasib mereka. Warga korban bencana Lumpur Lapindo yang semula bersifat menunggu dan pasif, kemudian mereka mengorganisir diri membangun kekuatan sosial (kekuatan kolektif) untuk melakukan aksi perlawanan. Selanjutnya, korban Lumpur Lapindo membentuk kelompok sebagai wadah dalam memperjuangkan tuntutan ganti rugi. Pada awalnya muncul dua kelompok utama korban bencana Lumpur Lapindo, yakni: (1) Kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) yang kemudian berubah menjadi kelompok Gabungan Korban Luapan Lumpur (GKLL); dan (2) kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap) yang berubah menjadi kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak). Pada tahap berikutnya muncul lagi tiga kelompok korban bencana Lumpur Lapindo, yakni; (1) Kelompok Gerakan Pendukung Perpres (Geppres); (2) Kelompok Tim-16; dan (3) Kelompok Gerakan Lumpur 4-Desa (Gempur 4-D).

Terbentuknya kelompok-kelompok korban bencana Lumpur Lapindo sangat efektif dalam membangun kekuatan kolektif (kekuatan sosial). Warga korban bencana Lumpur Lapindo yang tercerai-berai di beberapa lokasi pengungsian kemudian mereka bersatu dalam kelompok-kelompok korban bencana Lumpur Lapindo untuk memperjuangkan kepentingannya. Kekuatan kolektif yang dimiliki korban bencana Lumpur Lapindo mampu meningkatkan posisi negosiasi kolektif korban bencana terhadap pemerintah dan PT LBI, sehingga membuka peluang (ruang) untuk terjadinya proses negosiasi (*negotiation*) antara korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak pemerintah dan PT LBI. Beberapa upaya negosiasi kolektif yang dilakukan oleh korban bencana Lumpur Lapindo dalam melakukan tuntutan-tuntutan berhasil memaksa pihak pemerintah dan PT LBI untuk menyetujuinya, seperti tuntutan dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi, bukti kepemilikan sah selain sertifikat dan IMB, dan sebagainya.

Dalam konteks gerakan sosial korban Lumpur Lapindo, selanjutnya muncul pertanyaan tentang: Bagaimanakah muncul dan berkembangnya gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo dalam melawan dominasi negara dan korporasi?

Bagaimanakan proses pengorganisasian korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo sehingga mampu menjadi sebuah gerakan sosial? Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Paling tidak terdapat dua alasan penting mengapa peneliti tertarik meneliti tentang aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, yakni: *Pertama*, fenomena bencana semburan lumpur panas di Sidoarjo merupakan kasus kontemporer yang menyita perhatian masyarakat luas, baik regional, nasional, bahkan masyarakat internasional; dan *Kedua*, fenomena gerakan sosial akan selalu muncul sebagai bentuk manifestasi dari *social power* dalam reaksinya terhadap kekuatan dominasi *state power* (kekuasaan negara) dan *market power* (kekuasaan pasar).

Dalam hal ini permasalahan utama yang menjadi fokus pertanyaan adalah Bagaimanakah dinamika kemunculan dan perkembangan gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo dalam melawan dominasi negara dan korporasi? Selanjutnya pertanyaan tersebut kemudian dielaborasi lagi menjadi beberapa sub-pertanyaan, sebagai berikut: (1) Bagaimanakah periodisasi selama siklus terjadinya gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo?; dan (2) Bagaimanakah dinamika perubahan bentuk *political opportunity*, *mobilizing structure*, dan *cultural framing* pada setiap periode gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo?

## B. Perspektif Teoritik

Untuk dapat memahami realitas empiris terkait fenomena "Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo Dalam Melawan Dominasi Negara dan Korporasi", maka akan dijelaskan beberapa perspektif teoritik sebagai berikut.

### 1. Konsep tentang Dominasi

Menurut Lovett<sup>15</sup>, pada umumnya dominasi mengacu kepada suatu jenis khusus dari relasi antara orang-orang dan kelompok. Dalam dominasi harus terdapat beberapa orang atau kelompok

---

<sup>15</sup> Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing. Hal.113.

sebagai agen dominasi, harus terdapat orang atau kelompok yang berbeda sebagai subjek dominasi, dan harus terdapat suatu keadaan tertentu antara dua pihak, yakni agen dan subjek dominasi, yang bisa digambarkan sebagai situasi dan kondisi *dominating* (mendominasi). Konsep dominasi dapat dikonstruksi dari tiga elemen, yakni: (1) kondisi kekuasaan yang tidak seimbang (*the imbalance of power condition*); (2) kondisi ketergantungan (*the dependency condition*); dan (3) kondisi ketidakhadiran atau ketidakpatuhan atas aturan (*the absence of rules condition*).

Konsep tentang dominasi dapat dipahami dari pandangan beberapa tokoh teori kritis, seperti Karl Marx, Max Weber, Herbert Marcuse, dan Jurgen Habermas. Max Weber mengembangkan teori dominasi birokrasi, Herbert Marcuse mengembangkan teori dominasi teknokratis, dan Jurgen Habermas mengembangkan teori dominasi budaya. Selain tokoh teori kritis tersebut, Scott (1990: 198) juga menjelaskan tentang tiga bentuk dominasi, yakni: dominasi material (*material domination*), dominasi status (*status domination*), dan dominasi ideologis (*ideological domination*)<sup>16</sup>.

Memahami bagaimana perspektif Marx tentang dominasi, tidak bisa dilepaskan dari penjelasan Marx tentang negara. Analisis Marx tentang negara sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan para filsuf pendukung liberalisme, seperti Hobbes, Locke dan Rousseau. Marx percaya bahwa eksistensi masyarakat mendahului adanya negara, namun Marx tidak setuju dengan analisis kaum liberal yang menolak realisasi negara jika negara hanya mengekang kebebasan. Marx justru menganggap eksistensi negara diakibatkan oleh adanya ketidakberesan yang sifatnya fundamental dari masyarakat. Ketidakberesan itu bersumber pada proses produksi masyarakat yang tidak adil, dimana terdapat pembagian klas, antara mereka yang memiliki (borjuis) dan mereka yang tidak punya alat produksi (proletar). Menurut Marx negara tidak mengabdikan kepada kepentingan seluruh masyarakat, melainkan hanya melayani kepentingan kelas-kelas sosial tertentu saja, menjadi alat suatu klas dominan untuk mempertahankan kedudukan mereka<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Ibid. Hal. 114.

<sup>17</sup> Ibid

Menurut Marx masyarakat yang membentuk negara, dan masyarakat dibentuk pula oleh cara produksi yang dominan dan hubungan-hubungan produksi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, negara merupakan ekspresi politik dari struktur kelas yang melekat dalam produksi. Dalam masyarakat ber-kelas seperti masyarakat kapitalis, negara didominasi oleh kaum borjuis, dan oleh sebab itu negara merupakan ekspresi politik dari kelas dominan ini. Dalam rumusan Marx yang terkenal "negara adalah panitia penyelenggara kepentingan kelas borjuis". Munculnya negara dalam masyarakat kapitalis akibat dari tidak terdamaikannya pertentangan kelas (antara borjuis dan proletar) dalam struktur masyarakat tersebut. Negara juga mengontrol perjuangan sosial dari kepentingan ekonomi yang berbeda, dimana kontrol tersebut dipegang oleh kelas yang kuat secara ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, negara juga menjadi alat represif dari kelas yang berkuasa. Selain menjalankan kekuasaan represif, negara juga menjalankan kekuatan hegemoni yang mampu melanggengkan kekuasaannya, yakni kekuasaan kelas dominan<sup>18</sup>.

Konsep Marx kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya, baik *Marxist* maupun *Marxian*. Misalnya pemikiran Gramsci tentang hegemoni yang berakar pada konsepsi fundamental Marx tentang negara<sup>19</sup>. Konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Pareto mengembangkan teori elit, dimana menurut Pareto<sup>20</sup> bahwa masyarakat pada kenyataannya terbagi dalam dua kategori, yakni: (1) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (2) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Dengan demikian menurut Pareto masyarakat terdiri dari dua kelas, yakni: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*); dan (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit.

---

<sup>18</sup> Patria, Nezar, & Arief, Andi. 1999. Anronio Gramsci: Negara & Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 18.

<sup>19</sup> Ibid. Halaman 175.

<sup>20</sup> Varma, S.P. 1987. Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali. Halaman 38.

Dalam konteks ini, peneliti mendasarkan pada perspektif teori dominasi ideologi yang dikembangkan oleh Althusser, dimana Althusser mengembangkan teori dominasi ideologi dari pandangan Marx tentang masyarakat dan negara. Setiap kelas berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan berbagai cara, termasuk menciptakan dan menggunakan ideologi. Inilah dasar pembentukan ideologi, membantu manusia untuk mendapatkan sumberdaya pemenuhan kebutuhan bagi diri dan kelompoknya sambil mencegah lawan-lawannya untuk mendapatkan hal yang sama<sup>21</sup>. Untuk keberlangsungan proses reproduksi produksi dan relasi produksi, negara dikembangkan sebagai struktur tertinggi yang mempersatukan dan memaksa individu tetap rekat dan bergerak menjalankan proses-proses itu. Negara dengan aparatusnya menjaga dengan berbagai cara agar kondisi yang menunjang reproduksi dan relasi produksi berlangsung terus. Althusser lalu membedakan dua jenis apartus negara menjadi: (1) *Repressive State Apparatus* (RSA) yang bekerja dengan cara refresif lewat penggunaan kekerasan (militer, polisi, hukum, penjara dan pengadilan); dan (2) *Ideological State Apparatus* (ISA) yang bekerja dengan cara persuasif dan ideologis (agama, pendidikan, keluarga, media massa, dan sebagainya). ISA bekerja secara muharab menggiring individu-individu menjadi subyek yang dengan kerelaan dan kehendaknya menjadi makhluk-makhluk bentukan yang bekerja melanggengkan proses reproduksi produksi tanpa perlu diawasi<sup>22</sup>.

## 2. Pemetaan Analisis Studi Gerakan Sosial

Crossley<sup>23</sup> membagi tradisi analisis studi gerakan sosial berdasarkan dimesi waktu dan seting wilayah. Dalam dimensi waktu tradisi studi gerakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi yakni sebelum tahun 1970-an dan setelah tahun 1970-an. Sementara dalam seting wilayah, studi gerakan sosial dapat dilihat dalam konteks seting Eropa dan Amerika Serikat.

---

<sup>21</sup> Althusser, Louis. 2008. Tentang Ideologi: Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies. Yogyakarta: Jalasutra. Hal. xxii.

<sup>22</sup> Ibid. Hal. xxiv.

<sup>23</sup> Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing. Halaman 11-12.



Selanjutnya Crossley menggambarkan studi gerakan social tersebut dalam sebuah tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Empat Tradisi Analisis Gerakan Sosial**

	<b>Amerika Serikat</b>	<b>Eropa</b>
<b>Sebelum Era 1970</b>	Perilaku Kolektif ( <i>Collective Behaviour</i> )	Marxisme ( <i>Marxism</i> )
<b>Setelah Era 1970</b>	Mobilisasi Sumber Daya/ Proses Politik ( <i>Resource Mobilization/ Political Process</i> )	Gerakan Sosial Baru ( <i>New Social Movements</i> )

Sumber: Sukmana, 2016: 12<sup>24</sup>

Mengacu kepada pandangan Crossley sebagaimana digambarkan dalam tabel 1.2., maka di Amerika Serikat, sebelum era tahun 1970-an, tradisi analisis studi gerakan sosial lebih diwarnai oleh pemikiran perspektif perilaku kolektif. Sementara di era setelah tahun 1970-an, tradisi studi gerakan sosial analisisnya lebih banyak diwarnai oleh perspektif mobilisasi sumberdaya atau proses politik. Berbeda dengan perkembangan di Amerika, di Eropa sebelum era tahun 1970-an analisis studi gerakan social diwarnai tradisi Marxis, dan setelah era 1970-an analisis gerakan social lebih banyak diwarnai oleh tradisi perpektif Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*).

Setelah era tahun 1970-an, para teoritisi gerakan sosial mulai meninggalkan cara berpikir tradisi perilaku kolektif (*collective behavior*) dan tradisi Marxis dalam menganalisis gerakan social dengan memunculkan cara pandang baru. Sejak era tahun 1970-an hingga dewasa ini, di kawasan Eropa berkembang tradisi baru dalam menganalisis studi gerakan sosial yakni tradisi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*), dimana salah satu teori dari GSB adalah teori berorientasi identitas (*the identity oriented theory*). Sementara di Amerika Serikat analisis studi gerakan social diwarnai oleh pemikiran tradisi perspektif mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) atau proses politik (*political process*).

### **3. Gerakan Sosial Sebagai Tindakan Kolektif yang Diorganisir**

Tindakan kolektif (*collective action*) didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan,

atau pengaruh dari seluruh kelompok, bukan untuk seorang atau beberapa orang individu<sup>25</sup>. Mengacu kepada konsep Olson, maka inti dari konsep tindakan kolektif adalah adanya kepentingan umum atau kepentingan bersama (*public goods*) yang diusung di antara kelompok orang-orang<sup>26</sup>. Menurut Weber, suatu tindakan dikatakan terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif dalam tindakan mereka tersebut<sup>27</sup>.

Bagaimana kaitan antara tindakan kolektif dan gerakan sosial? Sebagaimana dikatakan Macionis<sup>28</sup>, bahwa gerakan sosial (*social movement*) adalah merupakan tipe paling penting dari perilaku kolektif (*collective behavior*). Untuk memperjelas konsep tentang Gerakan Sosial (*social movement*), selanjutnya dikemukakan berbagai definisi tentang Gerakan Sosial (*social movement*) dari beberapa ahli.

Macionis<sup>29</sup>, menyatakan bahwa *social movement* adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*). Dari definisi gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan Macionis tersebut maka dapat digaris-bawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni: adanya aktivitas yang diorganisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial.

Senada dengan Macionis, Spencer<sup>30</sup> menyatakan bahwa yang dimaksud gerakan sosial adalah merupakan upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru. Ciri utama dari pandangan Spencer adalah adanya upaya kolektif

---

<sup>24</sup> Ibid. Halaman 12.

<sup>25</sup> Zomeren, Martijn Van. 2009. *Journal of Social Issues*, Vol. 65, No. 4, 2009, pp. 645-660.

<sup>26</sup> Oliver, Pamela E. 1993. *Formal Models of Collective Action*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 19 (1993), pp. 271-300.

<sup>27</sup> Ritzer, George; & Goodman, Douglas J. 2009. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Halaman 136-137.

<sup>28</sup> Macionis, John J. 1999. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall. Halaman 607.

<sup>29</sup> Op cit.

<sup>30</sup> Spencer, Metta. 1982. *Foundations of Modern Sociology*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Halaman 504.

(bersama) dan upaya tersebut diarahkan untuk terjadinya perubahan suatu tatanan yang lebih baik lagi dari tatanan yang ada.

Sementara Locher<sup>31</sup> berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengatur (mengorganisir) diri dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial. Orang-orang dengan sedikit atau banyak kekuatan politik yang dimilikinya, bergabung secara bersama-sama untuk mendapatkan beberapa hal, yakni suatu perubahan sosial. Menurut Locher, sebagian besar teoritisi perilaku kolektif memandang gerakan sosial sebagai suatu tipe dari perilaku kolektif, tetapi banyak dari teoritisi gerakan sosial memandang bahwa gerakan sosial merupakan fenomena yang terpisah dari perilaku kolektif.

Klandermans<sup>32</sup>, menyitir pendapat Tarrow yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elit, pihak lawan dan pihak yang berwenang. Dari pendapat Tarrow ini maka dapat elaborasi bahwa: (1) suatu gerakan adalah tindakan penentangan terhadap elit, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya lainnya; (2) suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama atas pihak lawan, pihak berwenang, dan elit; (3) suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan (4) untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial.

Greene<sup>33</sup>, menyatakan bahwa gerakan sosial (*social movement*) adalah bentuk perilaku kolektif yang bertahan cukup lama, terstruktur, dan rasional. Beberapa karakteristik dari gerakan sosial meliputi: (1) sejumlah orang; (2) tujuan umum untuk mendukung atau mencegah suatu perubahan sosial; (3) adanya struktur dengan kepemimpinan yang diakui umum; dan (4) adanya suatu aktivitas yang dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Gerakan sosial

---

<sup>31</sup> Locher, David A. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall. Halaman 231.

<sup>32</sup> Quah, Stella R., & Sales, Arnaud (eds). 2000. *The International Handbook of Sociology*. London: SAGE Publication. Ltd. Halaman 236.

<sup>33</sup> Greene, Shepard. 2002. *Sociology and You*. Glencoe: McGraw-Hill. Halaman 291.

relatif lebih permanen dan terorganisir dibandingkan dari tipe perilaku kolektif yang lainnya.

Stolley<sup>34</sup>, dengan mengutip pendapat Tarrow, menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya pencapaian tujuan tertentu melalui tindakan yang menentang status quo, wewenang dan budaya yang sudah mapan. Orang-orang yang melakukan suatu gerakan membangun perasaan identitas kolektif, yakni membagi perasaan bersama tentang penyebab dan membantu usaha-usaha mereka dengan mempertahankan suatu gerakan. Beberapa gerakan berjalan dengan singkat dan kemudian berhenti, bisa gagal atau berhasil mencapai tujuannya. Beberapa gerakan yang lainnya, berjalan melalui waktu yang lama dan memiliki pendukung yang memberikan dukungan sepanjang kehidupannya. Untuk mengetahui mengapa dan syarat-syarat apa yang memunculkan suatu gerakan sosial, Freeman<sup>35</sup> melakukan penelitian yang menganalisis empat bentuk gerakan sosial yang terjadi antara tahun 1960-1970, yaitu: *the civil rights*, *student protests*, *welfare rights*, dan *women's liberation movements*. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa untuk terjadinya suatu gerakan sosial harus terdapat syarat-syarat sebagai berikut: (1) ada suatu jaringan komunikasi, yang dapat; (2) memberikan pilihan dalam membantu penyebaran ide-ide gerakan, bersamaan dengan; (3) adanya krisis sebagai penyebab keterlibatan, dan; (4) adanya upaya untuk mengorganisasi kelompok-kelompok yang tertarik (*interested groups*) ke dalam suatu gerakan.

Dari paparan tersebut diatas maka dapat dipertegas bahwa inti yang penting dari suatu gerakan sosial yang dibedakan dari bentuk perilaku kolektif adalah bahwa gerakan sosial itu merupakan suatu tindakan kolektif yang diorganisasikan (diorganisir).

#### **4. Gerakan Sosial dan Tindakan Perlawanan**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *civil society* memiliki kekuatan berupa *social power* (kekuatan sosial), dan bentuk dari

---

<sup>34</sup> Stolley, Kathy S. 2005. *The Basics of Sociology*. Westport: Greenwood Press. Halaman 188.

<sup>35</sup> Op.cit.

*social power* ini adalah *social movement* (gerakan sosial). Klandermans<sup>36</sup>, menyitir pendapat Tarrow yang menyatakan bahwa *social movements* adalah penentangan/perlawanan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elit, pihak lawan dan pihak yang berwenang. Dari pendapat Tarrow ini maka dapat elaborasi bahwa: (1) suatu gerakan adalah tindakan penentangan/perlawanan terhadap elit, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya lainnya; (2) suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama atas pihak lawan, pihak berwenang, dan elit; (3) suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan (4) untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial.

Menurut Singh<sup>37</sup>, gerakan-gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan-warisan kultural mereka. Gerakan sosial dan aksi kolektif telah menjadi sebuah kekuatan universal dari lembaga dan aksi historis dalam masyarakat. Oleh karena itu, gerakan sosial dan aksi sosial tidak hadir begitu saja dalam masyarakat, tetapi kemunculannya seiring dengan adanya suatu konflik dan pergulatan-pergulatan di seputar persoalan ketimpangan, dominasi, kebebasan dan keadilan sosial. Lebih lanjut Singh menyatakan bahwa situasi-situasi ketimpangan dan dominasi sosial, jika dijalankan dan dipertahankan oleh institusi-institusi dan lembaga-lembaga sosial, maka pada gilirannya akan menghasilkan sebuah situasi balik dimana terjadi perlawanan, penolakan, dan pemberontakan menentang sistem-sistem dominasi tersebut. Bagi Singh, struktur-struktur sosial dikonseptualisasikan sebagai sebuah arena pertemuan yang intens dan tidak terhitung jumlahnya dari berbagai kelompok pendominasi dan kolektivitas-kolektivitas sosial yang terdominasi. Struktur-struktur masyarakat merupakan sebuah medan pergulatan yang terus-menerus di antara berbagai kelompok, strata, dan lapisan sosial yang saling bersaing.

---

<sup>36</sup> Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing. Halaman 28.

<sup>37</sup> Ibid. Halaman 29.

Para sarjana menggunakan terminologi perlawanan untuk menjelaskan tentang berbagai variasi dari tindakan dan tingkah laku pada semua tingkatan kehidupan sosial manusia (individu, kolektifitas, dan institusi) dan dalam berbagai seting yang berbeda, termasuk sistem politik, hiburan dan sastra, dan tempat kerja<sup>38</sup>. Dalam hal ini, semua hal dari revolusi hingga gaya rambut telah dijelaskan sebagai suatu perlawanan. Perlawanan sangat beragam menurut tingkah laku dan seting. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa modus dari perlawanan adalah bisa dalam bentuk fisik atau materi (*material or physical*), termasuk menggunakan badan atau objek-objek material yang lainnya. Perlawanan sangat siap untuk terjadinya gerakan sosial atau aksi protes dan ketegangan politik. Perlawanan juga bisa dalam bentuk bahasa dan tingkah laku simbolik, misalnya ketika perempuan Hawai mempublikasikan cerita-cerita tradisional di surat kabar, berbicara dengan menggunakan bahasa asli mereka, dan melakukan tarian dalam rangka melakukan perlawanan atas aneksasi terhadap suku Hawai. Bahkan aksi diam (*silence*) juga dapat dikategorikan sebagai bentuk dari perlawanan. Skala perlawanan juga bervariasi, bisa bersifat individual atau kolektifitas, luas atau terbatas secara lokal. Target dari perlawanan juga bervariasi, bisa berupa individual, kelompok, organisasi, institusi, dan struktur sosial.

Holander dan Einwohner<sup>39</sup> menyatakan bahwa secara umum ada dua elemen inti dalam perlawanan, yakni: (1) Tindakan (*action*); dan (2) Oposisi (*opposition*). Tindakan (*action*) dipahami dalam konteks yang lebih luas, yakni mengacu tingkah laku aktif (*active behavior*), apakah itu bersifat verbal, kognitif, maupun fisik. Sementara oposisi (*opposition*) mengacu pula kepada istilah-istilah lain, seperti: membalas (*counter*), bertentangan (*contradict*), perubahan sosial (*social change*), penolakan (*reject*), tantangan (*challenge*), subversif (*subversive*), dan kerusakan dan/atau gangguan (*damage and/or disrupt*). Rubin (1996: 245) menyatakan bahwa perlawanan adalah tindakan yang melibatkan kesadaran, aksi kolektif, dan penentangan langsung terhadap struktur

---

<sup>38</sup> Ibid. Halaman 29-30.

<sup>39</sup> Ibid. Halaman 31.

kekuasaan. Dengan demikian perlawanan meliputi aktivitas dimana aktivitas tersebut terjadi sebagai kebalikan (oposisi) atas seseorang atau sesuatu yang lainnya.

## 5. Kerangka Teori Gerakan Sosial: Perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald

Untuk memahami proses dan dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo (Lula), maka kerangka teoritik gerakan sosial yang dijadikan sebagai dasar analisis mengacu kepada perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald tentang tiga varian teoritik dalam studi gerakan sosial. McAdam, McCarthy, dan Zald dalam bukunya yang berjudul *"Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structure, and Cultural Framings"*, menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang penting dalam mengkaji dan menganalisis tentang kemunculan dan perkembangan gerakan sosial. Ketiga faktor tersebut meliputi: (1) Struktur peluang-peluang politik dan kendala-kendala yang menghambat gerakan; (2) Bentuk dari organisasi, baik formal maupun informal, yang mendukung suatu perlawanan/pemberontakan; dan (3) Proses-proses kolektif tentang interpretasi, atribusi, dan konstruksi sosial yang menghubungkan antara peluang dan tindakan (aksi). Dalam bahasa yang sederhana ketiga faktor tersebut meliputi: (1) Peluang-peluang politik (*Political opportunities*); (2) Struktur penggerak (*Mobilizing structures*); dan (3) Pembingkai kultural<sup>40</sup>.

Penjelasan ketiga faktor tersebut, yakni: Peluang-peluang politik (*Political opportunities*), Struktur penggerak (*Mobilizing structures*); dan Pembingkai kultural (*Cultural framing*) adalah sebagai berikut.

### a. Peluang-Peluang atau Kesempatan Politik (*Political Opportunities*)

Istilah *Political Opportunity Approach* (Pendekatan peluang/Kesempatan Politik) seringkali disebut juga dengan istilah *Political Opportunity Structure* (Struktur peluang/Kesempatan Politik) atau *the Political Process Theory* (Teori Proses Politik). Teori Proses Politik

---

<sup>40</sup> Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publisihing. Halaman 190.

(*the Political Process Theory*) tentang *Social Movements* (Gerakan Sosial) untuk pertama kali dirumuskan oleh Douglas McAdam pada tahun 1982 dalam sebuah buku yang berjudul *Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*<sup>41</sup>.

Dalam beberapa hal perspektif *Political Process Theory* memiliki kesamaan dengan *Resource Mobilization Theory*. Seperti halnya *Resource Mobilization Theory*, *Political Process Theory* memfokuskan kepada fakto-faktor yang dapat memungkinkan suatu gerakan sosial berhasil, dimana faktor politik dan ekonomi dianggap jauh lebih penting dibandingkan faktor-faktor personal. Teori Proses Politik (*the Political Process Theory*) lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan.

Proses politik (*political process*) mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang-orang atau kelompok berusaha memperoleh akses kepada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri. Studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi<sup>42</sup>.

Fokus dari *Political Process Theory* adalah lebih banyak kepada koneksi politik (*political connections*) daripada kepada sumberdaya material (*material resources*). Sebuah gerakan sosial (*social movement*) dipandang sebagai fenomena politik, bukan fenomena psikologis seseorang. Gerakan sosial dipandang sebagai upaya rasional dari kelompok untuk memperoleh pengaruh yang cukup demi memajukan kepentingan-kepentingan politik mereka. Semua Gerakan Sosial (*Social Movements*) adalah merupakan perjuangan untuk melawan penindasan atau dominasi atas suatu kekuasaan sosial dan politik.

Eisinger<sup>43</sup>, memperkenalkan konsep tentang Struktur Peluang Politik (*the Political Opportunity Structure: POS*), dimana dewasa

---

<sup>41</sup> Ibid. Halaman 191.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid. Halaman 192.



ini konsep tentang Struktur Peluang Politik (*the Political Opportunity Structure*) tersebut banyak digunakan oleh McAdam (1982) dan Tarrow (1994). POS merupakan suatu ekspresi yang bertujuan melakukan analisa tentang keadaan politik yang memiliki pengaruh terhadap kemunculan, struktur, skope dan keberhasilan sebuah gerakan sosial. Para ilmuwan menggunakan konsep tentang POS dan dapat diterapkan secara umum dalam menganalisis gerakan pada konteks karakteristik local. Suatu struktur adalah spesifik, setiap lokasi berbeda dan bervariasi dari waktu ke waktu.

McAdam<sup>44</sup>, berpendapat bahwa ada tiga faktor determinan yang dapat mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial, yakni: (1) *organization strength*; (2) *cognitive liberation*; dan (3) *political opportunities*.

Pertama, *Organization strength*, yakni level (tingkat kondisi) organisasi dalam masyarakat yang merasa dirugikan. Semakin terorganisir suatu kelompok orang-orang, maka akan semakin besar kemungkinan berhasilnya suatu gerakan sosial. Seperti halnya dalam *Resource Mobilization Theory*, McAdam melalui *Political Process Theory*-nya juga mencatat pentingnya kehadiran organisasi untuk membentuk gerakan sosial. Keberadaan suatu organisasi, apapun jenisnya, akan membangun struktur *solidarity incentive*, jaringan komunikasi, dan pemimpin yang diakui. Selanjutnya McAdam berpendapat bahwa keberadaan suatu kelompok sosial akan memungkinkan munculnya motivasi sosial dan antar-personal untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kelompok bersama anggota yang lainnya. Anggota kelompok yang tidak mau bergabung dalam suatu gerakan bersama dengan yang lainnya akan merasa bersalah dan mungkin akan mendapatkan hukuman secara sosial. Sementara jika mereka ikut bergabung maka akan mendapatkan keuntungan secara sosial dan akan merasasemakin memiliki kedekatan dengan anggota yang lainnya.

Menurut Porta dan Diani<sup>45</sup>, dalam analisis tentang gerakan sosial, kajian tentang organisasi gerakan sosial (*social movement*

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

*organization: SMO*) merupakan kajian yang cukup populer. Meskipun para ahli memberikan pengertian yang cukup bervariasi tentang organisasi gerakan sosial (*social movement organization*), namun secara umum dapat dikatakan bahwa organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi identitas yang bersifat kompleks atau formal, dengan tujuan mencapai tujuan mereka yang diimplementasikan dalam suatu gerakan sosial (*social movement*) atau kontra gerakan sosial. Sementara definisi yang lainnya, menyatakan bahwa organisasi gerakan sosial sebagai asosiasi orang-orang yang melakukan tuntutan moral dan ideal tentang bagaimana seharusnya kehidupan personal atau kelompok yang termarginalkan dari masyarakatnya diorganisasikan.

*Kedua, Cognitive liberation*, yakni persepsi tentang peluang keberhasilan dalam masyarakat. Semakin percaya bahwa mereka bisa berhasil, maka semakin besar mereka untuk mencoba terlibat dalam melakukan gerakan sosial. *Cognitive Liberation*, merupakan konsep yang sederhana. Sebelum orang-orang ikut mengambil bagian dalam suatu gerakan, para anggota potensial harus mengembangkan ide (gagasan) bahwa suatu situasi dipandang tidak adil dan kondisi ini dapat diubah melalui suatu tindakan kolektif. Dalam kata lain, mereka harus mengembangkan perasaan suatu deprivasi relative (*relative deprivation*), yakin bahwa deprivasi ini salah, memutuskan bahwa tujuan mereka adalah benar, dan yakin bahwa solusi atas problem mereka adalah bersifat struktural. Sebenarnya McAdam tidak pernah menggunakan kata *relative deprivation*, akan tetapi gagasannya memiliki kesamaan. Sebelum suatu gerakan dapat dimulai, terlebih dahulu harus ada kelompok dimana para anggotanya mempunyai keinginan dan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu dari tindakan bersama.

*Ketiga, Political opportunities*. Ada dua konsep dalam *political opportunities*, yaitu: (a) *Political opportunities*, yakni keselarasan antara kelompok dengan lingkungan politik yang lebih besar. Semakin besar suatu kelompok dapat bersatu dalam arena politik, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat melakukan perubahan dalam suatu system politik. *Political Opportunity* merupakan aspek yang sangat penting dibandingkan dengan dua faktor yang lainnya. Organisasi-organisasi gerakan, harus

memperoleh dan menggunakan kekuasaan politik untuk mencapai hasil yang signifikan. Gerakan Sosial (*social movements*) bukan suatu ruang kosong (*vacuum*); dia merupakan produk dari lingkungan social dan politik sekitarnya. Adanya perubahan dalam suatu system, akan memungkinkan untuk munculnya sebuah gerakan social; dan (b) *The Social System*; Untuk dapat bertahan hidup, maka gerakan social harus mampu beradaptasi dengan perubahan social dan politik dalam masyarakat. McAdam menyebutkan terdapat empat dimensi dari *political opportunity* yang memiliki hubungan langsung dengan system social dimana gerakan eksis (Locher, 2002:267; McAdam, McCarthy, & Zald, 2004:27)<sup>46</sup>, yakni: (1) Relatif terbuka atau tertutupnya suatu kelembagaan system politik (*the relative openness or closure of the institutionalized political system*); (2) Stabil atau tidak stabilnya dari berbagai hubungan antar-kelompok yang berkuasa (*the stability or instability of that broad set of elite alignments that typically undergird a polity*); (3) Ada atau tidak adanya persekutuan antara kekuatan-kekuatan (elit) dalam masyarakat (*the presence or absence of elite allies*); dan (4) Kapasitas dan kecenderungan Negara untuk melakukan tindakan refresif (*the state's capacity and propensity for repression*).

Masing-masing faktor secara langsung menentukan seberapa besar kesempatan politik (*political opportunity*) yang dimiliki oleh suatu gerakan sosial (*social movement*). Semua faktor tersebut di luar kendali dari anggota-anggota gerakan. Agar berhasil, maka suatu gerakan harus ada dalam situasi dan tempat dimana faktor-faktor tersebut mendukung.

Dalam menjelaskan peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan sosial, Sydney Tarrow<sup>47</sup> berpendapat bahwa secara umum terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui peluang-peluang politik yang memicu munculnya gerakan-gerakan sosial, yakni: (1) *Proximate opportunity structure*; dan (2) *State centered opportunity structure*.

---

<sup>46</sup> Ibid. Halaman 194.

<sup>47</sup> Ibid.

*Pertama, Proximate opportunity structure.* Pendekatan ini menekankan pada tanda/signal yang diterima dari kebijakan-kebijakan di lingkungan masyarakat atau dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam sumber daya dan kapasitas masyarakat. Secara khusus pendekatan ini dibagi lagi menjadi dua tipe, yaitu: (1) *Policy specific opportunities*; yang berpandangan bahwa peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan sosial bisa muncul oleh karena suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. Kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi hadirnya suatu gerakan sosial. Peluang politik juga bisa muncul sebagai akibat dari legitimasi pemerintah yang semakin merosot, atau bahkan karena legitimasi Negara tidak diakui oleh masyarakat; singkatnya, karena masyarakat tidak mengakui legitimasi Negara; dan (2) *Group-specific opportunities*; Pendekatan ini melihat struktur peluang-peluang yang terfokus pada perubahan-perubahan yang terjadi atau dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, baik tujuan ataupun keberadaannya di masyarakat. Perubahan-perubahan ini juga dapat memicu munculnya aksi kolektif. Adapun penyebab terjadinya perubahan-perubahan tersebut bisa ditimbulkan oleh berbagai faktor, seperti: politik, ekonomi, ideologi, budaya, perang, dsb.

*Kedua, State centered opportunity structure.* Pendekatan ini memfokuskan pada negara dan segala aspek di dalamnya yang merupakan sumber terjadinya peluang-peluang yang bisa digunakan untuk memunculkan aksi kolektif. Secara khusus terdapat dua tipe dari *State centered opportunity structure*, yaitu: (1) *Cross-sectional statism*; Dalam pendekatan ini negara dianggap sebagai arena persaingan antara berbagai kelas sosial. Status dan terjadinya konflik-konflik politik.; dan (2) *Dynamic statism*; yang memfokuskan kepada bagaimana perubahan negara (*state change*) dan bagaimana perubahan negara ini memproduksi atau mengurangi peluang-peluang politik. Pendekatan ini menyoroti pengaruh perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu negara dan pengaruhnya pada aktor-aktor gerakan sosial. Seluruh system politik menurut Tarrow mengalami perubahan yang pada gilirannya akan mengubah lingkungan aktor-aktor sosial yang cukup kuat untuk mempengaruhi langkah awal, bentuk-bentuk, dan hasil-hasil dari tindakan kolektif.

**b. Struktur Penggerak (*Mobilizing Structures*)**

McCarthy<sup>48</sup> mengartikan konsep struktur penggerak (*mobilizing structure*) sebagai cara-cara yang disepakati untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang meliputi repertoar taktik-taktik tertentu, bentuk organisasi gerakan sosial khusus, dan repertoar modular (rancangan) gerakan sosial. Dalam pengertian lain, struktur penggerak adalah struktur-struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu gerakan sosial.

Menurut McCarthy terdapat empat dimensi *mobilizing structure* baik bersifat formal maupun informal, dimana melalui wahana ini orang bergerak dan melibatkan diri dalam suatu tindakan kolektif. Keempat dimensi *mobilizing structure* sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.3. Dimensi Struktur Penggerak (*Mobilizing Structure*)**

	<b>Non-Gerakan (<i>NonMovement</i>)</b>	<b>Gerakan (<i>Movement</i>)</b>
<b>Tidak Resmi (<i>Informal</i>)</b>	Jaringan Pertemanan ( <i>Friendship Networks</i> ); Lingkungan Tempat Tinggal ( <i>Neighborhoods</i> ); Jaringan Kerja ( <i>Work Networks</i> ).	Jaringan Aktivist ( <i>Activist Networks</i> ); Kelompok-Kelompok Kesamaan ( <i>Affinity Groups</i> ); Komunitas Memori ( <i>Memory Communities</i> ).
<b>Resmi (<i>Formal</i>)</b>	Gereja ( <i>Churches</i> ); Gabungan-Gabungan ( <i>Unions</i> ); Asosiasi Profesional ( <i>Professional Associations</i> ).	Organisasi Gerakan Sosial ( <i>SMOs</i> ); Komite-Komite Protes ( <i>Protest Committees</i> ); Lembaga-Lembaga Gerakan ( <i>Movement Schools</i> ).

Sumber: Sukmana, 2016: 196.

Dengan demikian, mengacu kepada perspektif McCarthy sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1.4. tersebut diatas, maka dimensi-dimensi *mobilizing structure* yang dapat dijadikan wahana bagi mobilisasi sumberdaya gerakan sosial adalah meliputi bentuk dimensi yang tidak resmi (*informal*) seperti: Jaringan Aktivist (*Activist Networks*); Kelompok-Kelompok Kesamaan (*Affinity Groups*);

<sup>48</sup> Ibid. Hal. 141-142.

Komunitas Memori (*Memory Communities*), dan bentuk dimensi yang resmi (*formal*) seperti: Organisasi Gerakan Sosial (*SMOs*); Komite-Komite Protes (*Protest Committees*); Lembaga-Lembaga Gerakan (*Movement Schools*).

*Resource Mobilization Theory (RMT)*, pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall. *RMT* memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. *RMT* lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik. *RMT* berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial. Menurut Oberschall, istilah penggerak (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.

Atas dasar berbagai kajian tentang basis rasionalitas partisipasi dalam tindakan kolektif, kemudian Pichardo<sup>49</sup> melihat bahwa terdapat tiga elemen dasar dalam teori mobilisasi sumberdaya tentang proses terjadinya suatu gerakan sosial, yakni: sumberdaya (*resources*), motivasi (*motivation*), dan lingkungan politik (*political environment*).

Selanjutnya terdapat dua model analisis dalam pendekatan *Resource Mobilization Theory* (Pichardo; Phongpaichit, dalam Triwibowo)<sup>50</sup>, yakni:

*Pertama; The Political-interactive model (The Political process models)*. Model ini dikembangkan oleh Tilly, Gamson, Oberschall dan McAdam. Model ini lebih menekankan pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring (*network*), serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok-kelompok tertindas (*aggrieved groups*) sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan sosial. Model ini menempatkan relasi gerakan sosial dengan negara dan bingkai sistem politik

---

<sup>49</sup> Ibid. Halaman 197.

<sup>50</sup> Ibid.

yang ada sebagai determinan yang penting bagi keberhasilan gerakan sosial. Jika negara kuat dan represif, maka gerakan sosial sulit untuk mencapai tujuannya, demikian juga sebaliknya. Pichardo menjelaskan bahwa model ini menekankan pada kapasitas internal dari komunitas untuk menghasilkan organisasi gerakan sosial.

*Kedua; The Organizational-entrepreneurial model (The Professional organizer models).* Model ini dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Model ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Model ini pada dasarnya mengaplikasikan teori pengembangan organisasi untuk menganalisis gerakan sosial serta memandang bahwa organisasi formal merupakan *carriers of social movements*. Organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Setiap Organisasi Gerakan Sosial (*Social Movement Organization; SMO*) harus mampu mengelola sumber-sumber (*resources*) yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber dimaksud meliputi sumber-sumber material, seperti pekerjaan (*jobs*), penghasilan (*income*), dan tabungan (*savings*), serta sumber-sumber non-material seperti wewenang (*authority*) komitmen moral (*moral commitment*), kepercayaan (*trust*), persahabatan (*friendship*), kemampuan (*skills*) dan sebagainya. Menurut Oberschall, keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan, tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang tergabung ke dalam organisasi, bagaimana mengarahkan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan (*opponents*).

Dalam mengembangkan pendekatan mobilisasi sumberdaya, McCarthy dan Zald<sup>51</sup> menekankan atas perspektif sentral, yakni: Pertama, studi agregasi (pengumpulan) sumber daya (seperti uang dan tenaga kerja) sangat penting untuk memahami aktivitas gerakan sosial. Karena sumber daya diperlukan untuk keterlibatan

---

<sup>51</sup> Ibid. Halaman 198.

dalam konflik sosial, maka sumberdaya harus dikumpulkan untuk tujuan-tujuan kolektif; Kedua, dalam upaya agregasi (pengumpulan) sumber daya maka diperlukan beberapa bentuk minimal organisasi, dan karenanya perspektif mobilisasi sumberdaya secara implisit atau eksplisit lebih terfokus langsung kepada organisasi gerakan sosial dari pada mereka yang bekerja dalam perspektif tradisional; Ketiga, dalam mengkalkulasi (menghitung) tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan ada pengakuan eksplisit akan pentingnya keterlibatan individu dan organisasi dari luar kolektivitas dimana suatu gerakan sosial terjadi; Keempat, model penawaran dan permintaan (*supply and demand*) kadang-kadang diterapkan dalam mengkaji arus sumber daya yang bergerak kearah dan menjauh dari gerakan sosial tertentu; dan Kelima, ada kepekaan terhadap pentingnya biaya dan manfaat dalam menjelaskan individu dan keterlibatan organisasi dalam aktivitas gerakan sosial.

McCarthy dan Zald<sup>52</sup> menjelaskan bahwa model mobilisasi sumberdaya (*the resource mobilization model*), sebagaimana yang digambarkannya, menekankan kepada interaksi antara: ketersediaan sumberdaya (*resource availability*), struktur preferensi dari organisasi yang sudah ada sebelumnya (*the preexisting organization of preference structures*), dan pengelolaan yang ditujukan untuk mempertemukan preferensi tuntutan (*entrepreneurial attempts to meet preference demand*).

Menurut Dieter Opp<sup>53</sup>, perspektif mobilisasi sumberdaya yang digambarkan oleh McCarthy dan Zald berasumsi bahwa aktor-aktor politik dan Organisasi Gerakan Sosial memiliki tujuan-tujuan tertentu. Salah satu strategi yang diambil oleh aktor-aktor politik dan Organisasi Gerakan Sosial dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan mobilisasi sumberdaya. Hal ini berimplikasi bahwa tindakan Organisasi Gerakan Sosial adalah dalam tataran mendapatkan sesuatu yang bernilai bagi mereka, yakni mereka bertindak menurut preferensi mereka. Organisasi Gerakan Sosial memiliki keyakinan bahwa mobilisasi sumberdaya

---

<sup>52</sup> Ibid. Halaman 199.

<sup>53</sup> Ibid. Halaman 199.



adalah sebagai instrumen untuk mencapai tujuannya. Namun tidak selamanya Organisasi Gerakan Sosial berhasil dalam melakukan mobilisasi sumberdaya.

McCarthy dan Zald<sup>54</sup> mengakui bahwa ketidakpuasan atau keluhan (*grievances*) dan deprivasi relatif (*relative deprivation*) adalah merupakan variabel kunci dalam menjelaskan tentang perilaku protes dan Gerakan Sosial. Namun demikian berbeda dengan pendekatan perpektif teori deprivasi relatif, McCarthy dan Zald melalui pespektif mobilisasi sumberdaya memandang bahwa ketidakpuasan (*grievances*) bukan bersifat pemberian (*given*). Keluhan (*discontent*) dan ketidakpuasan (*grievances*) dapat didefinisikan, dibuat dan dimanipulasi oleh para pengelolaisudan organisasi (*issue entrepreneurs and Organizations*). Argumen ini tidak menyatakan bahwa menolak tentang pentingnya keluhan sebagai variabel penjelas untuk memahami gerakan sosial. Namun lebih sebagai faktor penjelas tentang bagaimana proposisi munculnya ketidakpuasan. Oleh karena itu, McCarthy dan Zald, lebih menekankan pada analisis kondisi struktural yang memfasilitasi ekspresi ketidakpuasan (*grievances*). Selanjutnya McCarthy dan Zald berpendapat bahwa aktivitas pengelola (pengusaha) politik akan menghasilkan keluhan, dan keluhan ini memungkinkan pada gilirannya memiliki efek positif terhadap munculnya protes.

McCarthy dan Zald<sup>55</sup> dan beberapa penulis yang lainnya membuat daftar tentang berbagai bentuk dari sumberdaya seperti uang (*money*), fasilitas dan tenaga kerja (*facilities and labor*), dan legitimasi (*legitimacy*). Dalam tulisan lainnya, McCarthy dan Zald menyatakan bahwa perspektif mobilisasi sumberdaya (*resources mobilization*) menempatkan beberapa sumberdaya dalam masyarakat, seperti semua level pemerintahan (*all levels government*), yayasan-yayasan (*foundations*), institusi keagamaan (*religious institutions*), dan konstituen ikhlas/baik hati (*conscience constituences*), kelompok-kelompok yang mendukung tujuan gerakan (*groups that support the movement's goals*). Pernyataan

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid. Halaman 200.

ini mempertegas bahwa sumberdaya bukan hanya berupa barang-barang yang berwujud (*tangible*) seperti uang dan fasilitas (*money and facilities*) akan tetapi juga meliputi institusi dan kelompok (*institutions and groups*). Selain itu, sumberdaya juga bisa meliputi akses kepada media (*access to media*), dukungan simpatisan (*support by sympathizers*), loyalitas kelompok atau anggota (*loyalty of groups or members*), kesediaan ruang pertemuan atau ruang kantor (*availability of rooms for meeting or office work*), hak-hak, pengetahuan dan kemampuan dari aktor.

Mengacu kepada pandangan tersebut, kemudian Dieter Opp<sup>56</sup> mendefinisikan sumberdaya (*resources*) sebagai barang-barang, yakni segala sesuatu yang bisa digunakan dimana individu atau aktor kolektif dapat mengontrolnya (*Resources are goods, i.e. everything that has utility which individual or collective actors can control*). Dalam warna yang sama, Gamson, Fireman, dan Rytina (1982:23; dalam Dieter Opp)<sup>57</sup> menyatakan bahwa sumberdaya (*resources*) dimaksudkan sebagai semua objek yang dapat digunakan oleh kelompok untuk meningkatkan tujuan kolektif, dan kontrol atas objek-objek tersebut dapat ditransfer dari seseorang kepada orang yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya uang (*money*), senjata (*weapons*), alat-alat percetakan (*printing presses*), dan sebagainya. Dengan demikian, maka sumberdaya (*resources*) itu adalah milik kelompok (*properties of groups*), akan tetapi semua objek tersebut harus dapat ditransfer dari seseorang kepada orang yang lainnya. Maka, intelegensia (*intelligence*) atau kemampuan (*skills*) tidak bisa disebut sebagai sumberdaya (*resources*).

Konsep mobilisasi (*mobilization*). Berangkat dari konsep Jenkin<sup>58</sup> yang menjelaskan tentang konsep mobilisasi (*mobilization*), yakni bahwa mobilisasi (*mobilization*) adalah suatu proses dimana kelompok mengamankan kontrol kolektif atas sumberdaya yang diperlukan untuk suatu tindakan kolektif. Selanjutnya McCarthy dan Zald memperluas konsep mobilisasi (*mobilization*), yang

---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid. Halaman 21.

menyatakan bahwa mobilisasi adalah mengacu kepada berbagai aktivitas dari suatu organisasi gerakan sosial atau aktor individual untuk mendapatkan kontrol atas barang-barang yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan tujuan dari organisasi gerakan atau aktor individual.

### c. Pembingkai Kultural (*Cultural Framing*)

Konsep tentang *framing* yang digunakan dalam studi gerakan sosial (social movements) berasal pemikirannya Goffman<sup>59</sup>. Goffman mengartikan proses pembingkai (*framing processes*) merupakan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mereproduksi makna. Menurut Eriyanto<sup>60</sup>, analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realita. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media<sup>61</sup>.

Gagasan *framing* pertama kali dilontarkan oleh Baterson tahun 1955<sup>62</sup>. Mulanya *frame* dimaknai sebagaistruktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandanganpolitik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebihjauh oleh Goffman pada tahun 1974 yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepinganperilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas<sup>63</sup>.

Menurut Benford dan Snow<sup>64</sup> konsep proses *framing* dewasa ini berkembang di dalam disiplin ilmu sosial seperti psikologi, khususnya psikologi kognitif, linguistik dan analisis diskursus, komunikasi dan studi media, ilmu politik dan studi kebijakan, dan sosiologi.

---

<sup>59</sup> Ibid. Halama 201.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Soenyono. 2008. Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan: Political Opportunity, Mobilizing Structure, dan Cultural Framing. Surabaya: Insan Cendekia. Hal. 41-42.

<sup>62</sup> Sobur, Alex. 2002. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis dan Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 161.

<sup>63</sup> Ibid. Hal. 162.

<sup>64</sup> Benford, Robert D.; & Snow, David A. 2000. Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. Annual Review of Sociology. Vol. 26 (2000), pp. 611-639.

Di dalam sosiologi, konsep framing khususnya digunakan dalam studi gerakan sosial dan tindakan kolektif (*social movements and collective action*). Selanjutnya Benford dan Snow<sup>65</sup> menyatakan bahwa aktor gerakan sosial dipandang sebagai agen signifikan yang secara aktif terlibat dalam produksi dan pemeliharaan makna untuk konstituen gerakan (*constituents*), pihak lawan (*antagonists*), dan pengamat (*bystanders*). Para aktor gerakan sosial secara mendalam terlibat dengan media, pemerintahan lokal (*local government*), dan negara (*state*), dengan apa yang disebut "politik signifikasi (*the politics of signification*).

Menurut McAdam, McCarthy, dan Zald<sup>66</sup>, faktor peluang/kesempatan politik (*political opportunity*) dan faktor struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) merupakan fondasi yang potensial untuk terjadinya suatu tindakan, apabila salah satu faktor tersebut tidak ada maka kecil kemungkinan suatu tindakan kolektif akan terjadi. Penghubung antara faktor peluang/kesempatan (*opportunity*), organisasi, dan tindakan (*action*) adalah makna dan definisi yang mengarahkan orang-orang kepada situasi mereka, yakni situasi ketidakpuasan dan kekecewaan. Paling tidak orang-orang perlu merasakan kondisi ketidakpuasan tentang beberapa aspek kehidupan mereka dan meyakini bahwa melalui tindakan kolektif mereka dapat mengatasi masalah. Kekurangan salah satu atau keduanya dari persepsi ini, yakni ketidakpuasan dan keyakinan, nampaknya tidak akan memungkinkan bahwa orang-orang mau dimobilisasi meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Kondisi kehadiran atau ketidakhadiran persepsi ini bersifat kompleks yang oleh David Snow, dkk., disebutnya sebagai proses pembingkai (*framing processes*). Selanjutnya Snow<sup>67</sup>, mendefinisikan *framing* sebagai upaya strategis yang disadari oleh kelompok orang-orang sebagai cara bersama untuk memahami tentang dunia dan diri mereka sendiri yang melegitimasi dan memotivasi suatu tindakan kolektif.

---

<sup>65</sup> Ibid. Hal. 613

<sup>66</sup> McAdam, McCarthy, & Zald. Op.cit. Halaman 5.

<sup>67</sup> McAdam, McCarthy, & Zald. Op.cit. Halaman 6.

Mengacu kepada pandangan Benford dan Snow<sup>68</sup> yang menyatakan bahwa *framing* membantu untuk membuat suatu peristiwa atau kejadian memiliki makna (arti) dan dengan demikian berfungsi untuk mengatur pengalaman dan membimbing tindakan. *Framing* tindakan kolektif juga melakukan fungsi penafsiran dan pemahaman yang dimaksudkan untuk memobilisasi pengikut potensial dan konstituen, untuk menggalang dukungan penonton, dan memobilisasi antagonis (Snow & Benford 1988: 198). Dengan demikian, *framing* tindakan kolektif merupakan seperangkat aksi yang berorientasi memberikan keyakinan dan makna yang menginspirasi dan melegitimasi kegiatan dan kampanye dari Organisasi Gerakan Sosial (*Social Movements Organization*).

Proses pembingkaihan kultural (*cultural framing*) gerakan sosial berkaitan dengan konstruksi identitas partisipan gerakan. Menurut Singh<sup>69</sup>, teori berorientasi Identitas (*the Identity-Oriented theory*) secara umum mempunyai sifat-sifat non-materialistik dan ekspresif (*nonmaterialistic and expressive in nature*). Teori Identitas (*the Identity-Oriented Theory*) membahas pertanyaan integrasi dan solidaritas dari kelompok yang terlibat dalam aksi kolektif.

Berbagai kajian yang membahas tentang perkembangan dan identifikasi konsep identitas kolektif (*collective identity*) telah banyak dilakukan, baik menurut perspektif Amerika maupun di Eropa Kontinental. Kajian awal dilakukan oleh para teoritis aliran Chicago (*Chicago School*) yang menggunakan pandangan klasik dan psikologi social atas perkembangan perspektif dari identitas kolektif. Misalnya, Blumer<sup>70</sup> berpendapat bahwa gerakan harus mengembangkan semangat korps (*esprit de cops*) di antara anggota melalui konstruksi *in-group-out-group relationships*, memberikan kesempatan untuk interaksi formal, serta ritual dan seremoni formal organisasi (*organizing formal ceremonies and rituals*).

---

<sup>68</sup> Benford, Robert D.; & Snow, David A. 2000. *Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 26 (2000), p.611-639.

<sup>69</sup> Singh, Rajendra. 2001. *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. New Delhi: SAGE publications India, Ltd. Hlm 113.

<sup>70</sup> Snow, David A.; Soule, Sarah A.; & Kriesi, Hauspeter (eds.). 2004. *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. Hlm. 436.

Johnston dan Klandermans<sup>71</sup> mendefinisikan identitas kolektif (*collective identity*) sebagai saling interaksi dan berbagai yang diproduksi oleh beberapa individu (atau kelompok pada level yang lebih kompleks) dan memusatkan orientasinya pada tindakan serta peluang dan kendala dimana aksi terjadi. Terdapat tiga unsure dalam identitas kolektif, yakni: (1) Identitas kolektif sebagai proses yang melibatkan denifisi kognitif tentang tujuan, sarana, dan bidang tindakan; (2) Identitas kolektif adalah sebagai proses yang mengacu kepada jaringan relasi aktif antara actor yang berinteraksi (*interact*), berkomunikasi (*communicate*), saling mempengaruhi (*influence each other*), negosiasi (*negotiate*), dan membuat keputusan (*make decisions*). Bentuk organisasi dan model kepemimpinan, saluran komunikasi, dan teknologi komunikasi adalah merupakan bagian dari jaringan relasi; dan (3) Tingkat tertentu dari investasi emosional, yang memungkinkan individu merasakan seperti sebagai bagian dari suatu kesatuan.

Menurut Della Porta dan Diani<sup>72</sup> konstruksi identitas (*identitay construction*) tidak dipandang secara sederhana sebagai prakondisi (*precondition*) untuk suatu tindakan kolektif (*collective action*). Identitas social aktor dalam suatu priode waktu tertentu akan menuntun perilaku mereka berikutnya. Mengutip pendapat Tourine, Della Porta dan Diani menyatakan bahwa suatu tindakan terjadi ketika actor mengembangkan kemampuan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, actor social yang lainnya, dan topangan dari hubungan timbal-balik (*mutual relationship*) diantara mereka.

### C. Kerangka Berpikir (Kerangka Konseptual)

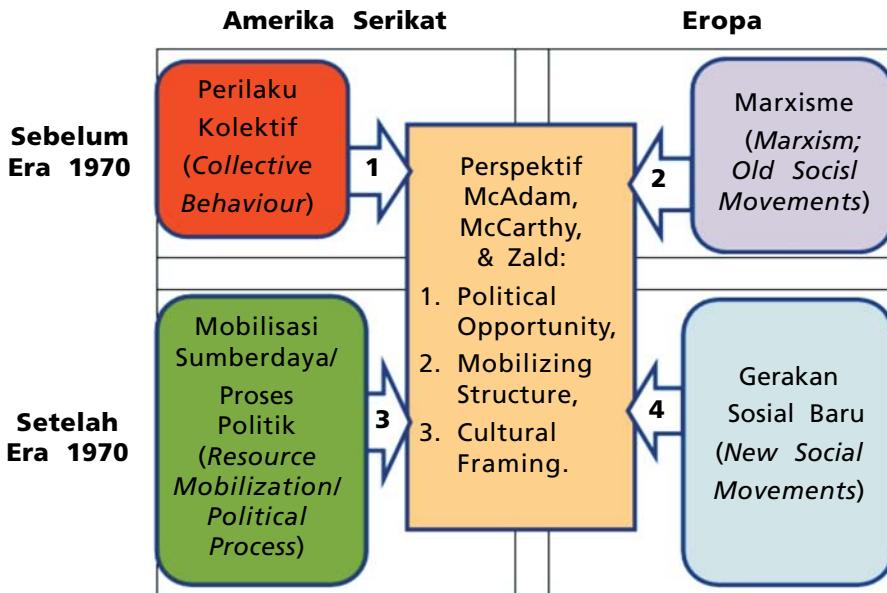
Perspektif teoritik yang dijelaskan oleh McAdam, McCarthy, dan Zald tentang tiga aspek penting dalam mengkaji kemunculan dan perkembangan gerakan sosial, yakni: peluang politik (*political opportunity*), struktur mobilisasi (*mobilizing structure*), dan

---

<sup>71</sup> Johnston, Hank., & Klandermans, Bert (eds.). 1995. *Social Movements and Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press. Hlm. 45.

<sup>72</sup> Della Porta, Donatella; & Diani, Mario. 2006. *Social Movements an Introduction*. Malden: Blackwell Publishing. Hlm. 93.

pembingkaian kultural (*cultural framing*), dalam konteks pemetaan teoritik studi gerakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Crossley, maka posisinya dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Konstruksi Posisi Pemikiran McAdam, McCarthy, & Zald dalam Empat Tradisi Analisis Gerakan Sosial Crossley**

Sumber: Sukmana, 2016: 205

Gambar 1.1. menggambarkan tentang konstruksi posisi perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald dalam konteks Empat tradisi analisis studi gerakan sosial menurut pandangan Crossley. Perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald tentang peluang politik (*political opportunity*), struktur penggerak (*mobilizing structure*), dan pembingkaian kultural (*cultural framing*) dipengaruhi oleh ke-Empat peta studi gerakan sosial sebagaimana digambarkan Crossley. Pengaruh ke-Empat peta studi gerakan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*; Dimensi perilaku kolektif (*collective behaviour*), memberikan sumbangan terhadap perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald berkaitan dengan konsep keluhan-keluhan (*grievances*), ketidakpuasan, dan kekecewaan sebagai faktor pendorong munculnya tindakan (aksi) kolektif;

*Kedua; Dimensi Marxisme (Marxism; Old Social Movements)*, memberikan sumbangan terhadap perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald berkaitan dengan konsep bahwa kemunculan gerakan sosial seiring dengan adanya suatu konflik dan pergulatan-pergulatan di seputar persoalan ketimpangan, dominasi, kebebasan dan keadilan sosial. Situasi-situasi ketimpangan dan dominasi sosial, jika dijalankan dan dipertahankan oleh institusi-institusi dan lembaga-lembaga sosial, maka pada gilirannya akan menghasilkan sebuah situasi balik dimana terjadi perlawanan, penolakan, dan pemberontakan menentang sistem-sistem dominasi tersebut. Struktur-struktur sosial dikonseptualisasikan sebagai sebuah arena pertemuan yang intens dan tidak terhitung jumlahnya dari berbagai kelompok pendominasi dan kolektivitas sosial yang terdominasi. Struktur masyarakat merupakan sebuah medan pergulatan yang terus-menerus di antara kelompok, strata, dan lapisan sosial yang bersaing;

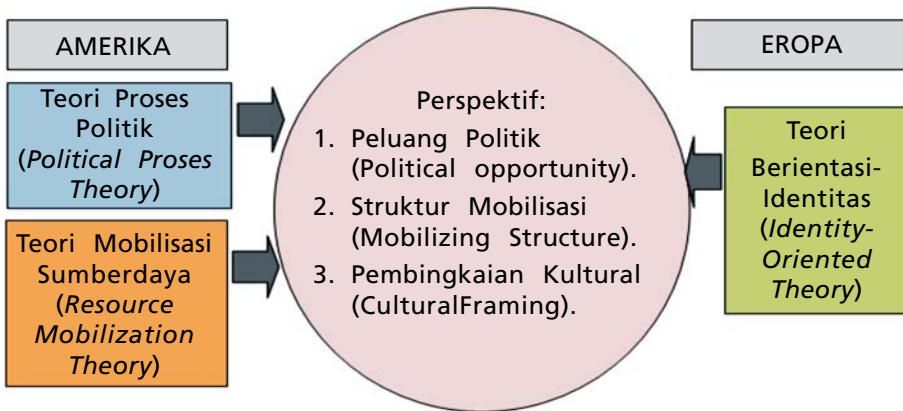
*Ketiga; Dimensi Mobilisasi Sumberdaya/Proses Politik (Resource Mobilization/Political Process)*, memberikan sumbangan terhadap perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald berkaitan dengan konsep rasionalitas politik (peluang politik) dan rasionalitas ekonomi tentang kalkulasi keuntungan dan kerugian (*costs and benefits*) dalam suatu gerakan sosial; dan

*Keempat; Dimensi Gerakan Sosial Baru (New Social Movements)*, memberikan sumbangan terhadap perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald berkaitan dengan konsep identitas sebagai basis pembingkai kultural (*cultural framing*) dalam membangun spirit dan simpati gerakan sosial.

Selanjutnya, perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald adalah merupakan kombinasi (gabungan) dari pemikiran dasar atas tiga teori utama dalam studi gerakan sosial, yakni: Teori Proses Politik atau Teori Struktur Peluang Politik (*Political Process Theory* or *Political Opportunity Structure: POS*), Teori Mobilisasi Sumber daya (*Resource Mobilization Theory: RMT*), dan Teori Identitas (*Identity-Oriented Theory: IOT*). Teori Proses Politik (*Political Process Theory: PPT*) dan Teori Mobilisasi Sumberdaya (*Resource Mobilization Theory: RMT*) berkembang di Amerika dengan basis rasionalitas, sementara Teori Berorientasi-Identitas (*Identity-Oriented Theory: IOT*) berkembang di Eropa dengan basis identitas (emotif).

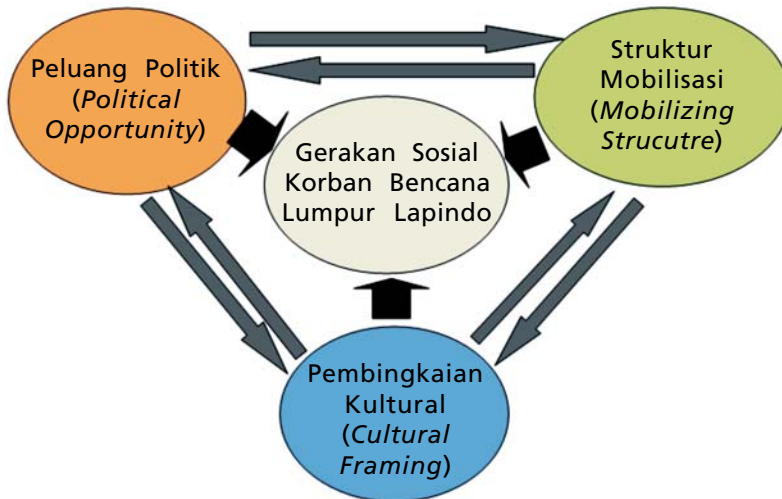


Posisi perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald dalam kombinasi ketiga teori tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.2. Kombinasi antara Tiga Teori Gerakan Sosial dalam Perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald**

Sumber: Konstruksi peneliti, diadopsi dari Crossley (2002:10); dan McAdam, McCarthy, & Zald (2004)<sup>73</sup>



**Gambar 1.3. Model Kerangka Berpikir**

Sumber: Diadopsi dari McAdam, McCarthy & Zald, 2004<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing. Hal. 207.

<sup>74</sup> Ibid. Halaman 208.

Berdasarkan konstruksi pada Gambar 1.2., maka perspektif teori gerakan sosial yang berkembang di Amerika dan Eropa meskipun memiliki perbedaan, namun perspektif teori-teori tersebut bisa diintegrasikan secara komprehensif dalam mengkaji kemunculan dan perkembangan gerakan sosial.

Selanjutnya, dari penjelasan kerangka teoritik gerakan sosial yang mengacu kepada perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald, maka selanjutnya dirumuskan model kerangka berpikir (kerangka konseptual) dalam konteks gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) pada Gambar 1.3. Dari model kerangka berpikir sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.3. tersebut diatas, maka dapat dijelaskan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- *Pertama*, Faktor peluang politik (*political opportunity*), struktur penggerak (*mobilizing structure*), dan pembingkaihan kultural (*cultural framing*), merupakan faktor-faktor yang berkontribusi atas kemunculan dan perkembangan gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) di Sidoarjo;
- *Kedua*, Faktor peluang politik (*political opportunity*) akan berkontribusi bagi muncul dan berkembangnya gerakan sosial apabila ditopang oleh faktor struktur penggerak (*mobilizing structure*) dan pembingkaihan kultural (*cultural framing*);
- *Ketiga*, Faktor struktur penggerak (*mobilizing structure*) akan berkontribusi bagi muncul dan berkembangnya gerakan sosial apabila ditopang oleh faktor peluang politik (*political opportunity*) dan pembingkaihan kultural (*cultural framing*);

Selanjutnya, dalam konteks studi ini secara operasional didasarkan atas pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

- *Pertama*, bahwa muncul dan berkembangnya aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) di Sidoarjo karena difasilitasi oleh adanya peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan politik yang mendasarinya. Peluang dan kesempatan yang memfasilitasi muncul dan berkembangnya aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) di Sidoarjo tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah tentang eksplorasi Migas di wilayah Kecamatan Porong, Sidoarjo, yang mengakibatkan munculnya bencana Lumpur Lapindo (Lula);

- *Kedua*, bahwa muncul dan berkembangnya aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) di Sidoarjo karena didukung oleh kekuatan sumberdaya gerakan sosial yang dihimpun melalui proses mobilisasi, baik mobilisasi kekuatan kolektif maupun mobilisasi sumberdaya gerakan sosial lainnya;
- *Ketiga*, bahwa muncul dan berkembangnya aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) di Sidoarjo karena adanya proses pembingkaihan (*framing*) yang memungkinkan gerakan sosial mendapat dukungan baik internal (dukungan partisipan) maupun eksternal (dukungan simpati).

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penulisan buku ini disusun ke dalam 7 (Tujuh) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab Pertama; merupakan Bab Pengantar dimana pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang terjadinya fenomena bencana Lumpur Lapindo yang mendorong munculnya aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Selain itu Bab ini juga menjelaskan tentang perspektif teoritik dan sistematika penulisan buku;
- Bab Kedua; menguraikan tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Sidoarjo dan dampak bencana Lumpur Lapindo, yang meliputi penjelasan mengenai deskripsi umum wilayah Kabupaten Sidoarjo, Gambaran dan penjelasan terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di wilayah Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon, dan Deskripsi serta penjelasan terjadinya perubahan kehidupan masyarakat pada wilayah yang terkena dampak bencana Lumpur Lapindo di wilayah kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon;
- Bab Ketiga; menjelaskan gambaran tentang bagaimana dominasi negara dan korporasi dalam arena bencana Lumpur Lapindo. Terjadinya peristiwa bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan dampak dari dominasi negara (pemerintah) yang mengeluarkan kebijakan pemberian izin kepada pihak korporasi (PT LBI) untuk melakukan aktivitas eksplorasi Migas di wilayah blok Brantas, khususnya di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Aktivitas eksplorasi Migas yang dilakukan

oleh PT LBI tersebut, diindikasikan mengandung unsur pelanggaran, seperti pelanggaran atas RTRW Kabupaten Sidoarjo, dan pelanggaran HAM. Negara lebih memihak kepada kepentingan korporasi (PT LBI) daripada kepentingan rakyat;

- Bab Keempat; menjelaskan tentang bagaimana kebijakan dominatif negara dan korporasi yang melahirkan idegerakan sosialkorban bencana Lumpur Lapindo. Peta dinamika dan perkembangan gerakan sosial korban Bencana Lumpur Lapindo dapat di analisis pada periode pertama gerakan, dimana pada periode ini merupakan awal terjadinya bencana Lumpur Lapindo hingga munculnya kebijakan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007. Pada periode pertama ini dapat dikatakan sebagai fase munculnya ide aksi pra-Gerakan Sosial karena kelompok (organisasi) Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo belum terbentuk.
- Bab Kelima; berisi penjelasan tentang bagaimanaproses pemantapan dan konsolidasi menujuaksigerakan sosialkorban bencana Lumpur Lapindo. Ketidakpuasan dan kekecewaan korban bencana Lumpur Lapindo terhadap pihak pemerintah dan PT LBI, serta ketidakpercayaan korban bencana Lumpur Lapindo terhadap pihak LSM, memunculkan kesadaran bahwa mereka harus mengorganisir diri untuk membangun kekuatan kolektif dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban bencana dalam mendapatkan ganti-rugi atas aset tanah dan bangunan milik mereka yang hancur tergenang oleh lumpur. Oleh karena itu pada Bab ini diuraikan hal-hal yang terkait dengan: Situasi dan Kondisi yang Mendasari Munculnya Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo, Terbentuknya Kelompok (Organisasi) Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo, Aksi Tuntutan Kolektif Korban Bencana Lumpur Lapindo, dan Pembentukan Identitas Kolektif Sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo";
- Bab Keenam; berisi penjelasan tentang gambaran proses penurunan (*Declining*) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami penurunan (*declining*) sebagai dampak dari terbitnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA). Keluarnya putusan kasasi

Mahkamah Agung (MA) yang memperkuat bahwa fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo sebagai bencana alam, mengubah kondisi, konstalasi, dan strategi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Perubahan juga muncul dalam konteks peluang politik (*political opportunity*), struktur mobilisasi (*mobilizing structure*), dan pembingkaiian kultural (*cultural framing*) gerakan; dan

- Bab Ketujuh; berisi uraian penjelasan tentang Peta dan Dinamika Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo, Kesimpulan Penelitian, Implikasi Teoritis, dan Agenda Studi Selanjutnya.

## Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sidoarjo & Dampak Bencana Lumpur Lapindo

Bencana semburan Lumpur Lapindo (Lula) yang terjadi di Sidoarjo telah menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di wilayah yang terkena dampak bencana Lumpur Lapindo (Lula), yang meliputi wilayah di tiga kecamatan, yakni: Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon.

### **A. Deskripsi Umum Wilayah Kabupaten Sidoarjo**

#### **1. Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Historis**

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Timur. Ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo terletak di kota Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo dihimpit oleh dua sungai besar yang merupakan pecahan dari kali Brantas, yakni Kali Porong dan Kali Mas, sehingga Kabupaten Sidoarjo terkenal dengan kota Delta. Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah Utara, Selat Madura di sebelah Timur, Kabupaten Pasuruan di sebelah Selatan, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah Barat<sup>75</sup>. Kabupaten

---

<sup>75</sup> Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2009. BPS Kabupaten Sidoarjo, halaman 3.

Sidoarjo merupakan penyangga utama Kota Surabaya yang termasuk ke dalam kawasan Gerbangkertosusila<sup>76</sup>.

Berdasarkan aspek historisnya, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya identitas dan eksistensi kehidupan masyarakat Sidoarjo sudah terbentuk sejak sekitar 153 tahun yang lalu. Seiring dengan perjalanan waktu, maka identitas masyarakat Sidoarjo terbentuk melalui dinamika, pengumpulan, dan dialektika historis, sejak jaman kerajaan Nusantara, kolonialisme Hindia-Belanda, penjajahan Jepang, masa pra-kemerdekaan, hingga masa orde reformasi dewasa ini. Sejarah Kabupaten Sidoarjo pada era pra-kemerdekaan dan awal kemerdekaan tidak terlepas dari proses perjuangan dan konflik bersenjata.

Secara historis, Sidoarjo dahulu dikenal sebagai pusat dari Kerajaan Janggala<sup>77</sup>. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, daerah Sidoarjo bernama Sidokare, yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung Pucang Anom, yang dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus Ranuwiryo yang berdiam di kampung Pangabahan. Pada tahun 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 *Staatsblad* No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Kabupaten Sidokare dipimpin oleh R. Notopuro (kemudian bergelar R.T.P. Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan, yang merupakan putra dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Kabupaten Sidokare, diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo<sup>78</sup>.

---

<sup>76</sup> Gerbang kertosusila adalah akronim dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila sendiri, menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar-daerah. Kawasan Gerbangkertosusila merupakan kawasan terbesar kedua di Indonesia yang berpusat di Surabaya, kawasan ini serupa dengan istilah Jabodetabek dengan pusat di Jakarta.

<sup>77</sup> Kerajaan Janggala adalah salah satu dari dua pecahan kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan ini berdiri tahun 1042, dan berakhir sekitar tahun 1130-an. Lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

<sup>78</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sidoarjo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo), diakses Jumat, 13 Juli 2012.

## 2. Keadaan Umum Kabupaten Sidoarjo

### a. Kondisi Geografis

Kabupaten Sidoarjo, dilihat dari luas wilayahnya, merupakan kabupaten terkecil dan terpadat penduduknya di Jawa Timur dengan luas wilayah 63.438,534 ha atau 63,439 km<sup>2</sup>, diapit kali Surabaya (sepanjang 32,5km) dan kali Porong (sepanjang 47 km). Luas potensi wilayah Kabupaten Sidoarjo meliputi: luas lahan pertanian 28.763 Ha, luas lahan perkebunan tebu 8.164 Ha, luas lahan pertambakan 15.729 Ha, dan luas lahan pertambakan 15.729 Ha. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,5 BT-112,9 BT, dan 7,3 LS-7,5 LS, dengan batas-batas wilayah: sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura. Peta wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Sidoarjo**

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2009

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan, sehingga jumlah desa dan kelurahan seluruhnya 353 desa/kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*). Berdasarkan data yang ada,



Kecamatan Jabon mempunyai wilayah yang paling luas, yaitu 80.9976 km<sup>2</sup>, sekaligus mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling rendah yaitu 717 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi dan Kecamatan Taman yang sama-sama memiliki 24 desa/kelurahan.

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo termasuk beriklim tropis dan mengenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara bulan Mei sampai September, sementara di bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim penghujan. Suhu udara berkisar 20-35 derajat Celsius. Sementara, pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 11 (sebelas) jenis penggunaan lahan, yaitu: perkampungan (pemukiman), industri, pertambangan, sawah, pertanian, tanah kering, hutan (tanah bakau), perairan (darat dan tambak), tanah terbuka, jalan, dan sungai/saluran irigasi.

Kabupaten Sidoarjo memiliki Slogan atau Motto: "*SIDOARJO PERMAI/BERSIH HATINYA*", yang merupakan singkatan dari: "Sidoarjo Pertanian Maju, Andalan, Industri, Bersih, Rapi, Serasi, Hijau, Sehat, Indah dan Nyaman". Mengandung makna bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertanian yang subur sebagai lumbung pangan, mempertahankan pertanian maju agar bisa swasembada pangan dengan cara intensifikasi pertanian dan menggunakan mekanisme teknologi tepat guna, disamping itu mendorong perkembangan industri yang semakin meningkat, sehingga keduanya berkembang secara serasi. Selain itu masyarakat Kabupaten Sidoarjo berbudaya hidup dalam lingkungan yang bersih, rapi, serasi, hijau, sehat, indah dan nyaman.

Lambang Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 5 bagian<sup>79</sup>, yakni: (1) Sebuah segilima beraturan yang sisi-sisinya berbentuk kurung kurawal; (2) Sebuah bintang bersudut lima; (3) Setangkai padi, delapan belas butir dan sebatang tebu lima ruas dengan bentuk membulat; (4) Ikan bandeng dan ikan udang membentuk

---

<sup>79</sup> Lihat: Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2009. Badan Pusat Statistik dan Bappekab Sidoarjo, Mei 2010.

huruf "S"; dan (5) Pita yang berisi tulisan: KABUPATEN SIDOARJO. Makna masing-masing lambang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebuah segilima beraturan yang sisi-sisinya berbentuk kurung kurawal, melambangkan: Falsafah Pancasila yang juga mengandung arti bahwa rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mentrapkan ajaran Pancasila dengan tertib dan pasti.
- 2) Sebuah bintang bersudut lima, melambangkan: Ke-Tuhanan-an Yang Maha Esa yang menggambarkan kehidupan ber-KeTuhanan/beragama dari rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 3) Setangkai padi, depalan belas butir dan sebatang tebu lima ruas dengan bentuk bulat, melambangkan: Hasil bumi yang paling penting dalam daerah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan bentuk yang membulat dari padi dan tebu tersebut menggambarkan kebulatan tekad untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. 18 (delapan belas) butir padi menunjukkan banyaknya Kecamatan dalam daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 4) Ikan bandeng dan ikan udang membentuk huruf "S", melambangkan: Hasil tambak dalam daerah Kabupaten Sidoarjo. Bentuk huruf "S" dari ikan bandeng dan ikan udang tersebut menunjukkan huruf pertama dari Sidoarjo. Artinya Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertanian yang subur sebagai lumbung pangan, mempertahankan pertanian yang maju agar bisa swasembada pangan dengan cara identifikasi pertanian dan menggunakan mekanisasi teknologi tepat guna, di samping itu mendorong perkembangan industri yang semakin meningkat, maka kedua hal ini harus berkembang secara serasi. Selain itu masyarakat Kabupaten Sidoarjo berbudaya hidup dengan lingkungan yang bersih, rapi, serasi, hijau, sehat, indah dan nyaman.

## **b. Gambaran Demografis**

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.945.250 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 977.683 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 967.569 jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut hasil sensus penduduk tahun 2000, maka pada tahun 2010 terdapat kenaikan

jumlah penduduk sebanyak 382.235 jiwa (24,45%). Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Waru yaitu 210.426 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan kecamatan lain, yaitu 6.940 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 47.683 jiwa dan sekaligus menjadi kecamatan dengan kepadatan terendah yakni 588 jiwa/km<sup>2</sup>. Pertambahan penduduk Kabupaten Sidoarjo dari periode tahun 1980 sampai dengan 1990 sebesar 313.287 jiwa (36,67%), periode 1990 sampai dengan 2000 sebesar 395.548 jiwa (33,88%), dan periode 2000 sampai dengan 2010 bertambah sebanyak 382.237 jiwa (24,46%).

Komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jenis kelamin sebenarnya hampir berimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan, yakni dengan selisih 10.114 jiwa. Meskipun secara keseluruhan di Kabupaten Sidoarjo, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan, namun ada satu kecamatan yang menunjukkan sebaliknya, yakni Kecamatan Sidoarjo dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan selisih perbedaan sebanyak 2.281 jiwa.

Berdasarkan struktur umur penduduk, maka dapat diketahui apakah penduduk suatu daerah termasuk dalam kategori strukturmuda atau tua. Struktur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk usia 0-14 tahun sekitar 40 persen, dan dikatakan tua apabila proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai 10 persen atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata struktur umur penduduk Kabupaten Sidoarjo adalah struktur umur peralihan karena tidak dapat digolongkan kedalam kedua kelompok tersebut. Namun mengarah ke struktur penduduk muda karena penduduk umur 65 tahun keatas jumlahnya kurang dari 5 persen, dan juga penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi seluruh penduduk yaitu sekitar 70 persen dari total penduduk.

Dilihat dari jenis mata pencaharian, komposisi Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang terbesar adalah bidang swasta (karyawan swasta), termasuk di dalamnya karyawan perusahaan industri, yaitu sebanyak 314.467 jiwa atau sekitar 16,19% dari total penduduk,

kemudian wiraswasta (pedagang) sebanyak 88.158 jiwa atau sekitar 4,53% dari total penduduk, sementara pertukangan/buruh tani sebanyak 84.366 jiwa atau sekitar 4,34% dari total penduduk. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang terbesar dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 407.144 jiwa atau 22,60% dari total penduduk Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya berkaitan dengan komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut jenis agama yang dipeluk, mayoritas penduduk Kabupaten Sidoarjo, yakni sebanyak 95,34%, beragama Islam. Sedangkan yang lainnya meliputi: pemeluk Kristen sebanyak 2,03%, Katolik sebanyak 1,13%, Hindu sebanyak 0,215, dan Konghucu sebanyak 0,01%. Data jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010, menurut Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 1.762.594 jiwa<sup>80</sup>. Kabupaten Sidoarjo terkenal juga sebagai kota santri. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah Pesantren dan Santri di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan yang memiliki jumlah pesantren terbanyak adalah Kecamatan Waru, yakni sebanyak 35 Pondok Pesantren. Sedangkan jumlah santri terbanyak ada di Kecamatan Buduran dengan jumlah santri sebanyak 2.430 jiwa. Jumlah keseluruhan Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 265, dengan jumlah santri sebanyak 21.564 jiwa.

### **c. Gambaran Kondisi Perekonomian Kabupaten Sidoarjo**

#### **1) Potensi Unggulan Daerah**

Lokasi Kabupaten Sidoarjo yang strategis di kawasan “GERBANG-KERTASUSILA” dan merupakan *hinterland* dari kota Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonominya. Beberapa faktor pendukung dari pertumbuhan Kabupaten Sidoarjo, diantaranya: memiliki dukungan infrastruktur dan utilitas yang baik (seperti:

---

<sup>80</sup> Data jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 berbeda antara data versi BPS Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, serta Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 menurut data BPS Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.945.252, sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 2.018.239, sementara Departemen Agama menyebutkan sejumlah 1.762.594.

jalan, bandara, terminal, telekomunikasi, dan sebagainya), dan sebagai kota industri yang didukung dengan kegiatan perikanan dan pertanian yang maju.

Terjadinya bencana semburan lumpur panas di Kecamatan Porong dan sekitarnya, telah menimbulkan berbagai kerugian, khususnya kerugian ekonomi, terutama dengan tidak berfungsinya jalan tol pada ruas jalan Porong-Gempol yang merupakan urat nadi perekonomian dan jalur transportasi orang maupun barang dari/ dan ke arah Surabaya, telah mengakibatkan dampak yang luar biasa antara lain: peningkatan pembiayaan distribusi hasil produksi industri atau eksportir, tidak dapat berproduksi dan atau menurunnya produktivitas usaha di sektor industri, perdagangan, jasa, hotel dan jasa konstruksi.

Menurunnya daya saing Sidoarjo sebagai salah satu tujuan investasi di Jawa Timur akibat investor takut lokasi usahanya menjadi sasaran luapan lumpur, juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan investasi dan menurunnya produktivitas usaha dan masyarakat. Hal ini akan berdampak terhadap sulitnya upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Sidoarjo, perluasan kesempatan kerja serta peluang berusaha.

Salah satu upaya menaikkan kembali daya saing Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menggali potensi yang dimiliki. Potensi unggulan Kabupaten Sidoarjo merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan mempunyai daya saing di pasaran, baik karena ciri-cirinya yang khas, kualitasnya maupun harganya yang kompetitif. Disamping itu juga, potensi unggulan tersebut berasal dari pemanfaatan potensi yang berasal dari sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang potensial untuk ditumbuh kembangkan. Bentuk nyata usaha Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menggali potensi unggulan adalah dengan dicanangkannya beberapa sentra usaha antara lain: Kampoeng Batik di Desa Jetis Kecamatan Sidoarjo, Kampoeng Sepatu di Desa Mojosantren Kecamatan Krian, Kampoeng Jajanan di Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung dan Kampoeng Krupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon<sup>81</sup>. Potensi unggulan Kabupaten Sidoarjo juga mencakup berbagai sektor antara lain:

a) Sektor Pertanian

Potensi unggulan disektor pertanian meliputi berbagai komoditas yang patut dijadikan unggulan karena mempunyai peran yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, komoditas tersebut terdiri dari: (a) Komoditas padi, potensi luas areal tanam 31.147 Ha dengan tingkat produksi sebesar 1.853.561,26 Kw atau rata-rata produksinya sebesar 59,51 Kw/Ha; (b) Komoditas tebu, luas areal tanam 5.951,32 Ha dengan tingkat produksi 5.661.754,08 Kw; dan (c) Komoditas sayuran dataran rendah, potensi luas areal tanam 1.639 Ha terdiri atas sayur bayam 570 Ha, sawi 487 Ha, kangkung 577 Ha dan terong 5 Ha. Untuk komoditas padi dengan luas panen 31.147 Ha dengan tingkat produktivitas sebesar 59,51 Kw/Ha sangat berpotensi untuk dikembangkan, mengingat pada Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Sidoarjo telah mendapat penghargaan beras tingkat nasional<sup>82</sup>.

Sedangkan untuk tanaman tebu sangat potensial untuk dikembangkan mengingat ada 4 (empat) pabrik gula di Kabupaten Sidoarjo. Areal tanam/panen tebu pada tahun 2008 seluas 5.951 Ha dengan tingkat produktivitas 951 Kw/Ha. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan komoditas tebu adalah melalui program bongkar ratoon (Keprasan lebih dari 3 kali diganti dengan tanaman baru) dengan sasaran produktivitas 1.200 Kw/Ha dan rendemen 8,5%.

Selanjutnya untuk komoditas sayuran dataran rendah juga mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan secara komersial, mengingat Sidoarjo berdekatan dengan kota Surabaya sebagai tempat pemasaran hasil sayuran dataran rendah, namun selama ini belum dikelola secara optimal. Selain itu perlu dikembangkan sayur organik untuk memenuhi kebutuhan swalayan atau supermarket di Sidoarjo maupun di sekitar Sidoarjo.

---

<sup>81</sup> <http://www.bagianpemerintahan.sidoarjo.go.id/evass&lap/lkpj/2008/imtro-lkpj.htm>

<sup>82</sup> Lihat: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2009. BPS Kabupaten Sidoarjo.

## b) Sektor Perikanan

Pada sektor perikanan di Kabupaten Sidoarjo mengandalkan udang dan bandeng sebagai komoditas unggulan yang dijadikan lambang Kabupaten Sidoarjo. Dengan luas tambak 15.530,409 Ha memberikan kesejahteraan bagi 3.257 petani tambak dan 3.282 pendega, yaitu orang yang berusaha secara bagi hasil dengan pemilik tambak. Wilayah tambak di Sidoarjo membentang dari utara ke selatan sepanjang pantai timur, dimulai dari Kecamatan Waru sampai Kecamatan Jabon. Perikanan, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Kabupaten Sidoarjo. Selat Madura di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, diantaranya ikan, udang dan kepiting. Logo Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa Udang dan Bandeng merupakan komoditi perikanan yang utama. Oleh-oleh makanan khas Sidoarjo adalah Bandeng Asap dan Kerupuk Udang. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis"<sup>83</sup>.

## c) Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar 47,34% pada tahun 2007 dan untuk tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 46,04% atau turun sebesar 1,3%. Hal ini diakibatkan oleh dampak semburan lumpur panas Lapindo yang terjadi di daerah Kecamatan Porong dan sekitarnya, yang berdampak antara lain: tidak berfungsinya jalan tol pada ruas Porong Gempol yang merupakan urat nadi perekonomian, terendahnya bangunan pabrik/industri besar sebanyak 35 buah, terendahnya lahan usaha mikro/UMKM, dan terjadinya pengangguran sebagai akibat hilangnya lapangan pekerjaan.

Disamping akibat dampak luapan Lumpur, penurunan kontribusi sektor industri pengolahan juga diakibatkan oleh naiknya harga BBM untuk industri serta imbas dari krisis

---

<sup>83</sup> Lihat: Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2009. BPS Kabupaten Sidoarjo; Lihat juga: [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sidoarjo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo); Diakses Jumat, 13 Juli 2010 jam 06.45 wib.

global. Pada sektor industri pengolahan, potensi terbesar adalah pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sektor ini terbukti tahan dari terpaan krisis. Apabila dikelompokkan jumlah usaha berskala UMK di Sidoarjo sebanyak 167.251 unit, sedangkan UMB sebanyak 2.512 unit. Ini berarti Usaha Mikro, dan Kecil jumlahnya mencapai 98,52% dari total usaha yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2009, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan lagi dari tahun 2008, yakni kontribusinya mencapai 49,44%, sedangkan untuk tahun 2010 kontribusi sektor industri pengolahan sedikit menurun dari tahun 2009, yakni menjadi 48,68%. Namun demikian, secara umum kontribusi sektor industri pengolahan merupakan yang paling tinggi bagi PDRB Kabupaten Sidoarjo, dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya.

Sektor industri di Kabupaten Sidoarjo memang berkembang dengan cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis kawasan Indonesia Timur (Surabaya), berdekatan dengan pelabuhan laut Tanjung Perak maupun Bandara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif, serta kondisi sosial, politik, dan keamanan yang relatif stabil sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sidoarjo<sup>84</sup>. Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, di antaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedon, Waru, dan di Tebel, Gedangan, serta sentra industri kerupuk di Telasih, Tulangan<sup>85</sup>.

Besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo ditopang oleh tumbuhnya

---

<sup>84</sup> Bencana semburan lumpur Lapindo secara keseluruhan tidak begitu berpengaruh terhadap total investasi di Kabupaten Sidoarjo. Meskipun pada tahun 2009 total investasi turun hampir sekitar 50% dari tahun 2008, namun pada tahun 2010 total investasi di Kabupaten Sidoarjo naik 100% dibandingkan tahun 2009. Lihat: Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2010. BPS Kabupaten Sidoarjo.

<sup>85</sup> Lihat: Lihat: Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2010. BPS Kabupaten Sidoarjo. Lihat juga: [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sidoarjo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo). Diakses Jumat, tgl. 13 Juli 2012.



perusahaan-perusahaan industri, baik besar maupun sedang. Data jumlah perusahaan industri besar dan sedang untuk setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui jumlah keseluruhan perusahaan industri besar maupun sedang yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2010, jumlah keseluruhan perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 804 buah, dengan rincian 243 buah perusahaan industri besar dan 561 perusahaan industri sedang.

Banyaknya perusahaan industri di Kabupaten Sidoarjo, berdampak pada besarnya daya serap tenaga kerja di sektor ini. Jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahaan industri besar dan industri sedang di Kabupaten Sidoarjo, dilihat bahwa daya serap sektor industri terhadap tenaga kerja di kabupaten Sidoarjo cukup besar, yakni mencapai 150.499 orang. Apabila setiap tenaga kerja diasumsikan mempunyai tanggungan anggota keluarga 4 jiwa, maka total penduduk Kabupaten Sidoarjo yang kehidupannya ditopang oleh sektor industri mencapai sekitar 601.996 jiwa atau hampir sekitar 31,01% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2010.

d) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Kontribusi sektor perdagangan juga cukup besar dan potensial bagi perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Sektor ini berkaitan dengan sektor yang lain yaitu sektor industri pengolahan. Pada tahun 2008 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo sekitar Rp 12,02 trilyun (26,75%), pada tahun 2009 jumlahnya mengalami kenaikan menjadi Rp 13,46 trilyun namun persentasenya menurun (10,82%) dibandingkan tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2010 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 15,44 trilyun (27,32%). Pada tahun 2010, jumlah investasi pada sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo mencapai lebih dari Rp.3.828 trilitun<sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> Lihat: Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2010. BPS Kabupaten Sidoarjo.

## 2) Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat dari indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB disajikan dalam dua bentuk yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (ADHK'00). PDRB ADHB masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa, sehingga tidak terlalu akurat untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu digunakan PDRB ADHK'00 yang telah menghilangkan inflasi sehingga bisa diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil. Sedangkan untuk tingkat kemakmuran digunakan indikator PDRB Perkapita.

### a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB):

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2000 selama kurun waktu dua tahun terakhir adalah Rp.50.132.273 (tahun 2009) dan 56.506.927 (tahun 2010). Diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHB dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan 12,71 % atau meningkat dari tahun 2009 yang sebesar Rp 50.132.273 menjadi Rp 56.506.927 pada tahun 2010. Dari keseluruhan sektor terlihat semuanya mengalami peningkatan. Sektor industri pengolahan sejumlah Rp 27,506 trilyun lebih, dan sektor perdagangan, hotel & restoran sejumlah Rp 15,442 trilyun lebih. Masing-masing merupakan sektor dominan yang menyumbang PDRB paling besar di Kabupaten Sidoarjo. Sementara angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000, selama kurun waktu dua tahun terakhir Rp. 24,768 trilyun lebih pada tahun 2009, dan Rp 26,161 trilyun lebih pada tahun 2010.

PDRB Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,39 trilyun lebih atau kenaikan sebesar 5,62 %. Dari beberapa sektor terlihat mengalami peningkatan dan juga terdapat penurunan pada 2010. Dalam hal ini sektor industri pengolahan sebesar Rp 12,051 trilyun lebih dan sektor perdagangan sebesar Rp 7,570 trilyun lebih merupakan sektor dominan yang menyumbang PDRB paling besar Di Kabupaten

Sidoarjo pada tahun 2010. Pada sektor industri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak ditopang oleh besarnya keberadaan Industri Rumah Tangga (IRT) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sedang perkembangan distribusi per-sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (ADHK 2000) selama tahun 2009 dan 2010 terlihat komposisi sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 tidak mengalami perubahan, dimana sektor Industri Pengolahan menjadi penyumbang terbesar PDRB yaitu sebesar 46,07 persen, kemudian berturut-turut sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 28,94 persen, juga sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 12,39 persen. Untuk sektor industri pengolahan meskipun menjadi penyumbang terbesar PDRB, namun pada tahun 2010 kontribusinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009, yakni dari 47,07 persen menjadi 46,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

b) PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan indikator tingkat kemakmuran. Pada dua tahun terakhir PDRB Per-kapita berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2009 sebesar Rp. 23.883.922 meningkat menjadi Rp 26.284.800 pada tahun 2010. Dengan demikian berarti telah terjadi pertumbuhan sebesar 10,05 persen. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2000, pada tahun 2009 PDRB perkapita Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 11.486.188 dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp. 11.854.758. Dengan demikian berarti pertumbuhan ril PDRB perkapita adalah sekitar sebesar 3,20 persen.

### 3) Investasi

Investasi memiliki peranan penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik, selama menghasilkan out put yang efisien. Investasi juga bisa dijadikan sebagai indikator kondisi sosial, politik, hukum, keamanan, dsb., bagi suatu daerah. Perkembangan Investasi Swasta di Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui bahwa total nilai investasi pada tahun 2010 di Kabupaten Sidoarjo mencapai lebih dari Rp 4.745 trilyun. Sektor yang paling besar menarik investasi adalah sektor perdagangan, yakni sebesar Rp3.828 trilyun lebih, disusul sektor perumahan sebesar Rp 686 Trilyun lebih. Sementara sektor pertanian adalah sektor yang paling kecil nilai investasinya, yakni sebesar Rp 2,150 trilyun.

Perbandingan total investasi di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2005 sampai dengan 2010, dapat dilihat bahwa tahun 2009 total nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 total nilai investasi sebesar Rp. 2.449 trilyun lebih, meningkat menjadi Rp 4.745 trilyun lebih pada tahun 2010. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2009 nilai investasi menurun hampir sekitar 100% dari tahun 2008, hal ini diakibatkan sebagai dampak dari terjadinya bencana semburan lumpur Lapindo di sekitar wilayah Porong dan sekitarnya.

## **B. Deskripsi Terjadinya Bencana Lumpur Lapindo**

Tanggal 29 Mei 2006 menjadi sejarah penting bagi warga di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya, Kabupaten Sidoarjo, karena menjadi awal munculnya bencana semburan lumpur panas Lapindo. Lumpur panas dengan volume antara 100 ribu-150 ribu m<sup>3</sup> per-hari, keluar dari perut bumi dan menenggelamkan wilayah kawasan pemukiman, pertanian, dan industri<sup>87</sup>.

---

<sup>87</sup> Batubara, Bosman & Utomo, Paring Waluyo.2012. Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo. Yogyakarta: INSITPress. Hal.3.

Semburan lumpur panas terjadi di sekitar sumur Banjarpanji-1, yakni sumur eksplorasi minyak yang terletak di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pengeboran (eksplorasi) pertama kali dilakukan pada tanggal 20 Pebruari 2006 dengan sasaran formasi karbonat Kujung, dengan rencana kedalaman sekitar 3.200 meter. Pada awalnya pengeboran ini tidak mengalami hambatan yang berarti sampai dengan kedalaman sekitar 2.700 meter. Namun ketika mencapai kedalaman 2.700 meter, baru timbul masalah yakni hilangnya sirkulasi lumpur, yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Pada keesokan harinya, pipa pengeboran dicabut dari tempat pengeboran, sehingga menyebabkan terjadinya *well-kick*. Hal inilah yang memicu terjadinya semburan lumpur dan air keatas permukaan yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2006<sup>88</sup>. Luapan lumpur ini secara bertahap semakin membesar, dan diperkirakan volumenya antara 100 ribu m<sup>3</sup> - 150 ribu m<sup>3</sup> per-hari. Dengan volume semburan lumpur yang sangat besar ini, maka wilayah desa yang ada di sekitarnya menjadi tergenang oleh lumpur.

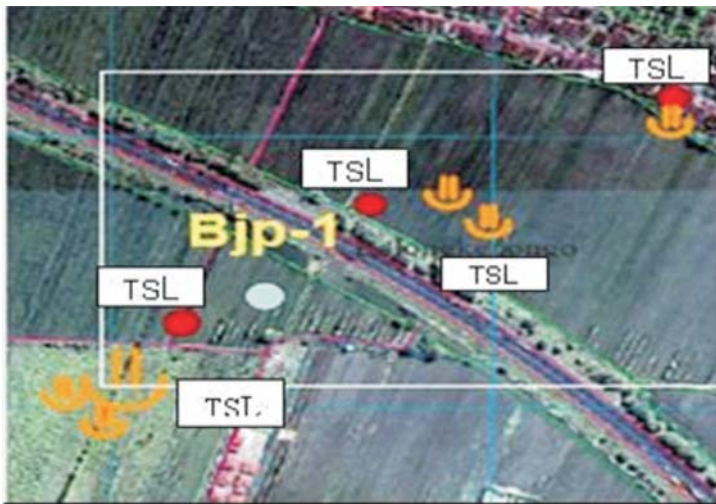
Lokasi pusat semburan lumpur Lapindo berada di Kecamatan Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Lokasi pusat semburan berjarak sekitar 15 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik PT Lapindo Brantas Incorporated (PT LBI), sebagai operator blok Brantas. Blok Brantas membentang dari wilayah Jombang, Mojokerto, Sidoarjo hingga Pasuruan. Berdasarkan klasifikasi data Walhi Jawa Timur, wilayah Blok Brantas Ring I terdiri dari 11 desa/kelurahan di Sodoarjo. Ring II terdiri dari 29 desa di Sidoarjo. Ring III meliputi 441 desa terbentang di Jombang, Mojokerto, Sidoarjo hingga Pasuruan. Membentang di 481 desa di empat kabupaten. Di wilayah Sidoarjo, PT LBI menguasai konsesi wilayah minyak dan gas bumi (migas) lebih dari 10.000 hektar, atau lebih dari separuh wilayah Sidoarjo. Blok Brantas mempunyai kurang lebih 7 (tujuh) cadangan migas dengan sumber

---

<sup>88</sup> Wiguna, I Putu A., Citrosiswoyo, W., & Widodo, A. (eds.). 2009. Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. Surabaya: PSKB ITS. Hlm. 8.

daya gas bumi sebesar 677 BCF (triliun kaki kubik) dan minyak bumi sebesar 12,5 MMBBL (juta barrel).

Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tidak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan Tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan jalan raya Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur Pantura Timur), serta jalur Kereta Api (KA) lintas timur Surabaya-Malang dan jalur Surabaya-Banyuwangi.

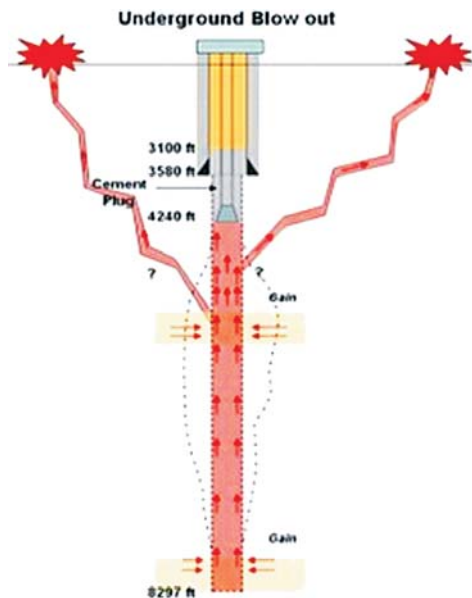


**Gambar 2.2. Lokasi Tempat Semburan Lumpur (TSL) Lapindo**

Sumber: Wiguna, Citrosiswoyo, & Widodo, 2009

Pada awalnya pengeboran sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki (2.590 meter) untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping). Sumur tersebut akan dipasang selubung bor (*casing*) yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi *circulation loss* (hilangnya lumpur dalam formasi) dan *kick* (masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur) sebelum pengeboran menembus formasi Kujung. Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo “sudah” memasang *casing* 30 inci pada kedalaman 150 kaki, *casing* 20 inci pada 1.195 kaki, *casing (liner)* 16 inci pada 2.385 kaki, dan *casing* 13-3/8 inci pada 3.580 kaki (Lapindo Press Rilis ke wartawan, 15 Juni 2006). Ketika

Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka "belum" memasang *casing* 9-5/8 inchi yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan Formasi Kujung (8500 kaki). Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pengeborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Alhasil, mereka merencanakan memasang *casing* setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak meng-*casing* lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. Selama pemboran, lumpur *overpressure* (bertekanan tinggi) dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (*blow out*) tetapi dapat di atasi dengan pompa lumpurnya Lapindo (Medici).



**Gambar 2.3. Underground Blowout (Semburan Liar Bawah Tanah)**

Sumber: Wiguna, Citrosiswoyo, & Widodo, 2009

Setelah kedalaman 9.297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah

tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu gamping formasi Klitik sangat *porous* (bolong-bolong). Akibatnya lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang (masuk ke lubang di batu gamping formasi Klitik) atau *circulation loss* sehingga Lapindo kehilangan/kehabisan lumpur di permukaan. Akibat dari habisnya lumpur Lapindo, maka lumpur formasi Pucangan berusaha menerobos ke luar (terjadi *kick*). Mata bor berusaha ditarik tetapi terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standard, operasi pemboran dihentikan, perangkap *Blow Out Preventer (BOP)* di rig segera ditutup dan segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan *kick*. Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai ke batas antara *open-hole* dengan selubung di permukaan (*surface casing*) 13 3/8 inchi. Di kedalaman tersebut, diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil dan kemungkinan banyak terdapat rekahan alami (*natural fissures*) yang bisa sampai ke permukaan. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubang sumur disebabkan BOP sudah ditutup, maka fluida formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah yaitu melewati rekahan alami tadi dan berhasil. Inilah mengapa *surface blowout* terjadi di berbagai tempat di sekitar area sumur, bukan di sumur itu sendiri. Perlu diketahui bahwa untuk operasi sebuah kegiatan pemboran Migas di Indonesia setiap tindakan harus seijin BP MIGAS, semua dokumen terutama tentang pemasangan *casing* sudah disetujui oleh BP MIGAS.

Menurut Prasetya dan Batubara<sup>89</sup>, bencana Lumpur Lapindo adalah bencana yang sangat kompleks kalau dilihat dari geneologi terjadinya bencana. Perdebatan teoritis melibatkan ahli dari seluruh penjuru dunia. Umumnya pendapat para ahli terbelah menjadi dua kubu, yaitu kalangan yang berpendapat bahwa bencana ini disebabkan oleh aktivitas pengeboran pada sumur eksplorasi gas Banjar Panji-1 (BJP-1) milik PT LBI dan kalangan yang berpendapat

---

<sup>89</sup> Prasetya, Heru; & Batubara, Bosman (eds.). 2010. Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil. Depok: DESANTARA. Hlm. 40.



bahwa bencana lumpur disebabkan oleh reaktivasi patahan regional *Watukosek* akibat adanya gempa bumi Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006, 2 hari sebelum bencana semburan lumpur Lapindo terjadi.

Namun dalam *"AAPG 2008 International Conference & Exhibition"*<sup>90</sup>, pandangan para ahli geologi dunia tentang penyebab terjadinya semburan lumpur terbagi menjadi empat kelompok, yakni: Pertama, sebanyak tiga ahli dari Indonesia mendukung gempa Yogyakarta sebagai penyebabnya; Kedua, sebanyak 42 ahli dunia menyatakan aktivitas pemboran PT LBI sebagai penyebabnya; Ketiga, sebanyak 13 ahli yang menyatakan kombinasi gempa dan pemboran sebagai sumber penyebabnya; dan Keempat, ada 16 ahli yang menyatakan belum bisa menentukan pendapatnya. Sementara laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 29 Mei 2007 menemukan bahwa terdapat kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pengeboran oleh PT. LBI<sup>91</sup>. Sementara menurut hasil kajian Pusat Studi Kebumihan dan Bencana (PSKB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), dinyatakan bahwa penyebab terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo dimungkinkan karena faktor kegagalan teknologi<sup>92</sup>.

Akbar (2012: 79-81)<sup>93</sup>, dengan merujuk kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Departemen ESDM dan laporan Tim Investigasi Independen masalah semburan lumpur di sekitar sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), Sidoarjo, Jawa Timur yang dibentuk melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2231 K/73/MEM/2006, tanggal 14

---

<sup>90</sup> AAPG (American Association of Petroleum Geologists), pada tanggal 26-29 Oktober 2008 melaksanakan konferensi tahunan di Cape Town, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia. Lihat: <http://www.aapg.org/publications/news/explorer/details/articleid/10624/cape-town-ready-to-host-aapg-ice>. Lihat juga: Prasetyo. 2012. Kajian Aspek Strategis: Kontroversi Pemicu Semburan Lumpur Panas Sidoarjo "War-Game" Debat Lupsi. BPLS: Didistribusikan oleh Dr. Ir. Hardi Prasetyo, Wakil Kepala Bapel BPLS.

<sup>91</sup> Lihat: Laporan Pemeriksaan atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo. BPK: Laporan Eksekutif, 29 Mei 2007. Lihat juga: <http://www.jatam.org/dana-talangan-bukan-pintu-keluar-dari-jebakan-lumpur-lapindo/>.

<sup>92</sup> Wiguna, I Putu A., Citrosiswyo, W., & Widodo, A. (eds.). 2009. Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. Surabaya: PSKB ITS. Hlm. 15.

<sup>93</sup> Akbar, Ali Azhar. 2012. *Konspirasi SBY-Bakrie*. Jakarta: INDOPETRO Publishing. Halaman: 79-81.

Juni 2006, menjelaskan tentang kronologi pengeboran di sumur BJP-1 sebagai berikut<sup>94</sup>:

- Pemboran sumur BJP-1 dimulai pada tanggal 8 Maret 2006.
- Tanggal 26 Mei 2006, pemboran masih berjalan tanpa gangguan yang berarti, kemudian terdeteksi adanya kandungan H<sub>2</sub>S dengan konsentrasi tidak terlalu tinggi pada ayakan lumpur di menara bor, namun pemboran diteruskan sampai kedalaman 9.277 kaki (2.827 meter).
- Pada tanggal 27 Mei 2006 atau hari ke-80 telah mencapai kedalaman 9.297 kaki. Pada kedalaman tersebut terjadi *total loss circulation* (hilangnya lumpur pemboran) dan kemudian LBI/PT MCN mencabut pipa bor. Pada saat mencabut pipa bor, terjadi kick dan pipa terjepit (*stuckpipe*) pada kedalaman 4.241 kaki. Pipa tidak dapat digerakkan ke atas dan ke bawah maupun berputar/berotasi. Pada hari yang sama terjadi pula gempa bumi di Yogyakarta berkekuatan 5,9 skala Richter yang jaraknya sekitar 300 km dari lokasi pemboran.
- Tanggal 28 Mei 2006, pipa pemboran ditarik keluar lubang pemboran, nun pada kedalaman 4.241 kaki (1.241 meter) terdeteksi adanya tanda-tanda kick (masuknya cairan formasi ke dalam lubang pemboran), dan terdeteksi pula adanya kandungan H<sub>2</sub>S berkonsentrasi tinggi sampai 500 ppm di sekitar ayakan lumpur. Masalah *kick* akhirnya dapat ditanggulangi dengan memompakan lumpur berat ke dalam lubang sumur. Namun ternyata pipa sama sekali tidak dapat digerakkan naik-turun maupun diputar. Ini menandakan peralatan pemboran terjepit (*pie-sticking*). Hal ini tidak dapat ditanggulangi kendati sudah diusahakan dengan cara memompakan pelumas berulang-kali. Maka tindakan selanjutnya akan dilakukan pemotongan pipa dan meninggalkannya di dalam lubang sumur di bawah tanah.

---

<sup>94</sup> Intisari tentang kronologi kejadian luapan lumpur di sumur BJP-1 yang sumbernya sama dari hasil laporan investigasi Tim Independen yang dibentuk oleh Departemen ESDM juga pernah ditulis dalam sebuah buku oleh Tim penulis Walhi. Lihat: Setiawan, Dani (ed.). 2008. Lapindo: Tragedi Kemanusiaan dan Ekologi. Jakarta: Walhi. Halaman:3-5.

- Pada 29 Mei semburan gas berwarna putih ( $H_2S$ ) dan lumpur panas keluar pada pukul 05.00 wib dari rawa yang berjarak sekitar 150 meter barat daya dari sumur eksplorasi Banjar Panji-1 milik LBI dekat permukiman warga Desa Renokenongo dusun Reno Mencil, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Penduduk melaporkan adanya semburan air bercampur lumpur setinggi 25 aki (8 meter) yang menyembur setiap 5 menit pada jarak sekitar 150 meter ke arah barat daya dari menara pemboran (*rig*). Ketika lumpur berat kembali dipompa, ketinggian semburan berkurang menjadi hanya 8 kaki (3 meter), dan akhirnya tinggal 1 aki (30 sentimeter) dan menyembur setiap sekita 30 menit. Artinya peristiwa semburan liar ini hampir dapat ditanggulangi dengan menggunakan peralatan pemboran (*rig*) yang ada di lapangan.
- 1 Juni 2006, kembali muncul titik semburan lumpur panas ke dua di sebelah Timur Laut dari sumur Banjar Panji-1 sehingga mengakibatkan semburan lumpur panas semakin deras keluar dari perut bumi dan dengan cepat menggenangi areal persawahan dan jalan raya desa di sekitar sumurna Banjar Panji-1. Titik semburan baru kembali muncul pada 2 Juni 2006 sekitar 500 meter arah Timur Laut dari sumur Banjar Panji-1, tepatnya di kediaman bapak Haji Soleh penduduk Dusun Renomencil di Desa Renokenongo. Akibat dari semburan ini pemilik rumah dan sejumlah tetangganya mengungsi ke balai Desa Renokenongo karena khawatir akan muncul titik semburan di wilayah mereka.
- Tanggal 2 Juni 2006, terjadi semburan ketiga sekita 300 meter ke arah Timut Laut dari menara pemboran. Penyemenan penutup (*plug*) dilakukan di atas pipa yang telah dipotong untuk ditinggalkan.
- Tanggal 3 Juni 2006, peralatan pendukung pemboran mulai dipindahkan dari lokasi pemboran, dan pada pukul 22.00 wib, menara bor (*rig*) meninggalkan lokasi.
- Karena luapan semburan lumpur mulai menggenangi area sumur BJP-1, ada rekahan dan pipa terjepit, maka pada tanggal 4 Juni 2006 sumur BJP-1 ditinggal untuk sementara (*temporary well abandonment*). Pada saat ditinggalkan, tinggi seburan berkisar 1-2 meter dan berasal dari tiga titik semburan.

- Ketika semburan lumpur terjadi pertama kali di sekitar sumur Banjar Panji-1, volume lumpur yang dihasilkan masih pada tingkat 5.000 meter per-kubik per-hari. Lubang semburan terjadi di beberapa tempat, sebelum akhirnya menjadi satu lubang yang dari waktu ke waktu menyemburkan lumpur panas dengan volume yang terus membesar hingga mencapai 50.000 m<sup>3</sup> per-hari. Permasalahan penanganan lumpur panas ini menjadi jauh lebih berat akibat semakin membesarnya volume lumpur panas yang disemburkan, dari antara 40.000m<sup>3</sup> sampai 60.000 m<sup>3</sup> (Mei-Agustus) menjadi 126.000 m<sup>3</sup> per-hari, sehingga yang akan dibuang tidak hanya air dari lumpur tersebut, akan tetapi keseluruhan lumpur panas yang menyembur di sekitar sumur Banjar Panji-1.

Hingga bulan Juli 2012, bencana lumpur Lapindo sudah berjalan sekitar enam tahun lebih. Namun semburan lumpur belum menunjukkan tanda-tanda berhenti, meskipun volumenya sudah agak berkurang. Belum bisa dipastikan kapan semburan lumpur akan berhenti. Menurut Richard Davies dan kawan-kawan<sup>95</sup>, sulit untuk memprediksikan kapan kepastian semburan lumpur Lapindo akan berhenti. Namun, menurutnya kemungkinan semburan tersebut akan padam diprediksikan sekitar 26 tahun lagi<sup>96</sup>. Berarti semburan lumpur Lapindo baru akan berhenti sekitar tahun 2037.

Bencana lumpur Lapindo telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat di Kecamatan Porong dan sekitarnya. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan upaya mengatasi permasalahan bencana lumpur Lapindo tersebut. Berbagai kebijakan pemerintah tersebut, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>95</sup> Davies, Richard J., at.al. 2011. Structure Controls on Mud Volcano Vent Distribution: Examples from Azerbaijan and Lusi. East Java. *Journal of the Geological Society*, July, 2011, v. 168, p. 1013-1030.

<sup>96</sup> Tempo Interaktif. Edisi Jumat, 25 Pebruari 2011.

**Tabel 2.1. Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Lumpur Lapindo**

<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Bentuk Kebijakan</b>
1.	8 September 2006	Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo.
2.	8 April 2007	Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Selanjutnya diikuti oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2007, tertanggal 8 April 2007, yang menetapkan mengangkat anggota Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
3.	17 Juli 2008	Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
4.	23 September 2009	Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
5.	27 September 2011	Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2011, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
6.	5 April 2012	Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
7.	8 Mei 2013	Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013, tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak luapan lumpur Lapindo (lumpur Sidoarjo) sejak terjadinya peristiwa

semburan lumpur tahun 2006 hingga tahun 2012, tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) dan Peraturan Presiden (Perpres), sebagai berikut:

*Pertama;* Tertanggal 8 September 2006 terbit Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLS). Tim ini mempunyai tugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi: penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, dan penanganan masalah lumpur. Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo tidak mengurangi tanggung jawab PT Lapindo Brantas untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkannya. Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada anggaran PT Lapindo Brantas. Pada tanggal 22 Maret 2007, Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo kemudian menyampaikan usulan tentang wilayah PAT semburan lumpur, yang selanjutnya dijadikan lampiran Kepres Nomor 14 Tahun 2007.

*Kedua;* Tertanggal 8 April 2007 terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomo 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Perpres 14 Tahun 2007 ini menggantikan Kepres Nomor 13 Tahun 2006, dengan demikian keberadaan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo sudah berakhir dan tugas-tugasnya diambil-alih oleh Badan Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (BPLS). Tugas BPLS adalah menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastuktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.

Dalam lampiran Kepres Nomor 14 Tahun 2007 dicantumkan wilayah yang masuk ke dalam PAT, yakni wilayah yang terendam lumpur, sebagaimana usulan Timnas PSLS. Wilayah masuk PAT meliputi empat desa yaitu: Desa Siring, Desa Jatirejo, Desa Kedung Bendo, dan Desa Renokenongo, kemudian karena terjadi ledakan pipa gas Pertamina pada tanggal 22 Nopember 2006 yang menjebol tanggul sisi kanan Tol Porong-Gempol yang tidak bisa ditutup lagi, maka wilayah PAT ditambah lagi enam desa, yakni: Desa Ketapang,

Desa Kalitengah, Desa Glagah Arum, Desa Gempolsari, Desa Pejarakan, Desa Mindi, dan Desa Keboguyang. Luas wilayah PAT, yakni luas wilayah yang terendam lumpur, keseluruhnya meliputi 613,4 Ha. Berdasarkan pasal 15 Perpres Nomor 14 Tahun 2007, PT LBI diharuskan membeli tanah dan bangunan milik warga masyarakat yang ada di wilayah dalam PAT tersebut melalui skema jual-beli dengan pembayaran bertahap, yakni 20% dibayar dimuka dan sisanya dibayar paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.

*Ketiga;* Tertanggal 17 Juli 2008, terbit Perpres Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Salah satu pertimbangan terbitnya Perpres Nomor 48 Tahun 2008 ini adalah bahwa luapan lumpur di Sidoarjo telah menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan bagi masyarakat di luar PAT tanggal 22 Maret 2007 (Lampiran Perpres Nomor 14 Tahun 2007), yakni wilayah di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, selain wilayah yang masuk PAT sebagaimana Perpres 14 Tahun 2007, maka dengan terbitnya Perpres Nomor 48 Tahun 2008 luas wilayah yang terkena dampak lumpur bertambah lagi tiga desa yang berada di luar PAT, yakni: Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring. Selanjutnya, proses jual beli terhadap tanah dan bangunan milik warga masyarakat di tiga desa tersebut dilakukan oleh BPLS dengan mengacu kepada besaran harga jual-beli yang dibayarkan oleh PT. Lapindo Brantas terhadap tanah dan bangunan warga masyarakat yang ada di dalam PAT. Biaya jual-beli di tiga desa di luar PAT sebagaimana Perpres Nomor 48 Tahun 2008 ini dibebankan kepada dana APBN.

*Keempat;* Tertanggal 23 September 2009 terbit Perpres Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Inti dari Perpres Nomor 40 Tahun 2009 ini adalah adanya penambahan luas wilayah di luar PAT, yakni meliputi beberapa Rukun Tetangga (RT) di Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi yang terkena dampak semburan lumpur berupa amblesan maupun semburan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak huni.

*Kelima*; Tertanggal 27 September 2011 terbit Perpres Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Inti dari Perpres Nomor 68 Tahun 2011 adalah menegaskan Perpres Nomor 40 Tahun 2009 bahwa penentuan wilayah di luar PAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 40 Tahun 2009 tersebut ditentukan berdasarkan hasil kajian Tim Terpadu yang dibentuk oleh Dewan Pengarah BPLS. Kemudian tertanggal 26 Agustus 2011, Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS menerbitkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Nomor: 03/KTSP/DP-BPLS/2011 tentang Tim Terpadu Kajian Penanganan Dampak Luapan Lumpur Sidoarjo. Tugas utama Tim ini adalah melakukan kajian dampak luapan Lumpur Sidoarjo terhadap masalah sosial-kemasyarakatan melalui: pengumpulan dan analisis data, penentuan batas wilayah tidak aman di luar peta area terdampak, estimasi penanganan masalah sosial-kemasyarakatan, dan rekomendasi hasil kajian. Salah satu rekomendasi Tim Terpadu Kajian Penanganan Dampak Luapan Lumpur Sidoarjo ini adalah usulan penambahan tentang wilayah di luar Peta Area Terdampak yang kemudian menjadi dasar terbitnya Perpres Nomor 37 Tahun 2012.

*Keenam*; Tertanggal 5 April 2012 terbit Perpres Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Inti dari Perpres Nomor 37 Tahun 2012 ini adalah adanya penambahan wilayah di luar PAT yang termasuk terkena dampak luapan lumpur Sidoarjo berdasarkan hasil kajian dan usulan Tim Terpadu Kajian Penanganan Dampak Luapan Lumpur Sidoarjo.

*Ketujuh*; Tertanggal 8 Mei 2013 terbit Perpres Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Inti dari Perpres Nomor 33 Tahun 2013 ini adalah adanya penambahan wilayah di luar PAT yang termasuk terkena dampak luapan lumpur Sidoarjo berdasarkan hasil kajian dan usulan Tim Terpadu Kajian Penanganan Dampak Luapan Lumpur Sidoarjo.



### **C. Dampak Bencana Lumpur Lapindo dan Perubahan pada Wilayah Peta Area Terdampak (PAT)**

Bencana lumpur Lapindo telah menimbulkan dampak dan perubahan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan disekitar wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya, baik yang masuk ke dalam PAT maupun yang di luar PAT. Pada awalnya pusat semburan terjadi di wilayah Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Namun saat ini dampak bencana lumpur Lapindo telah meliputi wilayah di tiga kecamatan, yakni: Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2012, bahwa peruntukkan tata ruang wilayah Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon diprioritaskan hanya untuk kawasan pemukiman, pertanian dan industri, bukan untuk kawasan eksploitasi minyak dan gas (pertambangan). Kemudian Perda Nomor 16 Tahun 2003 diperbaharui lagi dan terbit Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RT RW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029, dimana dicantumkan bahwa wilayah Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan sebagian Kecamatan Tanggulangin, bersama dengan Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Krembung adalah termasuk ke dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) III, dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, konservasi geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krembung<sup>97</sup>. Sejalan dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2003, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Jawa Timur 2005-2020 yang juga menyatakan antara lain bahwa kawasan Sidoarjo, khususnya wilayah Kecamatan Porong diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertanian, dan industri<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> Lihat. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029. Ditetapkan tanggal 28 Juli 2009.

<sup>98</sup> Batubara, B., & Utomo, P.W. 2012. Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Migas di Sidoarjo. Jakarta: Insist Press. Halaman 148.

Dengan demikian, secara formal, pengembangan kawasan di wilayah Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon sudah jelas bahwa di wilayah tersebut diarahkan untuk kawasan pemukiman, pertanian dan industri. Namun secara faktual, kawasan tersebut telah menjadi kawasan eksplorasi migas. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan BP Migas memberikan hak pengelolaan kawasan Blok Brantas sebagai ladang eskplorasi minyak dan gas (migas). Kondisi ini tentu menimbulkan kerancuan antara regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah<sup>99</sup>. Dengan demikian, telah terjadi inkonsistensi fungsi peruntukkan wilayah kawasan Porong, dan sekitarnya, dari fungsi utama sebagai kawasan pemukiman, pertanian, dan idustri menjadi kawasan eksplorasi Migas. Atas terjadinya perubahan fungsi kawasan inilah yang kemudian menyebabkan munculnya bencana luapan lumpur Lapindo di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya.

Gambaran keadaan umum wilayah Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon sebelum terjadinya bencana semburan lumpur Lapindo tanggal 29 Mei 2006, adalah sebagai berikut.

### **1. Kondisi Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Sebelum Terjadinya Bencana Lumpur Lapindo**

Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Tanggulangin, merupakan tiga kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Data pada tahun 2006 sebelum terjadinya bencana semburan lumpur Lapindo<sup>100</sup>, total luas wilayah di tiga kecamatan tersebut adalah 14.311,02 hektar atau sekitar 20,04 persen luas wilayah Kabupaten Sidoarjo, dengan rincian luas Kecamatan Porong 2.982,26 hektar, Kecamatan Tanggulangin 3.229 hektar, dan luas Kecamatan Jabon 8.099,76 hektar.

Sedangkan alokasi penggunaan tanah untuk masing-masing wilayah kecamatan yang terbesar adalah sebagai berikut: untuk wilayah Kecamatan Porong alokasi terluas digunakan untuk areal

---

<sup>99</sup> Ibid. Halaman 149

<sup>100</sup> Data BPS Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2006. <http://www.sidoarjo.go.id/others/SdaAngka/index.php?data=2006/...>

persawahan yang mencapai 1.287,24 ha, disusul untuk areal perkampungan seluas 845,37 ha dan areal perikanan/perairan seluas 496,32 ha. Sementara untuk wilayah Kecamatan Tanggulangin, alokasi terluas juga digunakan untuk areal persawahan yang mencapai 1.522,05 ha, disusul untuk areal perkampungan seluas 790,28 ha dan areal perikanan/perairan seluas 498,96 ha. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Jabon areal terluas digunakan untuk perikanan/perairan seluas 4.077,51 ha, disusul areal persawahan seluas 1.645,28 ha, dan areal perkampungannya seluas 423,73 ha.

Sedangkan jumlah penduduk keseluruhan untuk tiga kecamatan adalah sebanyak 198.648 jiwa atau sekitar 13,42 persen dari total penduduk Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.480.578 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk Kecamatan Porong sebanyak 64.019 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 31.440 jiwa dan perempuan sebanyak 32.579 jiwa, penduduk Kecamatan Tanggulangin sebanyak 90.684 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 44.627 jiwa dan perempuan sebanyak 46.057 jiwa, sementara penduduk Kecamatan Jabon sebanyak 43.945 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 21.490 jiwa dan perempuan sebanyak 22.455 jiwa<sup>101</sup>. Jumlah penduduk ini tersebar dalam beberapa desa, RW dan RT. Data pada tahun 2006 tercatat Kecamatan Porong terbagi ke dalam 19 desa/kelurahan, 67 RW, 319 RT dan 17.954 KK, sedangkan Kecamatan Tanggulangin terbagi ke dalam 19 desa/kelurahan, 66 RW, 268 RT dan 23.868 KK, sementara Kecamatan Jabon terbagi ke dalam 15 desa/kelurahan, 83 RW, 251 RT dan 11.684 KK<sup>102</sup>.

Sebelum terjadi bencana lumpur Lapindo, pada tahun 2006 jumlah industri kecil formal di Kecamatan Porong sekitar 251 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 3.775 orang, di Kecamatan Tanggulangin terdapat 143 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 2.286 orang, dan di Kecamatan Jabon terdapat sekitar 293 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 4.233 orang. Sedangkan untuk jumlah industri kecil non-formal (kerajinan rakyat), di Kecamatan

---

<sup>101</sup> ibid

<sup>102</sup> Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2006.

Porong terdapat 7.851 unit dengan jumlah tenaga kerja terserap sekitar 12.788 orang, di Kecamatan Tanggulangin terdapat 7.532 unit dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 14.491 orang, dan di Kecamatan Jabon terdapat 4.281 unit dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 7.522 orang<sup>103</sup>.

Berdasarkan jenis mata pencaharian, penduduk Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2. Penduduk Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Kecamatan			Jumlah
		Porong	Tanggulangin	Jabon	
1.	PNS	1.136	1.425	440	3.001
2.	TNI	756	730	213	1.669
3.	POLRI	297	280	29	606
4.	Swasta	7.544	19.458	9.336	36.338
5.	Wiraswasta/Pedagang	2.737	5.950	1.621	10.308
6.	Petani	2.252	3.750	975	6.977
7.	Pertukangan	2.235	1.459	477	4.171
8.	Buruh Tani	3.609	6.000	936	10.545
9.	Pensiunan	311	610	465	1.386
10.	Nelayan	25	45	234	304
11.	Pemulung	0	25	110	135
12.	Jasa	1.342	1.300	1.216	3.858
Jumlah		22.244	41.032	16.052	79.328

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2006. Diolah Kembali

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Porong, dari data laporan tahun 2006, tercatat ada 31 sekolah TK, 37 SD (34 Negeri dan 3 Swasta), 10 SLTP (3 Negeri dan 7 Swasta), 5 SMU (1 Negeri dan 4 Swasta), dan 3 SMK Swasta. Jumlah siswa yang sekolah di daerah Kecamatan Porong meliputi: 585 siswa TK, 6.872 siswa SD, 3.936 siswa SLTP, 2.691 siswa SMU umum, dan 863 siswa SMU

<sup>103</sup> Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2006.

Kejuruan (SMK). Sementara di Kecamatan Tanggulangin tercatat 29 sekolah TK, 35 SD (34 Negeri dan 1 Swasta), 6 SLTP (1 Negeri dan 5 Swasta), 2 Swasta), dan 2 SMK Swasta. Jumlah siswa yang sekolah di daerah Kecamatan Tanggulangin meliputi: 2.614 siswa TK, 7.042 siswa SD, 3.1196 siswa SLTP, 450 siswa SMU umum, dan 282 siswa SMU Kejuruan (SMK). Sedangkan di Kecamatan Jabon, tercatat ada 29 sekolah TK, 24 SD Negeri, 3 SLTP (2 Negeri dan 1 Swasta), 1 SMU Swasta, dan 3 SMK Swasta. Jumlah siswa yang sekolah di daerah Kecamatan Jabon meliputi: 1.602 siswa TK, 4.341 siswa SD, 1.646 siswa SLTP, dan 358 siswa SMU umum.

## **2. Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Masyarakat Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon**

Akbar<sup>104</sup> telah mencatat rangkaian kejadian dampak semburan lumpur Lapindo sejak awal kejadian semburan lumpur (29 Mei 2006) hingga 2 tahun setelah kejadian semburan lumpur (2008). Menurut catatan Akbar, sampai 2 tahun semburan terdapat 15 desa tergenang lumpur, meliputi: Desa Renokenongo, Desa Jatirejo, Desa Siring, Desa Kedungbendo, Desa Sentul, Desa Besuki, Desa Glagah Arum, Desa Kedung Cangkring, Desa Mindi, Desa Gempol Sari, Desa Ketapang, Desa Pejarakan, Desa Permisan, Desa Kali Tengah, dan Desa Kebo Guyang.

Penentuan wilayah terdampak luapan lumpur Lapindo (lumpur Sidoarjo) dibagi kedalam dua kategori, yaitu: Pertama wilayah yang termasuk ke dalam PAT; dan Kedua wilayah yang termasuk di luar PAT. Dana penanganan dampak luapan lumpur yang ada di wilayah dalam PAT menjadi tanggungjawab PT LBI, sedangkan dana penanganan luapan lumpur yang ada di wilayah luar PAT menjadi tanggungjawab pemerintah melalui APBN.

Selanjutnya dari beberapa Peraturan Presiden tersebut, maka hingga bulan April 2012 terdapat beberapa wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang hilang karena terkena dampak lumpur Lapindo, baik tenggelam oleh lumpur maupun karena sudah tidak layak huni lagi. Secara

---

<sup>104</sup> Akbar, Ali Azhar. Op cit. Hal. 83-85.

keseluruhan wilayah-wilayah yang hilang atau sudah dinyatakan tidak layak huni lagi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Perubahan Wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Dampak Semburan Lumpur Lapindo Berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007**

No.	Kecamatan	Desa	Keterangan
1.	Porong	Desa Renokenongo	Berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, masuk ke dalam wilayah Peta Area Terdampak (PAT) yang tenggelam oleh luapan lumpur. Wilayah ini harus dikosongkan, sehingga penduduk di wilayah ini harus pindah tempat tinggal. Wilayah ini sekarang sudah tidak ada (hilang).
		Desa Siring (wilayah sebelah timur jalan raya Porong)	
		Desa Glagaharum (Dusun Risen)	
		Desa Jatirejo	
		Desa Mindi	
2.	Tanggulangin	Desa Kedungbendo	
		Desa Ketapang (wilayah bagian timur jalan raya Porong).	
		Gempolsari (wilayah bagian selatan sungai Porong)	
		Desa Kalitengah	
3.	Jabon	Desa Pejarakan	
		Desa Keboguyang	

Sumber: Data hasil penelitian 2012

Mengacu kepada Perpres Nomor 14 Tahun 2007 di atas, luas wilayah yang tenggelam oleh lumpur menurut laporan Ibnu Purna<sup>105</sup>, yakni luas wilayah yang masuk PAT tahun 2007 mencakup 641 Ha, dengan jumlah penduduk meliputi 13.237 Kepala Keluarga (KK) dan 39.947 jiwa<sup>106</sup>.

Mengacu kepada Perpres Nomor 48 Tahun 2008 di bawah, luas wilayah di luar Peta Area Terdampak yang dinyatakan sudah tidak layak huni lagi sebagai akibat dari luapan lumpur, menurut laporan Ibnu Purna meliputi 70 Ha, dengan jumlah penduduk meliputi 1.790 KK, dan 6.094 jiwa.

<sup>105</sup> Ibnu Purna adalah Wakil Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

<sup>106</sup> <http://www.setkab.go.id/artikel-4238-kasus-lumpur-lapindo-sejauh-mana-tanggung-jawab-pemerintah-dan-swasta.html>

**Tabel 2.4. Perubahan Wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulengin dan Jabon Dampak Semburan Lumpur Lapindo Berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2008**

No.	Kecamatan	Desa	Keterangan
1.	Jabon	Besuki	Menurut Perpres Nomor 48 Tahun 2008, wilayah ini ditetapkan sebagai wilayah yang terkena dampak sosial-kemasyarakatan luapan lumpur di luar PAT. Wilayah ini harus dikosongkan, sehingga penduduk di wilayah ini harus pindah tempat tinggal. Aset milik warga korban berupa tanah dan bangunan mendapat ganti-rugi dari pemerintah melalui dana APBN. Pemerintah melalui BPLS melakukan mekanisme jual-beli dengan cara di cicil sebagaimana halnya pada wilayah yang masuk PAT, yakni uang muka 20% dan sisanya 80% yang dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 tahun habis.
		Pejarakan	
		Kedungcangkring	

Sumber: Data hasil penelitian 2012

**Tabel 2.5. Perubahan Wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulengin dan Jabon Dampak Semburan Lumpur Lapindo Berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2009**

No.	Kecamatan	Desa	Keterangan
1.	Porong	Desa Siring Barat (Beberapa RT), yang meliputi: RT 1, RT 2, RT 3, RT 12 di wilayah RW 12.	Berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2009, wilayah ini ditetapkan sebagai wilayah yang terkena dampak luapan lumpur di luar PAT, berupa ablesan maupun semburan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak huni. Oleh karena itu wilayah ini harus dikosongkan.
		Desa Jatirejo, yang meliputi: RT 1 & RT 2 di wilayah RW 1.	
		Desa Mindi, yang meliputi: RT 10, RT 13, & RT 15 di wilayah RW 2.	

Sumber: Data hasil penelitian 2012

Mengacu kepada Perpres Nomor 40 Tahun 2009 tersebut, luas wilayah di luar Peta Area Terdampak yang dinyatakan sudah tidak layak huni lagi sebagai akibat dari luapan lumpur, menurut data laporan Tim Terpadu Kajian Penanganan Dampak Luapan Lumpur Sidoarjo adalah seluas 38,18 Ha. Sementara menurut laporan Ibnu Purna, bahwa pertimbangan sebagai daerah yang dianggap tidak layak huni didasarkan pada rekomendasi gubernur setempat dari hasil studi Tim Kajian Kelayakan Permukiman yang meliputi 9 RT dan 3 Desa, yaitu Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi serta mencakup 31 Ha, dengan jumlah penduduk meliputi 761 KK, dan 2.942 jiwa.

**Tabel 2.6. Perubahan Wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Dampak Semburan Lumpur Lapindo Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2012**

No.	Kecamatan	Desa	Keterangan
1.	Porong	Desa Pamotan: RT 07 di lingkup wilayah RW 02; RT 08, RT 09, dan RT 10 di lingkup wilayah RW 03; serta RT 11, RT 12, RT 13, dan RT 14 di lingkup wilayah RW 04.	Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2012, sesuai usulan hasil kajian Tim Terpadu, wilayah ini ditetapkan sebagai wilayah yang terkena dampak luapan lumpur di luar PAT. Wilayah ini dinyatakan sebagai wilayah yang sudah tidak layak huni, oleh karena itu harus dikosongkan.
		Kelurahan Gedang: RT 10 yang terletak di sebelah timur jalan kampung dan batas sebelah timur sungai di lingkup wilayah RW 03; RT 11 dan RT 12 di lingkup wilayah RW 04; serta RT 15, RT 16, dan sebagian RT 17 dengan batas sebelah timur Jalan Arteri Porong, sebelah barat, utara, dan selatan jalan pemukiman di lingkup wilayah RW 05.	
		Desa Glagaharum: Sehamparan sawah yang terletak di sebelah timur jalan alternatif Surabaya-Malang, sebelah barat sawah desa Renokenongo, Kecamatan Porong (wilayah Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007), sebelah utara tanggul, dan sebelah selatan jalan desa.	
		Desa Wunut: Sehamparan sawah dengan batas sebelah timur Sungai Ketapang, sebelah barat jalan relokasi Arteri Porong, sebelah utara bekas rel lori, dan sebelah selatan Desa Pamotan.	



Lanjutan Tabel 2.6.

		Kelurahan Mindi: RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07 di lingkup wilayah RW 01; RT 08, RT 09, RT 11, RT 12, dan RT 14 di lingkup wilayah RW 02; serta RT 16, RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, dan RT 21 di lingkup wilayah RW 03.	
2.	Tanggulangin	<p>Desa Ketapang: RT 02, RT 03, dan RT 04 di lingkup wilayah RW 01; RT 05, RT 06, dan RT 14 di lingkup wilayah RW 02; RT 08, RT 09, RT 10, dan RT 11 di lingkup wilayah RW 03; RT 12 dan RT 15 di lingkup wilayah RW 04; sehamparan sawah di bagian utara, dengan batas sebelah timur, barat, utara, dan selatan berupa jalan desa; serta sehamparan sawah di bagian selatan, dengan batas sebelah timur, barat, dan utara berupa jalan desa, dan sebelah selatan berupa jalan tolruas Surabaya-Malang.</p> <p>Desa Gempolsari: Sebagian RT 07 dan sebagian RT 08 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 02; sebagian RT 11, sebagian RT 12, dan sebagian RT 13 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 03; serta sebagian RT 14 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten, sebagian RT 15 yang terletak di sebelah barat jalan kabupaten, dan sebagian RT 16 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 04.</p> <p>Desa Kalitengah: Sebagian RT 05 yang terletak di sebelah selatan jalan desa di lingkup wilayah RW 02; serta sebagian RT 02, sebagian RT 03, sebagian RT 04, RT 05, dan RT 06, yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 03.</p>	
3.	Jabon	Desa Besuki: RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04 di lingkup wilayah RW 06; RT 05, RT 06, dan RT 07 di lingkup wilayah RW 07;	

Lanjutan Tabel 2.6.

		serta sehamparansawah dengan batas sebelah timur sawah DesaKeboguyang, Kecamatan Jabon, sebelah barattanggul, sebelah utara batas Desa Glagaharum,Kecamatan Porong, dan sebelah selatan KaliPorong.	
--	--	---	--

Sumber: Data hasil penelitian 2012

Mengacu kepada Perpes Nomor 37 Tahun 2012, tambahan luas wilayah yang dinyatakan sudah tidak layak huni lagi, menurut laporan Ibnu Purna yakni seluas 329 Ha, yang meliputi ratusan KK. Sementara untuk tambahan luas wilayah terdampak yang masuk ke dalam luar PAT menurut Perpes Nomor 33 tahun 2013 sekitar 120 hektar.

**Tabel 2.7. Luas Wilayah yang Harus Dikosongkan di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon Menurut Perpes**

No.	Dasar Pepres	Luas Wilayah (Ha)	Keterangan
1.	Perpres No.14/2007	641,00	Masuk wilayah dalam PAT yang tenggelam karena luapan lumpur. Menjadi tanggung jawab PT LBI.
2.	Perpres No. 48/2008	70,00	Masuk wilayah luar PAT sebagai wilayah yang terkena dampak sosial-kemasyarakatan. Menjadi tanggung jawab pemerintah.
3.	Perpres No. 40/2009	31,00	Masuk wilayah luar PAT sebagai wilayah yang terkena dampak luapan lumpur berupa ablesan maupun semburan gas berbahaya. Menjadi tanggung jawab pemerintah.
4.	Perpres No. 37/2012	329,00	Masuk wilayah luar PAT sebagai wilayah yang tidak layak huni. Menjadi tanggung jawab pemerintah.
5.	Perpres No. 33/2013	120,00	Masuk wilayah luar PAT sebagai wilayah yang tidak layak huni. Menjadi tanggung jawab pemerintah.
Jumlah		1.191,00	

Sumber: Data hasil penelitian 2012

Dengan demikian, secara keseluruhan gambaran luas wilayah di tiga kecamatan yang wilayahnya harus ditinggalkan (dikosongkan) karena dampak lumpur Lapindo, yakni di Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon baik wilayah yang termasuk di dalam PAT maupun di luar PAT, adalah sebagaimana pada tabel 2.7 di atas.

Berdasarkan data sebagaimana digambarkan pada tabel 2.7. tersebut, nampak bahwa luas wilayah terdampak bencana Lumpur Lapindo yang masuk ke dalam wilayah dalam PAT yang menjadi tanggung jawab pihak PT LBI adalah seluas 641 hektar. Sedangkan luas wilayah terdampak bencana Lumpur Lapindo yang masuk ke dalam wilayah luar PAT yang menjadi tanggung jawab pihak pemerintah adalah seluas 550 hektar<sup>107</sup>.

Bencana lumpur Lapindo selain menimbulkan dampak pada terjadinya perubahan wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon akibat hilangnya beberapa wilayah karena tenggelam lumpur atau tidak layak huni, juga telah menimbulkan perubahan pada berbagai aspek, seperti: ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut Akbar<sup>108</sup>, semburan lumpur Lapindo sejak 29 Mei 2006 yang hingga saat ini berlangsung, secara fisik telah menimbulkan kerusakan aset di areal sekitar pusat semburan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan wilayah regional lainnya. Aset yang rusak terdiri dari: (1) Tanah dan bangunan hunian penduduk; (2) Tanaman produktif, seperti tanaman padi, tebu, dan palawija; (3) Bangunan dan peralatan pabrik; dan (4) Infrastruktur, seperti jalan tol, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa gas, dsb. Semburan lumpur tersebut secara langsung dan tidak langsung telah berdampak kepada kehidupan masyarakat dan dunia usaha di wilayah genangan. Dampak secara langsung yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia usaha berupa kerusakan fisik aset tanah seperti hilangnya fungsi tanah, bangunan, infrastruktur, mesin, dan peralatan produksi serta ternak yang

---

<sup>107</sup> Sumber: hasil wawancara via sms dengan bapak Dwinanto, Humas BPLS, Rabu: 13 Mei 2015.

<sup>108</sup> Akbar, Ali Azhar. Op.cit. Halaman 22.

hilang. Di samping kerugian aset fisik, semburan lumpur juga berdampak langsung kepada hilangnya pendapatan yang terjadi oleh aktivitas ekonomi di daerah terkena dampak semburan. Tercatat sekitar 30 pabrik terpaksa menghentikan aktivitas produksinya akibat tergenang lumpur, sehingga harus merumahkan sekitar 1.873 para karyawannya. Keadaan seperti ini menyebabkan terjadinya banyak pengangguran<sup>109</sup>.

Selanjutnya menurut Kresnayana<sup>110</sup>, kerugian ekonomi akibat luapan lumpur setidaknya terbagi dalam dua, yakni *direct cost* atau kerugian langsung yang mencapai Rp 50 milyar per-hari, dan *indirect cost* atau kerugian tidak langsung Rp 500 milyar per-hari. Kerugian ini mayoritas akibat kendala transportasi yang hingga saat ini belum teratasi dengan baik. Meskipun saat ini sudah ada jalan arteri baru, tetapi seluruh kendaraan besar pengangkut barang tetap harus melalui Jalan Raya Porong yang memiliki faktor resiko keamanan dan kenyamanan cukup tinggi. Tidak hanya itu, Kereta Api hingga saat ini juga masih melalui jalur rel berisiko tinggi. Banyak perusahaan yang membatalkan rencana investasi di Jawa Timur akibat tragedi semburan lumpur Lapindo, misalnya ada sebuah perusahaan otomotif besar membatalkan rencana membangun pabrik di Pasuruan karena takut terkendala semburan lumpur Lapindo. Menurut Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dengan mengacu kepada hasil kajian dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, kerugian akibat bencana lumpur Lapindo mencapai Rp 33 Trilyun per-tahun<sup>111</sup>.

Menurut Batubara dan Utomo<sup>112</sup>, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007, sebanyak 3.562 buruh terkena PHK akibat sembilan perusahaan tutup dan sepuluh perusahaan lainnya melakukan pengurangan buruh.

---

<sup>109</sup> Baca: "Banjir Panas Lumpur Sidoarjo". [Http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir\\_lumpur\\_panas\\_Sidoarjo](http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo).

<sup>110</sup> Kresnayana adalah dosen Statistik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), lulusan Master dari Universitas Wisconsin, Madison, Amerika Serikat.

<sup>111</sup> Baca: "Lumpur Lapindo Terus Merongrong Jawa Timur". Tempo.Co. Edisi Selasa, 29 Mei 2012.

<sup>112</sup> Batubara, Bosman; & Utomo, Paring W. 2012. Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo. Yogyakarta: INSIST Press. Halaman 30.

Sementara 2.302 buruh korban lumpur panas masih terkatung-katung tanpa pekerjaan akibat 26 pabrik tempatnya bekerja terendam lumpur. Sementara menurut catatan Komnas Ham, Hak masyarakat untuk bekerja atau membuat pekerjaan baru juga lenyap terendam lumpur. Akibat sekitar 20 perusahaan terendam lumpur, sekitar 3.560 buruh kehilangan pekerjaan selama 2006. Nasib 2.300 buruh lainnya masih terkatung-katung hingga sekarang, yakni sekitar sembilan bulan setelah lumpur pertama kali menyembur.

Dalam bidang pendidikan, sedikitnya sekitar 33 sekolah terendam lumpur. Akibatnya, 5.397 siswa harus dimutasi ke sekolah lain atau belajar di sekolah darurat. Data lain menyatakan setidaknya 36 bangunan TK hingga SMA rusak<sup>113</sup>, belum termasuk gedung sekolah di tepi tanggul lumpur yang harus tutup atau pindah. Sekolah yang terkena lumpur Lapindo tersebar di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Sekolah swasta yang memiliki biaya biasanya pindah ke lokasi lain. Sedangkan sekolah negeri hanya dianggarkan dana APBD untuk perbaikan atau relokasi. Hasil inventarisasi Dinas PU Cipta Karya Sidoarjo, total kerugian atas bangunan sekolah negeri SD, SMP dan SMU di kawasan Porong yang terendam lumpur Lapindo mencapai Rp22,5 miliar<sup>114</sup>.

Menurut hasil kajian yang dilakukan Tjuk Kasturi Sukiadi<sup>115</sup>, kerugian akibat bencana lumpur Lapindo diperkirakan mencapai Rp 45 triliun pertahun, yang dipetakan menjadi tiga aspek, yakni kerugian ekonomi masyarakat, industri, serta infrastruktur. Kerugian ekonomi masyarakat berupa aset warga yang ditenggelamkan lumpur, yang mencapai Rp 8 Triliun, serta hilangnya potensi pendapatan warga yang mencapai Rp 250 miliar, akibat kehilangan lapangan pekerjaan. Aset warga terdiri dari 824 hektar lahan pertanian, serta rumah milik 10.430 kepala keluarga atau 38.627 jiwa. Lapangan pekerjaan yang hilang adalah di sektor formal, seperti buruh karena banyak pabrik yang tenggelam, serta sektor informal mulai dari toko peracangan, pedagang di pasar desa,

---

<sup>113</sup> <http://www.hi-techmall.org/pemkot/blog/lumpur-lapindo-terus-gerus-sekolah>

<sup>114</sup> <http://www.antaranews.com/view/?i=1165835991&c=NAS&s=>

<sup>115</sup> Tjuk Kasturi Sukiadi adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ailangga Surabaya.

warung, tukang ojek hingga tukang becak yang ada di Porong. Di sektor Industri, Tjuk menghitung kerugiannya mencapai Rp 700 miliar untuk total aset 28 pabrik, yang juga terendam lumpur. Juga hilangnya potensi pendapatan pabrik, yang pertahunnya diperkirakan sekitar Rp 280 miliar. Akibat lainnya, 2.935 karyawan, juga kehilangan mata pencaharian. Kerugian infrastruktur meliputi rusaknya jalan tol, jalan raya, jaringan pipa gas, jaringan listrik Jawa-Bali, rel kereta api, jaringan telepon, PDAM, jaringan irigasi, serta kantor-kantor publik, mulai dari sekolah hingga kantor desa, yang kerugiannya mencapai Rp 20 trilyun. Selain itu, 40 persen pergerakan ekonomi di Jawa Timur, ternyata melalui Porong, sehingga kerugian ini akan terus bertambah jika lumpur tidak segera tertangani. Sebelum bencana Lumpur Lapindo, pergerakan transportasi di Porong mencapai 60 persen dari total kendaraan keluar masuk Surabaya. Di jalan tol Porong misalnya, per-hari menampung pergerakan 60 ribu kendaraan niaga, serta 30 ribu kendaraan pribadi. Sedangkan jalan raya Porong, perhari dilalui sebanyak 30 ribu kendaraan.

Banjir lumpur mempengaruhi PDRB Jawa Timur, karena sekitar 48,6% perekonomian regional Jawa Timur mendapat kontribusi dari Surabaya, Sidoarjo-Banyuwangi, dan Malang Raya. Rusaknya infrastruktur jalan tol menghambat pergerakan aktivitas ekonomi. Ruas Porong jalan tol Surabaya-Gempol kilometer 37-40 atau 2,5 kilometer telah ditutup total sejak 22 November 2006. Pengalihan seluruh lalu lintas kendaraan ke jalan raya Porong menyebabkan kemacetan berkepanjangan<sup>116</sup>. Terganggunya infrastruktur jalur transportasi utama itu juga berakibat pada inefisiensi distribusi barang di Jawa Timur, Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu, jika luapan lumpur ini tidak dapat dihentikan, dampaknya akan mengancam setidaknya 647,65 hektar sawah, dan 7.000 hektar areal tambak<sup>117</sup>.

Menurut Peneliti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), paling tidak terdapat 18 hak yang dihilangkan pengusaha pengebor Lapindo terhadap pemilik tanah yang terkena semburan lumpur.

---

<sup>116</sup> Dewan Riset Daerah Jawa Timur. 2011. Agenda Riset Daerah Provinsi Jawa Timur 2011-2014. Hal 431.

<sup>117</sup> Ibid. Hal. 432.

Ke-18 hak tersebut antara lain meliputi: hak informasi, hak rasa aman, hak mengembangkan diri, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak-hak pekerja, hak berkeluarga, hak atas kesejahteraan, hak jaminan sosial, hak-hak pengungsi, hak penyandang cacat, hak untuk orang berusia lanjut dan hak untuk anak dan perempuan<sup>118</sup>.

Sektor industri pengolahan di Jawa Timur yang menopang sekitar 30% PDRB juga ikut terpukul, aset 28 pabrik, meliputi industri furniture, plastik, hasil bumi, dan lainnya, yang mempekerjakan 2.935 karyawan, ikut terendam lumpur, dengan kerugian sekitar Rp 700 milyar. Potensi hilangnya pendapatan pabrik per-tahunnya mencapai Rp 280 milyar. Beberapa industri yang juga melakukan ekspor terpaksa tidak bisa memenuhi kontrak ekspornya. Implikasi langsung juga menerpa sektor industri pengolahan di Sidoarjo, khususnya industri di sekitar Porong, yang menyumbang 43% industri pengolahan di Sidoarjo.

Kerugian tersebut di atas merupakan kerugian material yang dapat dihitung secara langsung dari kehilangan dan kerusakan aset fisik maupun sarana-prasarana fisik milik masyarakat, swasta, maupun milik pemerintah. Kerugian material tersebut memicu dampak non-fisik terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian yang mempunyai nilai tidak kalah besar dengan kerugian materi, yaitu kerugian sosial-budaya, serta kerugian psikologi dan kesehatan masyarakat. Dampak non-fisik ini belum menjadi perhatian utama pihak yang bertanggungjawab, yang seharusnya juga memberikan ganti-rugi kepada masyarakat yang menjadi korban terkena dampak kerusakan, sosial-budaya, psikologi dan kesehatan.

#### **D. Pembagian Wilayah Peta Area Terdampak Bencana Lumpur Lapindo: Dalam PAT dan Luar PAT**

Wilayah terdampak bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo dibagi kedalam dua kategori wilayah terdampak, yakni wilayah dalam

---

<sup>118</sup> <http://www.neraca.co.id/2012/05/28/selain-harta-korban-lapindo-kehilangan-banyak-hak/>

PAT dan wilayah luar PAT. Luas wilayah terdampak bencana Lumpur Lapindo yang masuk wilayah dalam PAT meliputi sekitar 641 hektar, sementara luas wilayah terdampak yang masuk wilayah luar PAT sekitar 550 hektar.

Penentuan wilayah yang masuk dalam PAT didasarkan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2007. Menurut Perpres Nomor 14 tahun 2007 tersebut bahwa dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah. Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam Peta Area Terdampak meliputi 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis. Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas. Sedangkan biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Selanjutnya penentuan wilayah yang masuk luar PAT didasarkan atas beberapa Peraturan Presiden (Perpres), yakni: Perpres Nomor 48 tahun 2008, Perpres Nomor 40 tahun 2009, Perpres Nomor 68 tahun 2011, Perpres Nomor 37 tahun 2012, dan Perpres Nomor 33 tahun 2013. Intinya adalah bahwa biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak (PAT) dibebankan pada APBN. Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah. Proses jual beli ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Sidoarjo (BPLS) atas nama pemerintah.

Hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa relasi antara korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI dan pihak



pemerintah adalah diatur melalui skema relasi jual-beli. Artinya pihak warga korban bencana Lumpur Lapindo diposisikan sebagai pihak penjual aset tanah dan bangunan yang hancur tenggelam atau karena tidak layak huni. Sedangkan pihak PT LBI dan pihak pemerintah diposisikan sebagai pihak pembeli aset tanah dan bangunan. Dalam proses jual-beli tersebut pihak PT LBI dan pemerintah mensyaratkan bukti kepemilikan atas aset tanah dan bangunan milik warga korban agar bisa dilakukan pembayaran.

Menurut penjelasan Humas BPLS, dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak PT LBI sebesar Rp 3,03 Triliun, sedangkan untuk dana APBN sebesar Rp 2,8 Triliun<sup>119</sup>. Namun menurut sumber lain, sejak 2006 pemerintah telah menggelontorkan total dana sekitar Rp 7,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk menyelesaikan masalah bencana lumpur Sidoarjo korban. Dana tersebut digunakan, antara lain, sebagai kompensasi atas kehilangan harta benda dan kehilangan pendapatan masyarakat yang menjadi korban bencana. Dana APBN sekitar Rp 7,6 triliun tersebut dirinci sebagai berikut: APBN tahun 2007 sebesar Rp 113,9 Miliar, APBN tahun 2008 sebesar Rp 1,1 Triliun, APBN tahun 2009 sebesar Rp 592,1 Miliar, APBN tahun 2010 sebesar Rp 1,2 Triliun, APBN tahun 2011 sebesar Rp 1,3 Triliun; APBN tahun 2012 sebesar Rp 1 Triliun, dan APBN tahun 2013 sebesar Rp 2,2 Triliun<sup>120</sup>.

Dalam perkembangan selanjutnya, proses pembayaran jual beli untuk wilayah luar PAT yang menjadi tanggung jawab pemerintah berjalan dengan lancar. Hal ini berbeda dengan proses pembayaran jual beli untuk wilayah dalam PAT yang menjadi tanggung jawab pihak PT LBI yang mengalami kemacetan karena masalah keuangan. Kondisi ini menyebabkan munculnya perasaan sebagai bentuk ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kepada warga korban bencana Lumpur Lapindo terutama yang masuk wilayah dalam PAT.

---

<sup>119</sup> Wawancara via sms dengan Humas BPLS, Dwinanto, Rabu: 13 Mei 2015.

<sup>120</sup> <http://katadata.co.id/infografik/2014/12/09/duit-negara-disedot-lapindo>. Diakses: Rabu, 13 Mei 2015.

## **E. Bencana Lumpur Lapindo Sebagai Arena Produksi Ketidakadilan**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bencana<sup>121</sup> semburan Lumpur Lapindo (Lula) di Sidoarjo telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, khususnya masyarakat di sekitar Kecamatan Porong, dan sekitarnya. Bencana semburan lumpur Lapindo telah menimbulkan dampak pada bidang ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya.

Selain merasakan dampak ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya tersebut, warga korban lumpur Lapindo juga merasakan adanya ketidakadilan<sup>122</sup>. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh warga korban dalam bencana lumpur Lapindo. Dengan kata lain, bencana semburan lumpur Lapindo telah menjadi arena reproduksi ketidakadilan khususnya yang dilakukan oleh korporasi (PT LBI) dan negara (pemerintah) terhadap warga korban lumpur Lapindo.

Sebagaimana dinyatakan oleh M. Masrukh<sup>123</sup>, bahwa warga korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo sudah diperlakukan tidak adil, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak PT LBI. Penderitaan yang dirasakan oleh warga masyarakat Porong dan sekitarnya yang menjadi korban bencana semburan Lumpur Lapindo merupakan salah satu bukti dari bentuk adanya ketidakadilan. Kutipan hasil wawancara dengan M. Masrukh sebagai berikut:

---

<sup>121</sup> Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lihat: UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>122</sup> Istilah ketidakadilan sebagai lawan dari keadilan, dimana keadilan selalu dikaitkan dengan konsep ketidakberpihakan dan kesetaraan (*equality*). *Justice* (keadilan) sebagai konsep dasar teori etika dan filsafat politik, keadilan dikaitkan dengan konsep ekuitas (ketidakberpihakan) dan kesetaraan (*equality*), terutama dengan perintah untuk memperlakukan sesama dengan setara. Dari zaman Aristoteles (384-322 SM), adalah konvensional untuk membedakan antara: (1) keadilan distributif, yang berkaitan dengan pertanyaan tentang siapa mendapatkan apa, dan (2) keadilan kumulatif, yang berkaitan dengan cara memperlakukan individu dalam transaksi sosial.

<sup>123</sup> M. Masrukh adalah korban bencana lumpur Lapindo dan merupakan tokoh muda masyarakat Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, juga sebagai pimpinan Panti Asuhan "Nurul Azhar".

*"...Apakah warga korban merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dan korporasi? Dalam hal ini pasti, karena kalau kita ngomong adil..itu pasti warga masyarakat disini tidak akan menderita seperti ini, walaupun namanya diganti, ini penggantian ini tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka rasakan, warga disini sudah bercerai berai...jadi kalau dilihat ini warga yang ada di satu desa saja sdh tidak terkoordinir sekarang itu ada dimana, apakah ini memang dilakukan seperti itu supaya gerakan-gerakan masyarakat disini menjadi lemah sehingga tidak terkoordinir dan itu bisa diombang-ambingkan..."<sup>124</sup>*

Menurut penjelasan Paring Waluyo Utomo<sup>125</sup>, dalam dimensi korban lumpur Lapindo ketidakadilan yang dirasakan adalah berkaitan dengan belum dipenuhinya hak-hak warga sebagai korban bencana Lumpur Lapindo, terutama hak-hak yang terkait dengan persoalan pembayaran ganti rugi. Dalam kondisi yang sangat terpaksa, maka korban bencana Lumpur Lapindo hanya bisa berharap bahwa yang penting adalah bagaimana pemerintah dan PT LBI bisa membayar lunas atas ganti rugi aset tanah dan bangunan dengan segera. Ketidaktegasan dan kelambanan negara dalam membela hak-hak warga negara sebagai korban bencana memperkuat dimensi rasa ketidakadilan. Kutipan pernyataan Paring Waluyo sebagai berikut:

*"...Konsep ketidakadilan seperti apa? tetapi saya kira faktor mendasarnya adalah soal kebijakan. tentu ini masalah yang dimensinya struktural, dimana konsepsi seperti ini dipahami beragam oleh para korban Lapindo yang terkelompok-kelompokan atau dikelompok-kelompokkan. Namun kalau kita mencerna dari bahasa awam dari korban tentu ketidakadilan itu adalah belum dipenuhinya hak-hak mereka, mereka belum dibayar secara tuntas. Meskipun dibayar tuntas itu juga belum memenuhi rasa keadilan yang sepenuh-penuhnya. Di tengah kelambanan dan*

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan M. Masrukh, 35 tahun, warga korban lumpur Lapindo & tokoh muda masyarakat Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Pimpinan Panti Asuhan "Nurul Azhar", Senin, tanggal 12 Maret 2012.

<sup>125</sup> Paring Waluyo Utomo adalah aktivis pendamping korban bencana lumpur Lapindo.

*ketidaktegasan negara dalam membela korban, derajat rasa dimensi keadilan dari hari ke hari dari pihak korban semakin turun derajatnya, yaaa..akhirnya mereka hanya berkata: ya.. pokoknya bisa sekedar lunas...".<sup>126</sup>*

Dalam konteks bencana lumpur Lapindo, terdapat beberapa hal yang dirasakan oleh warga korban bencana sebagai bentuk ketidakadilan. Bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo bukan hanya terkait dengan persoalan ganti rugi atas aset tanah dan bangunan saja, melainkan lebih luas dari itu, yakni menyangkut berbagai dimensi. Hal-hal yang dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*; Bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh warga korban Lumpur lapindo terkait dengan persoalan kontroversi tentang masalah perijinan pengeboran. Masyarakat di sekitar Porong, khususnya masyarakat Desa Renokenongo<sup>127</sup>, melihat adanya proses yang tidak transparan dalam proyek pemboran yang dilakukan oleh PT LBI. Semula pihak PT LBI menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembelian tanah warga oleh PT LBI diperuntukkan bagi pengembangan kawasan peternakan ayam, bukan untuk lokasi pengeboran minyak dan gas (Migas)<sup>128</sup>. Dalam hal ini Sunarto<sup>129</sup> menyatakan bahwa masyarakat merasa sudah dikelabui oleh pihak PT LBI karena tidak adanya transparansi dalam peruntukkan pembelian tanah; *"Kita tahunya memang untuk peternakan"*, demikian ditegaskan Snt. Masyarakat semula diberitahu bahwa pembelian tanah tersebut memang untuk kawasan peternakan. Kutipan pernyataan wawancara dengan Sunarto sebagai berikut:

*"Iya..jadi memang ini mestinya bisa diambil hikmah oleh peimpin-pemimpin kita ini, agar sesuatu itu perlu ada*

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara via email dengan Paring Waluyo Utomo. Senin, tanggal 5 Nopember 2012.

<sup>127</sup> Desa Renokenongo merupakan pusat semburan lumpur panas Lapindo.

<sup>128</sup> Lihat Prasetya, Heru; & Batubara, Boman (eds.). 2010. Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil. Yogyakarta: DESANTARA. Hal.42.

<sup>129</sup> Snt adalah korban lumpur Lapindo asal Desa Renokenonongo yang juga sebagai Koordinator Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekoontrak).

*kajian-kajian, artinya kajian-kajian yang mendalam tidak gegabah tidak asal menghasilkan uang demi kepentingan pribadi dan sesaat, kami melihat memang dari awalnya pembebasan tanah itu sudah tidak transparan, ada yang mengatakan bahwa beli tanah itu untuk peternakan, untuk macam-macam, apa untuk mengelabui masyarakat, apa ini teknis mereka, mestinya menurut saya ya harus transparan saja biar masyarakat juga tahu, apa itu ditolak apa tidak itu kan urusan belakang, yang penting masyarakat harus transparan, sehingga kalau tidak transparan masyarakat juga tiba-tiba tahu kalau itu untuk pengeboran yang mestinya harganya harus mahal, ternyata kalau untuk peternakan kan bisa murah, ini awal dari proses pembelian tanah, mestinya itu di Siring yang harus dibebaskan karena Siring itu masyarakatnya tanggap masyarakatnya dikumpulkan waktu itu dibalai desa, ternyata harga tawar-menawar sehingga Lapindo tidak mau, terus bergeser ke Renokenongo, Renokenongo tanpa dikumpulkan langsung ada transaksi system gerilya. Yaa..itulah ada mungkin ya satu dua orang yang hatinya kurang rela sehingga bisa menimbulkan ini, dan memang seumpama transparan mungkin masyarakat tidak mau, banyak yang menolak".<sup>130</sup>*

Dengan demikian, reproduksi ketidakadilan yang pertama adalah persoalan transparansi ijin dan peruntukkan pembelian tanah (lahan) warga oleh PT LBI. Pihak PT LBI menggunakan tanah (lahan) tersebut untuk pengeboran (eksplorasi) pertambangan Migas, sementara warga mengetahuinya untuk pengembangan peternakan ayam.

Menurut Batubara dan Utomo<sup>131</sup>, berdasarkan penjelasan dari salah seorang warga korban lumpur Lapindo yang juga pemilik tanah di lokasi sumur pengeboran Banjarpanji-1 di desa Renokenongo yang bernama Mochamad Zainul Arifin atau dikenal dengan panggilan Cak Mat, menyatakan bahwa sejak awal telah terjadi proses yang tidak transparan dalam proyek pengeboran

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan bapak Snt, hari Senin tanggal 4 Juni 2012.

<sup>131</sup> Prasetyo, Heru; & Batubara, Bosman (eds.). 2010. Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil. Yogyakarta: Desantara & Lafadl Initiative. Hal. 41.

yang dilakukan oleh PT LBI. Ketidak-transparanan terjadi sejak dari awal pembelian tanah sampai pada informasi yang diterima oleh warga pada saat semburan lumpur terjadi tanggal 29 Mei 2006.

Saat transaksi jual beli, kebanyakan warga tidak mengetahui bahwa sawah mereka akan dibeli oleh PT LBI, karena proses jual-beli diwakili oleh Kepala Desa Renokenongo, yakni Mahmudatul Fatchiyah. Ketika itu para pemilik sawah yang kebanyakan dari warga RT 18, 19, dan 20, Desa Renokenongo tidak mengetahui persis siapa sesungguhnya pihak yang membeli tanah mereka. Warga percaya kepada keterangan Kepala Desa Renokenongo bahwa tanah warga dibeli untuk keperluan peternakan ayam<sup>132</sup>. Setelah transaksi jual beli terjadi, lokasi itu kemudian ditutup dengan seng, hingga warga tidak diketahui apa yang dikerjakan di dalam pagar seng tersebut. Beberapa orang warga baru menyadari bahwa lokasi tersebut digunakan untuk pemboran setelah mendengar suara besi dipukul berulang-ulang<sup>133</sup>.

*Kedua*; Ketidakadilan yang terkait dengan inkonsistensi pelaksanaan kebijakan penggunaan peruntukkan Tata Ruang. Sebagaimana sudah disinggung pada Bab II bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2012, bahwa peruntukkan wilayah Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon diprioritaskan hanya untuk kawasan pemukiman, pertanian dan industri, bukan untuk kawasan eksploitasi minyak dan gas (pertambangan). Kemudian Perda Nomor 16 Tahun 2003 diperbaharui lagi dan terbit Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029, dimana dicantumkan bahwa wilayah Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan sebagian Kecamatan Tanggulangin, bersama dengan Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Krembung adalah termasuk ke dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) III, dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, konservasi geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dengan pusat

---

<sup>132</sup> Ibid. Hal. 42-43

<sup>133</sup> Ibid. Hal 43

pertumbuhan berada di kawasan Krembung. Sejalan dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2003, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Jawa Timur 2005-2020 yang juga menyatakan antara lain bahwa kawasan Sidoarjo, khususnya wilayah Kecamatan Porong diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertanian, dan industri.

Dengan demikian, secara formal, pengembangan kawasan di wilayah Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon sudah jelas bahwa di wilayah tersebut diarahkan untuk kawasan pemukiman, pertanian dan industri. Namun secara faktual, kawasan tersebut telah menjadi kawasan eksplorasi migas. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan BP Migas memberikan hak pengelolaan kawasan Brantas sebagai ladang eskplorasi Migas. Kondisi ini tentu menimbulkan kerancuan antara regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Batubara & Waluyo, 2012:149). Dengan demikian, telah terjadi inkonsistensi fungsi peruntukkan wilayah kawasan Porong dan sekitarnya, dari fungsi utama sebagai kawasan pemukiman, pertanian, dan idustri menjadi kawasan eksplorasi Migas. Atas terjadinya perubahan fungsi kawasan inilah yang kemudian menyebabkan munculnya bencana luapan lumpur Lapindo di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya.

Menurut Masrukh<sup>134</sup>, pihak PT LBI dan pemerintah yang dalam hal ini BP Migas dianggap telah melakukan pelanggaran besar karena telah melakukan eksplorasi (pengeboran) Migas di tengah-tengah pemukiman warga. Kutipan wawancara dengan Masrukh sebagai berikut:

*"Iyaa...apapun itu entahlah itu Lapindo ataupun pihak terkait dalam hal ini..mesti corporate ini punya ijin, ijin nya dari mana? Ya pemerintah saat itu, berarti berurusan sama.. karena ini dipake tambang berarti urusannya dengan pemerintah yang menangani masalah tambang...padahal kalau menurut aturan penambangan kan tidak boleh di*

---

<sup>134</sup> M. Masrukh, 38 tahun, adalah korban lumpur Lapindo, yang merupakan tokoh muda masyarakat desa Siring, Kecamatan Porong dan Pimpinan Panti Asuhan "Nurul Azhar".

*wilayah atau di pertengahan perkampungan pemukiman, ini tidak hanya...bukan hanya ngomong satu kila tapi meter dari pemukiman warga..ini sudah merupakan kejahatan besar...pelanggaran besar..ini harus dicatat bahwa ini pelanggaran maka itu pasti yang bertanggung jawab dua hal, yaitu corporate itu sendiri karena melakukan pengeboran di tengah warga; yang kedua pemerintah masalah ijin, kenapa ijin itu bisa ke luar di wilayah pemukiman".<sup>135</sup>*

Dengan demikian, reproduksi ketidakadilan kedua dalam konteks bencana semburan Lumpur lapindo adalah berupa pelanggaran atas aturan aktivitas eksplorasi (pengeboran) Migas yang dilakukan di tengah-tengah pemukiman warga.

PT LBI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, juga telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 3 dan 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Mengacu kepada Pasal 3, disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dengan: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Sementara apabila mengacu kepada pasal 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa antara lain: (a) Ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Ijin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum; (c) Ijin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan bapak Masrukh, hari Senin, tanggal 12 Maret 2012.



dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; (d) Ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak; dan (e) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan ijin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam konteks lumpur Lapindo, pemerintah daerah bukannya kemudian mencabut ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RUTR Kabupaten Sidoarjo, tapi malahan membiarkan dan bahkan mendukungnya.

Selain pelanggaran terhadap Tata Ruang, PT LBI juga telah melanggar pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi: "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Sementara, Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan"<sup>136</sup>.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pada pasal 1 ayat (2) disebutkan tentang pengertian dampak besar dan penting, yakni: "Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan", yang meliputi: (a) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; (b) eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui; (c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam

---

<sup>136</sup> Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dalam pemanfaatannya; (d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; (e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; (f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik; (g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati; (h) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; dan (i) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara. Sementara pada pasal 5, disebutkan bahwa kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain: (a) jumlah manusia yang akan terkena dampak; (b) luas wilayah persebaran dampak; (c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; (d) banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak; (e) sifat kumulatif dampak; dan (f) berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Menurut Akbar<sup>137</sup>, apabila dicermati dari pasal-pasal yang ada dalam PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tersebut, maka diduga terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PT LBI, sesuai pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang".

*Ketiga*; Bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh warga korban lumpur lapindo yang terkait dengan faktor penyebab terjadinya semburan lumpur. Warga korban menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya bencana semburan lumpur panas di wilayah Porong dan sekitarnya adalah karena faktor kesalahan manusia (*human error*). Menurut Akbar<sup>138</sup>, semburan lumpur panas yang terjadi di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, pada tanggal

---

<sup>137</sup> Akbar, Ali Azhar. Op.cit. Halaman 150.

<sup>138</sup> Ibid. Hal 123.

29 Mei 2009 diduga akibat kegiatan eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi sumur Banjar Panji-1 di blok Brantas yang dioperasikan oleh PT LBI. Dugaan kelalaian prosedur dalam kegiatan tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam.

Sementara itu, pihak pemerintah dan pihak PT LBI menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya bencana semburan lumpur panas tersebut adalah karena faktor alam. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 27 November 2007, yang isinya menolak gugatan YLBHI, menyatakan bahwa pemerintah dan PT LBI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada tanggal 13 Juni 2008, yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2007, bahwa adanya kejadian semburan lumpur di Sidoarjo karena kecenderungan gejala alam lebih dominan, bukan sebagai kesalahan manusia. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), tanggal 3 April 2009, yang isinya menolak permohonan Kasasi YLBHI, menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo merupakan fenomena alam dan bukan kesalahan industri dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Sebagaimana sudah disinggung bahwa bencana Lumpur Lapindo adalah bencana yang sangat kompleks kalau dilihat dari geneologi terjadinya bencana. Perdebatan teoritis melibatkan ahli dari seluruh penjuru dunia. Umumnya pendapat para ahli terbelah menjadi dua kubu, yaitu kalangan yang berpendapat bahwa bencana ini disebabkan oleh aktivitas pengeboran pada sumur eksplorasi gas Banjar Panji-1 (BJP-1) milik PT LBI dan kalangan yang berpendapat bahwa bencana lumpur disebabkan oleh reaktivasi patahan regional *Watukosek* akibat adanya gempa bumi Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006, 2 hari sebelum bencana semburan lumpur Lapindo terjadi. Namun dalam "*AAPG 2008 International Conference & Exhibition*", pandangan para ahli geologi dunia tentang penyebab terjadinya semburan lumpur terbagi menjadi empat kelompok, yakni: Pertama, sebanyak tiga ahli dari Indonesia mendukung gempa Yogya sebagai penyebabnya; Kedua, sebanyak 42 ahli dunia menyatakan aktivitas pemboran PT LBI sebagai

penyebabnya; Ketiga, sebanyak 13 ahli yang menyatakan kombinasi gempa dan pemboran sebagai sumber penyebabnya; dan Keempat, ada 16 ahli yang menyatakan belum bisa menentukan pendapatnya. Sementara laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 29 Mei 2007 menemukan bahwa terdapat kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pengeboran oleh PT LBI.

Menurut AJ<sup>139</sup>, penetapan semburan lumpur panas di Porong sebagai bencana alam adalah merupakan strategi supaya ada pengalihan tanggung jawab dari PT LBI kepada pihak pemerintah. Kutipan wawancara dengan Akhmadi Jauhari sebagai berikut:

*"...Sebenarnya orang sudah secara apa ya..secara umum orang sudah menyebut, karena perusahaan yang mengeksplorasinya adalah perusahaan Lapindo Brantas, orang lebih familiar mengatakan ini lumpur lapindo, sebenarnya itu secara tidak langsung lumpur yang diciptakan yang diakibatkan oleh eksplorasi PT. Lapindo Brantas, dan Pemerintah rupanya lebih mengarahkan, lebih bias lagi menjadi lumpur Sidoarjo supaya ini..a..tidak terfokus pada perusahaan Lapindo-nya.*

*...Betul, konsekuensi tanggung jawab, sebab tidak hanya tanggung jawab moral tapi sosial juga, karena memang ini adalah penanganan yang memang semestinya lapindo itu adalah yang paling bertanggung jawab setiap permasalahan sebelum di take over atau di anu oleh pemerintah..."*<sup>140</sup>

Dengan demikian, reproduksi ketidakadilan ketiga dalam konteks semburan lumpur lapindo adalah penetapan bahwa faktor penyebab terjadinya semburan lumpur panas di wilayah Porong dan sekitarnya adalah faktor alam, sehingga disebut sebagai bencana alam. Hal ini menafikan faktor kesalahan manusia (*human error*) sebagai penyebab terjadinya bencana semburan lumpur. Penetapan semburan lumpur sebagai bencana alam mengakibatkan terjadinya reduksi tanggung jawab pihak PT LBI dalam penanganan dampak bencana, terutama dampak kesehatan, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

---

<sup>139</sup> Akhmadi Jauhari adalah Koordinator Aliansi Korban Lumpur 4 Desa.

<sup>140</sup> Wawancara dengan bapak AJ, hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012.

*Keempat*; Bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo terkait dengan penyebutan istilah. Warga masyarakat menyebutnya dengan istilah bencana Lumpur Lapindo (Lula), sementara pihak pemerintah dan PT LBI menyebutnya dengan istilah bencana Lumpur Sidoarjo (Lusi). Masyarakat korban bencana semburan lumpur menyebut bencana Lumpur Lapindo (Lula) karena menganggap bahwa sumber dari terjadinya bencana semburan lumpur tersebut adalah karena ulah dari PT LBI yang melakukan eksplorasi Migas. Istilah Lumpur Sidoarjo (Lusi) menunjukkan kesan bahwa pihak PT LBI tidak bersalah atas terjadinya bencana semburan lumpur yang menyebabkan penderitaan bagi warga masyarakat di Kecamatan Porong dan sekitarnya.

Ketika salah satu media televisi swasta, yakni TVOne, menyiarkan berita yang menyebut istilah "Lumpur Sidoarjo", masyarakat Porong, Sidoarjo, dan sekitarnya yang menjadi korban bencana semburan lumpur panas merasa keberatan dan menuduh pihak TVOne telah mempolitisir istilah "Lumpur Lapindo" menjadi "Lumpur Sidoarjo". Namun juru bicara TVOne, Totok Suryono, menyatakan kantornya tidak pernah mempolitisir penyebutan bencana "Lumpur Lapindo" menjadi "Lumpur Sidoarjo". *"Di seluruh dunia, penyebutan suatu bencana memang dikorelasikan dengan tempat terjadinya bencana,"* kata Totok. Selanjutnya Totok mencontohkan bencana nuklir di Bhopal, India, yang disebutkan sesuai nama lokasi bencana, "Tragedi Bhopal". *"Begitu pula dengan Lumpur Sidoarjo,"* ujarnya. Menurut dia, penyebutan Lumpur Sidoarjo juga disebut Lumpur Porong. Namun karena tempatnya lebih dikenal sebagai bagian daerah Sidoarjo, penyebutannya menjadi "Lumpur Sidoarjo". Penyebutan Lumpur Sidoarjo murni dilakukan karena lokasi bencana tersebut ada di Sidoarjo<sup>141</sup>.

Ada dua alasan mengapa PT LBI harus bertanggung jawab, yakni: Pertama, kegagalan teknologi yang berakibat gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat berupa kerugian harta benda, dampak psikologis, bahkan sampai menimbulkan

---

<sup>141</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/27/090373958/TVOne-Bantah-Selewengkan-Nama-Lumpur-Lapindo>.

korban jiwa manusia, yang berarti mengakibatkan masyarakat kehilangan sumber kehidupan, tempat tinggal, korban jiwa, dan sebagainya, merupakan pelanggaran hak yang dijamin oleh undang-undang; Kedua, sudah menjadi kewajiban setiap lembaga usaha untuk melakukan tindakan kehati-hatian, sehingga tindakannya tidak memicu terjadinya bencana. Selain itu, dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan minyak dan gas bumi, kontraktor wajib melakukan konservasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik, dan memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan. Karena itu, jika berbagai persyaratan teknik tersebut tidak terpenuhi, maka perusahaan tersebut telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan bencana<sup>142</sup>.

*Kelima*; Bentuk ketidakadilan yang dirasakan warga korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, khususnya warga korban yang ada di sekitar pusat semburan Lumpur Lapindo, yang wilayahnya masuk ke dalam PAT, yakni yang ada di wilayah Desa Renokenongo, Siring, Glagaharum, Jatierjo (Kecamatan Porong), Desa Kedungbendo, Ketapang, Gempolsari, Kalitengah (Kecamatan Tanggulangin), dan Kalitengah, Pejarakan, dan Desa Keboguyang (Kecamatan Jabon), adalah berkaitan dengan pembagian tanggungjawab proses pembayaran ganti rugi. Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007, disebutkan bahwa warga korban yang masuk wilayah dalam PAT maka proses penyelesaian ganti ruginya menjadi tanggungjawab PT LBI, sementara warga korban yang masuk wilayah luar PAT proses penyelesaian ganti ruginya menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dana APBN. Dalam perjalanan selanjutnya, proses ganti rugi di wilayah dalam PAT tidak berjalan dengan lancar, bahkan hingga tahun 2012 PT LBI belum menyelesaikan proses ganti rugi secara tuntas. Sementara bagi warga korban yang ada di luar wilayah PAT, yang proses ganti ruginya menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dana APBN, pelaksanaan pembayaran ganti rugi relatif berjalan dengan lancar. Kondisi ini dianggap oleh warga korban yang masuk wilayah dalam PAT sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dari pemerintah terhadap warga negara.

---

<sup>142</sup> Akbar, Ali Azhar.*opcit.* Hal. 160.

*Keenam*; Bentuk ketidakadilan keenam yang dirasakan oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo yang terkait dengan perlakuan terhadap warga yang terkena dampak semburan lumpur, yakni bahwa mereka menjadi masyarakat korban bencana alam. Sebagai korban bencana alam, warga terpaksa harus pindah meninggalkan tempat tinggalnya dengan hanya mendapatkan uang jatah hidup selama tiga bulan, uang pindah rumah, uang kontrak rumah sementara selama dua tahun, dan pembayaran ganti rugi atas tanah dan bangunan yang dibayar secara angsuran. Sementara hak-hak lainnya sebagai warga negara tidak mendapatkan jaminan.

Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia, mencatat bahwa bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban<sup>143</sup>. Hak-hak yang terlanggar antara lain: (1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945; (2) Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana dijamin Pasal 28-D Ayat (2) UUD 1945; (3) Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimana dijamin Pasal 27-A UUD 1945; (4) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, seperti dijamin Pasal 28-G Ayat (1) UUD 1945; (5) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat layanan kesehatan, sebagaimana dijamin Pasal 28-H Ayat (1) UUD 1945; (6) Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar; hak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia, seperti dijamin Pasal 28-C UUD 1945; dan (7) Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

---

<sup>143</sup> <http://kompas.com/kompas-cetak/0701/23/opini/3206257.htm>

berkembang, sebagaimana dijamin Pasal 28-B Ayat (2) UUD 1945. Pasal 28-I UUD 1945 mengamanatkan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

*Ketujuh;* Bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh warga korban lumpur lapindo yang terkait peran pemerintah yang lebih pro-kapitalis (pro-pengusaha) daripada pro-rakyat (warga korban). Sikap pemerintah dianggap “lunak” terhadap pihak PT LBI. Seperti dinyatakan oleh Masruk<sup>144</sup>, bahwa pemerintah telah melakukan kejahatan besar karena memberikan ijin kepada PT LBI untuk melakukan eksplorasi migas di tengah-tengah pemukiman padat warga yang seharusnya tidak boleh.

Menurut Chalid Muhammad<sup>145</sup>, negara dianggap takluk kepada kekuatan korporasi karena tidak berani membongkar peristiwa semburan lumpur PT LBI. Senada dengan Chalid, Riza Damanik<sup>146</sup> juga menyatakan bahwa pemerintah tidak berdaya menekan PT LBI untuk bertanggung jawab atas semburan lumpur di ladang gasnya, bahkan negara dianggap telah gagal memainkan perannya. Sementara itu Puspa Dewy<sup>147</sup> berpandangan bahwa pemerintah juga dinilai tidak serius menangani korban perempuan yang rentan terhadap pelecehan seksual dan kriminalisasi, peristiwa lumpur Lapindo telah menambah beban hidup perempuan<sup>148</sup>.

Sukiadi<sup>149</sup> menyatakan bahwa kasus Lumpur Lapindo adalah praktek kasat mata Korporatokrasi<sup>150</sup> sebagai akibat rusaknya sistem

---

<sup>144</sup> Masruk, *opcit.*

<sup>145</sup> Chalid Muhammad adalah Ketua Institut Hijau Indonesia, Lembaga ini merupakan lembaga yang bergerak untuk menegakkan perlawanan terhadap dehumanisasi dan penegakan keadilan di masyarakat utamanya dalam bidang sosio-ekologis.

<sup>146</sup> Riza Damanik adalah Sekretaris Jenderal KIARA, yakni Organisasi Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo.

<sup>147</sup> Puspa Dewy adalah Staf Divisi Perempuan dan Konflik Sumberdaya Alam Solidaritas Perempuan.

<sup>148</sup> Lihat: <http://www.tempo.co/read/fokus/2010/05/29/1313/Negara-Dituding-Takluk-kepada-Korporasi>.

<sup>149</sup> Akbar, Ali Azhar. *Op cit.* Hal xxiv.

<sup>150</sup> Korporatokrasi adalah sistem kekuasaan yang dikontrol oleh berbagai korporasi besar, bank-bank internasional, dan pemerintahan. Istilah Korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukkan betapa korporasi atau perusahaan besar memang dalam kenyataannya dapat mendikte, bahkan kadang-kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginan



ketatanegaraan sehingga negara harus menanggung kejahatan korporasi melalui APBN, yang berujung pada merosotnya kemampuan negara dalam memberikan kesejahteraan rakyat banyak. Lahirnya dua buah kebijakan presiden tentang penanganan dampak bencana Lumpur Lapindo, yakni berupa 2 (dua) Keputusan Presiden (Kepres) dan 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres) yang mengikutinya, berhasil mengkanalisasi dari bencana korporat menjadi bencana alam. Beban tanggung jawab finansial korporat bergeser menjadi tanggung jawab negara dan dibebankan kepada rakyat melalui APBN. Inilah tabel kejahatan korporatokrasi yang ditanggung oleh rakyat melalui kebijakan pemerintah yang sudah tidak lagi "pro-rakyat". Beban APBN ini tidak berhenti sampai disini selama kebijakan yang dibuat Presiden dan keputusan politik DPR belum dianulir. Karenanya, argo kuda perampokkan APBN terus berjalan bagaikan bola salju. Belum lagi kerugian masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang jumlahnya secara material berpuluh-kali lipat besarnya. Beban negara akan semakin bertambah berat lagi mengingat, menurut Richard Davies<sup>151</sup> dan kawan-kawan, sulit untuk memprediksikan kapan kepastian semburan lumpur Lapindo akan berhenti. Namun, menurutnya kemungkinan prediksi semburan lumpur Lapindo tersebut baru akan berhenti sekitar 26 tahun lagi dihitung dari tahun 2011, yakni sekitar tahun 2033.

Masih menurut Sukiadi<sup>152</sup>, bencana Lumpur Lapindo telah menguras APBN hingga Rp 1,8 triliun per tahun. Menurutnya, saat ini kita sedang dipertontonkan drama politik sungguhan dari sebuah rezim *Kleptokorporasi*, yakni suatu sistem kekuasaan yang dikontrol oleh berbagai korporasi besar, bank-bank internasional, dan pemerintahan yang mempraktekkan bentuk administrasi publik

---

mereka. Kalau sebuah pemerintahan yang dikuasai oleh kaum aristokrat (bangsawan) disebut aristokrasi, sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh kaum plutokrat (orang kaya) disebut sebagai plutokrasi, dan sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh kaum kleptokrat (maling, preman) disebut sebagai kleptokrasi, maka sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh kaum korporatokrat (pemilik korporasi besar) boleh juga dinamakan Korporatokrasi. (Lihat: Rais, Mohammad Amin. 2008. Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia. Yogyakarta: PPSK Press. Hal. 82).

<sup>151</sup> Davies, Richard J. At.al. Loc.cit.

<sup>152</sup> Dalam Akbar, *op.cit.* Hal xxvi-xxvii.

yang menggunakan uang yang berasal dari publik untuk memperkaya diri sendiri, yakni penguasa dan antek-anteknya. APBN. Bagaimana tidak? Sebuah petaka yang disebabkan kegagalan teknologi oleh sebuah perusahaan PTLBI, sebuah perusahaan berstatus masih aktif berdomisili di Delaware, Amerika Serikat, telah menimpa masyarakat Sidoarjo khususnya dan menjadi beban seluruh rakyat Indonesia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. PT LBI bukan hanya mengurai energi dari perut bumi Sidoarjo, tapi secara deret ukur telah dan akan terus-menerus menggerogoti APBN puluhan tahun ke depan. APBN, sebagian besar bersumber pada pajak yang dipungut pemerintah dari rakyatnya. Kolaborasi politik anggaran antara Pengusaha-Politisi dan Eksekutif karena eksese sinergi politik anggaran dan *miss-management* dalam pengelolaan negara yang dipicu demokrasi transaksional pasca reformasi, sehingga sarat konflik kepentingan para pemangku politik anggaran.

*Kedelapan;* Bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo yang terkait dengan peran pihak PT LBI dalam proses penyelesaian masalah dampak semburan lumpur. Aburizal Bakrie mengaku tidak merasa bersalah atas terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan ganti rugi dengan cara membeli tanah dan bangunan warga lantaran "titah ibundanya". Menurut Aburizal Bakrie, pihak PT LBI sudah dinyatakan tidak bersalah oleh pihak MA, dengan demikian keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Hanya saja, karena "sang ibu" memerintahkan Aburizal Bakrie untuk membeli tanah dan bangunan, maka dia mengaku mematuhi. Aburizal Bakrie menjelaskan tanah dan bangunan milik warga itu itu bukan ganti rugi, melainkan melalui proses jual beli dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya sebesar Rp 60.000 per-meter persegi, tetapi dihargai oleh PT LBI sebesar Rp 1 juta<sup>153</sup>.

Aburizal Bakrie selanjutnya menyatakan bahwa sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan dana untuk penyelesaian

---

<sup>153</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/15/078390362/1cal-Bayar-Tanah-Warga-Lapindo-Demi-Titah-Ibu>.

kasus Lapindo di APBN. Sebab yang menjadi tanggung jawab pihak PT LBI adalah membeli tanah warga yang masuk dalam PAT, sementara itu di luar area peta terdampak menjadi tanggung jawab pemerintah<sup>154</sup>.

Sementara warga berpendapat bahwa PT LBI harus bertanggungjawab atas bencana semburan lumpur yang diakibatkan oleh kesalahan teknis saat melakukan pengeboran. Bagi warga penyebab lumpur lapindo adalah karena faktor pengeboran yang salah. Dengan demikian, pihak PT LBI memiliki kewajiban dan harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah dampak semburan lumpur tersebut.

Menurut Eva Kusuma Sundari<sup>155</sup>, enam tahun sudah warga Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi korban semburan lumpur Lapindo. Namun, hingga kini PT MLJ (PT LBI) dan pemerintah pusat cenderung ingin lepas tangan dari tanggung jawab pembayaran ganti rugi. Eva menjelaskan Komisi V DPR telah menetapkan pembayaran ganti rugi kepada korban sejak lama. Korban yang masuk dalam peta wilayah terkena dampak semburan lumpur Lapindo menerima tanggungan ganti rugi dari PT MLJ (PT LBI). Sedangkan korban yang berada di luar peta terkena dampak semburan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Namun, 6 (enam) tahun sudah warga Sidoarjo menjadi korban, pembayaran ganti rugi belum juga tuntas. Baik PT MLJ maupun pemerintah sama-sama tidak melakukan kewajiban masing-masing dan hal itu mengintensifkan penderitaan rakyat. *"Enam tahun terlalu lama menyengsarakan rakyat Sidoarjo. Kita mesti membedakan, mana kewajiban pemerintah dan mana kewajiban PT Minarak. Saya sebagai korban yang jadi tanggungan PT Minarak, karena terdampak langsung di ring dalam juga baru terima Rp 30 juta dari Rp 150 juta yang dijanjikan PT Minarak sejak enam tahun lalu. Teman-teman yang di ring luar yang menjadi tanggungan pemerintah juga negosiasi melulu, tapi duitnya juga seret"*, demikian dikatakan Eva. Selanjutnya dikatakan oleh Eva

---

<sup>154</sup> Lihat: <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/08/087395533/Duit-APBN-untuk-Lapindo-Kata-Ical-Itu-Tanggung-Jawab-Pemerintah>.

<sup>155</sup> Eva Kusuma Sundari adalah Korban bencana seburan lumpur Lapindo yang masuk Area Peta Terdampak, juga sebagai anggota DPR RI.

bahwa PT MLJ dan pemerintah cenderung tidak sensitif dan ingin lepas tangan terhadap para korban, Eva mengusulkan DPR bersama masyarakat untuk memberikan tekanan yang lebih kuat kepada kedua pihak itu, yakni pemerintah dan PT MLJ (PT LBI) untuk segera menyelesaikan kewajibannya<sup>156</sup>.

## F. Simpulan

Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang penting dan strategis di kawasan Jawa Timur, karena merupakan penyangga utama Kota Surabaya yang termasuk ke dalam kawasan "*Gerbangkertosusila*". "*Gerbangkertosusila*" adalah akronim dari "Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan", yang merupakan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar-daerah. Kawasan "*Gerbangkertosusila*" merupakan kawasan terbesar kedua di Indonesia yang berpusat di Surabaya, kawasan ini serupa dengan istilah Jabodetabek dengan pusat di Jakarta.

Terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindodi Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2006 telah menimbulkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada wilayah di tiga kecamatan baik yang masuk ke dalam PAT maupun luar PAT, yakni: Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon. Sekitar 1.191 hektar luas wilayah di tiga kecamatan tersebut yang meliputi areal pertanian, pertambakan, industri, dan pemukiman penduduk harus dikosongkan, baik karena tenggelam oleh luapan lumpur maupun karena dinyatakan sudah tidak layak huni sebagai dampak sosial-kemasyarakatan, amblesan, maupun bahaya semburan gas. Sementara lebih dari sekitar 15.788 KK atau 48.983 Jiwa harus pindah dari tempat tinggal asalnya ke tempat yang baru.

Wilayah yang terdampak bencana Lumpur Lapindo dibagi kedalam dua kategori, yakni wilayah dalam Peta Area Terdampak (dalam PAT) dan wilayah luar Peta Area Terdampak (luar PAT).

---

<sup>156</sup> Lihat: <http://www.tribunnews.com/2012/05/29/enam-tahun-lapindo-pt-minarak-dan-pemerintah-lepas-tangan>.

Proses penyelesaian masalah bencana Lumpur Lapindo dilakukan melalui skema jual-beli, dimana untuk wilayah dalam PAT menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak PT LBI, sedangkan untuk wilayah luar PAT menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak pemerintah.

## Dominasi Negara & Korporasi Dalam Arena Bencana Lumpur Lapindo

### A. Kebijakan Eksplorasi Migas di Wilayah Kecamatan Porong, Sidoarjo

Mengkaji kasus bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, tidak bisa dilepaskan dari politik kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sebagaimana sudah disinggung, bahwa bencana Lumpur Lapindo terjadi karena adanya aktivitas eksplorasi Minyak dan Gas (Migas) oleh PT LBI yang mendapat ijin eksplorasi dari pemerintah untuk mengelola area Blok Brantas. Pusat semburan Lumpur Lapindo terletak di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Sukiadi<sup>157</sup> fenomena bencana Lumpur Lapindo adalah praktek kasat mata sebuah Korporatokrasi sebagai akibat rusaknya sistem ketatanegaraan sehingga negara harus menanggung kejahatan korporasi melalui APBN yang berujung pada merosotnya kemampuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Blok Brantas merupakan suatu kawasan yang terletak di cekungan Jawa Timur yang diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 900 juta barel dan memiliki cadangan gas sebesar 700 milyar kaki kubik<sup>158</sup>.

---

<sup>157</sup> Akbar, Ali Azhar. Op.cit. Hlm. xxiv.

<sup>158</sup> Setiawan, Dani (Ed.). 2008. Lapindo Tragedi Kemanusiaan dan Ekologi. Jakarta: WALHI. Hlm. 43.

Di bawah pengelolaan PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI), Wilayah Kerja (WK) Blok Brantas meliputi seluas 3.042 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam Lima area, dua area di wilayah darat (*onshore*) dan tiga area di wilayah laut (*offshore*). Area Wilayah Kerja (WK) Blok Brantas tersebut meliputi, Area-1: Wilayah Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang (wilayah darat); Area-2: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto (wilayah darat); Area-3: Kabupaten Probolinggo (wilayah laut); Area-4: Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo (wilayah laut); dan Area-5: Kabupaten Situbondo (wilayah laut)<sup>159</sup>. Wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang merupakan lokasi terjadinya bencana Lumpur Lapindo, berada di Area 2 Blok Brantas.

Kawasan Blok Brantas pada mulanya dikelola oleh *Huffco Brantas Inc.*, anak perusahaan *Huffco Group* yang berpusat di Delaware, Amerika Serikat. Pada tahun 1990 *Huffco Brantas Inc.*, mendapat hak penambangan kawasan Blok Brantas berdasarkan persetujuan dari Presiden Suharto dengan surat Nomor: B-105/Pres/4/1990 tanggal 12 April 1990. Kemudian pada tahun 1996, PT LBI mulai mempunyai 50 persen *interest* kawasan Blok Brantas setelah membeli *interest* dari *Huffco Brantas Inc.* Berdasarkan surat BP Migas kepada PT LBI Nomor: 424/BP00000/2005-S0, tanggal 4 Juli 2005, pemegang *interest* kawasan Blok Brantas meliputi: PT LBI sebesar 50%, PT Medco E&P Brantas sebesar 32%, dan Santos Brantas Pty Ltd., sebesar 18%.

Dari berbagai kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan, PT LBI berhasil menemukan cadangan Migas yang berpotensi sangat baik di beberapa lokasi, antara lain di lapangan Wunut yang terletak di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Lapangan Wunut dinyatakan komersial dan mulai berproduksi pada bulan Januari 1999. Kemudian disusul oleh lapangan Carat di Kabupaten Mojokerto yang dinyatakan komersial pada tahun 2006, lalu lapangan Tanggulangin yang mulai dinyatakan komersial pada bulan Juni 2008<sup>160</sup>. Ketiga lapangan penemuan cadangan Migas ini, yakni

---

<sup>159</sup> Sumber: <http://lapindo-brantas.co.id/id/activities/project-scope/>; diakses tanggal 9 Agustus 2015.

<sup>160</sup> Sumber: <http://lapindo-brantas.co.id/id/about/profile/>; diakses tanggal 9 Agustus 2015.

lapangan Wunut, Carat, dan Tanggulangin, termasuk ke dalam wilayah Area 2 Blok Brantas.

PT LBI melakukan pengeboran sumur Banjar Panji-1, di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara (PT MCN). Kontrak itu diperoleh PT MCN atas nama *Alton International* Indonesia pada bulan Januari 2006 setelah menang tender dari PT LBI senilai US\$ 24 juta. PT LBI adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk BP MIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas. Selain sebagai pemegang *participating interest*, PT LBI juga bertindak sebagai operator karena memiliki saham 50 persen, sisanya dimiliki oleh PT Medco E&P Brantas sebesar 32%, dan Santos Brantas Pty Ltd., sebesar 18%.

Setelah terjadinya peristiwa bencana semburan Lumpur Lapindo, kepemilikan *participating interest* wilayah Blok Brantas mengalami perubahan. Sebelumnya, *participating interest* wilayah Blok Brantas dimiliki PT LBI sebesar 50%, PT Medco E&P Brantas sebesar 32%, dan Santos Brantas Pty Ltd., sebesar 18%.. Namun setelah terjadinya bencana Lumpur Lapindo, saham PT Medco di Blok Brantas dialihkan ke Grup Prakarsa melalui jaminan dari PT Minarak Labuhan yang merupakan anak perusahaan dari Grup Bakrie. Sedangkan *participating interest* Santos Brantas Pty Ltd., di Blok Brantas dialihkan kepada PT Minarak Labuhan yang juga merupakan perusahaan Grup Bakrie. Dengan demikian kepemilikan konsesi (*participating interest*) eksplorasi Migas kawasan Blok Brantas sepenuhnya berada di tangan perusahaan Grup Bakrie, yakni: PT LBI sebesar 50%, PT Prakarsa Brantas sebesar 32%, dan Minarak Labuan Co. Ltd. (PT MLC) sebesar 18%.

Dari data audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BP Migas dan rekannya dapat disimpulkan bahwa pengelola Blok Brantas sebenarnya sudah seringkali berpindah kepemilikan. Pada tahun 1990, *Huffco Brantas Inc.*, mendapat hak pengelolaan Blok Brantas berdasarkan persetujuan dari Presiden dengan surat Nomor: B-105/Pres./4/1990 tanggal 12 April 1990 perihal persetujuan *Production Sharing Contract* (PSC) atau Kontrak Kontrak Kerja Sama (KKKS) antara Pertamina dengan *Huffco Brantas Inc.* Selanjutnya



pada tanggal 23 April 1990 antara *Huffco Brantas Inc.*, PT Sarimbi Menur Sari, Pertamina, dan Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) menandatangani kesepakatan hak pertambangan tersebut dalam perjanjian PSC (KKKS) Blok Brantas. Masa berlaku kontrak tersebut selama 30 tahun sejak penandatanganan, dengan demikian masa berlakunya PSC (KKKS) Blok Brantas hingga tanggal 23 April 2020<sup>161</sup>.

Berdasarkan surat Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) Nomor: 0493/C0000/90-SO, tertanggal 26 Maret 1990 kepada Ketua Dewan Komisaris Pemerintah Pertamina, dinyatakan bahwa *Huffco Brantas Inc.*, memperoleh hak pertambangan (eksplorasi) di Wilayah Kerja (WK) Blok Brantas melalui prosedur tender. Terkait dengan proses tender Blok Brantas, Tim Audit BPK telah meminta dokumen tender tersebut kepada Departemen ESDM, BP Migas, PT LBI, dan Pertamina. Namun demikian, sampai dengan tanggal 31 Januari 2007, BPK belum menerima dokumen dimaksud. Kondisi ini menjadi pertanda awal yang kurang baik dalam industri Migas di tanah air, khususnya di Blok Brantas. Preferensi politik-ekonomi telah menggeser aspek hukum dan standar operasional kerja yang seharusnya menjadi pertimbangan utama<sup>162</sup>.

Sejak PSC (KKKS) wilayah Blok Brantas ditandatangani pada tanggal 23 April 1990, *hak dan interest* atas Wilayah Kerja (WK) Blok Brantas telah beberapa kali dialihkan. Pada tanggal 12 April 1996, *Huffco Brantas Inc.*, dengan surat Nomor: 127/Id/PW/L96 kepada Pertamina menginformasikan pergantian nama menjadi PT LBI. Perubahan nama tersebut berlaku sejak tanggal 10 April 1996. Sesuai surat persetujuan Pertamina, posisi *participating interest* di Blok Brantas sebagai berikut: (1) PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI) 20%; (2) *Inpex Brantas Ltd*, 20%; (3) *Norcen Brantas Ltd*, 20%; dan (4) *Oryx Indonesia Brantas Coy*, 40%. Surat tersebut menyatakan bahwa sebagai operator adalah PT LBI. Hingga 28 Pebruari 2007 kepemilikan PT LBI berada di bawah Energy Mega Persada (EMP),

---

<sup>161</sup> Batubara, Bosman, & Utomo, Paring Waluyo. 2012. *Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo*. Yogyakarta: INSISTPress. Hal. 143.

<sup>162</sup> Ibid. Hal. 143-144.

Medco Energy (ME), dan Santos. Selain sebagai *participating interest*, PT LBI juga bertindak sebagai operator. PT EMP memiliki LBI melalui bendera Kalila Energi yang menguasai saham LBI sebesar 82,42% dan *Pan Asia Enterprise* dengan saham 15,76%<sup>163</sup>.

Dari catatan audit keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI terhadap BP Migas dan rekanannya, dapat disimpulkan bahwa BP Migas sangat lemah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelola wilayah Blok Brantas, termasuk di dalamnya praktik pengalihan kepemilikan dan operasinya. Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh BPK RI tersebut, BP Migas atau pemerintah merasa tidak berkepentingan terhadap pemilik atau perubahan pemilik kontraktor dan *participating partner*. Selanjutnya, BPK RI berpendapat bahwa sesungguhnya pemantauan (pengawasan) BP Migas atau pemerintah terhadap kepemilikan atau perubahan kepemilikan kontraktor memiliki nilai yang sangat strategis dan penting karena perubahan kepemilikan dapat mempengaruhi perubahan kebijakan kontraktor, apalagi kebijakan yang menyangkut keuangan dan teknik<sup>164</sup>.

Dari data yang dipaparkan diatas, terlihat bahwa koalisi pemerintah dan PT LBI (korporasi) dalam pengelolaan (eksplorasi) sumberdaya Migas di wilayah Blok Brantas, khususnya di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, sangat kuat. Pihak PT LBI atas ijin pemerintah memiliki hak dan wewenang yang penuh untuk melakukan eksplorasi Migas. Bencana Lumpur Lapindo yang menysengsarakan rakyat, terjadi karena adanya aktivitas eksplorasi Minyak dan Gas (Migas) oleh PT LBI yang mendapat ijin eksplorasi dari pemerintah.

## **B. Konstelasi Politik pada Latar Kebijakan Pemerintah Terkait Bencana Lumpur Lapindo**

Kebijakan pemerintah dalam konteks bencana Lumpur Lapindo tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik pemerintahan, khususnya di era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)

---

<sup>163</sup> Ibid. Hal. 146.

<sup>164</sup> Ibid. Hal. 146-147.

baik era pertama maupun era kedua. Pada era pertama pemerintahan Presiden SBY, yakni pada periode tahun 2004-2009, ditandai dengan politik pemerintahan multi-partai. Pada Pemilu Presiden tahun 2004, pasangan Presiden-Wakil Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) didukung oleh beberapa Partai Politik (Parpol), yakni Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Partai Golkar merupakan salah satu Partai pendukung pemerintahan SBY-JK, maka sebagai konsekuensinya Partai Golkar mendapatkan jatah kursi Menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I. Salah satu kader Partai Golkar yang duduk di KIB Jilid I adalah Aburizal Bakrie (ARB) yang menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (21 Oktober 2004 sampai 7 Desember 2005) dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (7 Desember 2005 sampai 20 Oktober 2009). Pada saat awal terjadinya bencana Lumpur Lapindo, yakni tanggal 29 Mei 2006, posisi ARB adalah sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi.

Pada tahun 2009 melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII Partai Golkar di Riau, ARB terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2014. Meskipun pada Pemilu Presiden tahun 2009 Partai Golkar mendukung pasangan Capres-Cawapres Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Wiranto), namun ketika SBY-Budiono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan SBY-Budiono. Pada periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, yakni antara tanggal 22 Oktober 2009 sampai tanggal 20 Oktober 2014, Partai Golkar mendapatkan jatah kursi Menteri antara lain posisi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) yang dijabat oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar HR. Agung Laksono.

Peran Partai Golkar, khususnya peran ARB, sangat penting dalam pemerintahan SBY-JK maupun SBY-Budiono. Relasi politik antara ARB dan SBY sangat kuat, oleh karena itu dapat dipahami apabila kebijakan pemerintah terkait bencana Lumpur Lapindo lebih banyak menguntungkan pihak PT LBI (korporasi).

Sebagaimana dijelaskan pada poin A diatas, bahwa saham PT LBI sebesar 50% dimiliki oleh PT Energy Mega Persada (PT EMP) anak perusahaan milik keluarga Bakrie (Bakrie Group), setelah terjadinya bencana Lumpur Lapindo saham PT LBI 100% dimiliki oleh keluarga Bakrie (Bakrie Group) yakni: PT LBI sebesar 50%, PT Prakarsa Brantas sebesar 32%, dan Minarak Labuan Co. Ltd. (PT MLC) sebesar 18%.

### **C. Kebijakan Eksplorasi Migas di Wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebagai Pelanggaran atas Penerapan RT/RW Wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo**

Kebijakan pemerintah memberikan ijin eksplorasi Migas di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo menimbulkan kontroversi. Terdapat kontradiksi dan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait penggunaan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2012, bahwa peruntukkan wilayah Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon diprioritaskan hanya untuk kawasan pemukiman, pertanian dan industri, bukan untuk kawasan eksploitasi minyak dan gas (pertambangan). Kemudian Perda Nomor 16 Tahun 2003 diperbaharui lagi dan terbit Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029, dimana dicantumkan bahwa wilayah Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan sebagian Kecamatan Tanggulangin, bersama dengan Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Krembung adalah termasuk ke dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) III, dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, konservasi geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dengan pusat pertumbuhan berada di kawasan Krembung.

Selanjutnya, Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2003 dan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 diperkuat lagi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang

RTRW Jawa Timur 2005-2020 yang juga menyatakan antara lain bahwa kawasan Sidoarjo, khususnya wilayah Kecamatan Porong diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertanian, dan industri.

Dengan demikian, mengacu kepada RTRW yang secara formal dituangkan melalui Perda Kabupaten Sidoarjo dan Perda Provinsi Jawa Timur, dinyatakan bahwa pengembangan kawasan di wilayah Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon sudah jelas diarahkan untuk kawasan pemukiman, pertanian dan industri. Namun secara faktual, kawasan tersebut telah menjadi kawasan eksplorasi Migas. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan BP Migas memberikan hak pengelolaan kawasan Blok Brantas sebagai ladang eskplorasi Migas. Kondisi ini tentu menimbulkan kerancuan antara regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Batubara & Waluyo, 2012:149). Dengan demikian, telah terjadi kontradiksi dan inkonsistensi fungsi peruntukkan wilayah kawasan Porong dan sekitarnya, dari fungsi utama sebagai kawasan pemukiman, pertanian, dan idustri menjadi kawasan eksplorasi Migas. Atas terjadinya perubahan fungsi kawasan inilah yang kemudian menyebabkan munculnya bencana luapan lumpur Lapindo di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya.

Namun demikian, melalui kuasa hukum PT LBI, Otto Bismarck, pihak PT LBI menyangkal dengan menyatakan bahwa PT LBI tidak melanggar RTRW Kabupaten Sidoarjo karena berdasarkan revisi RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2012 atas Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo, dimungkinkan bagi sektor pertambangan untuk beroperasi di wilayah Sidoarjo. Berdasarkan revisi RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2012 yang dikeluarkan oleh Bappekab Sidoarjo pada tahun 2002, wilayah Sidoarjo selain untuk pengembangan wilayah pemukiman, perikanan dan perkebunan, juga diperuntukkan bagi pertambangan. Artinya, secara umum Otto Bismarck ingin menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan di Sumur Banjar Panji, Porong, Sidoarjo, tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Sidoarjo. Bukti yang disebutkan Otto itu, berbanding terbalik dengan keterangan yang disampaikan oleh Vinsensius Santoso, ahli tata ruang yang dihadirkan oleh Walhi

yang menyebutkan bahwa jika ditinjau dari RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2012, wilayah Porong atau Sidoarjo *diharamkan* bagi aktivitas pertambangan. Meski demikian, Santoso menjelaskan, terdapat beberapa pengecualian terkait masalah pertambangan di Sidoarjo, yakni bahwa aktivitas pertambangan yang dibolehkan hanyalah yang berkategori Galian C, seperti penambangan pasir. Santoso menyatakan bukti yang diajukan oleh Lapindo terkait masalah Tata Ruang Sidoarjo adalah bukti yang tidak logis, karena PT LBI mengacu pada revisi RTRW yang dikeluarkan pada 2002, sementara Perda RTRW Sidoarjo ditetapkan pada tahun 2003<sup>165</sup>.

Menurut Vinsensius Santoso, alasan PT LBI bahwa tidak melanggar RTRW Kabupaten Sidoarjo sangat lemah dan janggal. Menurutnya, adalah hal yang janggal ketika Lapindo menggunakan revisi RTRW Kabupaten Sidoarjo yang dikeluarkan oleh Bappekab Sidoarjo, karena RTRW Kabupaten Sidoarjo dituangkan ke dalam Perda yang merupakan produk politik sebagai hasil kesepakatan dan pembahasan antara eksekutif dan legislatif di daerah. Sedangkan Bappekab hanya merupakan salah satu unsur yang ikut membantu pemerintah di daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Bappekab tidak bisa begitu saja melakukan merevisi Perda RTRW. Apabila Bappekab mau merevisi Perda RTRW bisa menyampaikan usulan melalui Bupati, kemudian Bupati yang akan membahasnya bersama DPRD. Dalam kasus Lapindo ini, Santoso mencium ada gelagat yang tidak baik antara PT LBI dengan pihak Pemerintah. Pasalnya, meskipun RTRW Kabupaten Sidoarjo tidak membolehkan aktivitas pertambangan, terutama minyak dan gas bumi di Porong, namun Pemerintah tetap saja memberikan izin kepada PT LBI. Santoso menyatakan: "Ada apa di balik ini? Kok bisa Lapindo mendapatkan izin prinsip, izin lokasi dan Amdal? Padahal untuk mendapatkan itu semua, syarat dasar yang harus diperhatikan adalah peruntukan wilayah yang tertuang di dalam RTRW"<sup>166</sup>.

---

<sup>165</sup> Sumber: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17631/simpang-siur-tata-ruang-dan-wilayah-sidoarjo>; diakses Rabu, Kamis, 13 Agustus 2015.

<sup>166</sup> Ibid.

Menurut Masrukh<sup>167</sup>, pihak PT LBI dan pemerintah yang dalam hal ini BP Migas dianggap telah melakukan pelanggaran besar karena telah melakukan eksplorasi (pengeboran) Migas di tengah-tengah pemukiman warga. Kutipan wawancara dengan Masrukh sebagai berikut:

*"Iyaa...apapun itu entahlah itu Lapindo ataupun pihak terkait dalam hal ini..mesti corporate ini punya ijin, ijin nya dari mana? Ya pemerintah saat itu, berarti berurusan sama.. karena ini dipake tambang berarti urusannya dengan pemerintah yang menangani masalah tambang...padahal kalau menurut aturan penambangan kan tidak boleh di wilayah atau di pertengahan perkampungan pemukiman, ini tidak hanya...bukan hanya ngomong satu kilo tapi meter dari pemukiman warga..ini sudah merupakan kejahatan besar...pelanggaran besar..ini harus dicatat bahwa ini pelanggaran maka itu pasti yang bertanggung jawab dua hal, yaitu corporate itu sendiri karena melakukan pengeboran di tengah warga; yang kedua pemerintah masalah ijin, kenapa ijin itu bisa ke luar di wilayah pemukiman".*<sup>168</sup>

Dengan demikian, menurut Masrukh dalam konteks bencana semburan Lumpur lapindo telah terjadi pelanggaran atas aturan aktivitas eksplorasi (pengeboran) Migas yang dilakukan di tengah-tengah pemukiman warga.

PT LBI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, juga telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 3 dan 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Mengacu kepada Pasal 3, disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dengan: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber

---

<sup>167</sup> M. Masrukh, 38 tahun, adalah korban lumpur Lapindo, yang merupakan tokoh muda masyarakat desa Siring, Kecamatan Porong dan Pimpinan Panti Asuhan "Nurul Azhar".

<sup>168</sup> Wawancara dengan bapak Masrukh, hari Senin, tanggal 12 Maret 2012.

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sementara apabila mengacu kepada pasal 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa antara lain: (a) Ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Ijin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum; (c) Ijin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; (d) Ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak; dan (e) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan ijin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam konteks lumpur Lapindo, pemerintah daerah bukannya kemudian mencabut ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RUTR Kabupaten Sidoarjo, tapi malahan membiarkan dan bahkan mendukungnya.

Selain pelanggaran terhadap Tata Ruang, PT LBI juga telah melanggar pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi: "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Sementara, Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan<sup>169</sup>.



Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pada pasal 1 ayat (2) disebutkan tentang pengertian dampak besar dan penting, yakni: "Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan", yang meliputi: (a) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; (b) eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui; (c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; (d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; (e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; (f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik; (g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati; (h) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; dan (i) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara. Sementara pada pasal 5, disebutkan bahwa kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain: (a) jumlah manusia yang akan terkena dampak; (b) luas wilayah persebaran dampak; (c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; (d) banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak; (e) sifat kumulatif dampak; dan (f) berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Menurut Akbar<sup>170</sup>, apabila dicermati dari pasal-pasal yang ada dalam PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tersebut, maka diduga terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PT LBI, sesuai pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan

---

<sup>169</sup> Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>170</sup> Akbar, Ali Azhar. Op.cit. Halaman 150.

syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”.

Dari paparan tersebut diatas, nampak bahwa aktivitas eksplorasi Migas di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo melanggar berbagai aturan, yakni: Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2012, Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Jawa Timur 2005-2020, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

#### **D. Ketidakterbukaan dalam Proses Pembelian Tanah Warga Masyarakat**

Masyarakat di sekitar Porong, khususnya masyarakat Desa Renokenongo<sup>171</sup>, melihat adanya proses yang tidak transparan dalam proyek eksplorasi Migas yang dilakukan oleh PT LBI. Semula perwakilan dari pihak PT LBI menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembelian tanah warga oleh PT LBI diperuntukkan bagi pengembangan kawasan peternakan ayam, bukan untuk lokasi pengeboran minyak dan gas (Migas)<sup>172</sup>.

Snt<sup>173</sup> menyatakan bahwa masyarakat merasa sudah dikelabui oleh pihak PT LBI karena tidak adanya transparansi dalam peruntukkan pembelian tanah; “Kita tahunya memang untuk peternakan”, demikian ditegaskan Sunarto. Masyarakat semula diberitahu bahwa pembelian tanah tersebut memang untuk kawasan peternakan. Kutipan pernyataan wawancara dengan Snt sebagai berikut:

---

<sup>171</sup> Desa Renokenongo merupakan pusat semburan lumpur panas Lapindo.

<sup>172</sup> Lihat Prasetya, Heru; & Batubara, Boman (eds.). 2010. *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: DESANTARA. Hal.42.

<sup>173</sup> Snt adalah korban lumpur Lapindo asal Desa Renokenonongo yang juga sebagai Koordinator Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekoontrak).

*"Iya..jadi memang ini mestinya bisa diambil hikmah oleh pemimpin-pemimpin kita ini, agar sesuatu itu perlu ada kajian-kajian, artinya kajian-kajian yang mendalam tidak gegabah tidak asal menghasilkan uang demi kepentingan pribadi dan sesaat, kami melihat memang dari awalnya pembebasan tanah itu sudah tidak transparan, ada yang mengatakan bahwa beli tanah itu untuk peternakan, untuk macam-macam, apa untuk mengelabui masyarakat, apa ini teknis mereka, mestinya menurut saya ya harus transparan saja biar masyarakat juga tahu, apa itu ditolak apa tidak itu kan urusan belakang, yang penting masyarakat harus transparan, sehingga kalau tidak transparan masyarakat juga tiba-tiba tahu kalau itu untuk pengeboran yang mestinya harganya harus mahal, ternyata kalau untuk peternakan kan bisa murah, ini awal dari proses pembelian tanah, mestinya itu di Siring yang harus dibebaskan karena Siring itu masyarakatnya tanggap masyarakatnya dikumpulkan waktu itu dibalai desa, ternyata harga tawar-menawar sehingga Lapindo tidak mau, terus bergeser ke Renokenongo, Renokenongo tanpa dikumpulkan langsung ada transaksi system gerilya. Yaa..itulah ada mungkin ya satu dua orang yang hatinya kurang rela sehingga bisa menimbulkan ini, dan memang seumpama transparan mungkin masyarakat tidak mau, banyak yang menolak".<sup>174</sup>*

Dengan demikian, masyarakat (korban bencana Lumpur Lapindo) merasa dibohongi terkait persoalan transparansi ijin dan peruntukkan pembelian tanah (lahan) warga oleh PT LBI. Pihak PT LBI menggunakan tanah (lahan) tersebut untuk kawasan eksplorasi Migas, sementara warga mengetahuinya untuk pengembangan peternakan ayam.

Menurut Batubara dan Utomo<sup>175</sup>, berdasarkan penjelasan dari salah seorang warga korban lumpur Lapindo yang juga pemilik tanah di lokasi sumur pengeboran Banjarpanji-1 di desa Renokenongo yang bernama Mochamad Zainul Arifin atau dikenal

---

<sup>174</sup> Wawancara dengan bapak Snt, hari Senin tanggal 4 Juni 2012.

<sup>175</sup> Prasetyo, Heru; & Batubara, Bosman (eds.). 2010. Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil. Yogyakarta: Desantara & Lafadl Initiative. Hal. 41.

dengan panggilan Cak Mat, menyatakan bahwa sejak awal telah terjadi proses yang tidak transparan dalam proyek pengeboran yang dilakukan oleh PT LBI. Ketidak-transparanan terjadi sejak dari awal pembelian tanah sampai pada informasi yang diterima oleh warga pada saat semburan lumpur terjadi tanggal 29 Mei 2006. Menurut Cak Mat<sup>176</sup> pada tahun 2005 representasi PT LBI mendekati warga Desa Siring agar mau menjual tanahnya yang kelak akan dipakai sebagai lokasi pengeboran. Oleh warga Siring, ditolak. Gagal di Siring, representasi PT LBI kemudian mencoba mendekati warga Desa Jatirejo. Lagi-lagi representasi PT LBI ini gagal mendapatkan tanah di Jatirejo. Gagal di dua desa, yakni desa Siring dan Jatirejo, PT Lapindo Brantas Inc., tidak patah semangat. Pada bulan Maret 2006, PT LBI sukses membeli tanah sawah di desa Renokenongo, dengan alasan tanah akan digunakan untuk peternakan ayam. Warga melepas tanah sawah tersebut berkat bantuan dari seorang Kepala Desa Renokenongo yang saat itu dijabat oleh Mahmudatul Fatchiyah<sup>177</sup>.

Saat transaksi jual beli, kebanyakan warga tidak mengetahui bahwa sawah mereka akan dibeli oleh PT LBI, karena proses jual-beli diwakili oleh Kepala Desa Renokenongo, yakni Mahmudatul Fatchiyah. Ketika itu para pemilik sawah yang kebanyakan dari warga RT 18, 19, dan 20, Desa Renokenongo tidak mengetahui persis siapa sesungguhnya pihak yang membeli tanah mereka. Warga percaya kepada keterangan Kepala Desa Renokenongo bahwa tanah warga dibeli untuk keperluan peternakan ayam<sup>178</sup>. Setelah transaksi jual beli terjadi, lokasi itu kemudian ditutup dengan seng, hingga warga tidak mengetahui apa yang dikerjakan di dalam pagar seng tersebut. Beberapa orang warga baru menyadari bahwa lokasi tersebut digunakan untuk pemboran setelah mendengar suara besi dipukul berulang-ulang<sup>179</sup>.

---

<sup>176</sup> Ibid. Halaman 42.

<sup>177</sup> Sumber: *adln.lib.unair.ac.id/.../gdlhub-gdl-s2-2013-afandimuso-26756-8.-bab-i-n.p...*

<sup>178</sup> Op.cit. Hal. 42-43

<sup>179</sup> Op.cit. Hal 43

### E. Indikasi Pelanggaran HAM dalam Eksplorasi Migas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan lumpur Lapindo yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan pelanggaran hak asasi manusia<sup>180</sup>. Keputusan tersebut diambil melalui rapat paripurna Komnas HAM. "Kami meminta temuan tim investigasi Komnas HAM digunakan untuk penyidikan lebih lanjut oleh kepolisian," kata Wakil Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, dalam konferensi pers di Jakarta. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan bahwa Lapindo Brantas Inc., harus bertanggung jawab atas tercerabutnya hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan warga di sekitar Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Negara juga tetap harus menjalankan fungsinya melindungi hak-hak warga negara<sup>181</sup>. Namun demikian, Komnas HAM menilai bahwa dalam kasus bencana Lumpur Lapindo tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan pemantauan Komnas HAM menangkap adanya indikasi telah terjadi pelanggaran HAM di beberapa sektor kehidupan, yakni: Pertama, adalah perusakan lingkungan, padahal dalam UUD 1945 disebutkan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; Kedua, hak anak-anak atas pendidikan juga tercerabut karena sedikitnya 33 sekolah terendam lumpur yang mengakibatkan sekitar 5.397 siswa harus dimutasi ke sekolah lain atau belajar di sekolah darurat; Ketiga, Hak masyarakat untuk bekerja atau membuat pekerjaan baru juga lenyap terendam lumpur. Akibat beberapa perusahaan terendam lumpur, sehingga banyak buruh kehilangan pekerjaannya; dan Keempat, Hak warga atas kepemilikan juga dilanggar karena saat ini tanah, sawah, dan harta warga tak bernilai ekonomis lagi. Selain itu, masyarakat kehilangan rasa aman dan selalu resah akibat tumpang tindihnya berbagai kepentingan<sup>182</sup>.

---

<sup>180</sup> Mengacu kepada hasil "Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo". Lihat: <http://www.komnasham.go.id/publikasi>.

<sup>181</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2012/08/14/063423492/komnas-ham-kasus-lapindo-adalah-kejahatan>.

<sup>182</sup> Ibid.

Selanjutnya Komnas HAM jugamencatat bahwa bencana Lumpur Lapindodi Sidoarjotelah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban<sup>183</sup>. Hak-hak yang terlanggar antara lain: (1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945; (2) Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan adil dan layak dalamhubungan kerja, sebagaimana dijamin Pasal 28-D Ayat (2) UUD 1945; (3) Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimanadijamin Pasal 27-A UUD 1945; (4) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, seperti dijamin Pasal 28-G Ayat (1) UUD 1945; (5) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatlingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat layanan kesehatan,sebagaimana dijamin Pasal 28-H Ayat (1) UUD 1945; (6) Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar; hak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia, seperti dijamin Pasal 28-C UUD 1945; dan (7) Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, sebagaimanadijamin Pasal 28-B Ayat (2) UUD 1945.Pasal 28-I UUD 1945 mengamanatkan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Investigasi yang dilakukan Komnas HAM sejak 2009 paling tidak menemukan 15 kategori pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus lumpur Lapindo. Pelanggaran itu adalah: pelanggaran hak untuk hidup karena adanya korban meninggal dunia, pelanggaran hak atas informasi karena rencana kegiatan eksplorasi minyak dan gas di sana tidak diketahui masyarakat, hak atas rasa aman karena ancaman runtuhnya tanggul lumpur, hak

---

<sup>183</sup> <http://kompas.com/kompas-cetak/0701/23/opini/3206257.htm>

mengembangkan diri, hak atas perumahan karena tenggelamnya tempat tinggal. Komnas HAM juga menyatakan pengungsi lumpur Lapindo tak mendapat hak atas pangan dan kesehatan, hak atas pekerjaan dan hak pekerja karena lumpuhnya perekonomian di Sidoarjo, hak atas pendidikan karena rusaknya 33 sekolah sehingga siswa kesulitan bersekolah. Selain itu, yang turut dilanggar adalah hak berkeluarga dan berketurunan, hak milik, hak atas jaminan sosial, hak para pengungsi, dan hak kelompok rentan, seperti perempuan hamil dan menyusui, penyandang cacat, lansia, anak, dan perempuan<sup>184</sup>.

Selain Komnas HAM, Komnas Perempuan juga menyampaikan hasil temuan timnya yang dituangkan dalam "Laporan Pemetaan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Bencana Luapan Lumpur di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur". Kesimpulan laporan tersebut adalah bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak dasar warga negara yang mempengaruhi kehidupan lebih dari 24 ribu warga di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, baik oleh eksekutif (melalui terbitnya beberapa Perpres), oleh Yudikatif (melalui keputusan-keputusan pengadilan), maupun legislatif (melalui persetujuan APBN), antara lain: (1) Hak atas informasi, sejak awal warga yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran tidak diberikan informasi yang jelas tentang rencana pembangunan dan dampak dari pengeboran gas bumi oleh PT Lapindo Brantas; (2) Hak atas penghidupan yang layak, ribuan masyarakat kehilangan rumahnya tempat berlindung seketika, mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk menyusun kehidupan mereka di masa depan dan membangun rumah tangga yang aman dan nyaman sebagai keluarga dan komunitas; (3) Hak atas pekerjaan, ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan karena banyak industri di sekitar lokasi pengeboran yang terendam lumpur dan terpaksa tutup. Sementara, lapangan pekerjaan informal juga musnah seiring dengan musnahnya kehidupan bermasyarakat yang menjadi pelanggan; (4) Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, luapan lumpur dan gas yang keluar menyebabkan makhluk hidup termasuk manusia,

---

<sup>184</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/14/063423492/Komnas-HAM-Kasus-Lapindo-Adalah-Kejahatan>.

tumbuhan dan ternak tidak dapat bertahan hidup di lokasi; (5) Hak atas perumahan, ada ribuan warga yang rumahnya terendam lumpur lapindo terpaksa harus pindah. Sebagian dari mereka, setidaknya, bertahan hidup di pengungsian selama tiga tahun; (6) Hak atas kesehatan, aroma lumpur dan gas yang disebarkan oleh lumpur Lapindo membuat penduduk sekitar mengalami sesak napas. Bahkan para medis menganjurkan ibu hamil untuk pindah jauh dari lokasi karena takut aroma dari gas yang disebarkan oleh lumpur Lapindo tersebut akan membahayakan pada pertumbuhan janin; dan (7) Hak atas pendidikan yang layak, anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena orang tua mereka tidak mampu lagi membiayai pendidikan mereka<sup>185</sup>.

*The Centre on Housing Right and Eviction* (COHRE), yakni lembaga internasional dibawah naungan PBB yang memperjuangkan hak perumahan, memberikan perhatian yang besar terhadap bencana lumpur Lapindo. Bahkan COHRE mengusulkan PT LBI sebagai nominator pelanggar hak pemukiman<sup>186</sup>.

## **F. Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Munculnya Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Bagi Korban Bencana**

Bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo tidak hanya memproduksi ketidakadilan, akan tetapi juga menjadi arena produksi kemiskinan dan ketidakberdayaan bagi warga yang ada di wilayah Kecamatan Porong, dan sekitarnya, yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo. Menurut penjelasan beberapa korban bencana menyatakan bahwa pada umumnya korban bencana Lumpur Lapindo kehidupannya menjadi lebih miskin dan menjadi tidak berdaya<sup>187</sup>. Namun demikian, ada juga warga korban yang justru menjadi kaya setelah mendapatkan uang ganti rugi yang nilainya cukup besar, karena memiliki aset tanah dan bangunan yang luas.

---

<sup>185</sup> Heroepoeti, Arimbi. 2011. Pengabaian Dari Mula: Laporan Pemetaan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Bencana Luapan Lumpur di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jakarta: Komnas Perempuan. Hlm. 43-44.

<sup>186</sup> Lihat, <http://korbanlumpur.info/2008/08/24/lapindo-dinominasikan-sebagai-pelanggar-hak-pemukiman-warga/>

<sup>187</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa korban bencana Lumpur Lapindo, seperti: Hendra, Sumono, Sholeh, Zaenul Arifin, Ulfah, dan Nartaji, yang ditemui di atas tanggul lumpur.



Beberapa kasus yang dialami oleh korban bencana Lumpur Lapindo, digambarkan dalam kotak kasus sebagai berikut:

### Kotak 3.1. Analisis Kasus Hnd

Hnd, usia 25 tahun, menjelaskan bahwa sebelum terjadinya bencana Lumpur Lapindo dia tinggal di rumah milik ibunya di desa Jatirejo, Kecamatan Porong, saat ini Hendra dan ibunya mengontrak sebuah rumah sederhana di daerah Sidoarjo. Hendra menyatakan bahwa saat ini ibunya mengalami perasaan trauma kalau mendengar dan mengingat bencana Lumpur Lapindo. Untuk menyambung hidupnya, sambil menunggu proses pencairan sisa pembayaran jual-beli dari pihak PT MLJ, terpaksa ibunya mencari pinjaman uang. Untuk membantu meringankan beban hidup ibunya, terpaksa Hendra menjadi tukang ojek di sekitar tanggul Lumpur Lapindo dengan penghasilan yang tidak menentu, bahkan seringkali selama sehari tidak mendapatkan penghasilan sama sekali.

*"...ibu saya itu mau datang kesini itu nggak mau dia datang, saking takutnya, sakit traumanya, lihat rumahnya dulu tenggelam...Kalau kaya ya kaya hutang, ya kayanya kaya hutang, kalau kaya harta ya nggak, yang kaya ya kaya hutang. Kalau perlu tahu, uang cicilan keluar Rp 5 juta dibagi 4 orang, dapat satu juta, sisa satu juta ditabung, beli tanah saja nggak bisa. Jadi nggak semakin kaya, tapi kaya hutang, mau kontrak lagi nggak ada uangnya, ya ngutang dulu. Itu kan media, kebanyakan orang luar, provokasi orang-orang lumpur kaya dapatkan uang banyak, itu hanya politik saja, ya dari pihak-pihak tertentu nambah-nambahin saja...yang sebenarnya hidup kami menderita..."<sup>188</sup>.*

#### Catatan:

1. Dulu Hnd dan ibunya tinggal di rumah sendiri, sekarang tinggal di rumah kontrakan,
2. Ibunya trauma kalau mendengar Lapindo,
3. Hendra terpaksa menjadi tukang ojek di atas tanggul,
4. Ibunya terpaksa meminjam uang untuk menyambung hidup,
5. Uang cicilan pembayaran jual-beli tidak cukup membeli rumah.

<sup>188</sup> Petikan wawancara dengan Hendra, Jumat: 15 Pebruaru 2013, di atas tanggul Lumpur.

Selanjutnya Hnd menyatakan bahwa banyak warga yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo yang saat ini menjadi pengangguran, hidupnya menjadi miskin, dan banyak utang.

Sesepeda dengan pernyataan Hnd, Smn<sup>189</sup> salah satu warga korban bencana Lumpur Lapindo juga menyatakan hal senada bahwa dirinya terpaksa harus menjadi pengangguran karena pabrik tempatnya bekerja dulu harus tutup akibat tergenang luapan Lumpur Lapindo.

### **Kotak 3.2. Analisis Kasus Smn**

Menurut Smn, 36 tahun, saat ini kehidupan warga korban bencana Lumpur Lapindo sangat memprihatinkan. Sebelum terjadinya bencana Lumpur Lapindo, Smn tinggal bersama ibunya di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong. Pada tahun 2006, Smn bekerja sebagai buruh pabrik minuman dengan gaji perbulan sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). Posisi pabrik tempat Smn bekerja berada di sekitar wilayah Desa Jatirejo, saat ini pabrik tersebut sudah tutup karena terendam lumpur. Sekarang Smn menganggur, dan demi menyambung hidupnya terpaksa Smn menjadi tukang ojek di sekitar tanggul lumpur dan menjadi penjaga tenda lumpur yang dibangun diatas tanggul lumpur untuk melayani para pengunjung yang ingin melihat keadaan tanggul lumpur Lapindo. Smn mengaku penghasilan dari tukang ojek dan penjaga tenda lumpur tidak menentu, kadang dalam waktu sehari tidak mendapat penghasilan sama sekali. Menurut Smn, dia biasanya mendapat penghasilan yang lumayan apabila waktu liburan sekolah atau hari Sabtu dan Minggu, penghasilannya bisa mencapai Rp 50 ribu dalam satu hari.

#### **Catatan:**

1. Dampak bencana Lumpur Lapindo menyebabkan pengangguran (PHK).

Selanjutnya penuturan pasangan suami istri Slh dan Ufh menyatakan pula bahwa mereka terpaksa harus berhenti bekerja

---

<sup>189</sup> Sumono, laki-laki, usia 36 tahun adalah korban bencana Lumpur Lapindo asal Desa Jatirejo, kecamatan Porong.

karena perusahaan tempatnya bekerja harus tutup akibat tergenang luapan Lumpur Lapindo.

### Kotak 3.3. Analisis Kasus Slh

Slh, laki-laki, berusia 35 tahun, dan istrinya Ufh berusia 30 tahun, menyatakan sejak tahun 2007 terpaksa mereka harus mencari "kehidupan" di atas tanggul Lumpur Lapindo. Sebelum terjadi peristiwa bencana lumpur Lapindo, Slh dan Ufh tinggal di rumah milik sendiri di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong. Sekarang mereka tinggal di rumah kontrakan di daerah Semirahan, Sidoarjo. Pekerjaan Slh sebelum terjadi peristiwa bencana lumpur Lapindo adalah buruh pabrik, dengan penghasilan Rp 600.000,- (enamratus ribu rupiah) per-bulan. Demikian juga istrinya Ufh, sebelum terjadi peristiwa bencana lumpur Lapindo bekerja sebagai buruh pabrik perusahaan Krupuk Chiki dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sejak tahun 2007 pabrik tempat Slh dan Ufh bekerja, yang lokasinya ada di wilayah Desa Jatirejo, terpaksa harus berhenti beroperasi karena terendam oleh lumpur. Kondisi ini berdampak pada terjadinya PHK masal karyawan pabrik, termasuk Slh dan Ufh. Maka sejak tahun 2007, Slh dan Ufh menjadi pengangguran. Untuk menyambung hidup, mereka terpaksa mencari pekerjaan di sekitar tanggul lumpur Lapindo, Slh menjadi tukang ojek, sementara Ufh berjualan kaset CD rekaman peristiwa lumpur Lapindo dan menawarkan jasa photo bagi pengunjung yang ingin melihat genangan lumpur di atas tanggul. Penghasilan Slh dan Ufh dari pekerjaan di tanggul lumpur setiap harinya tidak menentu, kadang mendapat penghasilan kadang tidak.

*"...Kadang nggak dapat, kadang dapat 30 ribu. Kadang ya nggak dapat sama sekali. Ini tadi sudah dapat 20 ribu dari rolaty potret tadi. Ada orang yang minta potret di lumpur. Kita tawarin mau nggak dipotret langsung jadi, terus saya dapat 20 ribu...malahan seringnya ya tidak dapat. Kemarin ya cuma dapat 10 ribu..."<sup>190</sup>.*

#### Catatan:

1. Dulu tinggal di rumah milik sendiri, sekarang harus mengontrak.
2. Dampak bencana Lumpur Lapindo menyebabkan pengangguran.

<sup>190</sup> Kutipan wawancara dengan Ulfah, korban bencana Lumpur Lapindo, Sabtu: 1 Maret 2013.

Uraian diatas merupakan beberapa contoh kasus yang menunjukkan bagaimana warga yang menjadi korban lumpur Lapindo harus kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber bagi penghidupannya. Menurut penjelasan dari beberapa warga korban lumpur Lapindo yang ditemui di atas tanggul lumpur<sup>191</sup>, bahwa masih banyak warga yang lainnya yang nasibnya sama dengan mereka. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007, sebanyak 3.562 buruh terkena PHK akibat sembilan perusahaan tutup dan sepuluh perusahaan lainnya melakukan pengurangan buruh. Sementara 2.302 buruh korban lumpur panas masih terkatung-katung tanpa pekerjaan akibat 26 pabrik tempatnya bekerja terendam lumpur. Sementara menurut catatan Komnas Ham, Hak masyarakat untuk bekerja atau membuat pekerjaan baru juga lenyap terendam lumpur. Akibat sekitar 20 perusahaan terendam lumpur, sekitar 3.560 buruh kehilangan pekerjaan selama 2006. Nasib 2.300 buruh lainnya masih terkatung-katung hingga sekarang, yakni sekitar sembilan bulan setelah lumpur pertama kali menyembur. Berdasarkan data terakhir tahun 2013, menurut penjelasan dari Ritonga<sup>192</sup>, tercatat ada 33 perusahaan hancur tenggelam Lumpur Lapindo yang mengakibatkan sekitar 10.000 karyawan terpaksa menganggur.

Sikap pemerintah dianggap “lunak” terhadap pihak PT LBI. Seperti dinyatakan oleh Masrukh<sup>193</sup>, bahwa pemerintah telah melakukan kejahatan besar karena memberikan ijin kepada PT LBI untuk melakukan eksplorasi migas di tengah-tengah pemukiman padat warga yang seharusnya tidak boleh.

Menurut Chalid Muhammad<sup>194</sup>, negara dianggap takluk kepada kekuatan korporasi karena tidak berani membongkar peristiwa semburan lumpur PT LBI. Senada dengan Chalid, Riza Damanik<sup>195</sup>

---

<sup>191</sup> Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa warga korban lumpur lapindi, seperti: Zaenul Arifin, Irfan, Nartadji, Mustofa, Sulastri, dsb.

<sup>192</sup> S.H. Ritonga, adalah Ketua GPKLL, data hasil wawancara.

<sup>193</sup> Masrukh, *opcit*.

<sup>194</sup> Chalid Muhammad adalah Ketua Institut Hijau Indonesia, Lembaga ini merupakan lembaga yang bergerak untuk menegakkan perlawanan terhadap dehumanisasi dan penegakan keadilan di masyarakat utamanya dalam bidang sosio-ekologis.

<sup>195</sup> Riza Damanik adalah Sekretaris Jenderal KIARA, yakni Organisasi Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo.

juga menyatakan bahwa pemerintah tidak berdaya menekan PT LBI untuk bertanggung jawab atas semburan lumpur di ladang gasnya, bahkan negara dianggap telah gagal memainkan perannya. Sementara itu Puspa Dewy<sup>196</sup> berpandangan bahwa pemerintah juga dinilai tidak serius menangani korban perempuan yang rentan terhadap pelecehan seksual dan kriminalisasi, peristiwa lumpur Lapindo telah menambah beban hidup perempuan<sup>197</sup>.

Sukiadi (dalam Akbar, 2012: xxiv)<sup>198</sup> menyatakan bahwa kasus Lumpur Lapindo adalah praktek kasat mata Korporatokrasi sebagai akibat rusaknya sistem ketatanegaraan sehingga negara harus menanggung kejahatan korporasi melalui APBN, yang berujung pada merosotnya kemampuan negara dalam memberikan kesejahteraan rakyat banyak. Lahirnya dua buah kebijakan presiden tentang penanganan dampak bencana Lumpur Lapindo, yakni berupa 2 (dua) Keputusan Presiden (Kepres) dan 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres) yang mengikutinya, berhasil mengkanalisasi dari bencana korporat menjadi bencana alam. Beban tanggung jawab finansial korporat bergeser menjadi tanggung jawab negara dan dibebankan kepada rakyat melalui APBN. Inilah tabel kejahatan korporatokrasi yang ditanggung oleh rakyat melalui kebijakan pemerintah yang sudah tidak lagi "pro-rakyat". Beban APBN ini tidak berhenti sampai disini selama kebijakan yang dibuat Presiden dan keputusan politik DPR belum dianulir. Karenanya, argo kuda perampokkan APBN terus berjalan bagaikan bola salju. Belum lagi kerugian masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang jumlahnya secara material berpuluh-kali lipat besarnya. Beban negara akan semakin bertambah berat lagi mengingat, menurut Richard Davies<sup>199</sup> dan kawan-kawan, sulit untuk memprediksikan kapan kepastian semburan lumpur Lapindo akan berhenti. Namun, menurutnya kemungkinan prediksi semburan lumpur Lapindo

---

<sup>196</sup> Puspa Dewy adalah Staf Divisi Perempuan dan Konflik Sumberdaya Alam Solidaritas Perempuan.

<sup>197</sup> Lihat: <http://www.tempo.co/read/fokus/2010/05/29/1313/Negara-Dituding-Takluk-kepada-Korporasi>.

<sup>198</sup> Akbar, Ali Azhar. *Op.cit.* Hal xxiv.

<sup>199</sup> Richard Davies, dkk., adalah ahli geologi dari Universitas Durham, Inggris, menulis dalam *Journal of the Geological Society*.

tersebut baru akan berhenti sekitar 26 tahun lagi dihitung dari tahun 2011, yakni sekitar tahun 2033.

### **G. Pembagian Tanggungjawab Wilayah Peta Area Terdampak Bencana Lumpur Lapindo**

Wilayah terdampak bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo dibagi kedalam dua kategori wilayah terdampak, yakni wilayah dalam Peta Area Terdampak (dalam PAT) dan wilayah luar Peta Area Terdampak (luar PAT). Luas wilayah terdampak bencana Lumpur Lapindo yang masuk wilayah dalam PAT meliputi sekitar 641 hektar, sementara luas wilayah terdampak yang masuk wilayah luar PAT sekitar 550 hektar.

Penentuan wilayah yang masuk dalam PAT didasarkan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2007. Menurut Perpres Nomor 14 tahun 2007 tersebut bahwa dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjodengan pembayaran secara bertahap, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah. Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam Peta Area Terdampak meliputi 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis. Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas. Sedangkan biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Selanjutnya penentuan wilayah yang masuk luar PAT didasarkan atas beberapa Peraturan Presiden (Perpres), yakni: Perpres Nomor 48 tahun 2008, Perpres Nomor 40 tahun 2009, Perpres Nomor 68 tahun 2011, Perpres Nomor 37 tahun 2012, dan Perpres Nomor 33 tahun 2013. Intinya adalah bahwa biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak (PAT) dibebankan pada APBN. Dalam rangka penanganan masalah sosial

kemasyarakatan, dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah. Proses jual beli ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Sidoarjo (BPLS) atas nama pemerintah.

Hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa relasi antara korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI dan pihak pemerintah adalah diatur melalui skema relasi jual-beli. Artinya pihak warga korban bencana Lumpur Lapindo diposisikan sebagai pihak penjual aset tanah dan bangunan yang hancur tenggelam atau karena tidak layak huni. Sedangkan pihak PT LBI dan pihak pemerintah diposisikan sebagai pihak pembeli aset tanah dan bangunan. Dalam proses jual-beli tersebut pihak PT LBI dan pemerintah mensyaratkan bukti kepemilikan atas aset tanah dan bangunan milik warga korban agar bisa dilakukan pembayaran.

Menurut penjelasan Humas BPLS, dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak PT LBI sebesar Rp 3,03 Triliun, sedangkan untuk dana APBN sebesar Rp 2,8 Triliun<sup>200</sup>. Namun menurut sumber lain, sejak 2006 pemerintah telah menggelontorkan total dana sekitar Rp 7,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk menyelesaikan masalah bencana lumpur Sidoarjo korban. Dana tersebut digunakan, antara lain, sebagai kompensasi atas kehilangan harta benda dan kehilangan pendapatan masyarakat yang menjadi korban bencana. Dana APBN sekitar Rp 7,6 triliun tersebut dirinci sebagai berikut: APBN tahun 2007 sebesar Rp 113,9 Miliar, APBN tahun 2008 sebesar Rp 1,1 Triliun, APBN tahun 2009 sebesar Rp 592,1 Miliar, APBN tahun 2010 sebesar Rp 1,2 Triliun, APBN tahun 2011 sebesar Rp 1,3 Triliun; APBN tahun 2012 sebesar Rp 1 Triliun, dan APBN tahun 2013 sebesar Rp 2,2 Triliun<sup>201</sup>.

Dalam perkembangan selanjutnya, proses pembayaran jual beli untuk wilayah luar PAT yang menjadi tanggung jawab pemerintah berjalan dengan lancar. Hal ini berbeda dengan proses pembayaran

---

<sup>200</sup> Wawancara via sms dengan Humas BPLS, Dwinanto, Rabu: 13 Mei 2015.

<sup>201</sup> <http://katadata.co.id/infografik/2014/12/09/duit-negara-disedot-lapindo>. Diakses: Rabu, 13 Mei 2015.

jual beli untuk wilayah dalam PAT yang menjadi tanggung jawab pihak PT LBI yang mengalami kemacetan karena masalah keuangan. Kondisi ini menyebabkan munculnya perasaan sebagai bentuk ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kepada warga korban bencana Lumpur Lapindo terutama yang masuk wilayah dalam PAT.

## **H. Kebijakan Pemerintah yang Merugikan Korban Bencana**

Dominasi pemerintah atas korban bencana Lumpur Lapindo tercermin juga dalam kebijakan pemerintah terkait penyelesaian permasalahan dampak bencana Lumpur Lapindo. Dalam upaya mengatasi permasalahan sosial-kemasyarakatan sebagai dampak dari bencana Lumpur Lapindo, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupa Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres Nomor 14 Tahun 2007.

Salah satu konsekuensi dari terbitnya payung (jaminan) hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembayaran ganti rugi bagi korban bencana Lumpur Lapindo adalah ketentuan yang mengatur relasi antara warga korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI dan pemerintah menjadi relasi antara penjual-pembeli (relasi jual-beli). Artinya pihak warga korban bencana dianggap sebagai pihak penjual aset tanah dan bangunan, sementara pihak PT LBI dan Pemerintah diposisikan sebagai pihak pembeli. Proses jual-beli ini harus dilakukan dengan menggunakan akad jual-beli di hadapan notaris. Persoalan berikutnya yang muncul adalah berkaitan dengan persyaratan administratif sebagai bukti yang sah atas kepemilikan aset warga. Pihak PT LBI dan Pemerintah meminta persyaratan bukti berupa sertifikat untuk tanah dan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan, sementara bukti *letter-C* dan petok-D tidak diakui sebagai bukti yang sah.

Persoalan yang muncul adalah bahwa ternyata bukti persyaratan administratif yang disampaikan oleh pihak PT LBI tidak bisa dipenuhi oleh warga korban. Misalnya, dari 800 berkas yang milik warga korban di Desa Jatirejo, hanya 10 orang yang memiliki sertifikat tanah dan hanya satu orang yang memiliki IMB. Sementara dari jumlah keseluruhan berkas milik warga di empat desa, yakni sebanyak 4.000 berkas, dimana yang paling banyak berkas milik warga dari Desa Kedungbendo, ternyata hanya 110 berkas saja yang bersertifikat.



Dengan demikian kebijakan pemerintah berupa Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tersebut sangat merugikan posisi korban bencana Lumpur Lapindo.

## I. Simpulan

Kebijakan pemerintah dalam konteks bencana Lumpur Lapindo tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kurun waktu antara 2004-2014, terutama terkait peran Aburizal Bakrie (ARB) baik sebagai Menteri Koordinator pada KIB I maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Pemerintah (negara) dan pihak PT LBI (korporasi) melakukan tindakan dominatif dalam pengelolaan sumberdaya Migas di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang mengakibatkan munculnya kesengsaraan bagi korban bencana. Gambaran bentuk dominasi pemerintah (negara) dan korporasi (PT LBI) dalam arena peristiwa bencana Lumpur Lapindo, sebagai berikut:

- *Pertama*; Kebijakan pemerintah dalam memberikan ijin eksplorasi Migas di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo melanggar penggunaan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2012, Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Jawa Timur 2005-2020. Selain itu juga melanggar Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- *Kedua*; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kasus bencana lumpur Lapindo yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
- *Ketiga*; Masyarakat di sekitar Porong, khususnya masyarakat Desa Renokenongo, melihat adanya proses yang tidak transparan

dalam proyek eksplorasi Migas yang dilakukan oleh PT LBI. Semula perwakilan dari pihak PT LBI menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembelian tanah warga oleh PT LBI diperuntukkan bagi pengembangan kawasan peternakan ayam, bukan untuk lokasi pengeboran minyak dan gas (Migas);

- *Keempat*; Bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo menjadi arena produksi kemiskinan dan ketidakberdayaan bagi warga yang ada di wilayah Kecamatan Porong, dan sekitarnya, yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo. Menurut penjelasan beberapa warga, pada umumnya korban bencana Lumpur Lapindo kehidupannya menjadi miskin dan tidak berdaya; dan
- *Kelima*; Dominasi pemerintah atas korban bencana Lumpur Lapindo tercermin juga dalam kebijakan pemerintah terkait penyelesaian permasalahan dampak bencana Lumpur Lapindo. Salah satu konsekuensi dari terbitnya payung (jaminan) hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembayaran ganti rugi bagi korban bencana Lumpur Lapindo adalah ketentuan yang mengatur relasi antara warga korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI dan pemerintah menjadi relasi antarpemjual-pembeli (relasijual-beli). Warga korban bencana Lumpur Lapindo harus menunjukkan bukti-bukti otentik, seperti sertifikat dan bukti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) agar bisa mendapatkan ganti rugi dari pihak PT LBI dan pemerintah. Bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo tidak hanya memproduksi ketidakadilan, akan tetapi juga menjadi arena produksi kemiskinan dan ketidakberdayaan bagi warga yang ada di wilayah Kecamatan Porong, dan sekitarnya, yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo.

Dalam konteks ini maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah dan PT LBI merupakan agen dominasi, sementara korban bencana Lumpur Lapindo sebagai subyek dominasi, dan kebijakan pemerintah yang memberikan ijin eksplorasi migas kepada pihak PT LBI yang mengakibatkan terjadinya bencana Lumpur Lapindo sebagai situasi dan kondisi *dominating*.



# Bab 4

## Kebijakan Dominatif Negara & Korporasi Yang Melahirkan Ide Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo

Peta dinamika dan perkembangan Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo dapat di analisis pada periode pertama gerakan, yakni dalam kurun waktu antara 29 Mei 2006 hingga April 2007. Pada periode ini merupakan waktu dimana awal terjadinya bencana Lumpur Lapindo hingga munculnya kebijakan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 8 April 2007. Pada periode pertama ini dapat dikatakan sebagai fase munculnya ide aksi pra-Gerakan Sosial karena kelompok (organisasi) Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo belum terbentuk. Struktur mobilisasi tindakan kolektif korban bencana Lumpur Lapindo masih dilakukan secara sporadis oleh komunitas lingkungan setempat, seperti: RT, RW, dan Desa atas inisiatif beberapa tokoh dan pemimpin informal masyarakat.

Pada periode pertama ini, korban bencana Lumpur Lapindo mendapat bantuan dan dukungan advokasi dari koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam "Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo". Koalisi "Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo" yang dimotori oleh YLBHI dan Walhi melakukan aksi gugatan hukum (ligitasi), yakni menuntut

pihak pemerintah dan PT LBI atas perbuatan melawan hukum kepada pihak pengadilan.

### **A. Kegagalan Pihak Pemerintah dan PT LBI dalam Menghentikan Semburan Lumpur**

Analisis kondisi yang mendasari munculnya tindakan kolektif pra-gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo pada periode pertama ini karena adanya kekecewaan dan ketidakpuasan korban bencana Lumpur Lapindo terhadap respons pihak pemerintah dan PT LBI atas penanganan semburan lumpur. Warga korban bencana Lumpur Lapindo menilai bahwa: (1) Pihak PT LBI dan pemerintah telah gagal dalam upaya mengatasi (menutup) semburan lumpur; dan (2) Respons pihak PT LBI dan pemerintah juga dinilai lamban dalam upaya mengatasi dampak semburan lumpur.

Pada awalnya respons warga terhadap peristiwa semburan lumpur panas yang berpusat di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong mulai terjadi pada tanggal 29 Mei 2006, tenang-tenang saja karena tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Warga masyarakat percaya bahwa pihak pemerintah lokal (RT, RW, dan Desa) akan mengambil inisiatif dalam upaya mengatasi masalah semburan lumpur ini. Warga juga percaya bahwa pihak pemerintah dan PT LBI akan mampu mengatasi semburan lumpur panas.

Hingga awal Agustus 2006, warga yang ada disekitar semburan lumpur belum sampai kepada pemikiran bahwa mereka akan mengungsi atau meninggalkan daerahnya, apalagi harus pindah tempat tinggal. Warga masih berkeyakinan bahwa semburan lumpur dapat dihentikan. Namun memasuki akhir bulan Agustus 2006, warga mulai panik karena ternyata luapan lumpur semakin dasyat. Hampir sepertiga Desa Jatirejo, misalnya, sudah tergenang oleh lumpur. Warga mulai merasa pesimis atas kondisi yang ada, warga merasa bahwa semburan lumpur akan sulit untuk dihentikan. Volume semburan lumpur panas Lapindo semakin besar dan menggenangi wilayah pemukiman, persawahan, pertambakan, dan sebagainya yang ada di wilayah sekitar pusat semburan.

Terjadinya peristiwa semburan lumpur di wilayah desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, dan sekitarnya, mengakibatkan munculnya situasi yang mencekam bagi warga masyarakat yang

ada di sekitar semburan. Masyarakat mulai resah karena lumpur sudah masuk dan menggenang areal pemukiman warga. Kondisi seperti ini sangat membahayakan keselamatan warga, sehingga dengan sangat terpaksa warga korban bencana Lumpur Lapindo harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi ke tempat yang aman. Warga terpaksa harus mengungsi meninggalkan wilayah tempat tinggalnya karena lumpur mulai menggenang pemukiman warga. Proses pengungsian pertama kali terjadi pada tanggal 5 Juni 2006. Pada awalnya warga mengira bahwa mereka akan mengungsi untuk sementara waktu saja, namun ternyata warga tidak pernah bisa kembali lagi ke rumahnya karena wilayah pemukiman mereka sudah tenggelam oleh lumpur.

Warga korban bencana Lumpur Lapindo yang berasal dari berbagai desa, seperti: Siring, Renokenongo, KedungBendo, dan desa lainnya mengungsi ke beberapa tempat yang menjadi lokasi pengungsian, terutama lokasi pengungsian di Pasar Porong Baru (PPB). Hingga tanggal 26 Juni 2006 jumlah warga korban bencana Lumpur Lapindo yang mengungsi tercatat sekitar 1.400 KK atau sekitar 5.651 jiwa. Menurut data laporan Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak), Penanggulangan Bencana, Pemkab Sidoarjo, menyebutkan jumlah warga korban yang mengungsi terdiri dari 1.121 KK atau 4.944 jiwa berada di lokasi pengungsian Pasar Porong Baru (PPB) dan sebanyak 189 KK atau 707 jiwa berada di lokasi pengungsian Balai Desa Renokenongo<sup>202</sup>. Selanjutnya warga yang mengungsi di Balai Desa Renokenongo bergabung dengan pengungsi yang ada di Pasar Porong Baru (PPB) karena wilayah Desa Renokenongo terendam oleh lumpur.

Gelombang pengungsian terus berlanjut, dan jumlah pengungsi juga semakin bertambah. Warga korban bencana Lumpur Lapindo harus bertahan di lokasi pengungsian hingga tahun 2009, sekitar 2 tahun. Memang tidak semuanya warga korban yang harus meninggalkan rumahnya berada di lokasi pengungsian, sebab sebagian dari mereka ada juga yang numpang di keluarga dan sanak familinya atau mengontrak rumah di tempat yang aman.

---

<sup>202</sup> <http://www.antaranews.com/berita/36723/pengungsi-korban-lumpur-lapindo-capai-5651-jiwa>.

Hingga tahun 2012 lebih dari sekitar 15.788 KK atau 48.983 Jiwa warga korban bencana Lumpur Lapindo harus pindah dari tempat tinggal asalnya ke tempat yang baru.

Pada tanggal 8 September 2006, sekitar empat bulan setelah terjadinya semburan lumpur, pemerintah baru mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLs). Tugas Timnas PSLs disebutkan dalam bagian Ketiga dari Kepres tersebut, yakni: "Timnas mempunyai tugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi: (a) penutupan semburan lumpur; (b) penanganan luapan lumpur; dan (c) penanganan masalah sosial"<sup>203</sup>. Dengan demikian, tugas penutupan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur yang semula ditangani oleh pihak PT LBI diambil alih Timnas PSLs.

Munculnya kebijakan pemerintah berupa terbitnya Kepres No. 13/2006 yang mengambil alih tanggung jawab penutupan semburan Lumpur Lapindo dari pihak PT LBI menjadi tanggung jawab negara melalui Timnas PSLs, tidak terlepas dari konteks konstelasi politik pemerintahan Presiden SBY pada saat itu. Pada kurun waktu pemerintahan Presiden SBY, yakni periode 2005-2009, posisi ARB adalah sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (21 Oktober 2004 sampai 7 Desember 2005) dan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (7 Desember 2005 sampai 20 Oktober 2009). Sebagaimana dijelaskan pada Bab II bahwa saham PT LBI sebesar 50% dimiliki oleh PT Energy Meda Persada (PT EMP) milik keluarga Bakrie (Bakrie Group).

Namun ternyata upaya Timnas PSLs dalam menutup semburan lumpur juga tidak berhasil. Warga korban bencana Lumpur Lapindo merasa kecewa atas respons pemerintah dan PT LBI yang gagal dalam upaya menutup semburan lumpur. Selain itu, warga korban bencana Lumpur Lapindo juga merasa kecewa dan tidak puas atas penanganan pengungsian.

---

<sup>203</sup> Lihat: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, tertanggal 8 September 2006.

## **B. Mobilisasi Massa yang Berbasis Komunitas Masyarakat Lokal**

Pada periode pertama ini, mobilisasi tindakan kolektif korban bencana Lumpur Lapindo masih bersifat sporadis. Mobilisasi tindakan kolektif dilakukan oleh komunitas RT, RW, dan Desa yang sifatnya temporal. Pada periode ini kelompok (organisasi) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo belum terbentuk. Gambaran dinamika struktur mobilisasi tindakan kolektif (pra-gerakan sosial) korban bencana Lumpur Lapindo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada awalnya, aksi korban bencana Lumpur Lapindo masih berupa tindakan kolektif. Pada periode ini, struktur mobilisasi korban bencana Lumpur Lapindo masih bersifat sporadis atas dasar wilayah RT, RW, dan Desa masing-masing, karena kelompok-kelompok korban bencana Lumpur Lapindo belum terbentuk. Warga mulai panik, karena semburan lumpur semakin besar dan meluber ke kawasan pemukiman penduduk. Aksi sporadis mulai dilakukan warga masing-masing wilayah yang menuntut aliran lumpur ke wilayahnya ditutup.

Menurut penuturan KH<sup>204</sup>, pada tanggal 4 Juni 2006 sekitar 6 hari setelah terjadinya semburan lumpur, warga mulai resah karena lumpur sudah masuk ke jalan raya Renokenongo. Luberan lumpur kira-kira sudah mencapai mata kaki menggenangi jalan. Masyarakat kemudian melakukan aksi demonstrasi meminta supaya pihak PT LBI membuat tanggul penahan lumpur supaya tidak meluber ke wilayah perkampungan penduduk. Tuntutan warga masih bersifat sporadis, warga masih berjuang sendiri-sendiri sesuai dengan desanya masing-masing. Warga Siring memperjuangkan wilayah Desa Siring, warga Jatirejo memperjuangkan wilayah Desa Jatirejo, warga Renokenongo memperjuangkan wilayah Desa Renokenongo, dan sebagainya. Misalnya, ketika lumpur mengalir ke Desa Siring, kemudian warga Desa Siring melakukan aksi menuntut supaya dibuatkan tanggul penahan lumpur, demikian pula dengan wilayah desa yang lainnya. Di antara wilayah desa-desa yang mulai terkena genangan lumpur belum ada koordinasi.

---

<sup>204</sup> Wawancara dengan KH, Sabtu: 6 April 2013.



Kondisi ini menimbulkan kerawanan berupa konflik horisontal antar warga desa, karena begitu akses lumpur ke Desa Siring ditutup oleh tanggul, misalnya, maka tanggul tersebut kemudian dijebol oleh warga dari Desa Jatirejo karena warga Desa Jatirejo khawatir aliran lumpur akan berpindah ke desanya. Ketika lumpur mulai masuk wilayah Desa Jatirejo, kemudian warga Desa Jatirejo menuntut dibuatkan tanggul tapi kemudian dijebol oleh warga Desa Siring, dan seterusnya. Masing-masing wilayah desa juga membentuk Pam-Swakarsa (Pengamanan Swakarsa) yang tugasnya memantau situasi dan kondisi lumpur di wilayah RT, RW, dan Desa masing-masing. PT LBI melakukan penanggulangan lumpur sesuai dengan tuntutan warga masing-masing wilayah RT, RW, dan Desa tersebut melalui Pam Swakarsa desanya masing-masing.

Mengingat potensi konflik antar-warga karena proses pembuatan tanggul yang sifatnya sporadis (parsial), sementara semburan lumpur semakin besar dan aliran lumpur semakin luas, maka PT LBI meminta bantuan TNI untuk melakukan proses pembuatan tanggul lumpur secara menyeluruh. Maka sejak tanggal 26 Juni 2006, pihak TNI mengambil-alih proses pembuatan tanggul penahan lumpur dan dibuatlah kolam penampungan lumpur. Oleh karena yang terlibat dalam pembuatan tanggul kolam penampungan lumpur dilakukan oleh pihak TNI, maka warga tidak berani untuk melakukan pengebolan lagi.

Pada awalnya, komunikasi warga hanya dilakukan oleh warga masing-masing desa dengan pihak PT LBI. Warga di antara wilayah Desa yang terkena genangan lumpur masih belum ada koordinasi, namun masing-masing desa sudah dibentuk Pam Swakarsa yang difasilitasi oleh pemerintah desa masing-masing. Tugas Pam Swakarsa masing-masing desa adalah memantau perkembangan situasi dan kondisi lumpur. Hingga awal Agustus 2007, warga yang ada disekitar semburan lumpur belum sampai kepada pemikiran bahwa mereka akan mengungsi atau meninggalkan daerahnya, apalagi harus pindah tempat tinggal. Warga masih berkeyakinan bahwa semburan lumpur dapat dihentikan. Namun memasuki akhir bulan Agustus 2007, warga mulai panik karena ternyata luapan lumpur semakin dasyat. Hampir sepertiga Desa Jatirejo, misalnya, sudah tergenang oleh lumpur. Warga mulai merasa pesimis atas kondisi

yang ada, warga merasa bahwa semburan lumpur akan sulit untuk dihentikan.

Menghadapi kondisi seperti ini, kemudian salah satu warga Desa Jatirejo yakni Khoirul Huda melakukan upaya penjangkaran aspirasi dan pendapat warga (*polling*). Khoirul Huda menyebarkan angket kepada warga Desa Jatirejo, terutama yang ada di RT 4 sampai dengan RT 13. Hasil penyebaran angket, menyatakan bahwa sebesar 77% warga Desa Jatirejo menginginkan pindah dari Desa Jatirejo karena melihat bahwa semburan lumpur semakin besar dan susah untuk dihentikan. Sementara sisanya yang 33% menolak untuk pindah, dan mereka ingin tetap tinggal di wilayah Desa Jatirejo apapun yang terjadi. Dari warga yang 77% minta pindah dari Desa Jatirejo, sebesar 80% warga korban lumpur Lapindo meminta model *cash and carry*, yakni menuntut ganti rugi secara *cash* (tunai) atas aset tanah, bangunan, dan harta benda mereka. Sementara sisanya sebesar 20% meminta model relokasi (*resettlement*) ke tempat tinggal yang baru.

Selanjutnya KH dan kelompok Pam Swakarsa Desa Jatirejo, melakukan koordinasi dan menggodok aspirasi warga berdasarkan hasil *polling* ini. Tim kemudian memutuskan bahwa keinginan mayoritas warga korban lumpur Lapindo yang ada di Desa Jatirejo yaitu menginginkan pindah dari wilayah Desa Jatirejo dengan skema pembayaran ganti-rugi *cash and carry* (secara tunai) dijadikan sebagai bentuk tuntutan yang kemudian akan diperjuangkan kepada pihak PT LBI.

Inisiatif warga Desa Jatirejo yang dimotori oleh KH ini kemudian mendapat respons dari warga korban yang ada di desa lainnya, seperti: Desa Siring, Desa Renokenongo, Desa Kedungbendo, Perum TAS, dan wilayah-wilayah lainnya. Warga korban bencana yang ada di luar Desa Jatirejo tersebut kemudian meniru model wacana yang diputuskan warga Desa Jatirejo yakni mereka juga menginginkan pindah dari Desanya dengan skema penggantian *cash and carry*. Dengan demikian terdapat kesamaan aspirasi di antara warga korban lumpur Lapindo dari seluruh wilayah desa yang terkena luapn lumpur, yaitu desa: Jatirejo, Siring, Kedungbendo, Renokenongo, Gempolsari, Perum TAS, dan sekitarnya.

Akhirnya, sejak Oktober 2006, di antara warga korban dari berbagai desa tersebut sudah mulai terbangun komunikasi dan koordinasi secara informal, namun perjuangan warga korban masih tetap dilakukan secara sektoral berdasarkan wilayah desa masing-masing. Sebagaimana yang dikemukakan oleh KH sebagai berikut:

*"...Maka saat muncul wacana cash and carry, nah terus kita godog berapa keinginan warga untuk mendapatkan ganti rugi, macem-macem keinginan warga, jadi kita rapat dan sebagainya, apa namanya ada yang minta ini itu dan sebagainya, tapi kemudian kita sama-sama akhirnya sekitar bulan Oktober-Nopember 2006 kita sama-sama dengan desa lain, intinya warga di desa lain juga menginginkan hal sama dengan kelurahan Jatirejo, yaitu ingin pindah dari desa dan kemudian wacananya hampir sama minta cash and carry, itulah kemudian yang kita lakukan secara sektoral tapi kita terkoordinasi, tapi belum bentuk kelompok, masih istilahnya terkotak-kotak dalam bingkai-bingkai desa, tetapi kita punya satu tujuan ingin mendapatkan suatu ganti rugi secara cash and carry. Nah itu sudah mulai kita perjuangkan secara sama-sama...". (Rekapan wawancara dengan KH: Sabtu, 6 April 2013)<sup>205</sup>*

Dengan demikian, sampai dengan bulan Oktober-Nopember 2006 warga korban lumpur Lapindo belum membentuk organisasi (kelompok) gerakan sosial. Perjuangan masih bersifat sporadis dan sektoral berdasarkan wilayah desa masing-masing, namun diantara mereka sudah terdapat kesamaan tuntutan dan sudah dibangun koordinasi lintas desa.

Pada tanggal 23 Juni 2007, didampingi oleh tokoh budayawan Cak Nun (Emha Ainun Najib), 12 perwakilan warga dari tujuh kelompok desa atau wilayah yang terkena genangan lumpur Lapindo, yakni; Desa Jatirejo, Desa Siring, Desa Renokenongo, Desa Kedungbendi, Desa Kalitengah, Desa Ketapang, dan Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum TAS), kemudian menghadap Presiden di Istana Negara. Perwakilan warga kemudian menjelaskan tentang situasi dan kondisi semburan dan genangan lumpur, serta

---

<sup>205</sup> Kutipan pernyataan KH, dalam wawancara hari Sabtu, 6 April 2013

apa yang menjadi keinginan warga korban kepada Presiden SBY. Menurut KH, setelah mendapat penjelasan dari perwakilan warga korban, Presiden baru mengerti persoalan yang sebenarnya. Setelah itu kemudian Presiden mengambil keputusan untuk berkantor di Sidoarjo, tepatnya di Bandar Juanda Surabaya, selama tiga hari dari hari Senin sampai Rabu, tanggal 24-25 Juni 2007 untuk menyelesaikan persoalan lumpur lapindo.

*"Di dampingi Cak Nun, yang tadi saya ceritakan Cak Nun pake sandal itu. Nah disitu kemudian kita baru tahu bahwa pak SBY sebenarnya tidak paham benar tentang lumpur. Karena kita sudah apa namanya, ada juru bicara-juru bicara yang menceritakan masalah kondisi sosial, kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Pak SBY baru "Ngeh", dan kemudian beliau setelah peristiwa itu, itu kan hari Minggu, besoknya itu ke Surabaya dan berkantor selama tiga hari di Juanda itu. Itulah yang kemudian perintah pak SBY untuk segera memberikan pembayaran kepada warga". (Kutipan wawancara dengan KH: Sabtu, 6 April 2013)<sup>206</sup>*

Ketika kelompok warga korban ini menghadap Presiden di Istana Negara, mereka masih mengatasnamakan warga korban dari desanya masing-masing. Belum terbentuk kelompok/organisasi gerakan sosial korban lumpur Lapindo.

Pada tahap ini, korban bencana Lumpur Lapindo belum melakukan mobilisasi sumberdaya finansial. Dana diperoleh dari iuran pribadi para pemimpin lokal masing-masing desa dengan sebagian dukungan dana dari pihak LSM, seperti dari komunitas "Bambang Wetan" pimpinan Cak Nun (Emha Ainun Najib).

### **C. Dukungan dan Peran Advokasi Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Pada kurun waktu periode pertama fase munculnya pra-gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo merupakan fase dimana banyak mendapatkan dukungan dan simpati dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berbagai LSM yang memberikan

---

<sup>206</sup> ibid

dukungan dan simpati terhadap korban bencana Lumpur Lapindo dapat digambarkan sebagai berikut.

## 1. Dukungan Berbagai LSM Terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo

Peristiwa semburan Lula di Sidoarjo, tepatnya di wilayah desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, dan sekitarnya, Kabupaten Sidoarjo, yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2006, mendapat perhatian dan mengundang simpati dari masyarakat luas baik dalam skala regional, nasional, dan bahkan masyarakat internasional. Selain sebuah peristiwa yang langka, bencana Lumpur Lapindo (Lula) juga telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat di wilayah sekitar terjadinya bencana tersebut.

Berbagai pihak telah memberikan simpati, dukungan, dan advokasi terhadap warga korban bencana Lumpur Lapindo, baik bersifat individu maupun organisasi (kelompok) advokasi, seperti LSM. Organisasi (kelompok) dan LSM yang memberikan advokasi terhadap warga korban bencana Lumpur Lapindo juga ada yang bersifat regional, nasional, dan internasional. Beberapa organisasi (kelompok) dan LSM yang memberikan advokasi terhadap warga korban bencana Lumpur Lapindo, antara lain: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)<sup>207</sup>, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)<sup>208</sup>, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)<sup>209</sup>,

---

<sup>207</sup> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi lingkungan hidup independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. Walhi didirikan pada 15 Oktober 1980 sebagai reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan keadilan. WALHI merupakan forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (LSM/Ornop/NGO), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Lihat: [http://id.wikipedia.org/wiki/Wahana\\_Lingkungan\\_Hidup\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Wahana_Lingkungan_Hidup_Indonesia).

<sup>208</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat YLBHI tadinya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Sumber Lihat: [http://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan\\_Lembaga\\_Bantuan\\_Hukum\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Bantuan_Hukum_Indonesia).

<sup>209</sup> Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. KOMNAS HAM BERTUJUAN: (1) Mengembangkan kondisi

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Indonesia<sup>210</sup>, Lembaga Studi dan Kajian Advokasi HAM (ELSAM)<sup>211</sup>, *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL)<sup>212</sup>, Huma<sup>213</sup>, Koalisi Rakyat untuk Keadilan dan Perikanan (KIARA)<sup>214</sup>, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)<sup>215</sup>, Satu Dunia<sup>216</sup>, LBH Masyarakat<sup>217</sup>, Solidaritas Perempuan (SP)<sup>218</sup>, Imparsial<sup>219</sup>, dan sebagainya. Mereka tergabung dalam sebuah tim yang disebut “Tim Advokasi Korban Bencana Lumpur Lapindo”, khususnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Lembaga Studi dan Kajian Advokasi HAM (ELSAM), Jatam, ICEL, dan Huma<sup>220</sup>. Tim Advokasi ini dibentuk untuk memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat yang menderita kerugian akibat luapan lumpur yang diduga akibat kesalahan eksplorasi PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur.

Selain Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo terdapat juga “Koalisi Keadilan Korban Lumpur Lapindo (K3L)” yang terdiri dari beberapa LSM, yakni: Ciliwung Merdeka, ELSAM

---

yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan (2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Lihat: <http://www.komnasham.go.id/>.

<sup>210</sup> Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas. Sumber lihat: <http://www.jatam.org/>.

<sup>211</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. SumberLihat: <http://www.elsam.or.id/>.

<sup>212</sup> Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) atau Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, didirikan tahun 1993 oleh lima orang pendiri, yakni Mas Achmad Santosa, Mochamad Zaidun, Sandra Moniaga, Benny K. Harman, dan Wahyuni Bahar. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembangunan pada masa orde baru yang sangat berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan pengurasan sumber daya alam, perusakan lingkungan, serta tarbaikannya kepentingan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam Sumber lihat: [http://perpustakaan.menlh.go.id/index.php/directories/detail/2013011\\_513264931](http://perpustakaan.menlh.go.id/index.php/directories/detail/2013011_513264931).

<sup>213</sup> HuMa adalah organisasi non pemerintah (*non governmental organization*) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (*law reform*) pada bidang sumber daya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Sumberlihat: <http://huma.or.id/tentang-huma>.

(Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL), *Human Rights Working Group* (HRWG), *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL), Imparsial, Institut Hijau Indonesia, Jaringan Relawan Kemanusiaan, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), KontraS, Lapis Budaya Indonesia, LBH Masyarakat, Lembaga Hukum dan HAM Keadilan Indonesia (LHKI), Pergerakan Kaum Muda Indonesia (PKMI), Pulih, Satu Dunia, *Urban Poor Consortium* (UPC), Uplink, Wahana Interaksi, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yappika, Yayasan Air Putih, Yayasan Tifa<sup>221</sup>.

Berbagai organisasi kemahasiswaan juga memberikan bantuan dan advokasi terhadap warga korban bencana Lumpur Lapindo,

<sup>214</sup> Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) adalah organisasi non-pemerintah yang berdiri pada tanggal 6 april 2003. Organisasi nirlaba ini diinisiasi oleh WALHI, Bina Desa, JALA (Jaringan Advokasi untuk Nelayan Sumatera Utara), Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), dan individu-individu yang menaruh perhatian terhadap isu kelautan dan perikanan. Sumber lihat: <http://www.kiara.or.id/about-us/>.

<sup>215</sup> KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Visi: Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender. Sumber: Lihat <http://www.kontras.org/>.

<sup>216</sup> Satu Dunia/OneWorld Indonesia adalah sebuah lembaga nirlaba yang menangani informasi, komunikasi, pengetahuan dan teknologi, untuk organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Visi: Tercapainya masyarakat sipil Indonesia yang kuat sebagai bagian dari masyarakat sipil global; yang mampu berpartisipasi dalam proses demokratisasi pengetahuan melalui pertukaran informasi dan pengetahuan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Misi: Memperkuat gerakan masyarakat sipil di Indonesia dalam mendorong terwujudnya demokratisasi pengetahuan melalui berbagi informasi dan pengetahuan, baik secara nasional atau global dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sumber: Lihat <http://www.satudunia.net/tentang-kami/visi-dan-misi/>.

<sup>217</sup> Perkumpulan LBH Masyarakat adalah sebuah lembaga bantuan hukum yang hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan penyadaran dan pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat secara mandiri dapat melakukan advokasi, pendampingan dan pembelajaran atas segala permasalahan hukum, hak asasi manusia dan hak-hak warganegara yang mereka alami. Kerangka kerja LBH Masyarakat meliputi (1) Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum, penyadaran hak-hak masyarakat, pemberian informasi mengenai hukum dan hak-hak masyarakat serta pelatihan-pelatihan bantuan hukum bagi masyarakat; (2) Advokasi kasus publik dan kebijakan publik; (3) Penelitian permasalahan publik. Sumber: Lihat <http://lbhmasyarakat.org/beranda.php>.

<sup>218</sup> Solidaritas Perempuan (SP) didirikan pada tahun 10 Desember 1990. Pada awalnya berbadan hukum yayasan, dan pada April 1993 berubah menjadi organisasi perserikatan dengan keanggotaan individu baik perempuan dan laki-laki. Visi Solidaritas Perempuan (SP): Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme, dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil. Sumber: Lihat <http://www.solidaritasperempuan.org/tentang-sp/>.

antara lain seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya, dan sebagainya. Selain LSM dan organisasi lokal dan nasional juga terdapat LSM dan organisasi internasional yang memberikan simpati dan advokasi terhadap korban bencana Lumpur Lapindo, seperti *The Centre on Housing Rights and Evictions* (COHRE)<sup>222</sup> dan *The American Association of Petroleum Geologists* (AAPG)<sup>223</sup>.

Advokasi terhadap warga korban Lumpur Lapindo selain dilakukan oleh berbagai LSM dan organisasi-organisasi, juga dilakukan secara individual oleh tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, akademisi, dan politisi. Berbagai tokoh seperti Tjuk Kasturi Sukiadi, Salahudin Wahid, Frans Magnis Suseno, Rieke Diah Pitaloka, Slamet Rahardjo Djarot, dan Prof. Sutandyo (akademisi). Para tokoh ini hadir dalam acara sarasehan kebangsaan yang tergabung ke dalam Forum Kebersamaan Penanggulangan Bencana Negara (FKPBN). Selain itu juga ada tokoh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dari komunitas "Bambang Wetan", yang memiliki kedekatan dengan kelompok GKLL.

---

<sup>219</sup> Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian nomor 10/ 25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH. Didirikan oleh 18 orang pekerja hak-hak asasi manusia Indonesia, Todung Mulya Lubis, Karlina Leksono, M. Billah, Wardah Hafidz, Hendardi, Nursyahbani Katjasungkana, Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchory, Kamala Chandrakirana, HS Dillon, Munir, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, dan Poengky Indarti. Sumber: Lihat <http://www.imparsial.org/profil-imparsial.html>.

<sup>220</sup> Lihat: <http://nasional.tempo.co/read/news/2006/10/16/05586178/Tim-Advokasi-Korban-Lumpur-Lapindo-Ajukan-Somasi>.

<sup>221</sup> <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=783>.

<sup>222</sup> *Centre on Housing Rights and Evictions* (COHRE): Established in 1994, COHRE is now the leading international human rights organisation working for the protection of housing rights and the prevention of forced evictions around the world. (Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE): Didirikan pada tahun 1994, dewasa ini COHRE merupakan organisasi hak asasi manusia internasional terkemuka yang bekerja untuk perlindungan hak-hak perumahan dan pencegahan penggusuran paksa di seluruh dunia. Sumber: Lihat <http://humanrightsconnected.org/about>.

<sup>223</sup> *American Association of Petroleum Geologists* (AAPG), Sejak didirikan pada tahun 1917, telah menjadi pilar komunitas ilmiah di seluruh dunia. Tujuan awal AAPG, untuk mendorong penelitian ilmiah, untuk memajukan ilmu geologi, untuk mempromosikan teknologi, dan menginspirasi perilaku profesional yang tinggi, masih memandu Asosiasi hari ini. AAPG menyediakan publikasi, konferensi, dan kesempatan pendidikan ke geoscientists dan menyebarkan informasi geologi terbaru yang tersedia untuk masyarakat umum. Sumber: <http://www.aapg.org/about/aapg/overview>.



Menurut KH, pihaknya dan warga korban yang ada di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong didatangi dan dihubungi oleh dua orang yang mengatasnamakan Santri utusan Cak Nun (panggilan Emha Ainun Nadjib) dari komunitas "Bambang Wetan", untuk menawarkan bantuan advokasi bagi warga korban lumpur Lapindo.

*"...pada tanggal 27 itu ada orang yang datang ke saya itu mengatasnamakan santrinya Cak Nun, mereka mengatasnamakan komunitas "Bambang Wetan"... Itu komunitasnya Cak Nun di Surabaya. Komunitas Pengajian. Mereka kemudian ngasih tahu ke kami bahwa Insya Allah Cak Nun mau membantu kalau warga juga mau dibantu. Nah, terus terang saya saat itu saya sampaikan kepada mereka, ya coba mas, tapi sudah tidak terlalu optimis karena apa? Karena sudah hampir setahun sejak kejadian itu mulai kami setelah dimana itu? Di pengungsian, itu banyak anggota dewan yang datang, artis yang datang, terus kemudian bahkan pemerintah yang datang, pak Presiden juga datang, pak Wapres juga datang, semuanya datang. Dan semuanya ngasih janji. Tapi janji itu tidak terealisasi sampai hari itu. Begitu juga ketika ada teman-teman "Bambang Wetan" itu apa namanya, coba lah barangkali Cak Nun bisa bantu, saya pun juga tidak terlalu optimis karena faktanya adalah seringkali yang dari Jakarta itu datang, baik DPR, artis atau pemerintah sekalipun, mereka tidak bisa memberikan solusi...Tetapi kemudian, saya didorong oleh teman-teman, dicoba saja, ini namanya juga ikhtiar..."*<sup>224</sup>

Selanjutnya KH sebagai wakil dari Desa Jatirejo bertemu dengan Cak Nun dan menjelaskan bagaimana keinginan dan posisi warga korban lumpur Lapindo, khususnya yang ada di Desa Jatirejo. Kemudian Cak Nun menjelaskan bahwa dirinya bersedia untuk menjadi penghubung antara warga korban dan Presiden SBY. Melalui mediasi Cak Nun, akhirnya warga korban melalui para wakil dari desa masing-masing bisa menghadap Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta.

*"...Maka pada tanggal 29 Mei 2007, tepat satu tahun lumpur itu, saya ketemu Cak Nun di Surabaya. Saya ceritakan*

---

<sup>224</sup> Kutipan wawancara dengan KH, Sabtu: 6 April 2013.

*tentang perjuangan korban lumpur dan sebagainya, termasuk masalah administrasi yang belum terselesaikan, antara keinginan warga apapun administrasinya pokoknya harus segera ganti rugi, sementara Lapindo ingin bahwa yang diganti adalah tanah yang bersertifikat dan bangunan yang ber-IMB. Maka kemudian dari itu kita ketemu, singkatnya kemudian Cak Nun mempertemukan kita ke SBY tanggal 23 Juni itu, datang kita ke sana, ini ada perwakilan 12 orang perwakilan, nah yang datang waktu itu dari Peta Area Terdampak 1 dan Peta Area Terdampak 2, jadi Peta Area Terdampak 1 itu Jatirejo, Siring, Jatirejo dan Siring itu keseluruhan, terus kemudia Reno hanya sebelah Barat, jadi sebelah Timur belum masuk yang itu masuk Pagarekontrak, terus kemudian Kedungbendo secara keseluruhan, ditambah Perumtas, Tim-16 Perumtas, terus kemudian ditambah kelompok Kalitengah, dan orang Ketapang. Ini ada 7 kelompok, 12 orang yang berangkat ke SBY tanggal 23...".<sup>225</sup>*

Para wakil warga korban Lumpur Lapindo melalui mediasi Cak Nun kemudian menyampaikan situasi, kondisi dan aspirasi warga korban bencana Lumpur Lapindo. Setelah mendapatkan penjelasan dari para perwakilan warga korban Lumpur Lapindo, Presiden SBY baru mengerti tentang persoalan yang sesungguhnya terjadi dan apa yang menjadi keinginan warga. Dalam rangka mencari solusi dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait keinginan warga korban bencana Lumpur Lapindo, kemudian Presiden SBY memutuskan untuk datang langsung ke Sidoarjo dan selama 3 hari berkantor di Sidoarjo.

Bentuk advokasi yang dilakukan oleh organisasi, LSM, maupun tokoh-tokoh individual bermacam-macam. Dari yang sifatnya lunak seperti ucapan simpati, turut prihatin, hingga yang bersifat keras, misalnya mengecam, demonstrasi, dan sebagainya. Advokasi juga dilakukan secara akademis, misalnya melalui seminar, sarasehan, diskusi, dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya. Advokasi juga dilakukan melalui bentuk litigasi, yakni melalui proses gugatan hukum di

---

<sup>225</sup> Kutipan wawancara dengan KH, Sabtu, 6 April 2013.

pengadilan, seperti yang dilakukan oleh Tim Advokasi korban bencana Lumpur Lapindo, yang dimotori oleh YLBHI dan Walhi.

Dari paparan tersebut diatas nampak bahwa banyak sekali LSM, organisasi sosial, tokoh-tokoh yang memberikan atensi dan melakukan gerakan advokasi terhadap korban bencana Lumpur Lapindo. Namun ternyata upaya dan langkah advokasi yang dilakukan berbagai organisasi advokatif dalam membela dan memperjuangkan nasib korban bencana Lumpur Lapindo, termasuk upaya tokoh-tokoh individual, ternyata tidak membuahkan hasil.

Secara umum berbagai organisasi advokatif korban bencana Lumpur Lapindo berjalan sendiri-sendiri dan memiliki agendanya masing-masing. Meskipun beberapa organisasi dan LSM bergabung dalam Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo dan "Koalisi Keadilan Korban Lumpur Lapindo (K3L)", namun kekuatan tim ini sangat lemah. Setelah advokasi mereka kalah di pengadilan, maka Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo pun tidak jelas keberadaanya. Seperti sudah dijelaskan di atas, Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo melakukan proses litigasi di pengadilan berupa gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan PT LBI. Demikian juga Walhi melakukan gugatan perbuatan merusak lingkungan yang dilakukan oleh pihak PT LBI. Namun, proses litigasi yang dilakukan Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo mengalami kegagalan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim *ad hoc* untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Komnas HAM memutuskan membentuk tim *ad hoc* penyelidikan kasus Lumpur Lapindo setelah mendengar dan mempertimbangkan rekomendasi Laporan Tim Investigasi Kasus Lumpur Lapindo. Komnas HAM memutuskan membentuk tim *ad hoc* penyelidikan Lumpur Lapindo setelah menerima dan membahas rekomendasi laporan Tim Investigasi Kasus Lumpur Lapindo. Tim investigasi menyimpulkan adanya 18 pelanggaran HAM antara lain pelanggaran hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak pengembangan diri, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya<sup>226</sup>. Namun, tim *ad hoc* yang dibentuk Komnas HAM juga tidak jelas hasilnya.

Menurut penuturan M. Masrukh<sup>227</sup> menyatakan bahwa pada awal-awal terjadinya bencana semburan lumpur Lapindo, banyak sekali LSM-LSM yang turun melakukan advokasi, namun sekarang banyak yang tidak muncul lagi.

*"...lyaa..pada awal-awal memang LSM banyak yang masuk kesini...tapi kemudian seperti angin semusim saja, setelah musim itu habis sudah tidak ada kepedulian sama sekali, wilayah LSM yang masuk pun juga seperti setengah hati...tidak menyentuh sampai akar bawah, jadi suara-suara masyarakat di bawah itu juga tidak diperhatikan sama sekali dan tidak ada perjuangan sampai wilayah bawah apa yang menjadi krusial yang dibutuhkan masyarakat..contoh misalnya masalah kesehatan sampai sekarang ini padahal ini sudah berapa tahun lumpur ini keluar, itu tidak ada perhatian baik pemerintah maupun pihak terkait dalam hal ini Lapindo, dan LSM pun juga tidak ada yang membantu mengadvokasi warga dalam hal ini untuk mendapatkan hak-nya masalah kesehatan...bisa jadi..karena LSM yang masuk kesini ternyata beragam...jadi jalur masuknya pun juga berbagai macam..ada yang dari politik..ada yang dari masyarakat..masyarakat pun masyarakat luar sehingga dia tdk benar-benar setarus persen memperjuangkan kebutuhan masyarakat, kemudian yang banyak dilakukan LSM masalah penggantian yang disitu ada uangnya, begitu mungkin uang itu tidak kerja lagi di wilayah LSM ya sudah..akhirnya sekarang ya tinggal berapa LSM yang masih bertahan disini..."*<sup>228</sup>

Dalam catatan peneliti, hasil advokasi LSM lebih banyak menghasilkan buku dan laporan lapangan, baik yang ditulis secara tim maupun perorangan. Beberapa buku hasil karya advokasi LSM bahkan menjadi perhatian masyarakat luas yang justru menjadikan penulisnya terkenal dan mendapat keuntungan. Beberapa buku tersebut, seperti: Pertama, Ali Azhar Akbar pada tahun 2012 menulis buku yang berjudul *Konspirasi SBY-Bakrie*, dimana buku ini

---

<sup>226</sup> <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/63887>

<sup>227</sup> M. Masrukh, adalah seorang tokoh muda Desa Siring yang juga merupakan korban bencana Lumpur Lapindo.

<sup>228</sup> Kutipan pernyataan M. Masrukh, wawancara hari Senin, 12 Maret 2013.

diterbitkan oleh INDOPETRO *Publishing*; Kedua, Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo pada tahun 2012 menulis buku yang berjudul "Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo" yang diterbitkan oleh INSITPress; Ketiga, Heru Prasetya dan & Bosman Batubara (eds.) pada tahun 2010 menulis buku yang berjudul "Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil" yang diterbitkan oleh DESANTARA; dan Keempat, I Putu A. Wiguna, Citrosiswyo, dan Widodo (eds.) pada tahun 2009 menulis buku yang berjudul "Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo", yang diterbitkan oleh Pusat Studi Kebumihan dan Bencana (PSKB) Institut Teknologi Surabaya (ITS).

## **2. Aksi Gugatan Hukum oleh Koalisi LSM: "Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo"**

Advokasi yang dilakukan oleh LSM terhadap korban lumpur Lapindo dilakukan antara lain melalui proses litigasi (gugatan hukum), yakni gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan perbuatan merusak lingkungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan korporasi (PT LBI), aksi gugatan hukum tersebut meliputi:

*Pertama*; Aksi gugatan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) dalam kasus semburan lumpur panas Sidoarjo. Korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo melakukan aksi tuntutan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran Ham terhadap pihak pemerintah dan PT LBI. Aksi ini didukung dan diwakili oleh sebuah tim, yakni "Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo", yang terdiri dari 59 para advokat publik dan asisten advokat publik dari YLBHI. Surat gugatan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada tanggal 8 Desember 2006, dalam perkara Nomor: 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST<sup>229</sup>.

Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo atas nama korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, melakukan gugatan kepada para pihak tergugat, yakni: Presiden RI (sebagai pihak

---

<sup>229</sup> [http://id.wikisource.org/wiki/Surat\\_Gugatan\\_Perbuatan\\_Melawan\\_Hukum\\_Kasus\\_Lumpur\\_Panas\\_Sidoarjo](http://id.wikisource.org/wiki/Surat_Gugatan_Perbuatan_Melawan_Hukum_Kasus_Lumpur_Panas_Sidoarjo).

tergugat I), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai pihak tergugat II), Menteri Negara Lingkungan Hidup (sebagai pihak tergugat III), Badan Pelaksana Migas (sebagai pihak tergugat IV), Gubernur Jawa Timur (sebagai pihak tergugat V), Bupati Sidoarjo (sebagai pihak tergugat VI), dan pihak PTLBI (sebagai pihak turut tergugat). Menurut pihak penggugat, para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam kasus bencana semburan lumpur panas di Sidoarjo. Menurut para penggugat, bahwa sekalipun sejak awal telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, para tergugat tidak mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak semburan lumpur panas tersebut pada hari-hari awal terjadinya semburan lumpur. Hal ini menunjukkan bahwa para tergugat, selaku penyelenggara negara telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya.

Selain telah melakukan pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum, para pihak tergugat dan pihak turut tergugat juga dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut para tergugat bahwa masyarakat, baik yang menjadi korban langsung dari semburan lumpur panas di Sidoarjo maupun masyarakat luas yang secara tidak langsung terkena dampak semburan lumpur tersebut memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi manusia (Ham) ini juga telah menjadi hak konstitusional yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain melanggar UUD 1945, pelanggaran Ham dalam kasus semburan lumpur panas Lapindo juga tercermin dari unsur pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut YLBHI, bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat semburan lumpur panas dan penanganan yang berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas: (1) hak untuk hidup berupa hilangnya nyawa manusia akibat ledakan pipa gas Pertamina pada tanggal 22 November 2006; (2) Hak atas kehidupan yang layak berupa menurunnya kualitas kehidupan masyarakat yang menjadi korban langsung semburan Lumpur panas dan korban tidak langsung yakni masyarakat luas yang terkena imbas semburan Lumpur panas; (3) hak atas bebas dari rasa takut yang dialami korban dan potensi

korban serta masyarakat di Sidoarjo dan sekitarnya termasuk para nelayan di selat Madura; (4) hak atas perumahan yang dialami para korban yang harus kehilangan tempat tinggalnya akibat semburan Lumpur panas; (5) hak atas pekerjaan berupa hilangnya mata pencaharian dan pekerjaan akibat semburan Lumpur panas; (6) hak atas pendidikan berupa hilangnya kesempatan menjalani pendidikan akibat semburan Lumpur panas; (7) hak anak berupa terenggutnya hak-hak anak untuk memperoleh perawatan yang baik dari orang tuanya, untuk bermain dan berkreasi, dan mengikuti pendidikan, akibat semburan Lumpur panas; (8) hak-hak perempuan berupa hilangnya perlindungan kepada perempuan, khususnya anak-anak perempuan dan ibu-ibu akibat semburan Lumpur panas; dan (9) hak milik berupa hilangnya harta benda milik korban akibat semburan Lumpur panas. Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh semburan lumpur Lapindo di Porong-Sidoarjo, Jawa Timur.

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut: (1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; (2) Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; (3) Menghukum Para Tergugat untuk mengeluarkan kebijakan yang memerintahkan Turut Tergugat untuk memulihkan hak-hak masyarakat korban semburan lumpur panas di Sidoarjo dengan ketentuan bahwa masyarakat korban memperoleh kembali haknya setara atau lebih baik dengan nilai keadaan semula seperti sebelum terjadinya semburan lumpur panas ditambah dengan tanggungan penuh selama para korban belum terpenuhi hak-haknya; (4) Memerintahkan Para Tergugat mengeluarkan kebijakan agar Turut Tergugat untuk secara bersama-sama segera menghentikan semburan lumpur panas dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan mempertimbangkan Hak Asasi Masyarakat termasuk hak atas lingkungan yang sehat; (5) Memerintahkan kepada Para Tergugat mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin secara hukum bahwa Turut Tergugat akan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan terkait dengan upaya penanggulangan semburan lumpur panas di Sidoarjo dan pemulihan

hak-hak korban; (6) Memerintahkan Tergugat I untuk memerintahkan jajaran aparat hukum mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab termasuk pimpinan penanggung jawab usaha yang kegiatannya telah memicu terjadinya semburan lumpur panas; dan (7) Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada para korban yang diumumkan melalui 5 (lima) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio dan 10 (sepuluh) media cetak nasional selama tiga hari berturut-turut yang isinya berbunyi sebagai berikut:

*"Kami, Presiden RI, Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Ketua Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas RI; Gubernur Jawa Timur; Bupati Sidoarjo; Lapindo Brantas Incorporated, menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan terkait dengan kelalaian dan kealpaan melakukan kewajiban hukum kami terkait dengan terjadinya semburan lumpur panas yang merenggut Hak Asasi Manusia para korban dan masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya, serta membuat kerusakan lingkungan hidup yang memberikan dampak kerugian materil maupun immaterial yang besar dan meluas. Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta perubahan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang bermutu dan berkualitas dengan manfaat yang digunakan sebesar-besarnya bagi hak-hak Warga Negara Indonesia".*

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terhadap pemerintah dan PT LBI. Putusan PN Jakarta Pusat tanggal 27 November 2007 menyatakan menolak gugatan YLBHI dimana pemerintah dan PT LBI dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum<sup>230</sup>. Putusan PN Jakarta Pusat kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta tanggal 13

---

<sup>230</sup> <http://gebraklapindo.wordpress.com/2007/11/28/majelis-hakim-tolak-gugatan-ylbhi-soal-lumpur-lapindo/>



Juni 2008 yang menyatakan bahwa adanya kejadian Lumpur Sidoarjo karena kecenderungan gejala alam lebih dominan, bukan karena kesalahan manusia<sup>231</sup>.

Selanjutnya YLBHI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun putusan kasasi MA tanggal 3 April 2009 menyatakan menolak permohonan kasasi YLBHI bahwa semburan lumpur merupakan fenomena alam dan bukan kesalahan industri, dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

*Kedua*; Aksi gugatan perbuatan merusak Lingkungan Hidup. Bersamaan dengan gugatan YLBHI di PN Jakarta Pusat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga melakukan gugatan di PN Jakarta Selatan. Walhi mengajukan gugatan terhadap PT LBI dan pemerintah karena dinilai bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat semburan lumpur di Sidoarjo. Gugatan perdata itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sedangkan gugatan terhadap pemerintah, karena pemerintah dianggap telah melakukan pembiaran dan tidak melakukan kontrol. Walhi menggugat 12 pihak, yaitu: PT LBI, PT Energi Mega Persada, Kalila Energy Limited, Pan Asia Enterprise, PT Medco Energy, Santos Australia Limited. Dari pihak pemerintah, yang digugat adalah Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan Bupati Sidoarjo<sup>232</sup>. Walhi menggunakan dasar hukum pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup<sup>233</sup>.

Namun ternyata gugatan Walhi terhadap PT Lapindo dan Pemerintah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 27 Desember 2007, menolak gugatan *legal standing* yang diajukan Walhi atas kasus lumpur PT Lapindo<sup>234</sup>. Dalam amar putusannya, majelis hakim

---

<sup>231</sup> <http://gebraklapindo-wprdress.com/2007/12/11/ylbhi-banding-kasus-lapindo/>

<sup>232</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2007/02/12/05693046/Walhi-Gugat-Lapindo-dan-Pemerintah>(Diakses tgl 23 Pebruari 2013).

<sup>233</sup> *ibid*

<sup>234</sup> <http://www.hukumline.com/berita/baca/ho118236/dinilia-akibat-fenomena-alam-hakim-tolak-gugatan-walhi>.

memenangkan 12 tergugat, termasuk PT LBI dan pemerintah. Hakim beranggapan, semburan lumpur di sumur Banjar Panji-1, Sidoarjo, Jawa Timur, adalah fenomena alam biasa. Meski menolak gugatan Walhi, namun majelis hakim menyatakan tetap mewajibkan para tergugat untuk memenuhi tanggung-jawab moral yaitu berupaya menghentikan semburan lumpur.

Walhi selanjutnya mengajukan banding di tingkat PT Jakarta<sup>235</sup>. Namun putusan PT Jakarta tanggal 27 Oktober 2008 menguatkan putusan PN Jakarta Selatan tanggal 27 Desember 2007 yang menyatakan bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo disebabkan fenomena alam. Surat Panitera PN Jaksel tanggal 14 Januari 2009 yang menyatakan masing-masing pihak tidak mengajukan Kasasi, sehingga secara hukum putusan PT Jakarta tanggal 27 Oktober 2008 mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*)<sup>236</sup>.

Menurut AJ<sup>237</sup>, penetapan semburan lumpur panas di Porong sebagai bencana alam adalah merupakan strategi supaya ada pengalihan tanggung jawab dari PT LBI kepada pihak pemerintah. Kutipan wawancara dengan AJ sebagai berikut:

*"...Sebenarnya orang sudah secara apa ya..secara umum orang sudah menyebut, karena perusahaan yang mengeksplorasinya adalah perusahaan Lapindo Brantas, orang lebih familiar mengatakan ini lumpur lapindo, sebenarnya itu secara tidak langsung lumpur yang diciptakan yang diakibatkan oleh eksplorasi PT. Lapindo Brantas, dan Pemerintah rupanya lebih mengarahkan, lebih bias lagi menjadi lumpur Sidoarjo supaya ini..a..tidak terfokus pada perusahaan Lapindo-nya.*

*...Betul, konsekuensi tanggung jawab, sebab tidak hanya tanggung jawab moral tapi sosial juga, karena memang ini adalah penanganan yang memang semestinya lapindo itu adalah yang paling bertanggung jawab setiap permasalahan sebelum di take over atau di anu oleh pemerintah..."*<sup>238</sup>

---

<sup>235</sup> <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/02/25/2410/Walhi-Ajukan-Banding>

<sup>236</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2012/05/29/9-fakta-hukum-kasus-lapindo-466713.html>

<sup>237</sup> AJ adalah Koordinator Aliansi Korban Lumpur 4 Desa.

<sup>238</sup> Wawancara dengan bapak AJ, hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012.

Penetapan bahwa faktor penyebab terjadinya semburan lumpur panas di wilayah Porong dan sekitarnya adalah faktor alam, sehingga disebut sebagai bencana alam, menafikan faktor kesalahan manusia (*man-made*) sebagai penyebab terjadinya bencana semburan lumpur. Penetapan semburan lumpur sebagai bencana alam mengakibatkan terjadinya reduksi tanggung jawab pihak PT LBI dalam penanganan dampak bencana, terutama dampak kesehatan, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Upaya advokasi yang dilakukan oleh LSM YLBHI dan Walhi dalam membela kepentingan korban bencana lumpur Lapindo melalui litigasi ternyata mengalami kegagalan.

## **D. Aksi Tuntutan Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Pada periode pertama ini, korban bencana Lumpur Lapindo melakukan beberapa aksi untuk mengajukan tuntutan kolektif. Beberapa tuntutan korban bencana Lumpur Lapindo pada periode pertama ini yakni.

### **1. Proses Tuntutan Besaran Nilai Ganti Rugi**

Korban bencana Lumpur Lapindo harus menerima kenyataan bahwa secara hukum pihak pemerintah (negara) dan pihak korporasi (PT LBI) dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersalah atas terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Warga korban bencana Lumpur Lapindo juga harus bisa menerima "nasib" bahwa mereka adalah korban bencana alam. Namun demikian warga korban bencana Lumpur Lapindo ternyata tidak menerima begitu saja bahwa mereka sebagai korban bencana alam. Korban bencana Lumpur Lapindo berusaha membangun kekuatan kolektif untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas aset tanah dan bangunan milik mereka yang hancur tergenang lumpur, melalui upaya penjangkaran aspirasi.

Seorang tokoh masyarakat Desa Jatirejo yakni KH<sup>239</sup> melakukan upaya penjangkaran aspirasi dan pendapat warga (*polling*). KH menyebarkan angket kepada warga korban bencana Lumpur

---

<sup>239</sup> KH adalah tokoh masyarakat Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 6 April 2013.

Lapindo, khususnya warga Desa Jatirejo, hasil penyebaran angket menyatakan bahwa sebesar 77% warga Desa Jatirejo menginginkan pindah dari Desa Jatirejo karena melihat bahwa semburan lumpur semakin besar dan sulit untuk dihentikan. Sementara sisanya yang 33% menolak untuk pindah, dan mereka ingin tetap tinggal di wilayah Desa Jatirejo apapun yang terjadi. Dari warga korban bencana Lumpur Lapindo sebanyak 77% yang menginginkan pindah dari Desa Jatirejo, sebesar 80% warga korban lumpur Lapindo meminta model *cash and carry*, yakni menuntut ganti rugi secara *cash* (tunai) atas aset tanah, bangunan, dan harta benda mereka. Sementara sisanya sebesar 20% meminta model relokasi ke tempat tinggal yang baru.

Selanjutnya Khoirul Huda dan kelompok "Pam Swakarsa" Desa Jatirejo melakukan koordinasi dan menggodok aspirasi warga berdasarkan hasil *polling* ini. Tim kemudian memutuskan bahwa keinginan mayoritas warga korban lumpur Lapindo yang ada di Desa Jatirejo yaitu menginginkan pindah dari wilayah Desa Jatirejo dengan skema pembayaran ganti-rugi *cash and carry* (CnC) dijadikan sebagai bentuk tuntutan yang kemudian akan diperjuangkan kepada pihak PT LBI.

Inisiatif warga Desa Jatirejo yang dimotori oleh KH ini kemudian mendapat respons dari warga korban yang ada di desa lainnya, seperti: Desa Siring, Desa Renokenongo, Desa Kedungbendo, Perum TAS, dan wilayah-wilayah lainnya. Warga korban bencana yang ada di luar Desa Jatirejo tersebut kemudian meniru model wacana yang diputuskan warga Desa Jatirejo yakni mereka juga menginginkan pindah dari Desa-nya dengan skema penggantian *cash and carry*(CnC). Dengan demikian terdapat kesamaan aspirasi di antara warga korban lumpur Lapindo dari seluruh wilayah desa yang terkena luapan lumpur, yaitu desa: Jatirejo, Siring, Kedungbendo, Renokenongo, Gempolsari, Perum TAS, dan sekitarnya.

*"...Maka saat muncul wacana cash and carry, nah terus kita godog berapa keinginan warga untuk mendapatkan ganti rugi, macem-macem keinginan warga, jadi kita rapat dan sebagainya, apa namanya ada yang minta ini itu dan sebagainya, tapi kemudian kita sama-sama akhirnya sekitar bulan Oktober-Nopember 2006 kita sama-sama dengan*

*desa lain, intinya warga di desa lain juga menginginkan hal sama dengan kelurahan Jatirejo, yaitu ingin pindah dari desa dan kemudian wacananya hampir sama minta cash and carry, itulah kemudian yang kita lakukan secara sektoral tapi kita terkoordinasi, tapi belum bentuk kelompok, masih istilahnya terkotak-kotak dalam bingkai-bingkai desa, tetapi kita punya satu tujuan ingin mendapatkan suatu ganti rugi secara cash and carry. Nah itu sudah mulai kita perjuangkan secara sama-sama...". (Rekapan wawancara dengan KH: Sabtu, 6 April 2013)<sup>240</sup>*

Selanjutnya, KH dan beberapa perwakilan korban bencana Lumpur Lapindo dari Desa Jatirejo mengajukan tuntutan untuk mendapatkan ganti rugi kepada TimNas PSLs dan PT LBI. Berdasarkan kesepakatan warga, kemudian disampaikan tuntutan nilai pembayaran ganti rugi untuk tanah darat sebesar Rp 2 juta dan untuk bangunan sebesar Rp 2,5 juta per-meter persegi. Namun PT LBI melakukan penawaran harga menjadi sebesar Rp 500 ribu untuk tanah dan sebesar Rp 750 ribu untuk bangunan per-meter perseginya.

Penawaran dari pihak PT LBI ini kemudian mendapat penolakan dari warga korban bencana Lumpur Lapindo. Khoirul Huda dan beberapa perwakilan warga kemudian melakukan *bargaining* (negosiasi) dan tekanan kepada pihak PT LBI. Bahkan warga korban bencana Lumpur Lapindo mengancam akan melakukan aksi demonstrasi yang menurunkan ribuan warga korban bencana. Menghadapi tekanan warga korban bencana Lumpur Lapindo, akhirnya PT LBI menaikkan tawaran nilai ganti rugi menjadi sebesar Rp 1 juta untuk tanah darat dan Rp 1,5 juta untuk bangunan per-meter persegi. Usulan PT LBI ini kemudian bisa diterima oleh warga korban lumpur Lapindo, yakni sebesar 92% warga korban bencana Lumpur Lapindo menerimanya. Sementara nilai penggantian untuk tanah sawah diputuskan sebesar Rp 125 ribu per-meter persegi yang mengacu kepada hasil kesepakatan antara warga Desa Mindi dengan PT LBI yang telah terlebih dahulu diputuskan. Kesepakatan harga ganti rugi ini, yakni: sebesar Rp 1 juta

---

<sup>240</sup> Kutipan pernyataan KH, dalam wawancara hari Sabtu, 6 April 2013

untuk tanah darat, Rp 1,5 juta untuk bangunan, dan Rp 125 ribu untuk tanah sawah per-meter persegi, kemudian berlaku untuk semua wilayah yang terkena dampak lumpur Lapindo, baik wilayah di dalam Peta Area Terdampak (PAT) maupun wilayah di luar Peta Area Terdampak (PAT).

Upaya *collective bargaining* yang dilakukan korban bencana Lumpur Lapindo, khususnya terhadap pihak korporasi (PT LBI), dalam menuntut besaran nilai ganti rugi atas aset tanah dan bangunan milik mereka yang hancur tenggelam luapan lumpur ternyata mengalami keberhasilan.

## **2. Proses Tuntutan Payung (Jaminan) Hukum**

Proses negosiasi kolektif korban bencana Lumpur Lapindo ternyata tidak hanya berhenti sampai perjuangan untuk mencapai kesepakatan besaran nilai ganti rugi saja. Karena, setelah besaran nilai ganti rugi disepakati oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo dan pihak PT LBI, muncul persoalan berikutnya yakni berkaitan dengan belum adanya payung hukum yang dapat menjamin terlaksananya kesepakatan terkait besaran nilai ganti rugi ini. Warga korban lumpur Lapindo kemudian mendesak kepada pihak pemerintah melalui TimNas PSLs dan PT LBI untuk segera dikeluarkan payung hukum yang dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti rugi yang nilai pembayarannya sudah disepakati oleh pihak PT LBI dan warga korban tersebut.

Atas tuntutan warga korban bencana Lumpur Lapindo tersebut, selanjutnya dalam memberikan payung hukum kepada warga korban Lumpur Lapindo pihak pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 tertanggal 8 April 2007 tentang BPLS sebagai revisi atas Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2006.

## **E. Kesadaran Identitas Kolektif Sebagai “Korban Bencana Lumpur Lapindo” Belum Terbentuk**

Pada periode pertama pra-gerakan sosial ini, identitas kolektif sebagai “Korban Bencana Lumpur Lapindo” belum muncul. Warga yang menjadi korban bencana belum menyadari bahwa diri mereka sebagai “Korban Bencana Lumpur Lapindo”. Warga korban bencana

Lumpur Lapindo belum membangun framing bahwa mereka sebagai korban bencana Lumpur Lapindo. Dalam arti lain, kesadaran kolektif bahwa mereka sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo" belum terbangun.

Namun, proses membentuk *Cultural framings* pada periode pertama ini justru dilakukan oleh pihak LSM. Penyebutan istilah korban bencana Lumpur Lapindo dikonstruksi oleh pihak LSM. Koalisi LSM yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Lembaga Studi dan Kajian Advokasi HAM (ELSAM), Jatam, ICEL, dan Huma mereka tergabung dalam "Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo".

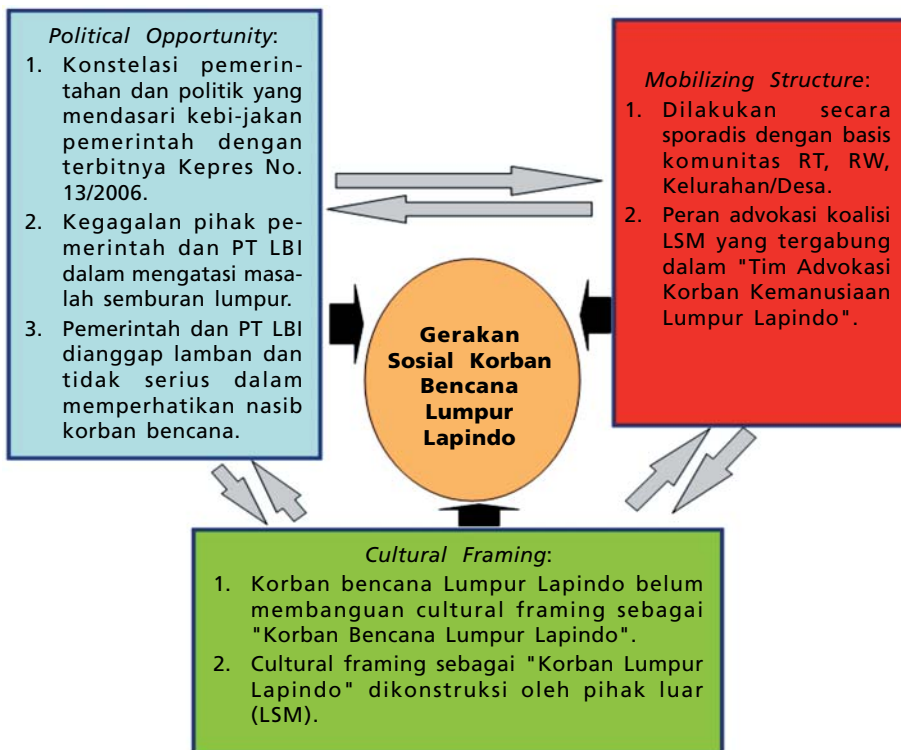
Selain koalisi LSM yang menamakan diri "Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo", juga muncul koalisi yang tergabung dalam "Koalisi Keadilan Korban Lumpur Lapindo (K3L)". LSM yang tergabung dalam "Koalisi Keadilan Korban Lumpur Lapindo (K3L)" ini meliputi: Ciliwung Merdeka, Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL), *Human Rights Working Group* (HRWG), *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL), Imparsial, Institut Hijau Indonesia, Jaringan Relawan Kemanusiaan, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), KontraS, Lapis Budaya Indonesia, LBH Masyarakat, Lembaga Hukum dan HAM Keadilan Indonesia (LHKI), Pergerakan Kaum Muda Indonesia (PKMI), Pulih, Satu Dunia, *Urban Poor Consortium* (UPC), Uplink, Wahana Interaksi, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yappika, Yayasan Air Putih, Yayasan Tifa.

Dengan demikian, pada periode pertama ini, *cultural framing* yang menyebut istilah "Korban Bencana Lumpur Lapindo" dikonstruksi oleh pihak LSM. Sementara pada internal warga korban bencana sendiri belum memunculkan istilah tersebut.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka secara singkat dapat disebutkan bahwa pada periode Pertama gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo kondisi aspek peluang/kesempatan politik (*political opportunity*) yang mendasari munculnya aksi gerakan sosial adalah karena kegagalan pihak pemerintah dan PT LBI dalam menghentikan semburan lumpur dan kekecewaan korban bencana atas ketidakseriusan dan lambannya respons pemerintah dan PT LBI dalam memperhatikan nasib warga korban bencana.

Sementara aspek struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) masih dilakukan secara sporadis dengan basis komunitas RT, RW, dan Desa. Struktur mobilisasi pada periode pertama ini juga ditandai dengan adanya peran advokasi dari koalisi LSM. Sedangkan aspek pembingkaihan kultural (*cultural framing*) ditandai dengan konstruksi identitas kolektif sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo" yang dibangun oleh pihak LSM, dimana warga korban bencana sendiri belum menyadari bahwa mereka sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo".

Selanjutnya gambaran kondisiaspek *political opportunity*, *mobilizing structure*, dan *cultural framing* yang terjadi pada periode pertama gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4.1. Political opportunity, Mobilizing structure, dan Cultural framing pada Periode Pertama Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo**



## F. Simpulan

Pada periode pertama, merupakan periode munculnya ide (gagasan) pra-gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Pada periode ini faktor peluang politik (*political opportunity*) yang mendasari munculnya aksi tindakan pra-gerakan sosial adanya kekecewaan dan ketidakpercayaan korban bencana Lumpur Lapindo terhadap pemerintah dan PT LBI dalam upaya penanganan semburan lumpur panas, serta muncul perasaan ketidakadilan pada diri korban bencana atas respons dan kebijakan pemerintah dan PT LBI atas penanganan proses pengungsian.

Struktur penggerak (mobilisasi) masih dilakukan secara sporadis dan lokal dengan basis komunitas lingkungan pemukiman (tempat tinggal), seperti RT, RW dan Desa karena pada periode ini kelompok (organisasi) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo belum terbentuk. Pada periode ini belum muncul kesadaran bahwa korban bencana Lumpur Lapindo harus mengorgisir diri untuk membangun kekuatan kolektif dalam memperjuangkan nasib mereka. Korban bencana Lumpur Lapindo melakukan tindakan kolektif untuk melakukan tuntutan berupa: (1) penutupan semburan lumpur dan penanggulan aliran lumpur agar tidak masuk ke wilayah pemukiman warga; (2) besaran nilai ganti rugi atas aset tanah dan bangunan milik warga yang hancur tergenang oleh lumpur; dan (3) adanya payung (jaminan) hukum terkait proses pembayaran ganti rugi. Struktur mobilisasi pada periode ini juga didukung oleh kekuatan koalisi LSM yang tergabung dalam "Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo" yang melakukan advokasi berupa gugatan hukum ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan PT LBI.

Secara eksplisit korban bencana Lumpur Lapindo belum menyebut dan merasa bahwa mereka sebagai korban bencana Lumpur Lapindo, sehingga proses *culturalframing* sebagai korban bencana Lumpur Lapindo belum dibangun. Namun, proses *culturalframing* sebagai korban bencana Lumpur Lapindo justru dimunculkan oleh pihak luar, yakni dari kalangan LSM yang menyebut sebagai "Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo" yang dimotori oleh YLBHI dan Walhi.

# Bab 5

## Proses Pemantapan & Konsolidasi Menuju Aksi Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo

Periode Kedua Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo dapat dipetakan dalam kurun waktu antara tanggal 8 April 2007 hingga April 2009. Pada periode Kedua ini dinamika Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo ditandai dengan dibentuknya kelompok (organisasi) korban bencana Lumpur Lapindo, yakni kelompok Gabungan Korban Bencana Lumpur Lapindo (GKLL) dan kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap), sebagai basis aksi (tindakan) kolektif. Dalam periode ini juga muncul istilah korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) yang dibentuk dan dimunculkan secara resmi oleh warga melalui nama kelompok. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam periode ini istilah “Korban Bencana Lumpur Lapindo” dijadikan sebagai *cultural framing*. Sebagaimana dijelaskan pada Bab I bahwa Gerakan Sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir, dimana proses pengorganisasian tindakan kolektif dilakukan melalui suatu organisasi gerakan sosial.

Ketidakpuasan dan kekecewaan korban bencana Lumpur Lapindo terhadap pihak pemerintah dan PT LBI, serta ketidakpercayaan korban bencana Lumpur Lapindo terhadap pihak LSM, memunculkan

kesadaran bahwa mereka harus mengorganisir diri untuk membangun kekuatan kolektif dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban bencana dalam mendapatkan ganti-rugi atas aset tanah dan bangunan milik mereka yang hancur tergenang oleh lumpur. Dengan demikian, terbentuknya kelompok korban bencana Lumpur Lapindo sebagai respons terhadap ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah, PT LBI, dan LSM.

### **A. Situasi dan Kondisi yang Mendasari Munculnya Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Situasi dan kondisi yang menjadi faktor peluang/kesempatan politik (*Political Opportunity*) yang mendasari munculnya aksi Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo pada periode kedua ini meliputi: (1) terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007; (2) munculnya ketidakpercayaan (*Distrust*) Korban Bencana Lumpur Lapindo terhadap Advokasi LSM, Pemerintah dan Korporasi; dan (3) lumpuhnya peran dan fungsi pemerintahan lokal. Gambaran ketiga aspek peluang/kesempatan politik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **1. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007**

Sebagai respons atas tuntutan korban bencana Lumpur Lapindo kepada pihak pemerintahtentang perlunya jaminan (payung) hukum dalam proses pembayaran ganti rugi sebagaimana dijelaskan pada Bab IV, presiden kemudian mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), tertanggal 8 April 2007.

Terdapat beberapa poin penting terkait isi dari Perpres Nomor 14 Tahun 2007 yakni: (1) Dibentuk suatu badan, yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai pengganti Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (Timnas PSLs). Tugas utama BPLS adalah menangani upaya penanggulangan Lumpur, menangani luapan lumpur, dan menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo; (2) Peta Area Terdampak (PAT) Lumpur Sidoarjo dibagi menjadi dua wilayah

PAT, yakni wilayah dalam PAT dan wilayah luar PAT, dimana untuk wilayah dalam PAT tanggung jawab penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT LBI, sedangkan untuk wilayah luar PAT tanggung jawab penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah; (3) mekanisme penggantian aset tanah dan bangunan milik warga yang tergenang lumpur diatur melalui mekanisme jual-beli dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah; (4) proses pembayaran jual-beli dilakukan secara bertahap dimana 20% dibayarkan dimuka dan sisanya sebesar 80% dibayar paling lambat dalam kurun waktu 2 tahun; dan (5) Pemerintah secara resmi menyebut istilah Lumpur Sidoarjo (Lusi) bukan Lumpur Lapindo (Lula).

Hal yang paling dianggap kontroversial oleh korban bencana Lumpur Lapindo dari substansi Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tersebut diatas adalah terkait dengan proses pembayaran ganti-rugi atas aset tanah dan bangunan milik warga korban bencana melalui mekanisme jual-beli dengan dengan bukti kepemilikan yang sah, dimana pihak PT LBI mensyaratkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat tanah dan sertifikat rumah (bangunan) dengan bukti surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sementara bukti Petok D dan Letter-C tidak diakui sebagai bukti yang sah. Persoalannya adalah bahwa sebagian besar korban bencana Lumpur Lapindo tidak memiliki bukti sertifikat tanah dan rumah, serta bukti surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Paling tidak terdapat dua hal yang sangat krusial dari substansi kebijakan pemerintah tentang penanganan bencana Lumpur Lapindo yang dituangkan dalam bentuk Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tersebut, yakni:

*Pertama*, didalam Perpres tersebut diatur tentang pembagian wilayah yang terkena dampak lumpur Lapindo, yakni wilayah di dalam Peta Area Terdampak (dalam PAT) dan wilayah diluar Peta Area Terdampak (luar PAT). Dalam proses penyelesaian ganti rugi (jual-beli), wilayah yang di luar PAT pembayaran menjadi tanggungjawab pihak PT LBI, sementara wilayah di luar PAT proses penyelesaian ganti rugi (jual-beli) menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dana APBN. Dalam perjalanan selanjutnya,

proses ganti rugi di wilayah dalam PAT tidak berjalan dengan lancar, bahkan hingga tahun 2012 PT LBI belum menyelesaikan proses ganti rugi secara tuntas. Sementara bagi warga korban yang ada di luar wilayah PAT, yang proses ganti ruginya menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dana APBN, pelaksanaan pembayaran ganti rugi relatif berjalan dengan lancar. Kondisi ini dianggap oleh warga korban yang masuk ke dalam wilayah PAT sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dari pemerintah terhadap warga negara.

Kebijakan pemerintah yang membagi wilayah Peta Area Terdampak bencana Lumpur Lapindo menjadi dua wilayah menyebabkan kekuatan kolektif gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo menjadi terpecah. Warga korban yang masuk wilayah luar Peta Area Terdampak (Luar PAT) umumnya tidak terlalu peduli dengan aksi gerakan sosial karena proses pembayaran jual beli berjalan dengan lancar melalui jaminan pemerintah dari alokasi dana APBN. Mereka hanya melakukan aksi saat menuntut agar wilayahnya dimasukkan kedalam wilayah PAT. Hal ini menimbulkan rasa iri pada warga korban yang masuk wilayah dalam PAT, karena proses pembayaran jual beli mengalami kemacetan. Padahal ketentuan yang diatur Perpres adalah bahwa proses pembayaran jual beli bagi korban yang ada di wilayah luar PAT akan diselesaikan setelah proses pembayaran jual beli bagi korban yang ada di wilayah dalam PAT sudah diselesaikan oleh pihak PT LBI.

*Kedua*, didalam Perpres tersebut juga diatur tentang pemberian kompensasi ganti rugi bagi masyarakat yang menjadi korban. Mekanisme pemberian ganti rugi kepada korban bencana Lumpur Lapindo ditetapkan melalui skema jual-beli, dimana warga korban bencana Lumpur Lapindo sebagai pihak yang menjual aset tanah dan bangunan yang hancur tergenang lumpur dan pihak PT LBI dan pemerintah sebagai pihak yang membeli aset. Syarat terjadinya proses jual-beli adalah bahwa warga korban bencana Lumpur Lapindo harus menunjukkan bukti otentik berupa sertifikat tanah dan rumah (bangunan), serta bukti surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Persoalan yang muncul adalah bahwa ternyata bukti persyaratan administratif yang disampaikan oleh pihak PT LBI tidak

bisa dipenuhi oleh sebagian besar warga korban. Misalnya, dari 800 berkas yang milik warga korban di Desa Jatirejo, hanya 10 orang yang memiliki sertifikat tanah dan hanya satu orang yang memiliki IMB. Sementara dari jumlah keseluruhan berkas milik warga di empat desa, yakni sebanyak 4.000 berkas, dimana yang paling banyak berkas milik warga dari Desa Kedungbendo, ternyata hanya 110 berkas saja yang bersertifikat.

Dengan demikian nampak bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak Lumpur Lapindo menimbulkan perasaan diskriminatif pada warga korban yang ada di wilayah dalam PAT dan menempatkan posisi warga korban dalam posisi yang lemah. Kondisi seperti ini ternyata berdampak pada melemahnya kekuatan kolektif gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo sehingga kerja gerakan sosial menjadi tidak efektif.

Seperti halnya pada periode pertama, maka munculnya kebijakan pemerintah dengan terbitnya Perpres No. 14/2007 juga lepas dari konteks konstelasi politik pemerintahan Presiden SBY pada saat itu. Pada kurun waktu pemerintahan Presiden SBY, yakni periode 2005-2009, posisi ARB adalah sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (7 Desember 2005 sampai 20 Oktober 2009).

## **2. Ketidakpercayaan (*Distrust*) Korban Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Advokasi LSM, Pemerintah, dan Korporasi**

Pengalaman menarik dialami oleh peneliti ketika peneliti "diusir" oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo yang sedang berkumpul di Pos Tanggul penahan genangan lumpur karena dikira dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun setelah dijelaskan bahwa peneliti bukan orang LSM tapi dari perguruan tinggi yang sedang melakukan penelitian, kemudian mereka mau menerimanya.

Pada awalnya warga korban bencana Lumpur Lapindo berharap pihak PT LBI dan pihak pemerintah bisa segera mengatasi persoalan semburan lumpur panas Lapindo. Namun ternyata berbagai upaya untuk menghentikan semburan lumpur tidak berhasil, sehingga semburan lumpur tidak bisa dihentikan. Volume semburan semakin meningkat dan luberan lumpur sudah memasuki kawasan

pemukiman penduduk yang ada di wilayah sekitar pusat semburan. Warga korban bencana Lumpur Lapindo ternyata tidak bisa berharap terhadap PT LBI dan pemerintah untuk menghentikan semburan lumpur. Pada akhirnya warga korban bencana Lumpur Lapindo terpaksa harus mengungsi meninggalkan tempat tinggalnya.

Selanjutnya warga korban bencana Lumpur Lapindo berharap kepada peran dari pemerintah lokal seperti RT, RW, dan Desa untuk memperjuangkan nasib mereka. Namun ternyata pihak pemerintah lokalpun tidak mampu berbuat banyak, karena jalannya roda pemerintahan terganggu bahkan tidak bisa berfungsi. Dalam beberapa hal fungsi-fungsi pemerintahan desa diambil alih oleh pihak kecamatan. Pihak RT, RW, Desa/Kelurahan, dan bahkan pemerintah Kecamatan tidak berdaya dalam menekan pihak PT LBI dan pemerintah pusat untuk memberi kejelasan nasib warga korban bencana Lumpur Lapindo.

Terakhir, warga korban bencana Lumpur Lapindo menaruh harapan kepada peran dari LSM, organisasi advokatif dan pihak luar untuk membantu memperjuangkan nasib mereka. Namun sebagaimana telah disinggung diatas, ternyata gerakan advokasi LSM dan organisasi sosial lainnya tidak menunjukkan hasil yang positif bagi warga korban bencana Lumpur Lapindo. Bahwa LSM dan organisasi advokasi ini "menarik diri" setelah kekalahan advokasi mereka dalam proses litigasi di pengadilan. Dengan demikian, warga korban bencana Lumpur Lapindo tidak bisa berharap banyak terhadap peran dan bantuan dari pihak LSM dalam memperjuangkan nasib mereka.

Kondisi seperti ini menyebabkan munculnya rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan (*distrust*) warga korban bencana Lumpur Lapindo kepada pihak PT LBI, pemerintah, dan juga kepada pihak LSM. Meskipun ada LSM yang tetap bertahan dalam memberikan advokasi kepada warga korban bencana Lumpur Lapindo, namun karena warga korban bencana Lumpur Lapindo sudah hilang kepercayaannya kepada pihak LSM, maka akhirnya LSM tersebut menarik diri. Misalnya, LSM "Komunitas Bambang Wetan" pimpinan Emha Ainun Nadjib, terpaksa harus menarik diri dari proses advokasinya karena ada beberapa pihak dari kelompok korban

bencana Lumpur Lapindo yang mencurigainya karena dianggap ada agenda dan kepentingan tertentu.

Ketidakpercayaan warga korban bencana terhadap bantuan advokasi dari pihak luar, khususnya LSM menyebabkan munculnya kesadaran korban bencana untuk mengorganisir diri. Kesadaran warga korban bencana Lumpur Lapindo untuk mengorganisir diri muncul setelah mereka berada di lokasi pengungsian. Warga korban berpikir bahwa upaya memperjuangkan nasib mereka sebagai korban bencana tidak bisa mengandalkan kepada bantuan pihak luar. Atas dasar itu, kemudian warga korban di lokasi pengungsian mulai melakukan koordinasi dan konsolidasi. Hasil koordinasi dan konsolidasi ini kemudian melahirkan organisasi atau kelompok korban bencana sebagai basis perjuangan tuntutan warga korban bencana Lumpur Lapindo. Kemudian terbentuklah dua kelompok utama korban bencana Lumpur Lapindo, yakni Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dan Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Pagarekoplal). Sejak saat ini kemudian muncul istilah “Korban Bencana Lumpur Lapindo”.

### **3. Lumpuhnya Peran dan Fungsi Pemerintahan Lokal**

Bencana semburan Lumpur Lapindo selain menghancurkan pemukiman warga, juga menghancurkan infrastruktur pemerintahan lokal, seperti RT, RW dan Desa. Seperti halnya warga korban, kantor administrasi pemerintahan desa pun harus ikut mengungsi. Kantor pemerintahan desa pada umumnya pindah ke kantor Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, sehingga roda pemerintahan tidak bisa berfungsi dan berjalan dengan baik.

Hingga tahun 2007, paling tidak ada tujuh desa yang kantor administrasinya harus mengungsi, yakni: Desa Jatirejo, Desa Renokenongo, Desa Siring yang mengungsi ke Kantor Kecamatan Porong; kemudian Desa Kedungbendo, Desa Kalitengah yang mengungsi ke kantor Kecamatan Tanggulangin; dan Desa Pejarakan, Desa Keboguyang yang mengungsi ke kantor Kecamatan Jabon.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 wilayah yang masuk ke dalam Peta Area Terdampak (PAT) bencana Lumpur Lapindo meliputi Sebelas desa di Tiga kecamatan, yakni:



Desa Renokenongo, Desa Siring, Desa Glagaharum, Desa Jatirejo, Desa Mindi (Kecamatan Porong), Desa Kedungbendo, Desa Ketapang, Desa Gempolsari, Desa Kalitengah (Kecamatan Siring); Desa Pejarakan dan Desa Keboguyang (Kecamatan Jabon). Wilayah desa ini harus dikosongkan karena tergenang oleh lumpur panas Lapindo.

Pada awal-awal terjadinya semburan Lumpur Lapindo, peran pemerintah desa lebih kepada upaya mengkoordinir warga untuk melakukan aksi dalam rangka mencegah masuknya lumpur ke wilayah desa masing-masing. Masing-masing wilayah desa juga membentuk Pam Swakarsa yang tugasnya memantau situasi dan kondisi aliran lumpur di desanya masing-masing. PT LBI melakukan penanggulangan lumpur sesuai dengan tuntutan warga masing-masing wilayah desa, melalui Pam Swakarsa desanya masing-masing. Namun dalam perjalanan berikutnya, peran dan fungsi pemerintah lokal, khususnya pemerintahan desa, lebih banyak bersifat administratif yang terkait dengan dokumen kependudukan, seperti memberikan surat keterangan dominisili, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan pindah, pendataan terkait dengan persebaran pengungsian warga masing-masing desa, dan sebagainya.

## **B. Terbentuknya Kelompok (Organisasi) Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Korban bencana Lumpur Lapindo merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak pemerintah dan pihak PT LBI, terutama terkait dengan substansi Perpres Nomor 14 Tahun 2007, selain itu mereka juga tidak bisa berharap terhadap advokasi LSM dan peran pemerintah lokal dalam memperjuangkan nasib mereka. Atas dasar ini kemudian korban bencana Lumpur Lapindo menyadari bahwa mereka harus membangun kekuatan kolektif.

### **1. Terbentuknya Kekuatan Kolektif Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Pada awalnya respons korban bencana Lumpur Lapindo masih bersifat pasif. Warga masih menunggu apa sesungguhnya yang terjadi dengan lingkungan mereka. Namun respons warga mulai muncul tatkala aliran lumpur mulai memasuki areal tempat tinggal

mereka. Tindakan kolektif korban bencana Lumpur Lapindo yang muncul masih bersifat sporadis, reaktif dan parsial, dimana secara massif belum dikoordinir dengan baik karena kelompok atau organisasi korban bencana Lumpur Lapindo belum terbentuk. Umumnya warga korban bencana Lumpur Lapindo menunggu respons dari pihak pemerintah dan pihak PT LBI dalam upaya menyelesaikan persoalan semburan Lumpur Lapindo. Selain itu warga juga masih menunggu upaya advokasi dari pihak LSM, yakni LSM YLBHI dan LSM Walhi Jawa Timur dalam melakukan proses litigasi berupa gugatan di pengadilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan PT LBI yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan penderitaan bagi warga Porong dan sekitarnya.

Namun ternyata respons pemerintah dianggap sangat lamban dan tidak memuaskan warga korban bencana Lumpur Lapindo, sementara pihak PT LBI ternyata tidak mampu untuk menghentikan semburan lumpur. Sedangkan upaya advokasi LSM melalui proses litigasi juga mengalami kegagalan karena gugatan hukum LSM ditolak oleh pihak pengadilan, sehingga pihak LSM tidak memiliki kekuatan dalam membela kepentingan warga korban dan mulai menarik diri dari proses advokasi sosial atas korban bencana Lumpur Lapindo. Disisi lain, pemerintah lokal seperti RT, RW, Desa, dan Kecamatan juga tidak berdaya dalam membela kepentingan warganya, khusus pemerintahan RT, RW dan Desa di lokasi yang terkena dampak bencana Lumpur Lapindo mengalami kelumpuhan. Menghadapi realitas seperti ini, maka muncul kesadaran dari beberapa warga korban bencana Lumpur Lapindo bahwa mereka harus menghimpun (mengkoordinir) diri untuk berjuang menuntut hak-hak mereka sebagai korban bencana.

Di Lokasi pengungsian, khususnya di lokasi pengungsian Pasar Porong Baru (PPB), beberapa tokoh masyarakat yang berasal dari wilayah desa yang terkena dampak bencana Lumpur Lapindo, yang juga merupakan korban bencana, karena merasa terpenggil dan atas dasar tanggung jawab sosial kemudian tampil sebagai insiator dalam mengkoordinir warga korban bencana Lumpur Lapindo. Para tokoh masyarakat tersebut kemudian mulai melakukan konsolidasi, rapat-rapat, diskusi, dan pertemuan-pertemuan bersama

dengan warga korban bencana Lumpur Lapindo yang lainnya. Dari proses tersebut maka kemudian disepakati untuk dibentuk kelompok-kelompok korban bencana Lumpur Lapindo yang selanjutnya dijadikan basis bagi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dalam melawan bentuk ketidakadilan yang mereka rasakan.

Dalam proses selanjutnya, kemudian lahirlah dua kelompok utama korban bencana Lumpur Lapindo, yakni kelompok: (1) Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL); dan (2) Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Pagarekorlap). Proses terbentuknya kelompok korban bencana Lumpur Lapindo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Proses Terbentuknya Kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL)**

Awal terbentuknya kelompok warga korban lumpur Lapindo bermula dari pemikiran dan usulan Cak Nun pada sekitar akhir bulan Agustus 2007 kepada warga korban bencana Lumpur Lapindo terutama yang berasal dari wilayah Desa Jatirejo. Saat itu Cak Nun menyampaikan bahwa perjuangan warga korban bencana Lumpur Lapindo tidak hanya berhenti sampai selesainya pembayaran jual-beli, tapi juga dilanjutkan dengan program-program yang terkait dengan proses akulturasi antara warga korban lumpur dengan masyarakat yang baru. Selain itu juga warga korban lumpur diharapkan turut berpartisipasi dalam program-program pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke arah yang lebih baik lagi.

*"...Nah setelah itulah proses pembayaran 20% itu lancar. Itu mulai Juli-Agustus. Ketika mulai lancar sekitar bulan Agustus itu, Cak Nun ngomong kepada kita, "rek nek kalau sudah terbayar kabeh, suatu saat kan bisa saja kita ini bubar", Cak Nun punya pikiran ini tidak harus masalah bayar-membayar, tetapi ini juga nanti harus dilanjutkan dengan untuk akulturasi budaya masyarakat. Sebab apa? Warga yang di Desa Jatirejo misalkan, pindah ke desa A misalkan, ini belum tentu mereka langsung settle, ini harus ada akulturasi budaya. Maka kemudian setelah sesi pertama adalah masalah pembayaran, urusan bayar-membayar, yang kedua akulturasi budaya, nah yang ketiga Cak Nun*

*menginginkan "nek cara begini awakmu makmur, la kalau sudah makmur awakmu ojo meneng ae, ya opo carane supaya Sidoarjo lebih makmur lagi". Tiga tahapan itu yang kemudian, apa namanya, kita strategikan. Dan itu tidak mungkin bisa kecuali ada organisasi..."*<sup>241</sup>

Akhirnya, pada sekitar bulan Agustus 2007, warga korban bencana lumpur Lapindo membentuk sebuah kelompok yang menamakan diri Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL). Anggota GKLL adalah para warga korban bencana lumpur Lapindo, terutama yang berasal dari Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo, dan warga Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum TAS), yang jumlahnya lebih dari 5.000 KK. Berdasarkan kesepatan warga korban, kemudian Djoko Suprastowo diberikan kepercayaan sebagai Koordinator GKLL dan Khoirul Huda sebagai sekretaris GKLL. Untuk memperkuat jaringan kelompok, selanjutnya dibentuk pengurus GKLL di tingkat desa dan kelurahan, yang meliputi: Bambang Harpriyatno (Koordintaor GKLL Kelurahan Siring), M. Saudo (Koordintaor GKLL Desa Renokenongo), H. Imron Rosadi (Koordintaor GKLL Desa Kedungbendo I), Suparman (Koordintaor GKLL Desa Kedungbendo II), H. Suprat (Koordintaor GKLL Desa Jatierjo), M. Mufid (Koordintaor GKLL Desa Ketapang), Agus Cahyono (Koordintaor GKLL Desa Kalitengah), dan Sutikno (Koordintaor GKLL Desa Gempolsari).

Ada tiga tujuan dibentuknya GKLL, yaitu: Pertama, memperjuangkan tuntutan ganti rugi; Kedua, melakukan proses akulturasi dan sosialisasi warga korban dengan lingkungan warga baru; dan Ketiga, partisipasi korban lumpur dalam pengembangan Sidoarjo. Sebagaimana dijelaskan oleh Huda bahwa *"...Selain untuk proses ganti rugi ada tujuan yang kedua yaitu akulturasi budaya. Yang ketiga adalah, apa namanya, partisipasi korban lumpur terhadap pembangunan Sidoarjo..."*<sup>242</sup>

GKLL memperjuangkan proses ganti rugi bagi warga korban lumpur Lapindo melalui skema *cash and carry*(CnC), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007. Skema *cash and carry*

---

<sup>241</sup> Kutipan wawancara dengan Khoirul Huda: Sabtu, 6 April 2013.

<sup>242</sup> Ibid.

adalah skema pembayaran ganti rugi secara bertahap melalui pembayaran uang muka sebesar 20%, dan sisanya sebesar 80% dilunasi dengan cara pembayar tunai dalam kurun waktu 2 tahun. Selama 2 tahun warga korban akan diberikan uang untuk kontrak rumah sebesar Rp 5 juta, dan jatah hidup sebesar Rp 300 ribu untuk setiap jiwa perbulan.

Sementara itu, dari kelompok GKLL muncul dua tokoh penting yakni Ir. Djoko Suprastowo dan Khoirul Huda S.Ag., M.Ag. Djoko Suprastowo dipercaya oleh warga korban lumpur Lapindo sebagai koordinator GKLL, sedangkan Khoirul Huda dipercaya sebagai sekretaris GKLL. Djoko Suprastowo merupakan tokoh masyarakat dari Desa Siring. Dipercaya sebagai koordinator GKLL karena memiliki kharisma yang kuat, meskipun bukan seorang organisatoris.

*"...Pak Djoko itu usianya diatas 50, tapi saya tidak tahu persis berapa usianya. Itu satu. Terus kemudian dia tokoh, artinya tokoh masyarakat disitu. Dari Siring. Waktu itu kenapa, kita sedang ngomong, pak Djoko itu memang bukan orang organisatoris. Jadi kalau malam dia harus rapat itu agak susah... Memiliki kharisma, itu yang kita ambil. Bagian operasional saya dan temen-temen. Jadi pak Djoko itu sampai hari ini kita jadikan sebagai simbol. Tapi pak Djoko pun dalam beberapa kali pertemuan seringkali tidak hadir, tapi komunikasi tetap jalan, "Ji, keputusannya begini Ji", "oh ya nggak opo-opo". Ya, dia biasanya kalau saya mau ada rapat "gimana Ji bisa rapat?", "aduh manehi nggak bisa", dia kan memang sibuk karena kontraktor juga. "Tapi bahas masalah ini yo opo carane?", jadi pak Djoko sudah kita serap duluan. Begitu rapat selesai kepada beliaunya saya sampaikan, keputusannya saya sampiakan. Dan hampir selama ini tidak ada masalah. Artinya meskipun dia itu, kalau posisinya pak Djoko itu saya katakan "Tut Wuri Handayani" lah...".<sup>243</sup>*

Khoirul Huda merupakan orang yang paling dominan dalam menggerakkan kelompok GKLL, sehingga Khoirul Huda menjadi tokoh sentral dalam kelompok GKLL. Menurut penuturan Khoirul Huda, dulu sebelum terjadinya peristiwa semburan lumpur Lapindo

---

<sup>243</sup> Ibid.

dia merupakan tokoh Desa Jatirejo dan memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa Jatirejo. Selain itu Khoirul Huda juga bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), menamatkan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, yang saat ini sedang menyelesaikan program Doktor Ilmu Sosial di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Keterlibatan Khoirul Huda dalam GKLL karena merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak warga korban. Pernyataan Khoirul Huda sebagai berikut:

*"...Jadi yang pertama, saya itu terlibat karena saya sebagai Wakil Ketua LPM di Desa Jatirejo. Terus kemudian yang kedua saya minimal merasa bahwa ini tidak semuanya warga bisa komunikasi. Komunikasi dalam artian memperjuangkan nasibnya kepada Bupati, kepada Lapindo, kepada itu semua. Mereka butuh jembatan. Dan sejak awal saya sampaikan kepada masyarakat siapapun yang saya hubungi tidak ada masalah yang penting mereka bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Terus kemudian yang ketiga ya naluri saya sebagai pendidik, sebagai pengajar, ya itu saja, yang kemudian saya harus hingga saat ini masih melakukan koordinasi dan lain sebagainya..."*<sup>244</sup>

Khoirul Huda merupakan sosok yang cerdas, hal ini nampak dari ekspresi dan gaya bicaranya saat wawancara. Selain itu Khoirul Huda juga merupakan seorang organisatoris. Ketika mahasiswa S1, Khoirul Huda aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saat ini Khoirul Huda juga aktif di organisasi Persyarikatan Muhammadiyah di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sidoarjo. Untuk mewujudkan dan memperkuat visi ketiga dari GKLL yakni turut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan Sidoarjo, kemudian Khoirul Huda juga mendirikan LSM "Huda Centre" (HC) dimana dia juga menjadi direktornya.

*"...Nah di Pondok Mutiara K-8 itu saya mendirikan HC, Huda Centre. Itu sebenarnya Huda Centre itu dulu didirikan*

---

<sup>244</sup> Ibid.

*karena untuk tujuan GKLL yang ketiga, yaitu setelah apa namanya? Setelah ganti rugi, akulturasi, dan partisipasi pembangunan masyarakat Sidoarjo. Saya membentuk HC dan HC itu karena bentuknya itu partisipasi korban lumpur ke masyarakat Sidoarjo, maka saya banyak bekerjasama dengan beberapa perusahaan. Bakti susu, pelatihan bengkel, macem-macem itu... Korban lumpur dan di luar lumpur karena konteksnya adalah partisipasi untuk Sidoarjo. Saya sampai hari ini sudah ada sekitar 70 bengkel yang saya didik melalui kerjasama dengan MPM Honda. Kita berkala. Terus kemudian ada ratusan apa namanya? Pengusahan roti yang sudah kita bina kerjasama dengan Bogasari. Nah terus kemudian ada ratusan siswa yang kita kasih beasiswa kerjasama dengan Santosa Lestari. Bagi sembako, bagi susu, namanya peningkatan gizi siswa, peningkatan sarana sekolah itu sudah kita ini, dan sampai saat ini itu masih jalan dan karena sifatnya itu charity..."<sup>245</sup>*

#### **b. Proses Terbentuknya Kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap)**

Selain kelompok GKLL, juga muncul kelompok lainnya yang menamakan diri Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap). Anggota kelompok Pagarekorlap meliputi seluruh warga korban bencana lumpur Lapindo yang berasal dari desa Renokenongo, Kecamatan Porong, yang tinggal di tempat pengungsian Pasar Porong Baru (PPB), yang jumlahnya sekitar 766 KK. Koordinator kelompok Pagarekorlap dipercayakan kepada H. Sunarto, sedangkan sekretarisnya Pitanto.

Warga yang tergabung dalam kelompok Pagarekorlap adalah mereka yang tidak setuju skema Perpres No. 14/2007, mereka meminta pembayaran *direct cash* (tunai langsung). Tapi seiring perjalanan, kelompok Pagarekontrak yang bertahan di pengungsian PPB Sidoarjo itu akhirnya setuju dengan skema Perpres No. 14/2007 setelah ditekan melalui ancaman pemutusan air PDAM, listrik dan penghentian jatah makanan. Pada akhir April 2008 kelompok Pagarekontrak setuju dengan skema pembayaran jual-beli 20 persen dan 80 persen, dengan meminta jaminan jika PTMLJ tidak akan

---

<sup>245</sup> Ibid.

ingkar janji. Namun, terakhir koordinator Pagarekorlap, H. Sunarto, SE., tiba-tiba mengambil keputusan setuju dengan skema “cash & resettlement” yang menimbulkan “rasan-rasan” para pengikutnya yang takut menyatakan ketidaksetujuan mereka.

Pitanto<sup>246</sup> menjelaskan bahwa ketika warga yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo berada di pengungsian Pasar Porong Baru (PPB) kondisinya sangat memprihatinkan dan banyak yang resah. Mereka kebanyakan tidak mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Para warga korban lumpur Lapindo bingung dengan nasib hidup mereka. Mereka juga ditekan untuk menerima kontrak yang ditawarkan oleh pihak PT LBI. Atas dasar kondisi seperti ini, kemudian Pitanto merasa terpanggil untuk ikut mengurus dan mengatur para korban. Pitanto kemudian menemui H. Sunarto, SE., yang sama-sama berada di tempat pengungsian Pasar Porong Baru (PPB) untuk membicarakan kondisi warga korban lumpur Lapindo. Pitanto menyatakan sebagai berikut:

*“...Dulu itu para korban nggak ada yang ngatur, kemudian saya memberanikan diri dengan pak Narto itu..’kalau orang-orang ini kayak gini bagaimana perasaan sampeyan’, karena saya pada waktu itu saya nggak bisa mimpin, karena saya tahu karakternya warga sebab saya pernah, nuwun sewu, saya pernah ngatur orang-orang itu selama 8 tahun, saya sebagai kepala desa disitu 8 tahun...”*...*“...Karena pada waktu itu warga itu ditekan, oleh Lapindo, untuk diberikan kontrak, karena kan saya yang blokir Pasar Porong Baru selama 2 tahun lebih, saya sebagai pengungsi Pasar Porong Baru...”*.(Kutipan pernyataan Pitanto)<sup>247</sup>

*“...karena pada waktu itu kepala desa tidak jalan dengan kita warga Pagar Rekontrak ini, bahkan tidak diurus sama sekali, kalau pemerintahan desa ya enak saja, yang bisa istirahat malam bisa tidur, tapi kalau saya dengan pak Narto cs, pengurus, kalau di Pasar Porong Baru ya itu full 24 jam, kapan saja dimana saja, apa saja, pasti dilakukan...”*<sup>248</sup>

---

<sup>246</sup> Pitanto, laki-laki, usia 51 tahun, asal Desa Renokenongo, adalah Wakil Ketua Kelompok Pagarekontrak.

<sup>247</sup> Wawancara dengan Pitanto, Jumat: 15 Pebruari 2013.

<sup>248</sup> Ibid.



Selanjutnya bersama dengan H. Sunarto, SE., Pitanto mengumpulkan beberapa warga korban Lumpur Lapindo yang ada di tempat pengungsian Pasar Porong Baru (PPB) untuk mendiskusikan dan membicarakan tentang kondisi dan nasib mereka. Warga korban bisa dikumpulkan melalui informasi dari mulut ke mulut secara *"gethok tular"*. Dari diskusi dan pembicaraan informal dengan beberapa warga korban bencana Lumpur Lapindo ini kemudian disepakati untuk membentuk suatu kelompok yang bisa mewakili warga korban dalam memperjuangkan nasibnya. Maka, selanjutnya dibentuk sebuah kelompok yang diberi nama Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap). Nama Renokenongo mengacu kepada desa asal warga korban yang berada di tempat pengungsian Pasar Porong Baru (PPB), yakni Desa Renokenongo. Kemudian warga juga sepakat secara aklamasi untuk memilih H. Sunarto, SE., untuk menjadi Koordinator dan Pitanto untuk menjadi Wakil Koordinator kelompok Pagarekontrak. Pada awalnya Pitanto menolak untuk menjadi Wakil Ketua kelompok Pagarekontrak, namun karena didesak warga korban dan karena merasa terpenggil, akhirnya Pitanto menerimanya. Untuk melengkapi kepengurusan, selanjutnya H. Sunarto, SE., dan Pitanto meminta Yudo Wintoko sebagai sekretaris dan Aris Setiadi sebagai bendahara kelompok Pagarekorlap.

*"...Ya, kita sharing kepada warga, karena pada waktu itu kan kumpulnya mudah, satu komunitas warga di Pasar Porong Baru hanya istilahnya itu gethok tular saja bisa kumpul, dan juga orang-orang itu memilih, memandang saya dianggap pantes, dan saya sendiri sebenarnya tidak..ya itu tadi karena kepedulian moral, ya okelah. Karena pada waktu itu saya tidak mau, sama pak Narto saya dipanggil, karena orang-orang itu tidurnya tidak ada atap, kan itu tidurnya kayak ikan pindang, saya itu trenyuh...Kalau, ini ngomong-ngomong saja..`terus bagaimana perasaan sampeyan lihat orang-orang ini`..."...Iya, asalnya itu belum ada nama paguyuban itu, terus ya dibuat pengurusnya, ya pak Narto sebagai ketua saya wakilnya.."*<sup>249</sup>

---

<sup>249</sup> Ibid.

Dari paparan diatas, nampak bahwa Pitanto dan H. Sunarto, SE., merupakan tokoh sentral yang sangat berperan dalam pembentukan kelompok Pagarekontrak. Siapakah Pitanto dan H. Sunarto, SE.? Pitanto, Spd., seorang laki-laki berusia 51 tahun, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan, merupakan warga asli dari Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pitanto dilahirkan di Desa Renokenongo, orang tua dan nenek-kakeknya juga berasal dari Desa Renokenongo. Ketika masih di Desa Renokenongo, sebelum terjadinya peristiwa bencana Lumpur Lapindo, Pitanto bekerja sebagai karyawan swasta dan juga berwiraswasta, sehingga secara ekonomi kehidupannya berhasil. Saat masih tinggal di Desa Renokenongo, Pitanto merupakan seorang tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh, karena itu Pitanto dipercaya oleh masyarakat Desa Renokenongo sebagai Kepala Desa selama 8 tahun. Ketika terjadi bencana Lumpur Lapindo pada Mei 2006, Pitanto dan keluarganya bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Renokenongo mengungsi ke tempat pengungsian PPB sampai tahun 2009.

Selanjutnya, H. Sunarto, SE., seorang laki-laki usia 51 tahun, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi. Sebelum terjadinya bencana Lumpur Lapindo, Sunarto tinggal di RT 01, RW 01, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari pusat sumur pengeboran Banjar Panji-1 (BPJ-1), tempat dimana pusat semburan lumpur panas keluar. Seperti halnya Pitanto, Sunarto juga merupakan orang yang cukup terpendang di Desa Renokenongo selain karena status pendidikannya yang Sarjana Ekonomi, tetapi juga karena kehidupannya ekonominya yang cukup berhasil. Sunarto bekerja di sebuah perusahaan swasta di Sidoarjo. Selain itu Sunarto juga berprofesi sebagai pengusaha. Ketika terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindo, sebagaimana halnya Pitanto, Sunarto bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Renokenongo mengungsi ke tempat pengungsian Pasar Porong Baru (PPB) sampai tahun 2009. Di tempat pengungsian PPB ini kemudian Sunarto bersama dengan Pitanto, yang sudah dikenal sejak masih tinggal di Desa Renokenongo, memprakarsai pembentukan kelompok Pagarekorlap<sup>250</sup>.

---

<sup>250</sup> Disarikan dari hasil wawancara dengan Sunarto, Senin: 4 Juni 2013.

## 2. Mobilisasi Kekuatan Finansial sebagai Faktor Penunjang Kekuatan Kolektif

Kekuatan kolektif korban bencana Lumpur lapindo juga didukung oleh kekuatan finansial (dana) yang dimobilisasi dari iuran anggotanya. Dari aspek finansial, potensi dana yang bersumber dari iuran (tarikan) yang dikumpulkan (dimobilisir) dari setiap warga korban bencana Lumpur Lapindo memang cukup besar. Misalnya, jumlah berkas jual-beli asset tanah dan bangunan milik warga korban bencana Lumpur Lapindo yang tergabung dalam kelompok GKLL sebanyak 4000 berkas. Setiap berkas ditarik iuran (fee) sebesar Rp 500.000,- (Limaratus Ribu Rupiah) yang disetorkan kepada kas bendahara kelompok GKLL. Dengan demikian dana yang terkumpul di bendahara GKLL mencapai jumlah sekitar 2 Milyar Rupiah. Menurut Khoirul Huda dana sebesar itu tidak seluruhnya dikumpulkan di Bendahara pusat GKLL, namun sebagian terdistribusikan di bendahara Korlap masing-masing.

*"..a saya katakan karena sumber dana perjuangan kita itu dari mana? Dari masyarakat. Jadi begini model kita itu masing-masing desa, di GKLL itu masing-masing desa dipersilahkan saja masing-masing Korlap itu sepakat dengan warganya masing-masing untuk iuran. Maka Jatirejo bikin sendiri, Siring bikin sendiri, Kedungbendo bikin sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya... Iya dalam bentuk uang. Misalnya begini, kalau Jatirejo seingat saya tahun 2008 itu sudah kesepatan warga bahwa warga membayar 500 Ribu Rupiah untuk tanah dan 500 ribu untuk bangunan... GKLL hanya minta tapi itu dulu sekarang sudah hampir satu tahun ini nggak aktif, minta 500 saja per-berkas untuk operasional. Dan itu masuk bendahara GKLL. Itu untuk kontrak sekretariat kantor GKLL, kita dulu kontrak ganti-ganti, pindah-pindah, pertama di Thamrin dulu itu, di Jalan Raya Thamrin itu..."*<sup>251</sup>

Demikian pula untuk kelompok Pagarekontrak, seperti halnya kelompok GKLL, warga korban bencana Lumpur Lapindo yang tergabung dalam kelompok Pagarekontrak juga ditarik iuran (fee)

---

<sup>251</sup> Kutipan pernyataan Khoirul Huda, wawancara hari Sabtu, 6 April 2013.

untuk masing-masing berkas antara 500 Ribu Rupiah hingga satu juta Rupiah. Jika diasumsikan ada 600 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi anggota kelompok Pagarekontrak dimana masing-masing KK memiliki satu berkas, apabila masing-masing berkas ditarik iuran (fee) sebesar 500 Ribu Rupiah saja, maka jumlah dana yang terkumpul di kas Bendahara kelompok Pagarekontrak mencapai sekitar 300 juta Rupiah. Dana iuran dari warga ini kemudian dikelola oleh bendahara untuk dijadikan dana perjuangan kelompok Pagarekontrak.

### **3. Mobilisasi Dukungan Internal dan Eksternal dalam Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Dalam konteks gerakan sosial korban lumpur Lapindo, analisis jaringan dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu: jaringan internal dan jaringan eksternal. Jaringan internal dimaksudkan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok gerakan sosial korban lumpur Lapindo dalam rangka membangun hubungan dengan warga korban lumpur Lapindo sebagai basis partisipan gerakan. Sementara jaringan eksternal dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok gerakan sosial korban lumpur Lapindo dalam rangka membangun hubungan dengan pihak luar untuk mendapatkan dukungan atas gerakan sosial yang dilakukan.

Bagaimana kelompok-kelompok gerakan sosial korban lumpur Lapindo membangun jaringan internal? Sekretaris GKLL Khoirul Huda menjelaskan bahwa untuk memperkuat jaringan internal, GKLL menyusun struktur komunikasi ke bawah secara berjenjang. Struktur GKLL terdiri dari Pengurus Pusat (PP), yang terdiri dari Ketua Djoko Suprastowo, Sekretaris Khoirul Huda, dan bendahara Mulyadi. Dibawah PP kemudian dibantu oleh 12 Koordinator Lapangan (Korlap). Masing-masing Korlap kemudian bertanggung jawab atas wilayah RT-nya masing-masing.

*"...Jadi, saya itu kalau, jadi GKLL itu kan ada yang disebut PP GKLL, PP itu Pengurus Pusat, ini hanya jumlahnya 12 orang. Nah masing-masing orang ini membawahi RT di Desa masing-masing. Masing-masing RT membawahi warga masing-masing. Jadi kalau saya mengundang rapat warga*

*saya cukup sms ke 12 orang ini. Masing-masing 12 orang ini cukup sms ke RW dan RT-nya masing-masing. RT-nya masing-masing langsung ke warga... Terus masing-masing Korlap, Imron Rosadi Korlap-nya Kedungbendo, Bambang Sakri Korlap-nya Siring, terus kemudian Haji Suprarpto Korla-nya Jatirejo, terus kemudian pak Suparman Korlap-nya Kedungbendo Utara, pak Hudo Korlap-nya Reno, dan sebagainya. Jadi saya dengan 12 orang itu sudah cukup. Nanti malam kita ketemu mau ngumpulkan ribuan orang, hari ini, pagi ini tak sms, selesai. Itu bisa..."<sup>252</sup>*

Senada dengan penjelasan Khoirul Huda dari PP GKLL, Bambang Sakri sebagai Korlap Siring menjelaskan bahwa sebagai Korlap dia membawahi wilayah 8 RT, yang masing-masing RT ada 2 orang yang bertanggung jawab. Sehingga secara keseluruhan Bambang Sakri memiliki 16 orang di lapangan.

*"...Ketua GKLL itu H. Djoko Prastowo, terus di sekretarisnya pak Khoirul Huda, terus terdiri dari bendahara pak Mulyadi, terus di tempat saya, saya membawahi desa saya sendiri, koordinator Siring, koordntor glagah, koordinator kedungbendo, nah itu menjadi satu..."<sup>253</sup>...Pertama, yang saya pegang, saya di bawah ini mempunyai yang namanya RT sama wakil RT, 8 daripada ketua RT, 8 juga wakil ketua RT termasuk juga Korlap, itupun sering saya adakan pertemuan, rapat, pertama saya berikan motivasi apa yang, kalau saya dapat informasi dari Minarak segera saya pangggit mereka ke-16 orang itu, saya beri gambaran, saya beri pemaparan, setelah itu mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Itu pun kalau tidak bisa, a.. mereka, tiap RT kan mempunyai a..warga yang mempunyai nomor-nomor teleponya, ada yang satu RT itu terdiri dari ada yang 40 KK, satu RT ada yang 50 KK, itupun nanti dapat informasi siapapun saya share-kan ke RT, Korlap, dan masyarakat..."<sup>253</sup>*

Dengan demikian, model jaringan internal yang dibangun oleh GKLL bersifat berjenjang (hierarkis) dimana Korlap merupakan ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan massa partisipan.

<sup>252</sup> Kutipan pernyataan wawancara Khoirul Huda, Sabtu: 6 April 2013.

<sup>253</sup> Kutipan pernyataan wawancara Bambang Sakri: Senin, 4 Juni 2012.

Hampir sama dengan GKLL, model jaringan internal yang dibangun oleh kelompok Pagarekontrak juga dilakukan secara berjenjang. Pada tingkat atas, kelompok Pagarekontrak dipimpin oleh Empat tokoh dominan, yaitu: Sunarto sebagai Ketua, Pitanto sebagai Wakil Ketua, Aris Setiadi sebagai Bendahara, dan Yudo Wintoko sebagai Sekretaris<sup>254</sup>. Kelompok Pagarekontrak dibentuk oleh warga korban lumpur Lapindo yang ada di tempat pengungsian PPB. Menurut penjelasan Pitanto, dalam kelompok Pagarekontrak ada kelompok-kelompok lagi yang didasarkan atas wilayah kerja RT. Dalam Pagarekontrak ada 14 RT, sehingga ada 14 kelompok yang di koordinir oleh koordinator kelompok. Kelompok wilayah RT ini ketika berada di tempat pengungsian PPB dikelompokkan dalam wilayah blok-blok pengungsian.

*"...Ketua pak H. Sunarto, SE, saya wakilnya Pitanto, sekretaris Yudo Wintoko... Bendaharanya itu H. Aris Setiadi, kemudian dari pengurus harian ini punya link ke ketua kelompok.. Iyaa...ada kelompok-kelompok... Yaa dulu satu kelompok itu ya satu RT... Itu mulai RT 1 sampai RT 14... Jadi ada 14 kelompok.. Ya kalau sekarang sih Emergency, kalau dulu di Pasar Baru Porong itu rutin, minimal satu minggu atau paling lambat dua minggu pasti ada pertemuan, dan setiap ada perkembangan yang signifikan pasti kita kumpulkan..."*<sup>255</sup>

Selain membangun jaringan internal dalam rangka memperkuat basis partisipan gerakan, kelompok gerakan sosial korban lumpur Lapindo juga membangun jaringan dengan pihak eksternal untuk mendapatkan simpati dan dukungan, baik dengan individu, kelompok, maupun dengan lembaga-lembaga. Upaya membangun jaringan dengan pihak eksternal yang dilakukan oleh kelompok Pagarekontrak dilakukan dengan berbagai pihak, antara lain:

*Pertama*, membangun jaringan dengan pihak media. Menurut Sunarto, peran media sangat penting dalam menyebarkan informasi yang terkait dengan aktivitas kelompok.

*"...a..ya..kita banyak press conference di media masa, saya terus terang saja kalau media ini kami nggak berpihak*

---

<sup>254</sup> Berdasarkan informasi dari Pitanto, wawancara hari Jumat, 15 Februari 2013.

<sup>255</sup> Rangkuman kutipan wawancara dengan Pitanto: Jumat, 15 Februari 2013.

*pada kami, kami terus terang saja nggak ada terdengar suaranya..begitu..yang kedua, kami kadang-kadang melalui sms kepada pemerintah, a..mau mengadakan gerakan tapi kadang-kadang kami hanya sekedar sms saja, kadang-kadang kami harus turun memang, dan kami sih sebenarnya berharap sih tidak memberikan contoh, tidak memberikan pelajaran kepada masyarakat luas sebenarnya, kalau sesuatu persoalan itu harus diselesaikan dengan demo, sebenarnya itu tidak benar juga...".<sup>256</sup>*

Kedua, Pagarekontrak membangun jaringan dengan berbagai tokoh baik tokoh nasional maupun lokal. Menurut Pintanto, untuk menggalang dukungan tokoh-tokoh baik nasional maupun lokal, kemudian Pagarekontrak mengadakan acara sarasehan kebangsaan yang secara khusus membicarakan tentang bencana lumpur Lapindo. Sarasehan kebangsaan ini dilaksanakan di tempat pengungsia Pasar Baru Porong (PBP) bertepatan dengan peringatan hari sumpah Pemuda ke-79 tahun 2007. Acara ini dilaksanakan bekerja sama dengan Tjuk Kasturi Sukiadi<sup>257</sup> dari Forum Kebersamaan Penanggulangan Bencana Negara (FKPBN)<sup>258</sup>. Hadir beberapa tokoh nasional, seperti: Salahuddin Wahid (Gus Sholah), Frans Magniz Suseno, Rieke Diah Pitaloka, dan Slamet Rahardjo Djarot, yang memberikan dukungan terhadap perjuangan warga korban lumpur Lapindo dalam menuntut hak-haknya<sup>259</sup>.

*"...Oh iya pernah, dengan tokoh-tokoh saya ketemu, dengan pak Tjuk, Iha itu para tokoh-tokoh nasional itu membentuk FKKBN, Forum Kebersamaan Korban Bencana Negara... Koordinatornya itu dari tokoh-tokoh nasional, kalau dulu almarhum pak Muhammad Nur, pak Tjuk Sukiadi, kemudian pak Syafii Maarif, Gus Sholah, pak Broto, itu kemudian budayawan-budayawan itu... Emha tidak, pada waktu itu tidak sepaham...".<sup>260</sup>*

---

<sup>256</sup> Kutipan pernyataan Sunarto, dalam wawancara hari Senin, 4 Juni 2012.

<sup>257</sup> Sekjen FKPBN

<sup>258</sup> <http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahooogroups.com/msg23186.html>.

<sup>259</sup> <http://hotmudflow.wordpress.com/2007/10/29/sumpah-pemuda-korban-lumpur/>

<sup>260</sup> Kutipan pernyataan Pitanto, wawancara hari Jumat, 15 Pebruari 2013.

Dalam sarasehan tersebut, di hadapan para tokoh, korban lumpur Lapindo menyampaikan keluhannya. *"Penderitaan kami belum selesai karena tuntutan belum terpenuhi"*, kata Ketua Pagar Rekontrak Sunarto. Romo Magnis Suseno mengungkapkan, semburan lumpur merupakan bencana alam akibat ulah manusia; *"Semua ini tidak manusiawi. Sebab, warga terpaksa pindah akibat kebodohan pihak tertentu"*, tuturnya. Dia menilai penanganan akibat lumpur belum selesai, banyak unsur politis yang ikut campur; *"Ganti rugi juga belum diselesaikan. Hal itu membuat korban sengsara"*, ucapnya. Menurut Romo Magnis, dampak terbesar yang timbul ialah hilangnya akar kebudayaan masyarakat Sidoarjo. Menurut dia, kalau manusia pindah karena inisiatif sendiri, tidak ada masalah, akan tetapi kalau pindah karena diusir atau terpaksa, hal tersebut akan berdampak pada rusaknya budaya. Hal senada diungkapkan Gus Sholah yang mengatakan bahwa lumpur Lapindo merupakan bencana akibat kesalahan perusahaan. Untuk itu, Lapindo bisa dipersalahkan; *"Berdasar pendapat pakar hukum, Lapindo bisa dikasuskan,"* tegasnya. Gus Sholah berjanji akan menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Joko Kirmanto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro untuk menyampaikan kondisi pengungsi dan penanganan lumpur. Gus Sholah juga berencana menemui Presiden SBY. Dia akan mengimbau presiden untuk mengadakan diskusi publik tentang persoalan lumpur. Dari diskusi itulah, diharapkan bisa ditemukan solusi nyata terhadap bencana lumpur. *"Saya bersama rekan-rekan sedang merencanakan itu semua. Kita tunggu waktunya saja"*, kata Gus Sholah<sup>261</sup>.

Selain mengadakan sarasehan kebangsaan, kelompok Pagarekontrak juga membangun jaringan dengan tokoh akademisi, antara lain dengan Prof. Sutandyo, Guru Besar Sosiologi Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

*"...Ya, bahkan kita pernah membuat suatu sarasehan kebangsaan, itu semua hadir, termasuk tokoh lintas agama Franz Magnis Suseno... ...bahkan pernah orang-orang*

---

<sup>261</sup> <http://hotmudflow.wordpress.com/2007/10/29/sumpah-pemuda-korban-lumpur/>



*korban itu mendatangkan dosen progresif dari Unair, itu ada kuliah Hukum, tapi orangnya itu ya orang awam kalau diberikan kaya gitu itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul... Iyaa tujuannya memotivasi warga...yang ngasih kuliah itu pak Prof. Soetandyo..".<sup>262</sup>*

Kelompok Pagarekontrak juga membangun jaringan dengan berbagai LSM. Salah satu LSM yang memberikan dukunga terhadap perjuangan warga korban lumpur Lapindo adalah Walhi Jatim.

*"...Ya kita punya link dengan teman2 di Surabaya, di Jakarta... Yaa, baik dari LSM maupun tokoh nasional siapa pun... Yaaa..banyak, ya ini kita bentuk siapa saja yang mau, ya kaya LSM siapa saja LSM yang mau turun, tapi ada syaratnya..jangan jadikan kita sebagai obyek...".<sup>263</sup>*

Pitanto menyatakan bahwa dia pernah difasilitasi oleh Walhi untuk menghadiri KTT perubahan iklim di Bali selama sepuluh hari.

*"...Bahkan saya pernah di Bali, dalam rangka KTT perubahan iklim, saya itu diundang oleh Walhi, saya sepuluh hari disana. Mau berangkat, masih di Pasar Baru Porong, saya malam sampe pagi itu diintel, akhirnya saya bisa mengelabui, dia masih tetap disitu saya sudah berangkat, begitu saya di Denpasar saya di bel pak sampeyan dimana? Saya di bandara Denpasar, wah mereka kaget, waktu saya disana di penginapan, saya juga diawasi, diintimidasi, katanya takut tidak aman, disini kan ada Pecalang, nanti jangan2 jadi musuhnya, tapi saya punya prinsip kalau saya tidak berbuat salah, ya Insya Allah akan selamat...".<sup>264</sup>*

Berkaitan dengan peran LSM dalam gerakan sosial korban lumpur Lapindo, Sunarto ketua Pagarekontrak menyatakan bahwa LSM-LSM itu sifatnya hanya memberikan dukungan, saran dan motivasi saja, namun keputusan tetap ada di tangan warga.

*"...LSM..ada pak, memang banyak LSM yang anu..tapi di tempat kami..a..kami juga ada komitmen, jadi kalau*

---

<sup>262</sup> Kutipan pernyataan Pitanto, Wakil Ketua kelompok Pagarenkontrak, Jumat: 15 Pebruari 2013.

<sup>263</sup> Ibid.

<sup>264</sup> Ibid.

*memang LSM itu sifatnya hanya memberikan saran memberikan motivasi ya ndak apa-apa, tapi kalau mereka..a..terlibat harus mengambil keputusan kami tidak mau... LSM pun juga begitu, LSM kalau menurut saya sih asumsi saya tadi, semakin panjang dia juga semakin lama untuk ikut bermain... Begitulah kira-kira...jadi kadang-kadang musuhi orang, kadang-kadang anu yaa...mungkin juga ada apa..ada take and gave juga...".<sup>265</sup>*

Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Seperti halnya kelompok Pagarekontrak, kelompok GKLL juga membangun jaringan dengan pihak-pihak eksternal. GKLL membangun jaringan dengan tokoh utama yakni Emha Ainun Nadjib dari komunitas "Bambang Wetan"<sup>266</sup>.

Selanjutnya, Khoirul Huda menjelaskan bahwa sebagai sekretaris GKLL dia juga aktif membangun jaringan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan. Sebagai mantap aktivis dan sebagai pengurus Persyarikatan Muhammadiyah, Khoirul Huda memiliki relasi yang cukup luas, sehingga memudahkan membangun jaringan.

*"...Ya..saya mungkin lama di organisasi pak, jadi waktu mahasiswa saya juga aktif di HMI, terus ketika saya di Unmuh saya juga banyak jaringan dengan Muhammadiyah dan sebagainya. Informasi kan tidak saya dapatkan hanya satu pihak. Saya komunikasi dengan teman-teman di Jakarta. Jadi misalkan apa yang harus saya ambil sebuah keputusan, misalkan kalau Lapindo tidak punya uang dulu sering tanya pada teman-teman di Jakarta. Jadi banyak sekali teman-teman yang saya ajak berunding... Rata-rata kalau LSM ada tema-teman memang saya tahu kapasitas mereka, kapabilitas dia terhadap itu. Jadi mohon maaf saja bukan sekedar LSM-LSM yang sekedar cari proyek dan sebagainya. Itu memang begitu...".<sup>267</sup>*

---

<sup>265</sup> Kutipan pernyataan Sunarto, Ketua Pagarekontrak, wawancara hari Senin, 4 Juni 2012.

<sup>266</sup> Komunitas "Bambang Wetan" adalah lembaga dakwah dan pengajian di wilayah Surabaya yang didirikan oleh budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Selain komunitas "Bambang Wetan", Emha juga mendirikan berbagai komunitas lainnya, seperti: Padhangmbulan (Jombang, Kenduri Cinta (Jakarta), Macapat Syafaat (Yogya), dan Gambang Syafaat (Semarang). Lihat: <http://www.weha.web.id/2011/04/e>.

<sup>267</sup> Kutipan pernyataan wawancara Khoirul Huda, Sabtu: 6 April 2013.

Jaringan eksternal dengan LSM juga dilakukan antara lain dengan Walhi Jatim dan YLBHI. Dukungan dari pihak Walhi dan YLBHI bersifat dukungan moral, saran, dan masukan pemikiran saja, bukan berupa dukungan dana. Itupun tidak semua saran dan masukan dari LSM diterima oleh GKLL.

*"...Tentu usul itu, bisa saya iyaikan atau tidak, kalau saya setuju bisa ada efek positifnya kepada masyarakat, tapi kalau nggak yang saya harus dapat. Karena seringkali tokoh juga salah sasaran atau salah pandang terhadap fakta di lapangan... selama ini dukungannya bersifat moral saja. Terus pemikiran-pemikiran, konsep-konsep hukum. Termasuk kemudian saya banyak berkoordinasi itu masalah dulu ketika Walhi dan YLBHI mau menggugat. Saya diminta tandatangan, saya nggak mau. Dan itu saya diskusi dengan banyak orang... Saya nggak mau. Sebab konsekuensinya adalah begitu saya tandatangan, saya dan warga mau tandatangan, Lapindo dinyatakan tidak bersalah karena tandatangan saya itu khawatirnya Lapindo tidak perlu saya. Kita sederhana saja, warga punya tanah dan bangunan maka harus punya tanah dan bangunan kembali dan kalau bisa lebih baik. Maka kemudian kalau itu ditempuh dengan Hukum itu bagus tapi kalau menang, tapi kalau kalah maka kemudian kultural itulah..."*<sup>268</sup>

#### **4. Tahapan Proses Pengorganisasian Kekuatan Kolektif Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Bagaimanakah warga korban lumpur Lapindo yang ada di wilayah Porong dan sekitarnya mampu mengorganisir komunitas lokal dalam suatu tindakan kolektif yang terorganisir? Sebelum terjadinya bencana semburan lumpur Lapindo, wilayah Peta Area Terdampak (PAT) semburan lumpur Lapindo merupakan wilayah komunitas yang terorganisir, yang merupakan bagian dari organisasi RT, RW, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan. Namun struktur organisasi komunitas ini tidak disiapkan secara khusus untuk suatu tindakan kolektif (gerakan sosial). Namun demikian basis komunitas ini, telah memberikan fondasi bagi kesiapan terutama dalam

---

<sup>268</sup> Ibid.

menyediakan sumber daya manusia bagi tindakan kolektif, baik pemimpin maupun partisipan (*leader and participants*).

Sebagaimana diutarakan oleh Khoriul Huda, bahwa pada awalnya respons korban lumpur Lapindo terhadap situasi dan kondisi bencana semburan lumpur Lapindo dilakukan secara sporadis di bawah koordinasi desa masing-masing.

*"...lyaaa...saya cerita dulu kenapa saya masuk. Jadi itu berawal dari tanggal 4 Juni 2006, yang waktu itu saya menjadi wakil ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Jatirejo, jadi itu lembaga remi kelurahan...Nah saat itu belum ada yang namanya organisasi-organisasi, masing-masing desa itu berjuang atas desanya sendiri-sendiri, orang Siring ya memperjuangkan desa Siring, Jatirejo juga memperjuangkan kelurahan Jatireno, Reno juga begitu, dan sebagainya... Masih Sporadis...belum terbentuk kelompok. Itu kemudian, apa namanya, pada bulan Mei 2007 itu sangat mencekam, hampir Sidoarjo waktu hampir terbakar, wah pokoknya mencekam luar biasa..."*<sup>269</sup>

Dalam perkembangan berikutnya, mengingat semakin derasnya semburan lumpur dan dampaknya terhadap masyarakat semakin luas, sementara respons pemerintah dan PT LBI dirasakan sangat lambat, maka kemudian warga masyarakat korban lumpur Lapindo mengorganisir dirinya dalam kelompok-kelompok.

Secara umum, terdapat tiga tahapan proses pengorganisasian tindakan kolektif korban lumpur Lapindo, yakni:

*Pertama*, tindakan kolektif korban lumpur Lapindo diorganisir dan dimobilisasi oleh institusi pemerintah formal seperti RT, RW, dan pemerintahan Desa, yang dilakukan secara sporadis sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Dalam konteks ini belum muncul perasaan sebagai "korban lumpu Lapindo". Warga masyarakat masih bersifat pasif dan berkeyakinan serta berharap kepada pemerintah untuk bisa segera mengambil berbagai alternatif tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah semburan lumpur Lapindo. Peran pemerintahan lokal (RT, RW, Desa) menjadi penting.

---

<sup>269</sup> Ringkasan kutipan wawancara dengan Khoirul Huda, Sabtu: 6 April 2013.

*Kedua*, warga menilai pemerintah lambat dan tidak melakukan pembelaan terhadap masyarakat korban. Warga menghadapi ketidakpastian tentang nasib mereka dan tidak mengerti tentang apa yang terjadi dan harus dilakukan. Muncul perasaan sebagai korban semburan lumpur Lapindo pada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat menyebut dirinya sebagai warga korban bencana lumpur Lapindo. Dalam kondisi seperti ini kemudian mendorong munculnya seseorang sebagai pemimpin yang memiliki kesadaran untuk mengorganisir warga korban dalam membela dan memperjuangkan hak-hak warga masyarakat. Maka kemudian muncullah berbagai kelompok warga korban lumpur Lapindo sebagai basis perjuangan dan basis terjadinya tindakan kolektif (gerakan sosial). Namun munculnya berbagai kelompok korban lumpur Lapindo, menyebabkan munculnya berbagai friksi di antara warga korban sendiri, sehingga mengakibatkan berkurangnya kekuatan perjuangan warga korban dalam menuntut hak-haknya.

*Ketiga*, terjadinya dinamika kelompok korban lumpur Lapindo melahirkan kesadaran di antara para pemimpin kelompok untuk menyatukan dan membangun kekuatan bersama. Oleh karena itu, muncul kesadaran untuk membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) Korban lumpur Lapindo sebagai lembaga yang menyatukan seluruh elemen-elemen kekuatan warga korban lumpur Lapindo.

Terdapat beberapa peluang dan kesiapan komunitas dalam mendorong dan memperkuat munculnya kelompok-kelompok korban lumpur Lapindo, yakni:

*Pertama*, basis partisipan. Jumlah warga yang menjadi korban bencana lumpur Lapindo cukup banyak, yakni sekitar 15.788 KK dengan jumlah jiwa 48.983 orang. Jumlah warga korban bencana lumpur Lapindo yang cukup banyak ini merupakan potensi dan peluang bagi munculnya berbagai kelompok korban sebagai basis partisipan kelompok. Kesediaan warga korban sebagai partisipan didukung pula oleh rasa senasib-sepenanggungan yang melahirkan spirit bagi terjadinya tindakan kolektif.

*Kedua*, adanya jaringan komunikasi kultural. Secara kultural jaringan komunikasi antar-warga korban lumpur lapindo sudah terbentuk seiring dengan dinamikan dan intensitas historis kehidupan masyarakat. Jaringan komunikasi kultural tercermin dalam

bentuk tradisi-tradisi, nilai-nilai, norma-norma, dan tata cara yang berlaku dan mengatur kehidupan warga masyarakat. Adanya tradisi-tradisi, nilai-nilai, norma-norma, dan tata cara yang berlaku dan berkembang di masyarakat memudahkan untuk terbangunnya sebuah jaringan dan komunikasi di antara mereka.

*Ketiga*, adanya struktur jaringan organisasi komunitas setempat (*community*)<sup>270</sup>. Struktur organisasi formal komunitas tercermin dalam bentuk organisasi RT, RW, Desa, dan Kecamatan. Organisasi formal ini memberikan fasilitas bagi berjalannya kelompok-kelompok korban lumpur Lapindo. Misalnya, dalam membangun tindakan kolektif korban lumpur Lapindo para ketua RT juga berfungsi sebagai koordinator lapangan yang secara langsung memobilisasi warga. Selain itu, para ketua RT juga menjadi basis bagi struktur jaringan komunikasi kelompok terhadap basis partisipan.

*Keempat*, adanya kesediaan pemimpin (*leader*) dalam komunitas. Komunitas dan struktur organisasi formal dalam masyarakat, menjadi sumber penyedia bagi munculnya pemimpin (*leader*) kelompok. Para pemimpin kelompok korban lumpur Lapindo bersumber dari basis kepemimpinan dalam struktur formal (RT, RW, Desa) dan informal masyarakat (tokoh masyarakat, Kyai, dan sebagainya). Para pemimpin formal dan informal ini kemudian muncul sebagai pemimpin kelompok korban lumpur Lapindo seiring dengan proses dan dinamika situasi dan kondisi terjadinya bencana semburan lumpur Lapindo.

## 5. Pengelolaan Sumberdaya Gerakan Sosial

Dalam konteks gerakan sosial, sumberdaya (*resource*) merupakan aspek pendukung dalam keberhasilan gerakan sosial. Dalam konteks gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo kemudian muncul pertanyaan: Apa yang menjadi sumberdaya utama gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo? Dan bagaimana para aktor (para pemimpin) mengelola sumberdaya tersebut?

Sumberdaya utama gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo adalah basis dukungan massa (partisipasi) yang cukup

---

<sup>270</sup> Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”, istilah mana menunjuk pada warga-warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu bangsa. Lihat: Soerjono Soekanto. 1986. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 130.

banyak. Basis massa gerakan sosial korban bencana lumpur Lapindo adalah seluruh warga yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo, baik yang ada di wilayah dalam PAT maupun warga yang ada di wilayah luar PAT. Mengacu kepada Perpres No. 14 tahun 2007, Perpres No. 48 tahun 2008, dan Perpres No. 40 tahun 2009, maka tercatat jumlah warga yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo mencapai sekitar 15.788 KK dengan jumlah jiwa 48.983 orang. Warga korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo ini terdistribusi ke dalam berbagai kelompok-kelompok, seperti: GKLL, Pagarekontrak, Geppres, Tim-16, Gempur 4-D, dan sebagainya. Mobilisasi sumberdaya gerakan sosial, yakni berupa partisipan gerakan, dilakukan antara lain melalui pembentukan berbagai kelompok gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo.

Selain jumlah partisipan yang cukup banyak, fenomena semburan lumpur panas Lapindo merupakan fenomena yang unik dan langka sehingga mendapat perhatian yang luar biasa dari berbagai pihak, baik secara nasional maupun internasional, termasuk para pakar, media, lembaga-lembaga, dan pihak-pihak lainnya. Tingginya perhatian dari berbagai pihak, memunculkan berbagai dukungan dan simpati atas penderitaan dan perjuangan korban lumpur Lapindo. Kondisi seperti ini juga merupakan sumberdaya (modal) yang cukup efektif dan potensial bagi gerakan sosial korban lumpur Lapindo. Misalnya, lembaga internasional seperti: *American Association of Petroleum Geologist* (AAPG) yang secara khusus mengangkat tema lumpur Lapindo dalam konferensi tahunan di Cape Town, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh ahli-ahli geologi dari seluruh dunia.

Selain AAPG ada juga lembaga *The Centre on Housing Right and Eviction* (COHRE), yakni lembaga internasional dibawah naungan PBB yang memperjuangkan hak perumahan, memberikan perhatian yang besar terhadap bencana lumpur Lapindo. Bahkan COHRE mengusulkan PT LBI sebagai nominator pelanggar hak pemukiman<sup>271</sup>. Dalam gambar berikut ini nampak seorang staf dari COHRE, yakni Zoe Gray sedang melakukan investigasi terhadap

---

<sup>271</sup> Lihat, <http://korbanlumpur.info/2008/08/24/lapindo-dinominasikan-sebagai-pelanggar-hak-pemukiman-warga/>

warga korban lumpur Lapindo untuk mendapatkan beberapa data (*fact and finding*).



**Gambar 5.1. Zoe Gray, Staf Officer dari COHRE Sedang Melakukan Fact and Finding Mission di Sidoarjo**<sup>272</sup>

Sementara lembaga-lembaga dalam negeri yang memberikan perhatian, seperti: Walhi, LBH, Komnas Ham, dan sebagainya. Walhi menilai bahwa PT LBI telah melakukan pelanggaran kejahatan ekologis. Sementara YLBHI menilai bahwa PT LBI telah melakukan perbuatan melanggar hukum<sup>273</sup>. Sedangkan Komnas Ham menilai bahwa PT LBI telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia<sup>274</sup>.

Dukungan dari pihak individu (perorangan) juga merupakan modal bagi perjuangan korban lumpur Lapindo dalam menuntut hak-haknya. Berbagai individu yang merupakan tokoh nasional dan regional telah memberikan dukungan dan simpatinya. Dukungan dan simpati dari para tokoh ini merupakan motivator bagi para warga korban lumpur Lapindo. Tokoh-tokoh tersebut antara lain tercatat, seperti: Emha Ainun Nadjib (budayawan), Sholahudin Wahid (Komnas Ham), Franz Magnis Suseno (rohaniawan), Tjuk K. Sukiadi (akademisi), Prof. Soetandyo

---

<sup>272</sup> Sumber: <http://korbanlumpur.info>.

<sup>273</sup> Lihat <http://news.detik.com/read/2007/03/05/134241/749846/gugatan-ylbhi-atas-sby-soal-lapindo-dikabulkan?nd771108bcj>

<sup>274</sup> Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/15/04234381/Lumpur.Lapindo.Sebabkan.Pelanggaran.HAM>. Diakses, tanggal 10 Januari 2013.



(akademimisi), Paring Waluyo (Walhi Jatim), Bambang Catur (Walhi Jatim), Rieke Diah Phitaloka (politisi), dan sebagainya.

Menurut Edwards dan McCarthy (Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 125-128)<sup>275</sup>, dalam konteks gerakan sosial paling tidak terdapat 5 (lima) tipe/jenis sumberdaya (*resources*), yaitu: Sumber daya moral (*moral resources*), Sumber daya kultural (*cultural resources*), Sumber daya organisasi-sosial (*social-organizational resources*), Sumber daya manusia (*human resources*), dan Sumber daya material (*material resources*).

Dalam konteks gerakan sosial korban lumpur Lapindo, ke-Lima kategori sumberdaya ini muncul, yakni: (1) sumberdaya moral, berupa dukungan, simpati dan solidaritas dari berbagai tokoh, kelompok, dan organisasi, baik lokal, nasional dan internasional; (2) sumberdaya kultural, berupa nilai-nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang selama ini sudah terbangun dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya, misalnya nilai kekeluargaan, gotong royong, dan sebagainya; (3) sumberdaya organisasi sosial, berupa kelompok atau organisasi yang sudah ada di masyarakat sebelum terjadinya bencana lumpur Lapindo, dan kelompok-kelompok yang dibentuk untuk tujuan gerakan sosial korban lumpur Lapindo; (4) sumberdaya manusia, berupa basis partisipan gerakan sosial yang meliputi warga korban lumpur Lapindo yang jumlahnya cukup banyak, selain itu juga adanya tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas untuk tampil menjadi pemimpin gerakan; dan (5) sumberdaya material, khususnya berupa dukungan dana, terutama dana yang di mobilisasi secara internal dari iuran warga korban lumpur Lapindo.

Selanjutnya Edwards dan McCarthy<sup>276</sup> menyatakan bahwa paling tidak terdapat empat kunci yang harus dilakukan oleh para pemimpin gerakan sosial dalam proses mobilisasi sumberdaya, yakni: (1) Membentuk organisasi dan membangun kapasitas organisasi (*creating organizations and building organizational capacity*); (2) Mobilisasi dana (*mobilizing money*); (3) Mobilisasi

---

<sup>275</sup> Snow, David A.; Soule, Sarah A.; & Kriesi, Hauspeter (eds.). 2004. *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. Hlm. 136-142.

<sup>276</sup> Ibid

aktivis (*mobilizing activism*); dan (4) Menciptakan mobilisasi dan sumberdaya potensial melalui tindakan kolektif (*creating resources and mobilization potential through collective action*).

Dalam konteks gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo, para pemimpin gerakan sosial sebagian besar merupakan inisiator terbentuknya berbagai kelompok (organisasi) gerakan sosial, mereka juga melakukan mobilisasi (penggalangan) dana, menciptakan dan mendesain aktivitas bersama, seperti aksi demonstrasi, membangun relasi, dan sebagainya.

### **C. Aksi Tuntutan Kolektif Oleh Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Pada periode kedua ini, korban bencana Lumpur Lapindo melakukan dua aksi tuntutan kolektif, yakni: (1) tuntutan terkait alat bukti kepemilikan yang sah atas aset tanah dan bangunan; dan (2) tuntutan terkait skema (model) Jual-Beli. Gambaran dan penjelasan proses kedua tuntutan kolektif korban bencana Lumpur Lapindo tersebut adalah sebagai berikut.

#### **1. Tuntutan Terkait Alat Bukti Kepemilikan yang Sah atas Aset Tanah dan Bangunan**

Salah satu konsekuensi dari terbitnya payung (jaminan) hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007, terkait pembayaran ganti rugi bagi korban bencana Lumpur Lapindo adalah ketentuan yang mengatur relasi antara warga korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI dan pemerintah menjadi relasi antara penjual-pembeli (relasi jual-beli). Artinya pihak warga korban bencana dianggap sebagai pihak penjual aset tanah dan bangunan, sementara pihak PT LBI dan Pemerintah diposisikan sebagai pihak pembeli. Dalam pasal 15 (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 dijelaskan bahwa: "Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah".

Proses jual-beli ini harus dilakukan dengan menggunakan akad jual-beli di hadapan notaris. Persoalan berikutnya yang muncul adalah berkaitan dengan persyaratan administratif sebagai bukti yang sah atas kepemilikan aset warga. Pihak PT LBI dan Pemerintah meminta persyaratan bukti berupa sertifikat untuk tanah dan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan, sementara bukti *letter-C* dan petok-D tidak diakui sebagai bukti yang sah.

Persoalan yang muncul adalah bahwa ternyata bukti persyaratan administratif yang disyaratkan oleh pihak PT LBI tidak bisa dipenuhi oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo karena sebagai besar dari mereka tidak memiliki bukti sertifikat dan IMB. Misalnya, dari 800 berkas yang milik warga korban bencana Lumpur Lapindo yang berasal dari Desa Jatirejo, hanya 10 orang yang memiliki sertifikat tanah dan hanya satu orang yang memiliki IMB. Sementara dari jumlah keseluruhan berkas milik warga korban bencana Lumpur Lapindo dari empat desa, yakni sebanyak 4.000 berkas, dimana yang paling banyak berkas milik warga dari Desa Kedungbendo, ternyata hanya 110 berkas saja yang bersertifikat. Atas kondisi ini kemudian warga korban melakukan perlawanan dan menolak persyaratan administrasi yang ditetapkan pihak PT LBI. Setelah melalui negosiasi kolektif yang cukup alot maka pada akhirnya PT LBI menyepakati untuk mengakui bukti petok-D dan *letter-C* diakui sebagai bukti yang sah. Data hasil wawancara sebagai berikut:

*"...Tapi memang ada permasalahan administratif. Satu, permasalahan administratif itu ternyata, apa namanya, a..Lapindo waktu itu menghendaki tanah yang akan dibeli itu adalah tanah Sertifikat, bukan petok D atau letter C. Yang kedua, yang disebut bangunan adalah dibuktikan dengan IMB, satu-satunya bukti bangunan itu adalah IMB. Nah, kami waktu itu harus membikin PERLAWANAN karena apa? Karena dari warga Jatirejo yang berkasnya hampir 800 berkas, bukan jiwa pak, berkas itu yang pemilik tanahnya. Satu orang bisa saja memiliki dua berkas, atau satu berkas bisa saja milik dari 4 orang, misalnya tanah warisan. Nah itu hampir 800 berkas itu hanya 10 orang yang punya sertifikat. Jatirejo saja. Terus kemudian dari 4000 berkas dari empat desa, yang paling banyak itu di desa Kedungbendo. Jadi, dari 4000 berkas yang ada di*

*empat desa itu, jadi kita sudah berserikat tapi belum ada nama, itu hanya 110 saja berkas yang bersertifikat. Artinya yang lain petok D atau letter C. Nah itu sertifikat. Terus yang kedua, masalah bangunan. Di Jatirejo itu dari 800 berkas hanya satu orang yang punya IMB, yang lain tidak punya. Ini kebetulan yang punya IMB itu dulu pegawai pajak atau pegawai apa gitu, mungkin sudah meleak administrasi dia punya IMB. Yang lain tidak punya. Ini yang menjadi perlawanan kami, kami merasa bahwasanya ini harus tidak seperti itu. Kami hanya komitmen bahwa yang harus kita perjuangkan bahwa masyarakat punya tanah punya bangunan maka dia harus punya tanah dan bangunan kembali. Terlepas apakah dia punya sertifikat atau IMB dan sebagainya...". "...akhirnya Minarak tidak mempermasalahkan bukti kepemilikan, sertifikat, petok D, letter C itu diiyakan. Asalkan dengan jaminan kalau petok D itu ada tandatangan camat dan Bupati. Itu kan solusinya. Jadi petok D, letter C dan sertifikat sudah sama hukumnya, itu hasil koordinasi pak SBY dan Minarak waktu itu...".<sup>277</sup>*

Setelah petok D dan letter C diakui sebagai bukti sah sebagai pengganti sertifikat tanah, baik tanah sawah maupun tanah darat, kemudian muncul problem berikutnya yakni terkait dengan bukti IMB untuk tanah bangunan yang masih belum klir. Untuk mengatasi masalah ini kemudian Cak Nun (Emha Ainun Nadjib) mengusulkan model mekanisme "sumpah". Artinya warga korban satu-persatu diminta menjelaskan posisi dan luas tanah-bangunannya kemudian mereka disumpah. Pengambilan sumpah dilakukan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo di hadapan Bupati, Can Nun, pihak PT LBI, disaksikan oleh RT, RW, tetangga, kemudian di setempel desa dan kecamatan.

*"...Tetapi masalah bangunan ini masih tetap. Sehingga kemudian kita juga tidak bisa terbayar. Nah masalah bangunan ini kemudian, terselesaikan ketika diawal Juli Cak Nun ketemu dengan pak Nirwan, sebenarnya ini pertemuan tidak sengaja, jadi Cak Nun ditemani pak Franki Welirang terus kemudian pak Nirwan ada pak Andi*

---

<sup>277</sup> Kutipan wawancara dengan Khoirul Huda: Sabtu, 6 April 2013.

*Darussalam, itu terus kemudian Cak Nun ketemu secara tidak sengaja, terus ngomong masalah Lumpur. Karena waktu itu kita sudah ngasih mandat kepada Cak Nun, untuk apa namanya, memberikan jalan tengah itu. Disitulah kemudian, ada diskusi-diskusi Cak Nun menyampaikan, "nek aku gampang, nek masalah bangunan nggak ene buktine", apa Cak?, "ya disumpah ae". Pak Nirwan bilang, "Iho kalau Cak Nun yang nyumpah saya percaya". Kemudian dua orang ini jabat tangan, baru setelah itulah muncul wacana sumpah. Dan kenapa yang nyumpah itu yang pertama Cak Nun dan Kyai Kangjeng di Pendopo itu, nah itu karena ada riwayatnya seperti itu. Maka kemudian ada solusinya adalah warga diminta membuat surat pernyataan, jelaskan luasan bangunan dan tanahnya, disaksikan oleh RT, RW, kelurahan dan tetangga, tandatangan dan kemudian disetempel Camat dan Bupati terus kemudian disumpah. Ini baru kemudian setelah itu warga mendapatkan pembayaran. Nah, pembayarannya berapa? 20%. Kenapa kok 20%? Disesuaikan dengan Perpres 14 Tahun 2007, bulan April 2007, bahwa Perpres itu menyatakan 20% dibayar sebagai uang muka dan 80% sisanya dibayar selama 2 tahun menjelang habisnya masa kontrak..."<sup>278</sup>*

Setelah persoalan administrasi bisa diselesaikan dan disepakati antara PT LBI dengan warga korban, maka kemudian dimulailah skema pembayaran tahap pertama yang 20%. Sekitar bulan Juli-Agustus 2007, pembayaran jual beli sebesar 20% yang dilakukan PT LBI berjalan lancar.

## **2. Tuntutan Terkait Skema (Model) Jual-Beli**

Munculnya payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur skema ganti rugi aset tanah dan bangunan milik korban bencana Lumpur Lapindo melalui mekanisme jual beli dengan cara pembayaran cicilan memunculkan respons yang beragam dari korban bencana Lumpur Lapindo. Dalam Perpres diatur tentang mekanisme pembayaran jual beli melalui dua tahap

---

<sup>278</sup> Ibid.

pembayaran, yakni tahap 1 pembayaran uang muka sebesar 20% yang dibayarkan secara kontan, dan tahap 2 pembayaran sebesar 80% yang dibayar secara diangsur (dicicil) untuk jangka waktu 2 tahun. Selama proses pembayaran cicilan, kepada korban bencana Lumpur Lapindo diberikan dana kompensasi berupa: (1) biaya pindah (evakuasi) sebesar Rp 500 Ribu setiap KK; (2) jatah hidup (uang lauk-pauk) sebesar Rp 300 Ribu untuk setiap jiwa selama 6 bulan; dan (3) biaya kontrak rumah sebesar Rp 5 Juta untuk dua tahun.

Ketika korban bencana Lumpur Lapindo melakukan *collective bargaining* (negosiasi kolektif) terkait tuntutan tiga hal, yakni tentang tuntutan besaran nilai ganti rugi, tuntutan bukti kepemilikan aset, dan tuntutan tentang payung hukum, seluruh korban bencana Lumpur Lapindo memiliki sikap dan suara yang sama, mereka bersatu. Namun ketika pemerintah mengatur mekanisme pembayaran jual-beli dengan skema 20% dan 80%, maka sikap dan suara korban bencana Lumpur Lapindo terpecah menjadi Empat kelompok. Ke-Empat kelompok tersebut meliputi: (1) Kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) yang menuntut skema *Cash and Carry (CnC)*; (2) Kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak) yang menuntut skema *Cash and Resettlement (CnR)*; (3) Kelompok Gerakan Pendukung Perpres (Gepres) yang menyetujui keputusan pemerintah dengan pembayaran ganti rugi melalui skema 20% dan 80% (Cash dan Cicilan); dan (4) Kelompok Tim-16 yang menuntut skema *Resettlement*.

Dalam perkembangan berikutnya, ketika pihak pengadilan menyatakan bahwa pemerintah dan pihak PT LBI tidak bersalah, Kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) yang semula menuntut skema *Cash and Carry (CnC)* kemudian merubah tuntutananya dengan menyetujui skema 20% dan 80% (Cash dan Cicilan). Dengan demikian, tuntutan korban bencana Lumpur Lapindo terkait dengan skema (mekanisme) pembayaran jual-beli terbagi menjadi Tiga kelompok, yakni kelompok *Cash and Resettlement (CnR)*, *Cash dan Cicilan*, dan kelompok *Resettlement*.

Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan mekanisme pembayaran jual-beli melalui skema 20% dan 80% (*Cash dan Cicilan*), namun pihak PT LBI tidak mampu menolak tuntutan

korban bencana Lumpur Lapindo yang mengajukan tuntutan di luar skema ini. Akhirnya pihak PT LBI menyetujui mekanisme pembayaran jual-beli melalui Tiga skema, yakni *Cash and Resettlement (CnR)*, *Cash* dan *Cicilan*, dan kelompok *Resettlement*.

#### **D. Pembentukan Identitas Kolektif Sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo"**

Pada periode kedua gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo, warga korban bencana sudah mulai membangun identitas kolektif bahwa mereka sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo". Hal ini secara formal tercermin dalam nama kelompok yang memunculkan istilah "Korban Bencana Lumpur Lapindo", seperti kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dan kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap). Apabila pada periode pertama identitas kolektif sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo" dikonstruksi oleh pihak LSM, maka pada periode kedua ini identitas kolektif sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo" dikonstruksi oleh dan atas kesadaran kolektif warga korban bencana sendiri.

Sebelum terjadinya bencana Lumpur Lapindo, warga yang tinggal di sekitar wilayah semburan lumpur sudah memiliki suatu identitas kolektif, yakni identitas kolektif yang berbasis komunitas setempat (*community*), seperti identitas kolektif sebagai warga Desa Jatirejo, Desa Siring, Desa Renokenongo, Desa Siring, dan sebagainya. Dengan demikian, identitas kolektif yang muncul merupakan produk dari komunitas setempat (*community*), khususnya komunitas Desa.

Identitas kolektif sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo" muncul sebagai produk dari kebijakan pemerintah yang memberikan hak eksplorasi (pengeboran) Migas di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya kepada PT LBI. Aktivitas eksplorasi (pengeboran) Migas tersebut telah menimbulkan bencana berupa semburan lumpur panas yang mengakibatkan tenggelamnya beberapa wilayah yang ada di sekitar lokasi pengeboran.

Dalam konteks gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo, identitas kolektif sebagai warga korban bencana Lumpur Lapindo yang merupakan produk dari kebijakan pemerintah, kemudian

direproduksi lagi oleh beberapa pihak melalui berbagai upaya. Salah satu upaya dalam mereproduksi kembali identitas kolektif sebagai warga korban lumpur Lapindo adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok korban bencana Lumpur Lapindo sebagai basis tindakan kolektif bagi perjuangan dalam menuntut hak-hak sebagai korban bencana. Dengan demikian eksistensi identitas kolektif sebagai korban lumpur Lapindo yang sudah terbentuk karena kebijakan pemerintah, kemudian diperkuat lagi secara internal melalui reproduksi kembali dengan membentuk kelompok-kelompok korban lumpur Lapindo.

Reproduksi identitas kolektif dilakukan oleh kelompok-kelompok melalui berbagai rapat, koordinasi, pertemuan dan berbagai aktivitas lainya. Misalnya, pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 warga korban bencana Lumpur Lapindo asal dari Desa Jatijejo melakukan pertemuan dan koordinasi menyikapi hasil *hearing* dengan pihak PT LBI, Pansus Lumpur DPRD Kabupaten Sidoarjo, dan warga korban lumpur. Di atas tanggul penahan genangan lumpur, korban bencana Lumpur Lapindo juga mendirikan posko sebagai tempat mereka untuk berdiskusi dan berkoordinasi antar sesama korban bencana.



**Gambar 5.2. Warga Korban Bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo  
Melakukan Koordinasi di Posko Tenda yang Terletak di  
Atas Tanggul<sup>279</sup>**



Untuk menunjukkan eksistensi sebagai korban bencana Lumpur Lapindo, beberapa warga yang tergabung dalam kelompok korban bencana Lumpur Lapindo juga membuka Posko pengaduan. Posko Pengaduan ini menjadi tempat koordinasi, rapat, dan advokasi bagi para korban bencana Lumpur Lapindo.



**Gambar 5.3. Peneliti di Depan Posko Pengaduan Korban Lumpur Lapindo yang terletak di Desa Siring<sup>280</sup>**

Reproduksi identitas kolektif sebagai warga korban bencana Lumpur Lapindo juga dilakukan dengan memproduksi berbagai simbol baik verbal, tulisan (kata-kata), maupun gambar-gambar, yang menunjukkan eksistensi warga korban lumpur Lapindo sebagai orang-orang yang tertindas, sebagai korban lumpur Lapindo. Berbagai tulisan dan spanduk yang bermunculan baik dalam setiap aksi tindakan kolektif maupun spanduk-spanduk yang dipampang di sekitar tanggul lumpur Lapindo, yang mencerminkan dan memperkuat identitas kolektif warga lumpur Lapindo sebagai pihak yang tertindas. Misalnya, spanduk dan tulisan yang berbunyi: "*Komite Warga Porong Korban Lapindo*", "*Lapindo Membunuh Warga Secara Halus*", "*Lumpur Lapindo Muncrat, Rakyat Melarat, Sekarat, Kiamat*", dan sebagainya.

<sup>279</sup> Sumber: Data hasil penelitian lapangan

<sup>280</sup> Sumber: Data hasil penelitian lapangan

Gambar di bawah ini menunjukkan berbagai bunyi ungkapan warga korban lumpur Lapindo:



**Gambar 5.4. Berbagai Spanduk dan Tulisan yang Mencerminkan Identitas Kolektif Warga Korban Lumpur Lapindo<sup>281</sup>**

Selain melalui berbagai spanduk, eksistensi identitas kolektif warga korban bencana Lumpur Lapindo direproduksi juga melalui berbagai ekspresi diri, misalnya dengan cara melumuri badan oleh lumpur. Warga korban bencana lumpur Lapindo ingin menunjukkan identitas mereka bahwa mereka sebagai korban lumpur Lapindo yang tertindas karena lumpur. Dengan demikian, Lumpur merupakan simbol baru atas identitas kolektif warga korban lumpur Lapindo.



**Gambar 5.5. Beberapa Warga Korban Lumpur Lapindo Menunjukkan Identitas Kolektif Mereka Sebagai Korban Lumpur Lapindo<sup>282</sup>**

Identitas kolektif sebagai korban bencana Lumpur Lapindo juga direproduksi kembali melalui eksploitasi atas kondisi dan situasi

<sup>281</sup> Sumber: <http://politik.kompasiana.com/2013/04/05/aburizal-bakrie-klaim-99-korban-lumpur-lapindo-berterimakasih-padanya-548197.html>.

<sup>282</sup> Sumber: <http://politik.kompasiana.com/2013/04/05/aburizal-bakrie-klaim-99-korban-lumpur-lapindo-berterimakasih-padanya-548197.html>.

warga korban bencana Lumpur Lapindo. Warga korban bencana Lumpur Lapindo terpaksa harus meninggalkan wilayah tempat tinggalnya karena tergenang atau tenggelam oleh lumpur sehingga status mereka menjadi warga pengungsi. Status sebagai pengungsi ini kemudian menjadi kekuatan baru yang memperkuat identitas kolektif mereka sebagai warga korban bencana lumpur Lapindo.

Dalam gambar berikut ini nampak para korbanlumpur Lapindo sedang menunjukkan identitas diri mereka sebagai pengungsi.



**Gambar 5.6. Status Sebagai Pengungsi Memperkuat Identitas Kolektif Sebagai Korban Lumpur Lapindo<sup>283</sup>**

Dalam gambar diatas, nampak bahwa koban bencana lumpur Lapindo sedang menunjukkan identitas kolektif mereka bahwa merekan merupakan warga korban lumpur Lapindo.

Selanjutnya dalam gambar berikutnya terlihat sebuah tulisan yang berbunyi: "*Kami Sudah 5 Tahun Hidup Sengsara Gara-gara Lumpur Lapindo*", adalah contoh lain dari bunyi spanduk yang terpampang saat warga korban lumpur Lapindo melakukan aksi tindakan kolektif. Kata "*kami*" yang terpampang dalam spanduk menunjukkan sebuah identitas kolektif.

Untuk memperkuat identitas kolektif sebagai warga korban bencana Lumpur Lapindo, kelompok-kelompok warga korban juga menciptakan simbol-simbol lawan sebagai spirit perjuangan kolektif. Penciptaan simbol-simbol lawan ini pada dasarnya adalah suatu

---

<sup>283</sup> Sumber:<http://komhukum.com/komhukum-artikel-10215-bakrie-berkomitmen-bayar-korban-lapindo.html#.UbBxZ9ixOr0>.

upaya untuk memperkuat basis identitas kolektif sebagai warga korban bencana Lumpur Lapindo.



**Gambar 5.7. Contoh Spanduk yang Mencerminkan Identitas Kolektif Sebagai Korban Lumpur Lapindo**<sup>284</sup>

Gambar atau patung Aburizal Bakrie (ARB) adalah merupakan simbol pihak yang harus dilawan secara kolektif. Dijadikannya gambar atau patung ARB sebagai simbol pihak yang harus dilawan akan memperkuat basis identitas kolektif warga sebagai korban lumpur Lapindo. Gambar atau patung ARB dijadikan sebagai spirit tindakan kolektif (gerakan sosial) dalam melawan ketidakadilan atas warga korban bencana Lumpur Lapindo.



**Gambar 5.8. Gambar Patung ARB Sebagai Simbol Pihak yang Harus Dilawan oleh Warga Korban Lumpur Lapindo**<sup>285</sup>

<sup>284</sup> Sumber: <http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/09/22/boediono-didemo-korban-lumpur-lapindo>.

<sup>285</sup> Sumber: <http://news.liputan6.com/read/599215/video-7-tahun-semburan-lapindo-korban-arak-ogoh-ogoh-ical>.

Sebagian kelompok warga korban bencana lumpur Lapindo berpandangan bahwa ARB merupakan sosok di balik tragedi bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Oleh karena itu, patung ARB dijadikan sebagai simbol pihak yang harus dilawan secara kolektif. Simbol patung ARB dengan demikian dapat memperkuat identitas kolektif warga korban lumpur Lapindo.

Simbol-simbol lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber reproduksi identitas kolektif korban bencana Lumpur Lapindo adalah dengan cara menciptakan slogan-slogan gerakan sosial. Sebagai contoh, tulisan di spanduk yang dipampang di benteng tanggul lumpur Lapindo di samping jalan Raya Porong, Sidoarjo, yang berbunyi "REVOLUSI DARI PORONG". Slogan ini memberikan spirit bagi tindakan kolektif korban bencana Lumpur Lapindo dalam melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang dirasakan oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo, dan spirit bagi warga korban bencana Lumpur Lapindo dalam memperjuangkan hak-haknya.



**Gambar 5.9. Slogan Perlawanan Warga Korban Lumpur Lapindo yang Memperkuat Basis Identitas Kolektif<sup>286</sup>**

Reproduksi identitas kolektif korban bencana lumpur Lapindo juga dilakukan oleh pihak-pihak eksternal melalui berbagai produksi simbol-simbol, seperti spanduk, film, gambar, dan sebagainya. Berbagai pihak eksternal, seperti LSM dan komunitas-komunitas peduli korban lumpur Lapindo, mereproduksi identitas kolektif korban lumpur Lapindo sebagai upaya advokasi (pembelaan).

---

<sup>286</sup> Sumber: Data Hasil Penelitian



**Gambar 5.10. Beberapa Bentuk Simbol Dukungan dan Simpati Pihak Eskternal atas Warga Korban Lumpur Lapindo yang Memperkuat Basis Identitas Kolektif<sup>287</sup>**

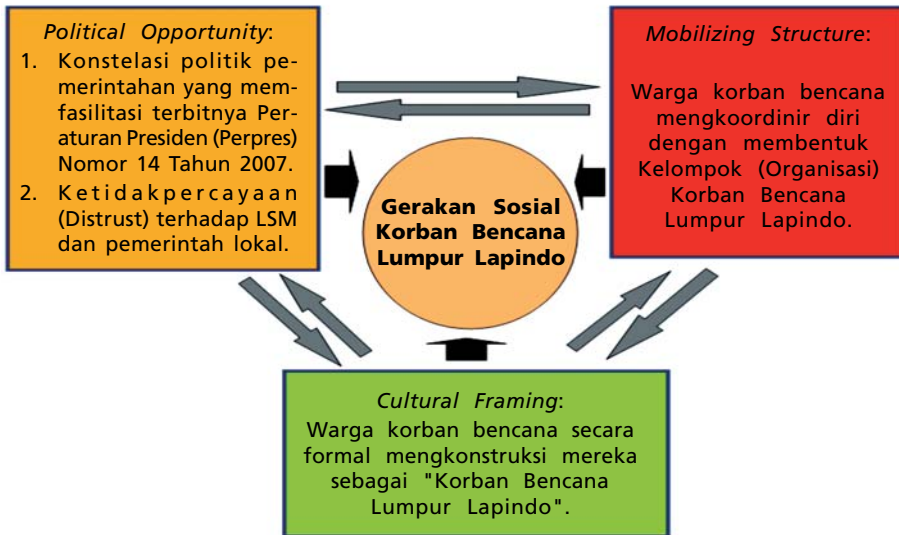
Dari penjelasan tersebut diatas, maka secara singkat dapat disebutkan bahwa pada periode kedua gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo kondisi aspek peluang/kesempatan politik (*political opportunity*) yang mendasari munculnya aksi gerakan sosial adalah meliputi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 dan ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap pihak LSM, pemerintah, korporasi (PT LBI), serta terhadap pemerintah lokal. Sementara aspek struktur penggerak (*mobilizing structure*) ditandai dengan dibentuknya kelompok (organisasi) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo, seperti kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dan kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap). Sedangkan aspek pembingkaihan kultural (*cultural framing*) ditandai dengan konstruksi identitas kolektif sebagai “Korban Bencana Lumpur Lapindo” yang dibangun oleh dan atas kesadaran diri warga korban bencana Lumpur Lapindo sendiri.

Selanjutnya aspek aspek peluang/kesempatan politik (*political opportunity*), struktur penggerak (*mobilizing structure*), dan pembingkaihan kultural (*cultural framing*) yang terjadi pada periode Kedua gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>287</sup> Sumber: Dari berbagai media





**Gambar 5.11. Political Opportunity, Mobilizing Structure, dan Cultural Framing pada Periode Kedua Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo**

## E. Simpulan

Pada periode kedua ini merupakan periode munculnya Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Faktor peluang/kesempatan politik (*political opportunity*) yang penting yang mendasari munculnya Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14/2007 terkait kebijakan penanganan dampak bencana lumpur. Korban bencana Lumpur Lapindo merasa tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil atas substansi dari Peraturan Presiden Nomor 14/2007. Salah satu substansi dari Peraturan Presiden Nomor 14/2007 tersebut yang dianggap tidak adil adalah mengatur tentang relasi jual-beli antara korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI. Dalam relasi jual-beli ini, pihak korban bencana Lumpur Lapindo diposisikan sebagai penjual aset tanah dan bangunan yang hancur tergenang lumpur, sementara pihak PT LBI diposisikan sebagai pembeli. Dalam proses jual-beli tersebut, pihak korban bencana Lumpur Lapindo harus menunjukkan bukti otentik berupa sertifikat tanah dan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Struktur penggerak (*mobilizing structure*) ditandai dengan dibentuknya kelompok (organisasi) korban bencana Lumpur Lapindo, yakni kelompok Gabungan Korban Bencana Lumpur Lapindo (GKLL) dan kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap). Dibentuknya kelompok (organisasi) korban bencana Lumpur Lapindo ini sebagai respons ketidakpercayaan korban bencana Lumpur Lapindo terhadap pihak pemerintah, PT LBI, dan pihak LSM. Melalui strategi aksi yang bersifat konfrontatif, korban bencana Lumpur Lapindo mengajukan tuntutan, yakni: (1) tuntutan terkait dengan alat bukti yang sah sebagai pengganti sertifikat dan IMB dalam proses jual-beli; dan (2) tuntutan terkait skema (mekanisme) pembayaran jual-beli.

Sementara dalam proses *Cultural Framing*, korban bencana Lumpur Lapindo membangun *framing* bahwa mereka sebagai korban bencana Lumpur Lapindo yang secara resmi dicantumkan dalam nama kelompok korban bencana Lumpur Lapindo. Selain tercantum dalam nama kelompok, *Cultural Framing* sebagai korban bencana Lumpur Lapindo juga diproduksi melalui berbagai simbol, gambar, dan mendramatisir situasi dan kondisi sebagai korban bencana Lumpur Lapindo.





## Proses Penurunan (*Declining*): Gerakan Sosial Sebagai Alat Kepentingan Pemimpin

Pada periode Ketiga Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo dapat dipetakan dalam kurun waktu antara tanggal 3 April 2009 hingga Desember 2014. Pada periode Ketiga ini, dinamika Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami penurunan (*declining*). Dinamika gerakan sosial dalam periode ini ditandai oleh peristiwa penting yakni keluarnya putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta bahwa peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo merupakan fenomena alam sehingga dikategorikan sebagai bencana alam, dimana putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tanggal 3 April 2009 ini sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperkuat bahwa fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo sebagai bencana alam, mengubah kondisi, konstalasi, dan strategi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Perubahan juga muncul dalam konteks peluang politik (*political opportunity*), struktur mobilisasi (*mobilizing structure*), dan pembingkaiian kultural (*cultural framing*) gerakan.

### **A. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) dan Penurunan Peluang Gerakan Sosial**

Kondisi peluang/kesempatan politik yang mendasari dinamika Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo pada periode Ketiga ini ditandai oleh keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo sebagai bencana alam, bukan sebagai bencana industri atau karena faktor manusia (*man-made disaster*). Pada tanggal 3 April 2009 keluar putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA), menyatakan peristiwa semburan lumpur di wilayah Sidoarjo sebagai bencana alam, keputusan kasasi MA ini sudah bersifat kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Catatan penting terkait perkembangan proses hukum tentang bencana Lumpur Lapindo dapat dirinci sebagai berikut<sup>288</sup>: *Pertama*, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Perdata Nomor: 284/Pdt.G/2006/PN.JKT.SEL., tanggal 27 Desember 2007 dalam amar putusanya menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Dalam hal ini, yang bertindak sebagai penggugat adalah Wahana Lingkungan Hidu (WALHI); *Kedua*, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pdt.G/2006/PN.JKT.SEL., tanggal 27 Desember 2007 telah dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusanya Nomor: 383/PDT/2008/PT.DKI, tertanggal 27 Oktober 2008 menyatakan bahwa "Semburan lumpur panas di Sidoarjo disebabkan karena fenomena alam". Bahwa WALHI tidak mengajukan kasasi sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); *Ketiga*, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 27 November 2007 yang menolak gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang dalam amar putusanya menyatakan bahwa "dengan demikian pemerintah dan Lapindo tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum"; *Keempat*, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta

---

<sup>288</sup> Akbar, Ali Azhar. 2012. Op.cit. Hal. 242-244.

dalam putusnya Nomor:136/PDT/2008/PT.DKI, tertanggal 13 Juni 2008 yang amar putusnya menolak permohonan banding dari YLBHI "bahwa adanya kejadian lumpur Sidoarjo karena kecenderungan gejala alam lebih dominan, bukan kesalahan manusia"; *Kelima*, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST., tanggal 27 November 2007, jo Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusnya Nomor: 136/PDT/2008/PT.DKI, tertanggal 13 Juni 2008, dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 24P/HUM/Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007, yang amar putusnya menolak permohonan Pemohon Uji Materiil yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); dan *Keenam*, Keputusan Pengadilan dan Mahkamah Agung yang berkekuatan tetap (*inkracht*) bahwa semburan lumpur merupakan fenomena alam dan bukan kesalahan industri, merupakan fakta-fakta hukum yang ada dan perlu dihormati. Putusan tersebut adalah: (a) Putusan tetap (*inkracht*) dari Mahkamah Agung RI Nomor: 2710K/pdt/2008 tertanggal 3 April 2009 atas gugatan YLBHI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 384/Pdt.G/2006 PN.Jkt. Pusat tertanggal 27 Nopember 2007; dan (b) Putusan tetap (*inkracht*) melalui surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Januari 2009, atas gugatan WALHI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 284/Pdt.G/2007/PN. Jakrat Selatan tertanggal 19 Desember 2007.

Adanya penetapan pengadilan yang memutuskan bahwa fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo disebabkan oleh faktor alam sehingga ditetapkan sebagai bencana alam, menimbulkan dampak dan konsekuensi yang sangat besar terhadap dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Dampak dan konsekuensi penetapan pengadilan tersebut yakni:

*Pertama*, ditetapkannya peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo sebagai bencana alam menyebabkan posisi PT LBI (korporasi) tidak bersalah. Oleh karena itu pihak PT LBI tidak memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya mengatasi dampak bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pengadilan hanya menyebutkan bahwa meskipun pihak PT LBI tidak bersalah secara hukum, namun pihak PT LBI memiliki kewajiban moral untuk turut mengatasi dampak bencana tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan

pihak PT LBI dalam upaya mengatasi dampak bencana Lumpur Lapindo dasarnya lebih bersifat panggilan kemanusiaan, tanggung jawab moral dan sosial saja. Penetapan semburan lumpur sebagai bencana alam mengakibatkan terjadinya reduksi tanggung jawab pihak PT LBI dalam penanganan dampak bencana, terutama dampak kesehatan, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Penetapan hukum dari pihak pengadilan ini merupakan kemenangan bagi PT LBI (korporasi) karena mengubah posisi pihak PT LBI dari ancaman kewajiban (tanggung jawab) hukum menjadi tanggung jawab moral dan sosial. Sukiadi (dalam Akbar, 2012:xxiv)<sup>289</sup> menyatakan bahwa kasus Lumpur Lapindo adalah praktek kasat mata Korporatokrasi sebagai akibat rusaknya sistem ketatanegaraan sehingga negara harus menanggung kejahatan korporasi. Aburizal Bakrie, sebagai pemilik PT LBI, mengaku tidak merasa bersalah atas terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan ganti rugi dengan cara membeli tanah dan bangunan warga lantaran "titah ibundanya". Menurut Aburizal Bakrie, pihak PT LBI sudah dinyatakan tidak bersalah oleh pihak MA, dengan demikian keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Hanya saja, karena "sang ibu" memerintahkan Aburizal Bakrie untuk membeli tanah dan bangunan, maka dia mengaku mematuhi. Aburizal Bakrie menjelaskan tanah dan bangunan milik warga itu itu bukan ganti rugi, melainkan ganti-untung karena melalui proses jual beli dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya sebesar Rp 60.000 per-meter persegi, tetapi dihargai oleh PT LBI sebesar Rp 1 juta<sup>290</sup>.

Karena pihak PT LBI dinyatakan tidak bersalah, maka korban bencana Lumpur Lapindo tidak memiliki dasar hukum dalam menuntut pihak PT LBI untuk bertanggung jawab atas nasib mereka.

*Kedua*, adanya penetapan pengadilan yang menetapkan peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo sebagai bencana alam merupakan kekalahan bagi pihak-pihak eksternal, khususnya LSM

---

<sup>289</sup> Ibid. Hal xxiv.

<sup>290</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/15/078390362/1cal-Bayar-Tanah-Warga-Lapindo-Demi-Titah-Ibu>.

dan organisasi sosial, dalam melakukan advokasi terhadap korban bencana Lumpur Lapindo. Sehingga pasca keluarnya penetapan pengadilan, sebagian besar pihak-pihak eksternal menarik diri dari proses advokasi terhadap korban bencana Lumpur Lapindo.

*Ketiga*, adanya penetapan pengadilan yang menetapkan peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo sebagai bencana alam menyebabkan terjadinya perubahan nama kelompok (organisasi) korban bencana Lumpur Lapindo dan perubahan strategi gerakan sosial. Dampak dari terjadinya perubahan nama kelompok (organisasi) korban bencana Lumpur Lapindo dan perubahan strategi gerakan sosial ini adalah munculnya berbagai friksi dalam kelompok korban bencana Lumpur Lapindo sehingga menimbulkan perpecahan dengan munculnya kelompok-kelompok baru korban bencana Lumpur Lapindo.

Kondisi tersebut diatas, menyebabkan terjadinya pelemahan kekuatan dalam gerakan sosial korban Lumpur Lapindo. Pelemahan kekuatan gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo ini mengakibatkan tidak efektif dan tidak berfungsinya secara optimal kerja gerakan sosial dalam memperjuangkan nasib korban bencana Lumpur Lapindo.

Keputusan hukum pengadilan yang menyatakan fenomena semburan Lumpur Panas di Sidoarjo sebagai bencana alam merupakan keputusan yang dinilai kontroversial. Secara akademik dalam "*AAPG 2008 International Conference & Exhibition*", pandangan para ahli geologi dunia tentang penyebab terjadinya semburan lumpur panas di Sidoarjo terbagi menjadi empat kelompok, yakni: *Pertama*, sebanyak tiga ahli dari Indonesia mendukung gempa Yogya sebagai penyebabnya, sehingga penyebab munculnya semburan lumpur panas karena faktor alam; *Kedua*, sebanyak 42 ahli dunia menyatakan aktivitas pemboran PT LBI sebagai penyebabnya, sehingga faktor penyebab munculnya semburan lumpur panas karena kesalahan manusia (kesalahan indutsri); *Ketiga*, sebanyak 13 ahli yang menyatakan kombinasi gempa dan pemboran sebagai sumber penyebabnya; dan Keempat, ada 16 ahli yang menyatakan belum bisa menentukan pendapatnya. Jadi, mayoritas ahli geologi dunia menyatakan bahwa faktor penyebab munculnya semburan lumpur panas karena kesalahan manusia (kesalahan indutsri). Sementara

laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 29 Mei 2007 menemukan bahwa terdapat kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pengeboran oleh PT LBI.

## **B. Re-Organisasi Kelompok Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Pada periode ketiga, dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo ditandai dengan melemahnya struktur mobilisasi yang dilakukan kelompok korban bencana Lumpur Lapindo. Melamahnya struktur mobilisasi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Perubahan Nama Kelompok Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Mengingat bahwa fenomena semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo sebagai bencana alam, dimana pihak pemerintah dan PT LBI dinyatakan tidak bersalah, maka pemimpin kelompok korban bencana Lumpur Lapindo melakukan perubahan (penggantian) nama kelompok dengan menghilangkan istilah "Lumpur Lapindo". Misalnya, nama kelompok GKLL yang semula merupakan singkatan dari Gabungan Korban Lumpur Lapindo kemudian diganti menjadi Gabungan Korban Luapan Lumpur. Kemudian kelompok Pagarekorlap (Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo) diganti menjadi Pagarekontrak (Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak).

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bahwa fenomena bencana semburan lumpur di Sidoarjo telah menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan apakah bencana ini sebagai bencana industri karena kesalahan manusia atau sebagai bencana alam.

Namun mengacu kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 27 November 2007, yang isinya menolak gugatan YLBHI, menyatakan bahwa pemerintah dan PT LBI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada tanggal 13 Juni 2008, yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2007 bahwa adanya kejadian semburan lumpur di Sidoarjo karena kecenderungan gejala alam lebih

dominan, bukan sebagai kesalahan manusia. Diperkuat lagi oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), tanggal 3 April 2009, yang isinya menolak permohonan Kasasi YLBHI, dimana putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo merupakan fenomena alam dan bukan kesalahan industri dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Oleh karena itu, secara hukum, ditetapkan bahwa bencana semburan lumpur di Sidoarjo sebagai bencana alam.

Adanya keputusan hukum tetap dari pihak pengadilan bahwa bencana semburan lumpur di Sidoarjo sebagai bencana alam, berdampak kepada perubahan nama dan strategi kelompok korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, khususnya pada dua kelompok besar yakni kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dan kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak).

Sebelum keluarnya putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), tanggal 3 April 2009, nama kelompok GKLL merupakan singkatan dari Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), namun setelah keluarnya putusan MA singkatan GKLL berubah menjadi Gabungan Korban Luapan Lumpur (GKLL). Menurut Khoirul Huda, Sekretaris kelompok GKLL, perubahan singkatan dari kelompok GKLL ini untuk menghormati putusan pengadilan dan sebagai kepatuhan terhadap hukum.

Seperti halnya kelompok GKLL, kelompok Pagarekontrak juga mengalami perubahan nama. Sebelum keluarnya putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), tanggal 3 April 2009, nama kelompoknya adalah Pagarekorlap merupakan singkatan dari Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo, namun setelah keluarnya putusan MA nama kelompok Pagarekorlap diganti dengan nama Pagarekontrak singkatan dari Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak. Menurut Pitanto, Wakil Ketua kelompok Pagarekontrak, perubahan nama kelompok dari Pagarekorlap menjadi Pagarekontrak karena untuk menghormati putusan pengadilan dan sebagai kepatuhan terhadap hukum.

## **2. Muncul Friksi Antar-Kelompok Korban Bencana**

Ketika pengadilan menyatakan bahwa PT LBI dinyatakan tidak bersalah atas terjadinya semburan lumpur panas di Sidoarjo maka



dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan terjadi antara lain pada nama kelompok (organisasi) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dan perubahan atas strategi gerakan yang dilakukan kelompok (organisasi) korban Lumpur Lapindo tersebut.

Nama GKLL yang semula merupakan singkatan dari Gabungan Korban Lumpur Lapindo, kemudian berubah menjadi Gabungan Korban Luapan Lumpur. Terdapat perubahan nama dari Lapindo menjadi Lumpur, namun nama kelompoknya masih tetap GKLL. Perubahan nama ini didasarkan atas pertimbangan keluarnya penetapan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa PT LBI dinyatakan tidak bersalah atas terjadinya bencana semburan lumpur di Sidoarjo, dan dinyatakan bahwa fenomena semburan lumpur di Sidoarjo dikategorikan sebagai bencana alam.

*"...Awalnya namanya Gabungan Korban Lumpur Lapindo, GKLL, itu pada awalnya. Jadi kita menyebut GKLL itu Gabungan Korban Lumpur Lapindo. Nah, sekitar April 2009 kita ganti GKLL itu menjadi Gabungan Korban Luapan Lumpur, sama GKLL-nya. Tapi Kenapa kita ganti? Karena pada waktu itu turun Kasasi MA yang menyatakan bahwa Lapindo tidak bersalah. Maka Lapindo berkeberatan kalau disebut Korban Lumpur Lapindo. Maka kita sebut menjadi Gabungan Korban Luapan Lumpur. Karena mereka keberatan setelah tanggal 9 April 2009 itu mereka mendapatkan incracth dinyatakan tidak bersalah. Kita menghormati hukum dan lakukan itu. Nah, jadi GKLL itu terbentuk sejak Agustus 2007...".<sup>291</sup>*

Perubahan tuntutan proses ganti rugi dari skema *cash and carry* (CnC) menjadi *cash and resttlement* (CnR) yang dilakukan oleh pengurus GKLL, dan penggantian nama GKLL menjadi Gabungan Korban Luapan Lumpur, telah menimbulkan kekecewaan pada sebagian warga korban bencana Lumpur Lapindo yang menjadi anggota GKLL karena keputusan tersebut diambil secara sepihak tanpa melalui musyawarah dan kesepakatan warga. Selanjutnya, warga korban lumpur Lapindo yang tidak setuju dengan perubahan

---

<sup>291</sup> Kutipan hasil wawancara dengan Khoirul Huda, Skretasris GKLL: Sabtu, 6 April 2013.

GKLL kemudian mereka mendirikan kelompok “perjuangan baru” yang menamakan diri kelompok Gepres, singkatan dari Gerakan Pendukung Perpres Nomor 14/2007. Selain Gepres, juga muncul kelompok lainnya yakni yang menamakan diri Tim-16. Dengan demikian kelompok Geppres dan Tim 16 lahir karena munculnya ketidakpuasan dari sebagian warga korban lumpur Lapindo terhadap kebijakan GKLL yang tidak lagi mampu memperjuangkan aspirasi mereka. “Jadi Geppres itu pecahan dari GKLL yang tidak setuju dengan *cash and resettlement*..”, demikian kata Khoirul Huda<sup>292</sup>.

Kelompok Geppres merupakan kelompok pecahan dari kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL). Kelompok GKLL lebih dikenal sebagai kelompok binaan Emha Ainun Najib (Cak Nun). Pada tanggal 24 Juni 2008, GKLL yang awalnya menuntut skema “*Cash and Carry*” (CnC) menandatangani nota kesepahaman dengan PT MLJ untuk menerima skema “*cash and resettlement*” (CnR), disaksikan oleh Bupati, Kepala BPLS dan Cak Nun selaku pembina GKLL. Karena nota kesepahaman itulah kemudian banyak warga yang kecewa yang kemudian membentuk Geppres<sup>293</sup>.

Geppres dipimpin oleh seorang tokoh agama, yakni KH. Abdul Fatah, yang merupakan pengasuh di Pondok Pesantren At-Tahzib, Karang Bendo, Tanggulangin, Sidoarjo. KH. Abdul Fatah dipilih oleh warga korban lumpur Lapindo sebagai Koordinator Gepres. Selain KH. Abdul Fatah, ada juga tokoh Geppres yakni Machmudatul Fatchiyah yang merupakan mantan Kepala Desa Renokenongo. Anggota Geppres, terdiri dari sebagian warga Perum TAS dan warga desa Jatiredjo, Siring, Kedung Bendo, dan Renokenongo, Desa Besuki, Kedungcangkring, dan Penjarakan, yang mayoritas tidak memiliki sertifikat tanah. Bukti kepemilikan tanah yang mereka miliki kebanyakan adalah Letter-C atau Petok-D.

Mantan Kades Renokenongo Machmudatul Fatchiyah, salah satu penggerak Geppres mengatakan bahwa sejak awal pihaknya menginginkan pembayaran ganti rugi “*cash and carry*” sebagaimana diatur dalam Perpres No. 14 Tahun 2007. “*Kami meminta pembayaran*

---

<sup>292</sup> Wawancara dengan Khoirul Huda, Sabtu: 6 April 2013.

<sup>293</sup> <http://gebraklapindo.wordpress.com/2008/07/28/cash-and-carry-atau-mati/>

*ganti rugi dilakukan cash and carry, yang 80 persen tetap dibayarkan dalam bentuk tunai, bukan resettlement", katanya<sup>294</sup>.*

Kelompok pecahan lainnya dari GKLL adalah kelompok Tim-16. Kelompok Tim-16 terdiri dari mayoritas warga Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum TAS) yang semuanya memiliki sertifikat tanah. Kelompok Tim-16 muncul karena tidak setuju dengan skema "*cash and resettlement*" (CnR) yang diperjuangkan oleh GKLL. Kelompok ini mengajukan tuntutan berupa relokasi. Koordinator kelompok Tim-16 adalah bapak Subiyanto dan tokoh lainnya adalah bapak Suharso. Anggota kelompok Tim-16 sekitar 2.000 orang yang merupakan warga yang tinggal di Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perumtas).

Ketika pengadilan menyatakan bahwa PT LBI dinyatakan tidak bersalah atas terjadinya semburan lumpur panas di Sidoarjo maka dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan terjadi antara lain pada nama kelompok (organisasi) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dan perubahan atas strategi gerakan yang dilakukan kelompok (organisasi) korban Lumpur Lapindo tersebut.

Nama GKLL yang semula merupakan singkatan dari Gabungan Korban Lumpur Lapindo, kemudian berubah menjadi Gabungan Korban Luapan Lumpur. Terdapat perubahan nama dari Lapindo menjadi Lumpur, namun nama kelompoknya masih tetap GKLL. Perubahan nama ini didasarkan atas pertimbangan keluarnya penetapan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa PT LBI dinyatakan tidak bersalah atas terjadinya bencana semburan lumpur di Sidoarjo, dan dinyatakan bahwa fenomena semburan lumpur di Sidoarjo dikategorikan sebagai bencana alam.

*"...Awalnya namanya Gabungan Korban Lumpur Lapindo, GKLL, itu pada awalnya. Jadi kita menyebut GKLL itu Gabungan Korban Lumpur Lapindo. Nah, sekitar April 2009 kita ganti GKLL itu menjadi Gabungan Korban Luapan Lumpur, sama GKLL-nya. Tapi Kenapa kita ganti? Karena pada waktu itu turun Kasasi MA yang menyatakan bahwa*

---

<sup>294</sup> <http://www.antaranews.com/print/111829/ratusan-korban-lumpur-lapindo-ngotot-tolak-cash-resettlement>

*Lapindo tidak bersalah. Maka Lapindo berkeberatan kalau disebut Korban Lumpur Lapindo. Maka kita sebut menjadi Gabungan Korban Luapan Lumpur. Karena mereka keberatan setelah tanggal 9 April 2009 itu mereka mendapatkan incracth dinyatakan tidak bersalah. Kita menghormati hukum dan lakukan itu. Nah, jadi GKLL itu terbentuk sejak Agustus 2007...".*<sup>295</sup>

### **3. Perubahan Strategi Aksi Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Selain terjadinya perubahan nama kelompok, perubahan juga terjadi pada strategi kelompok dalam memperjuangkan tuntutan warga korban bencana mendapatkan hak-haknya. Sebelum keluarnya putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), tanggal 3 April 2009, baik kelompok GKLL maupun kelompok Pagarekontrak menggunakan strategi konfrontatif. Namun setelah putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), tanggal 3 April 2009, baik kelompok GKLL maupun kelompok Pagarekontrak merubah strateginya dari konfrontatif menjadi kooperatif, negosiatif dan akomodatif.

Perubahan strategi kelompok ini karena posisi PT LBI yang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Pihak PT LBI, sebagaimana dinyatakan Aburizal Bakrie, mengaku tidak merasa bersalah atas terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan ganti rugi dengan cara membeli tanah dan bangunan warga lantaran "titah ibundanya". Menurut Aburizal Bakrie, pihak PT LBI sudah dinyatakan tidak bersalah oleh pihak MA, dengan demikian keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Hanya saja, karena "sang ibu" memerintahkan Aburizal Bakrie untuk membeli tanah dan bangunan, maka dia mengaku mematuhi. Aburizal Bakrie menjelaskan tanah dan bangunan milik warga itu bukan ganti rugi, melainkan melalui proses jual beli dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya sebesar Rp 60.000/m<sup>2</sup>, tetapi dihargai oleh PT LBI sebesar Rp 1 juta.

Pada periode awal gerakan, yakni sebelum adanya penetapan pihak pengadilan bahwa peristiwa bencana semburan Lumpur

---

<sup>295</sup> Kutipan hasil wawancara dengan Khoirul Huda, Skretasris GKLL: Sabtu, 6 April 2013.

Lapindo di Sidoarjo sebagai bencana alam, strategi gerakan yang digunakan oleh kelompok-kelompok korban bencana Lumpur Lapindo dengan menggunakan strategi konfrontatif. Sedangkan bentuk aksi gerakan lebih banyak menggunakan aksi pengerahan massa seperti demonstrasi. Jadi dalam melakukan aksi gerakan sosial, kedua kelompok gerakan sosial korban Lumpur Lapindo yakni kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dan kelompok Persatuan Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap) menggunakan strategi konfrontatif.

Pada awalnya yakni sekitar awal tahun 2007 kelompok GKLL menggunakan strategi konfrontatif ketika memperjuangkan hal-hal yang menurut mereka sifatnya prinsip. Ada tiga hal prinsip yang diperjuangkan GKLL melalui strategi konfrontatif, yakni: masalah penentuan dan tuntutan ganti rugi, besaran biaya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada warga korban lumpur Lapindo, dan persoalan alat bukti kepemilikan aset warga korban lumpur Lapindo.

Strategi konfrontatif ini berhasil dengan keluarnya Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), tertanggal 28 April 2007, sebagai payung hukum. Dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres tersebut tercantum: (1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT LBI membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah; dan (2) Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.

Selanjutnya hal yang dianggap prinsip adalah persoalan besaran ganti rugi yang belum diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007. GKLL mengajukan tuntutan besarnya ganti rugi sebesar Rp 2 juta untuk tanah dan Rp 2,5 juta untuk bangunan per-meternya. Sementara pihak PT LBI menawarkan sebesar Rp 500 ribu untuk tanah

dan Rp 750 ribu untuk bangunan per-meternya. Kemudian GKLL menolak atas tawaran pihak PT LBI dengan melakukan berbagai tekanan dan ancaman, seperti aksi demo, dan sebagainya. Akhirnya pihak PT LBI melunak dan bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp 1 juta untuk tanah dan Rp 1,5 juta untuk bangunan yang kemudian disepakati oleh GKLL.

Hal yang dianggap prinsip yang lainnya oleh GKLL adalah persoalan bukti kepemilikan aset oleh warga korban lumpur Lapindo. Pihak PT LBI hanya bersedia membayar ganti rugi aset warga korban lumpur Lapindo yang memiliki bukti sertifikat untuk tanah dan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan. Sementara bukti letter-C dan petok-D tidak diakui sebagai alat bukti kepemilikan aset. GKLL kemudian melakukan perlawanan karena sebagian besar warga korban lumpur Lapindo tidak memiliki sertifikat tanah dan tidak memiliki IMB. Akhirnya PT LBI melunak dan mau mengakui letter-C dan petok-D sebagai bukti kepemilikan aset yang sah.

Menurut penjelasan Pitanto<sup>296</sup>, strategi perjuangan kelompok Pagarekontrak adalah: negosiasi, konsolidasi, dan konfrontasi. Negosiasi dilakukan ketika Pagarekontrak memperjuangkan tuntutan warga korban bencana Lumpur Lapindo kepada pihak PT LBI, jika negosiasi tidak berhasil kemudian Pagarekontrak melakukan konsolidasi kekuatan untuk melakukan tekanan-tekanan. Apabila negosiasi dan konsolidasi ini tidak berhasil maka strategi berikutnya adalah dengan cara konfrontatif.

*"...Yaa..kita ini kan ada negosisasi, konsolidasi, kemudian konfrontasi, tiga hal ini tidak bisa terpisahkan... Negosiasi, konsolidasi, kalau tidak selesai ya kita konfrontasi. Karena kita tidak mau didikte oleh media, pak ini bagaimana?, saya bilang nanti dulu, sebab kalau demo itu tujuannya apa dulu, maunya apa? Fasilitasnya apa, dananya bagaimana? Nanti hasilnya itu kayak apa? Itu harus kita perhitungkan, jangan sampai kita itu ibarat penembak saya itu jangan sampe kehabisan amunisi, jelas itu..maka saya itu kalau turun, saya lihat dulu apakah warga itu*

---

<sup>296</sup> Wawancara dengan Pitanto, Wakil Ketua kelompok Pagarekontrak: Jumat. 15 Pebruari 2013.

*sudah kompak apa belum, kalau warga kompak ya oke, kalau masih belum kompak ya saya tunda...".<sup>297</sup>*

Strategi konfrontatif yang dilakukan oleh kelompok GKLL dan Pagarekorlap dikarenakan warga korban bencana Lumpur Lapindo menganggap bahwa pihak PT LBI sebagai pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya bencana dan pihak pemerintah lamban dalam mengambil tindakan untuk mengatasi dampak bencana.

Perubahan strategi kelompok ini karena posisi PT LBI yang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Pihak PT LBI, sebagaimana dinyatakan Aburizal Bakrie, mengaku tidak merasa bersalah atas terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan ganti rugi dengan cara membeli tanah dan bangunan warga lantaran "titah ibundanya". Menurut Aburizal Bakrie, pihak PT LBI sudah dinyatakan tidak bersalah oleh pihak MA, dengan demikian keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Hanya saja, karena "sang ibu" memerintahkan Aburizal Bakrie untuk membeli tanah dan bangunan, maka dia mengaku mematuhi. Aburizal Bakrie menjelaskan tanah dan bangunan milik warga itu itu bukan ganti rugi, melainkan melalui proses jual beli dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya sebesar Rp 60.000 per-meter persegi, tetapi dihargai oleh PT LBI sebesar Rp 1 juta.

Pertimbangan yang lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi GKLL dari strategi konfrontatif ke strategi koopertif adalah berkaitan dengan fakta tentang posisi keluarga Bakrie dalam kepemilikan saham PT LBI. Saham PT LBI dimiliki oleh tiga perusahaan, yakni: Energy Mega Persada (EMP) sebesar 50%, Medco Energy Persada sebesar 32%, dan Santos sebesar 18%. Dari saham EMP sebesar 50%, kemudian kepemilikannya dibagi dua yakni keluarga Bakrie memiliki saham sebesar 50% dan sisanya 50% dimiliki oleh publik. Medco hanya mau melakukan pembayaran ganti rugi dengan menanggung 30% saja dari total dana ganti rugi jika PT LBI dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Namun ternyata karena pengadilan menyatakan bahwa PT LBI tidak

---

<sup>297</sup> Kutipan wawancara dengan Pitanto. Idem.

bersalah, maka Medco pun "lari". Sementara Santos hanya mengeluarkan dana sebesar Rp 600 juta untuk kepentingan menutup *rig* (*snubbing units*). Maka tinggal keluarga Bakrie yang "tegak berdiri" dalam menyelesaikan pembayaran ganti rugi, meskipun dinyatakan tidak bersalah oleh MA. Sementara di sisi lainnya, kepemilikan keluarga Bakrie di PT LBI juga tidak begitu signifikan.

GKLL memperjuangkan proses ganti rugi bagi warga korban lumpur Lapindo melalui skema *cash and carry* (CnC), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007. Skema *cash and carry* adalah skema pembayaran ganti rugi secara bertahap melalui pembayaran uang muka sebesar 20%, dan sisanya sebesar 80% dilunasi dengan cara pembayarn tunai dalam kurun waktu 2 tahun. Selama 2 tahun warga korban akan diberikan uang untuk kontrak rumah sebesar Rp 5 juta, dan jatah hidup sebesar Rp 300 ribu untuk setiap jiwa perbulan.

Setelah sekian lama memperjuangkan ganti rugi dengan *cash and carry*, kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) akhirnya menyerah dan memilih sistem *cash and resettlement* (CnR). Hal ini dilakukan 2.000 anggota GKLL, setelah tidak adanya payung hukum yang menaungi aset berupa tanah non-sertifikat. Bahkan GKLL sudah menandatangani nota kesepahaman dengan PT MLJ. Sekretaris GKLL Khoirul Huda mengakui, sebenarnya warga berusaha menjual lahan tersebut. Namun ternyata, tanah tersebut tidak dapat di akta jual belikan (AJB). "*Di tengah proses pembayaran ganti rugi, ternyata tanah non-sertifikat tidak dapat di AJB kan,*" jelas Khoirul Huda<sup>298</sup>. Huda mengatakan, *cash and resettlement* ini hanya berlaku bagi warga yang tergabung dalam GKLL. Saat ini, tambah Huda, ada 3000 anggota GKLL yang tanahnya non-sertifikat. Setelah dilakukan sosialisasi, sebanyak 2.000 warga menyetujui dengan kesepakatan tersebut. "*Masih ada sekitar 1000 warga yang belum melakukan pilihan,*" paparnya.<sup>299</sup>

Vice President PT MLJ Andi Darusalam Tabussala, mengatakan, *cash and resettlement* merupakan upaya penyelesaian bagi warga

---

<sup>298</sup> <http://www.antaranews.com/print/107198/gkll-bimbang-antara-cash-and-carry-atau-cash-and-resettlement>

<sup>299</sup> Ibid



yang non sertifikat. "*Kami yakin ini adalah suatu kepastian, sehingga warga tidak lagi terombang-ambing,*" katanya<sup>300</sup>. Pihaknya juga tidak mempermasalahkan uang muka 20 persen, yang telah diberikan ke warga. Sebaliknya, PT MLJ menganggap uang muka tersebut sebagai hibah, yang tidak diperhitungkan. Selain itu PT MLJ tidak akan melakukan pembayaran ganti rugi *cash and carry* dalam kondisi apapun, kepada korban lumpur dengan bukti kepemilikan petok D, letter C, dan SK Gogol.

Konsep skema *Cash and Resettlement (CnR)* adalah bersifat: (1) *Cash*, meliputi pembayaran hanya untuk bangunan dihargai Rp 1,5 juta/meter, dan realisasi pembayaran 2 bulan setelah penandatanganan; (2) *Resettlement*, melalui penggantian tanah dengan perbandingan 1:1; Lokasi dikawasan PT Kahuripan Nirwana Village (KNV); untuk tanah sawah di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo; Tanah sawah juga dapat dikonversi ke tanah darat dengan perbandingan tertentu; Tanah dapat dijual kembali ke pihak PT MLJ, dihargai Rp 1 juta/meter, setelah 1 tahun dan diikat dengan akta notariat.

#### **4. Dibentuknya Sekretariat Gabungan (Setgab) Korban Bencana**

Menyadari bahwa kekuatan kelompok-kelompok warga korban lumpur Lapindo sebagai Organisasi Gerakan Sosial mengalami penurunan, maka kemudian para pemimpin atau koordinator kelompok korban bencana Lumpur Lapindo pada tahun 2012 bersepakat untuk membentuk sebuah kelompok yang disebut Sekretariat Gabungan (Setgab) Korban Lumpur Lapindo. Tujuan pembentukan Setgab Lumpur Lapindo ini untuk menyatukan kekuatan korban Lumpur Lapindo dalam memperjuangkan hak-haknya. Anggota Setgab Korban Lumpur terdiri dari kelompok-kelompok korban lumpur Lapindo yang telah ada selama ini, seperti: GKLL, Gepres, Tim-16, Pagarekontrak, dan sebagainya. Koordinator Setgab Lumpur Lapindo dipercayakan kepada Mas Boy (Yudo Wintoko) dari Pagarekontrak dan Juru Bicaranya dipercayakan kepada Khoirul Huda dari GKLL.

---

<sup>300</sup> Ibid

*"...Jadi begini, kita dulu adalah mempunyai pecahan-pecahan kelompok, itu tidak masalah karena memang keinginan kita, dan keinginan kita memang waktu itu berbeda-beda. Ada keinginan masyarakat yang berbeda-beda. Dan kita semuanya hanya sekedar menjalankan apa yang dihendaki oleh masyarakat. Tapi sekitar April 2012 ini kemauan kita sama, apa?, pelunasan. Nah daripada kita sendiri-sendiri, apa namanya? Namanya Pelunasan itu ingin sendiri-sendiri maka lebih baik kita bergabung. Karena apa? Karena pasukan kita semakin lama semakin mengecil... Kalau ini kita tidak bergabung maka kemudian kita kecil. Kan gerakan itu kalau kecil pendukungnya kan tidak akan efektif. Jadi apa yang kemudian mendasari berdirinya Setgab, itu ada dua hal, satu bahwa kita mempunyai tujuan yang sama Pelunasan, tapi yang kedua juga kita melihat realita bahwasanya tenaga kita semakin lama semakin kecil karena 10.500 warga yang sudah lunas inipun juga tidak akan pernah menuntut apa-apa karena permasalahan mereka sudah dianggap selesai..."*<sup>301</sup>

Pada awalnya kelompok-kelompok warga korban lumpur Lapindo memiliki dukungan keanggotaan yang cukup besar. Sehingga perjuangan masing-masing kelompok juga berjalan cukup efektif karena memiliki basis partisipan yang banyak. Namun seiring perjalanan waktu dan berlarut-larutnya penanganan masalah semburan lumpur, mengakibatkan banyak warga korban bencana Lumpur Lapindo yang merasa lelah dan frustrasi yang akhirnya semangat dukungannya juga menurun. Atas dasar kondisi seperti ini kemudian seluruh elemen korban bencana Lumpur Lapindo bergabung dalam suatu kelompok/organisasi yang menamakan diri Setgab Korban Lumpur.

Menurut Pitanto, dibentuknya Setgab Korban Lumpur adalah untuk menyatukan kekuatan yang saat sebelumnya tersebar dalam berbagai kelompok perjuangan. Disadari bahwa selama ini kelompok-kelompok tersebut berjalan sendiri-sendiri sehingga dalam beberapa hal seringkali memunculkan rasa saling curiga di antara berbagai kelompok tersebut. Padahal ada sesuatu hal yang

---

<sup>301</sup> Kutipan wawancara dengan Khoiril Huda, Sekretaris Koordinator GKLL: Sabtu, 6 April 2013.

secara prinsipil sama-sama diperjuangkan, yakni memperjuangkan hak-hak warga korban bencana Lumpur Lapindo. Atas dasar itu kemudian dibentuklah Setgab Korban Lumpur. Sebagaimana dikatakan Pitanto sebagai berikut: *"...Nah, kelompok-kelompok yang lain itu sekarang bisa bergabung menjadi satu, kita bentuk satu Setgab, Setgab Korban Lumpur PAT 14.."*<sup>302</sup>

Selanjutnya Khoirul Huda menyatakan bahwa warga di dalam peta terdampak yang ganti ruginya ditanggung PT MLJ dulu sempat terbagi dalam beberapa kelompok yang terpisah. Namun saat ini warga bersatu dalam Setgab yang terdiri dari empat kelompok besar, yaitu kelompok: Pagarekontrak, GKLL, Geppres, dan kelompok lain termasuk warga desa Glagah Harum. Kelompok-kelompok ini telah meleburkan diri bersama-sama dalam Setgab Korban Lumpur. K.H. Abdul Fatah sebagai Koordinator Gepres juga membenarkan kalau kelompok Geppres saat ini telah bergabung dengan Setgab Korban Lumpur.<sup>303</sup>

### **C. Munculnya Relasi Pertukaran Kekuasaan Antara Aktor Pemimpin Kelompok Gerakan Sosial Dengan Pihak Korporasi**

Melemahnya kekuatan Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo juga ditandai oleh adanya relasi pertukaran kekuasaan antara pemimpin kelompok korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI. Relasi pertukaran kekuasaan tersebut terjadi dalam konteks kepentingan politik dan bisnis. Gambaran terjadinya relasi pertukaran kekuasaan antara pemimpin kelompok korban bencana Lumpur Lapindo dan pihak PT LBI dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **1. Gerakan Sosial dan Keuntungan Politik**

Aktor pemimpin kelompok korban bencana Lumpur Lapindo memperoleh keuntungan politik sebagai konsekuensi dari gerakan sosial yang dilakukan oleh korban bencana Lumpur Lapindo (Lula).

<sup>302</sup> Kutipan wawancara dengan Pitanto, Wakil Ketua Pagarekontrak: Jumat, 15 Pebruari 2013.

<sup>303</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/27/058419770/Korban-Porong-ingin-Labrak-Hari-Suwandi>

Khoirul Huda sebagai pemimpin kelompok GKLL memiliki kepentingan politik dan kekuasaan sebagai sertaannya. Keterlibatan Khoirul Huda dalam perjuangan warga korban bencana Lumpur Lapindo, menyebabkan namanya menjadi terkenal. Dengan memanfaatkan kekuatan GKLL sebagai representasi dari korban bencana Lumpur Lapindo yang memiliki massa cukup banyak, Khoirul Huda kemudian terlibat di dunia politik untuk mendapatkan kekuasaan. Faktanya adalah bahwa Khoirul Huda pernah menjadi calon Wakil Bupati Sidoarjo untuk periode 2010-2015 mendampingi Bambang Prasetyo Widodo sebagai calon Bupati Sidoarjo. Pasangan Cabup-Cawabup Sidoarjo Bambang Prasetyo Widodo-Khoirul Huda (Setia Huda) resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Sidoarjo, pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010. Pasangan ini diusung oleh koalisi beberapa partai, seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai Golkar merupakan partai utama yang mengusung Khoirul Huda untuk menjadi calon Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2015.

Namun demikian Khoirul Huda dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2015, ternyata gagal menjadi Wakil Bupati definitif karena kalah dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo dengan suara yang tipis. Menurut Khoirul Huda kekalahannya dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2015 karena adanya praktek *money politics* yang dilalukan pasangan lainnya. Seperti yang dituturkan Khoirul Huda sebagai berikut:

*...Dan itu teman-teman lumpur semua yang bergerak, tanpa ada uang, ada apa, dan mohon maaf makan mereka mengeluarkan uang pribadi-pribadi. Itu kita jalan sampai kemudian pas Pilkada money politics dimana-mana, itu suaranya sudah bagus, money politics dimana-mana, temen-temen ngomong pak ini gimana? Ya sudah biarkan saja, wong kita nggak ini. Selesai. Minggu pemilihan, jam 2 saya lihat hasil quick account, kalah, terus saya tanya kenapa sih kok kalah? Temen-temen bilang oh pak di lapangan gini...gini..gini. intinya money politics...*<sup>304</sup>

---

<sup>304</sup> Hasil wawancara dengan Khoirul Huda, Sabtu: 6 April 2013.

Mengapa Khoril Huda diusung oleh Partai Golkar? Pertanyaan ini menarik karena sebagaimana diketahui bahwa PT LBI tidak bisa dilepaskan dari sosok ARB, sementara ARB adalah Ketua Umum Partai Golkar. Menurut penjelasan Khoirul Huda bahwa dirinya diusung oleh Partai Golkar karena sebelumnya Partai Golkar yang memberinya kartu anggota yang secara resmi menjadi kader Partai Golkar.

*...Nah kenapa saya Golkar? Karena pada waktu tahun 2010 itu saya dicalonkan oleh Golkar, PDIP, PKNU sama Hanura, dan yang ngasih kartu tanda Anggota itu hanya Golkar, maka kemudian saya ya hormatilah itu semua. Perkara terus kemudian komunikasi dengan PT Minarak dekat dengan pak Ical, ada beberapa hal yang luar biasa yang seharusnya patut diapresiasi. Jadi, itu logikanya sebenarnya nyambung gitu. Tapi sebenarnya kemudian kalau orang tidak paham dari bawah, dari luar, apalagi putus-putus, ya. Tapi saya pikir hidup itu ya gitu saja, kalau nggak disenangi ya begitu...<sup>305</sup>*

Mengapa Partai Golkar memberikan kartu anggota partai kepada Khoirul Huda? Hal ini nampaknya sebagai "relasi balas budi" Partai Golkar kepada Khoirul Huda. Ketika ARB mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, kelompok GKLL yang dimotori oleh Khoirul Huda menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya. Demikian pula ketika ARB menyatakan mencalonkan diri untuk menjadi calon Presiden RI untuk periode 2014-2019 kelompok GKLL dan Khoirul Huda menyatakan memberikan dukungan. Sementara kelompok dan pemimpin korban bencana Lumpur Lapindo yang lainnya justru menentanginya.

Relasi politik antara Khoirul Huda dan Partai Golkar kemudian terus berlanjut. Dalam Pemilu Legislatif 2014 KhoirulHuda kemudian menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Sidoarjo yang disung oleh Partai Golkar. Khoirul Huda menduduki Caleg Nomor urut 1 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1, dari Partai Golkar.<sup>306</sup> Dalam Pileg tahun 2014 ini, akhirnya Khoirul Huda terpilih menjadi

---

<sup>305</sup> Ibid

<sup>306</sup> <http://www.jariungu.com/caleg.php?idCaleg2014=67262>

anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2014-2019. Kiprah Khoirul Huda ini, tidak terlepas dari posisinya sebagai sekretaris kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL). Dengan demikian, posisi korban bencana Lumpur Lapindo yang semula menjadi kelompok subordinat (*powerless*) kemudian melalui relasi pertukaran kekuasaan berubah menjadi kelompok yang lebih *powerful* melalui representasi pemimpin kelompoknya.

Apabila pihak PT LBI melalui Partai Golkar dan sosok ARB memiliki kekuasaan politik untuk dipertukarkan dengan pihak kelompok korban bencana Lumpur Lapindo, dalam hal ini kelompok GKLL, maka pihak kelompok GKLL memiliki kekuasaan kolektif untuk dipertukarkan dengan pihak ARB. Logika penjelasannya adalah bahwa sebagai seorang politisi ARB memerlukan "citra" positif untuk mendapatkan dukungan dan simpati publik, apalagi saat itu ARB menyatakan diri untuk menjadi calon presiden untuk periode 2014-2019. Sementara peristiwa bencana Lumpur Lapindo merupakan "peluru" yang dapat menjatuhkan kredibilitas dan citra politik ARB. Oleh karena itu, ARB sangat berkepentingan untuk mengamankan korban bencana Lumpur Lapindo sehingga aksi-aksi kolektif korban bencana Lumpur Lapindo lebih kooperatif, bukan konfrontatif. Sebagaimana diketahui bahwa isu tentang bencana Lumpur Lapindo bukan saja hanya sekedar isu lokal atau regional, namun sudah menjadi isu nasional dan bahkan menjadi isu internasional. Maka dukungan positif dari korban bencana Lumpur Lapindo akan modal yang bisa dijual oleh pihak PT LBI, Partai Golkar dan ARB untuk memperbaiki citranya.

Selain Khoirul Huda, juga terdapat pemimpin gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo lainnya yang terlibat dalam koalisi dan relasi politik, yakni Mahmudatul Fatkhiah. Dalam Pileg 2014, Mahmudatul Fatkhiah menjadi Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun berbeda dengan Khoirul Huda, Mahmudatul Fatkhiah ternyata gagal untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2014-2019. Mahmudatul Fatkhiah adalah tokoh penting di balik proses penjualan tanah di Desa Renokenongo kepada PT LBI yang kemudian mengakibatkan terjadinya bencana semburan lumpur panas di Sidoarjo. Pada saat itu Mahmudatul Fatkhiah

menjabat sebagai Kepala Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Mahmudatul Fatkhiah juga meruapakan salah satu tokoh yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap) yang kemudian berubah menjadi Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak).

## **2. Gerakan Sosial dan Keuntungan (Kepentingan) Bisnis**

Selain ada yang memperoleh keuntungan politik, aktor pemimpin kelompok juga ada yang mendapatkan keuntungan bisnis sebagai implikasi dari gerakann sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Keuntungan bisnis ini diperoleh oleh pemimpin kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak). Sebagaimana sudah disinggung bahwa nama kelompok Pagarekontrak (Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak) pada awalnya bernama Pagarekorlap (Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo). Demi menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa bencana semburan panas di Sidoarjo sebagai bencana alam dan dinyatakan PT LBI tidak bersalah, maka nama kelompok Pagarekorlap berubah menjadi Pagarekontrak. Selain perubahan nama kelompok, kelompok Pagarekontrak juga melakukan perubahan strategi aksi dari konfrontatif menjadi kooperatif dan akomodatif.

Berbeda dengan pemimpin sentral GKLL yang melakukan relasi pertukaran kekuasaan atas dasar kepentingan politik, maka kepentingan pemimpin kelompok Pagarekontrak lebih cenderung kepada relasi ekonomi (bisnis). Salah satu tuntutan dari warga koban bencana Lumpur Lapindo yang tergabung dalam kelompok Pagarekontrak adalah meminta agar tempat tinggal mereka yang baru bisa direlokasikan di satu tempat, sehingga mereka bisa berkumpul bersama sebagaimana dulu saat tinggal di Desa Renokenongo.

Aspirasi warga korban bencana Lumpur Lapindo yang tergabung dalam kelompok Pagarekontrak yang menginginkan untuk relokasi tempat tinggal secara bersama-sama di tempat yang baru kemudian direspons oleh para pemimpin kelompok Pagarekontrak. Para pemimpin kelompok Pagarekontrak kemudian mencari lokasi tanah

untuk kawasan perumahan dan membangun rumah untuk hunian korban bencana Lumpur Lapindo melalui kerjasama dengan Real Estate Indonesia (REI) Jatim dan Bank Jatim, yang difasilitasi pihak Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Selanjutnya, maka diatas tanah seluas sepuluh hektar dibangun sekitar 600 unit rumah tipe 36 yang kemudian menjadi kawasan Perumahan Renojoyo. Nama Renojoyo diambil dari nama asal desa warga korban bencana Lumpur Lapindo yakni Desa Renokenongo. Dalam konteks ini, para pemimpin kelompok Pagarekontrak yakni Sunarto, Pitanto, Yudi Wintoko, dan Aris Setiadi lebih banyak berperan sebagai broker pengembang perumahan. Disinyalir bahwa mereka ini telah mendapatkan fee dari upayanya dalam membantu pembebasan tanah dan pembangunan kawasan perumahan di Renojoyo. Data hasil wawancara sebagai berikut:

*"...Ya ini, saya waktu itu membebaskan tanah 10 hektar, saya kapling-kapling, warga beli, kerjasama dengan bendaharnya tadi ya kebetulan punya duit, ya beli saja ini, yang penting satu orang-orang itu bagaimana supaya bisa kumpul disini. Orang-orang kesulitan, nanti bangunnya bagaimana, orang-orang rapat lagi, pak gini saja kalau bisa itu dibangun lagi saja, nanti bayarnya dari hasil ganti rugi, saya kesana-kemari itu mencari orang yang peduli yang mau bangunan, sampai saya minta tolong sama pak De Karwo itu, nah ketemu yang namanya REI, ya ini jadilah rumah, begitu diurug, dibikinkan rumah, ya ini tidak semua yang ambil..". (Kutipan hasil wawancara dengan Pitanto, Jumat: 15 Pebruari 2013).*

Berdasarkan pernyataan Pitanto tersebut, maka para pemimpin kelompok Pagarekontrak menunjukkan peran yang sangat dominan dalam menyiapkan lokasi pemukiman bagi warga korban bencana Lumpur Lapindo yang tergabung dalam kelompok Pagarekontrak. Proses pembayaran rumah oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo akan dibayarkan oleh pihak PT LBI kepada Bank Jatim sesuai dengan besaran jumlah dana yang harus dibayarkan kepada masing-masing korban bencana Lumpur Lapindo atas dasar jual-beli.

Dari deskripsi tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa terdapat relasi pertukaran kekuasaan antara kelompok Pagarekontrak dengan pihak PT LBI, dimana kekuasaan kolektif kelompok



Pagarekontrak dipertukarkan dengan kekuasaan finansial PT LBI sehingga melahirkan keuntungan bisnis bagi aktor pemimpin kelompok Pagarekontrak.

#### **D. Bias Identitas Kolektif Antara "Korban Bencana Lumpur Lapindo" Vs "Korban Bencana Lumpur Sidoarjo"**

Dampak dari keluarnya keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung menyebabkan terjadinya reformulasi nama kelompok korban bencana Lumpur Lapindo, yakni kelompok GKLL yang semula merupakan singkatan dari Gabungan Korban Lumpur Lapindo kemudian berubah menjadi Gabungan Korban Luapan Lumpur, dan kelompok Pagarekorlap (Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo) kemudian berubah menjadi Pagarekontrak (Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak). Dengan demikian, secara formal kata "Korban Lumpur Lapindo" tidak lagi dicantumkan sebagai nama kelompok.

Pada periode ini, korban bencana Lumpur Lapindo tidak lagi memunculkan *Cultural framing* bahwa mereka sebagai korban bencana Lumpur Lapindo, akan tetapi mereka merubahnya dengan menyebut sebagai korban bencana luapan lumpur. Perubahan *framings* ini menunjukkan bahwa PT LBI bukan pihak yang harus dipersalahkan, sehingga semakin memperlemah posisi korban bencana Lumpur Lapindo. Pada periode ketiga ini *cultural framing* juga diwarnai oleh kontradiksi dalam beberapa hal, sebagai berikut.

#### **1. Kontroversi Perbedaan *Cultural Framings* Pada Berita Media Massa**

Menarik untuk dikaji adalah perbedaan yang muncul dalam *framing* berita di media massa TV tentang bencana semburan lumpur di Sidoarjo, yakni antara TVOne dan Metro TV. *Framing* berita di TVOne selalu menyebutkan istilah Bencana Lumpur Sidoarjo (Lusi), sementara *framing* berita di Metro TV selalu menyebut istilah bencana Lumpur Lapindo (Lula).

TVOne (sebelumnya bernama Lativi) adalah sebuah stasiun televisi swasta Indonesia. Berawal dari penggunaan nama Lativi, stasiun televisi ini didirikan pada tanggal 30 Juli 2002 oleh Abdul Latief dan dimiliki oleh ALatief Corporation. Pada saat itu, konsep

penyusunan acaranya adalah banyak menonjolkan masalah yang berbau klenik, erotisme, berita kriminalitas dan beberapa hiburan ringan lainnya. Sejak tahun 2006, sebagian sahamnya juga dimiliki oleh Grup Bakrie yang juga memiliki stasiun televisi antv. Pada tanggal 14 Februari 2008, Lativi secara resmi berganti nama menjadi TVOne, dengan komposisi 70 persen berita, sisanya gabungan program olahraga dan hiburan. Abdul Latief tidak lagi berada dalam kepemilikan saham TVOne. Komposisi kepemilikan saham TVOne terdiri dari PT Visi Media Asia Tbk sebesar 49%, PT Redal Semestasebesar 31%, Good Response Ltd sebesar 10%, dan Promise Result Ltd sebesar 10%. Direktur Utama TvOne saat ini adalah Ardiansyah Bakrie, anak Aburizal Bakrie (ARB).<sup>307</sup>

MetroTV adalah sebuah stasiun televisiswasta berita yang berkedudukan di Indonesia. MetroTV didirikan oleh PT Media Televisi Indonesia, resmi mengudara sejak 25 November2000 di Jakarta. Metro TV dimiliki Media Group pimpinan Surya Paloh yang juga memiliki harian *Media Indonesia* dan *Lampung Post*. PT Media Televisi Indonesia merupakan anak perusahaan dari Media Group, suatu kelompok usaha media yang dipimpin oleh Surya Paloh, yang juga merupakan pemilik surat kabarMedia Indonesia. PT Media Televisi Indonesia memperoleh izin penyiaran atas nama MetroTV pada tanggal 25 Oktober1999. Pada tanggal 25 November2000, pertama kali MetroTV mengudara dalam bentuk siaran ujicoba di 7 kota. Pada awalnya, hanya bersiaran 12 jam sehari, namun sejak tanggal 1 April 2001, MetroTV mulai mengudara selama 24 jam.<sup>308</sup>

Ketika TVOne, menyiarkan berita yang menyebut istilah “Lumpur Sidoarjo”, masyarakat Porong, Sidoarjo, dan sekitarnya yang menjadi korban bencana semburan lumpur panas merasa keberatan dan menuduh pihak TVOne telah mempolitisir istilah “Lumpur Lapindo” menjadi “Lumpur Sidoarjo”. Namun juru bicara *TVOne*, Totok Suryono, menyatakan kantornya tidak pernah mempolitisir penyebutan bencana “Lumpur Lapindo” menjadi “Lumpur Sidoarjo”. “*Di seluruh dunia, penyebutan suatu bencana memang*

---

<sup>307</sup> Lihat: <https://id.wikipedia.org/wiki/TvOne>; diakses Rabu, 25 November 2015.

<sup>308</sup> Lihat: <https://id.wikipedia.org/wiki/MetroTV>; Diakses Rabu, 25 November 2015.

dikorelasikan dengan tempat terjadinya bencana," kata Totok. Selanjutnya Totok mencontohkan bencana nuklir di Bhopal, India, yang disebutkan sesuai nama lokasi bencana, "Tragedi Bhopal". "Begitu pula dengan Lumpur Sidoarjo," ujarnya. Menurut dia, penyebutan Lumpur Sidoarjo juga disebut Lumpur Porong. Namun karena tempatnya lebih dikenal sebagai bagian daerah Sidoarjo, penyebutannya menjadi "Lumpur Sidoarjo". Penyebutan Lumpur Sidoarjo murni dilakukan karena lokasi bencana tersebut ada di Sidoarjo.<sup>309</sup>

Mengacu kepada hasil penelitian Novenanto (2010: 63-75),<sup>310</sup> bahwa beberapa media nasional menggunakan nama lumpur Sidoarjo (Sidoarjo: nama kabupaten). *Newsletter* solusi, diterbitkan Lembaga Kajian LC, juga menggunakan nama ini. Beberapa media internasional, seperti *Nature* dan *National Geographic*, dan beberapa artikel jurnal geologi menggunakan istilah ini. Baik media maupun jurnal geologi itu menggunakan akronim Lusi (Lumpur Sidoarjo). Beberapa penelitian sosial berbahasa Inggris lainnya pun merujuk pada nama tempat, yaitu provinsi Jawa Timur, *East Java mudflow* (luapan/luberan lumpur Jawa Timur). Dalam analisis *framing* atas tiga media nasional (Kompas, Media Indonesia dan Seputar Indonesia) dan tiga media lokal (Jawa Pos, Surya dan Surabaya Post). Ada media yang konsisten menggunakan nama Lumpur Lapindo (Kompas), namun ada surat kabar yang konsisten menggunakan nama Lumpur Porong (Surabaya Post). Sementara, beberapa surat kabar lain (Jawa Pos, Surya, Seputar Indonesia dan Media Indonesia) cenderung tidak konsisten dalam memberi label pada peristiwa ini. Beberapa media terakhir tadi menggunakan lumpur Lapindo, lumpur Sidoarjo, bahkan hanya lumpur saja, tanpa embel-embel apapun. Labelisasi "lumpur Lapindo" berkonotasi menghakimi Lapindo Brantas Inc sebagai pihak yang bertanggung jawab atas luapan lumpur, sedangkan labelisasi lokasi lumpur Porong atau lumpur Sidoarjo lebih

<sup>309</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/27/090373958/TVOne-Bantah-Selewengkan-Nama-Lumpur-Lapindo>.

<sup>310</sup> Novenanto, Anton. 2010. Melihat kasus lapindo sebagai bencana sosial. Jurnal: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Vol. 23 / No. 1 / Published : 2010-01. TOC : 9, and page :63-75.

berkonotasi netral, tidak menuduh atau menyalahkan siapa yang menjadi penyebab luapan lumpur, dan hanya menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi di Porong atau di Sidoarjo.

Mengacu kepada hasil penelitian Rizko (2014: 116-129)<sup>311</sup> bahwa pada saat terjadi kasus lumpur Lapindo, terlihat adanya pro-pemberitaan pada kasus semburan lumpur di Sidoarjo oleh media lainnya seperti milik PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) yang kita ketahui Anindya Bakrie sebagai pemilik saham mayoritas di media tersebut, juga turut menukar istilah “Lumpur Lapindo” menjadi “Lumpur Sidoarjo” yang juga dilakukan oleh tvOne. Dimana kedua media ini berada di bawah Bakrie Group melakukan upaya pencitraan dan pembenaran bahwa kasus tersebut disebabkan fenomena alam dan bukan *human error* seperti pemberitaan media massa lainnya. Hal ini menghilangkan pandangan negatif masyarakat tentang perusahaan Lapindo melalui media wartawan yang berada di bawah naungan Bakrie Group.

Mengacu kepada berita yang dimuat Kompasiana<sup>312</sup> dengan judul: Perang Opini? Metro TV dan TVOne Soal Lumpur Lapindo, menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bencana lumpur Lapindo merupakan bencana alam kontan mendapatkan tanggapan dua televisi berita terbesar di Indonesia, Metro TV dan TV One. Terjadi perbedaan yang sangat kentara dalam isi berita yang disampaikan antara keduanya. Dalam TVOne, yang menjadi pemberitaan utama adalah, bahwa MK telah memutuskan bencana alam tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, karena merupakan bencana alam. Dilanjutkan dengan isi berikutnya yang menggambarkan bagaimana ganti rugi sudah dilakukan oleh Lapindo Brantas melalui Minarak Lapindo. Televisi milik keluarga Bakrie tersebut juga menayangkan sebagian warga Sidoarjo korban lumpur yang telah mendapatkan ganti rugi dan sudah tinggal di perumahan yang layak. Sementara Metro TV sebaliknya, isi berita yang disajikan sangat bertolak belakang dengan

---

<sup>311</sup> Rizko, Muhammad Mikal. 2014. Analisis Framing Berita Bencana Lumpur Lapindo Porong Sidoarjo di TVOne. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 2014, 2 (2): 116-129 ISSN 0000-0000, [ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id).

<sup>312</sup> Lihat: [http://www.kompasiana.com/wendy\\_stiawan/perang-opini-metro-tv-dan-tv-one-soal-lumpur-lapindo\\_551acc89a333119b20b65a39](http://www.kompasiana.com/wendy_stiawan/perang-opini-metro-tv-dan-tv-one-soal-lumpur-lapindo_551acc89a333119b20b65a39).

apa yang disampaikan TVOne. Televisi berlogo kepala burung tersebut menayangkan bagaimana tersiksanya warga korban lumpur Lapindo yang hingga sekarang belum juga tertangani. Bahkan, dilanjutkan dengan dialog yang mengangkat tema mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas bencana Lapindo.

Kontroversi *framing* berita fenomena bencana semburan lumpur di Sidoarjo antara TVOne dan Metro TV dapat dirangkum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 6.1. Perbedaan Framing Berita Bencana antara TVOne dan Metro TV**

Pihak	Framing Berita
<b>TVOne</b>	Konsisten menyebut istilah Bencana Lumpur Sidoarjo (Lusi). Membela dan selalu menampilkan berita positif atas pihak PT LBI. Korban bencana sudah mendapatkan ganti yang layak.
<b>Metro TV</b>	Konsisten menyebut istilah Bencana Lumpur Lapindo (Lula). Menyudutkan dan menampilkan berita negatif atas pihak PT LBI. Korban bencana sebagai kelompok yang tersiksa.

Sumber: Hasil Penelitian

## 2. Kontroversi Antara Istilah Ganti Rugi dan Ganti Untung

Perbedaan *framing* terkait dengan fenomena bencana semburan lumpur di Sidoarjo antara pihak korban bencana dan pihak PT LBI adalah tentang terminologi penggantian atas aset sawah, tanah darat, dan tanah bangunan milik korban bencana yang hancur tenggelam lumpur. Pihak korban bencana menganggap sebagai bentuk ganti rugi, sementara pihak PT LBI menyebutnya sebagai ganti untung.

Sebagaimana sudah disinggung pada Bab IV bahwa korban bencana Lumpur Lapindo mengajukan tuntutan untuk mendapatkan ganti rugi kepada TimNas PSLs dan PT LBI. Berdasarkan kesepakatan warga, kemudian disampaikan tuntutan nilai pembayaran ganti rugi untuk tanah darat sebesar Rp 2 juta dan untuk bangunan sebesar Rp 2,5 juta per-meter persegi. Namun PT LBI melakukan penawaran harga menjadi sebesar Rp 500 ribu

untuk tanah dan sebesar Rp 750 ribu untuk bangunan per-meter persegi. Namun kemudian pihak PT LBI menaikkan tawaran nilai ganti rugi menjadi sebesar Rp 1 juta untuk tanah darat dan Rp 1,5 juta untuk bangunan per-meter persegi. Usulan PT LBI ini kemudian bisa diterima oleh warga korban lumpur Lapindo, yakni sebesar 92% warga korban bencana Lumpur Lapindo menerimanya. Sementara nilai penggantian untuk tanah sawah diputuskan sebesar Rp 125 ribu per-meter persegi yang mengacu kepada hasil kesepakatan antara warga Desa Mindi dengan PT LBI yang telah terlebih dahulu diputuskan.

Namun pihak PT LBI melalui Aburizal Bakrie menjelaskan tanah dan bangunan milik warga itu bukan ganti rugi, melainkan melalui proses jual beli dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya sebesar Rp 60.000 per-meter persegi, tetapi dihargai oleh PT LBI sebesar Rp 1 juta<sup>313</sup>. ARB menyatakan bahwa dirinya paling populer di Sidoarjo, Jawa Timur, di antara capres lain yang akan bertarung di Pemilu 2014. Menurutnya, warga Sidoarjo mengetahui betul bagaimana mengurus warga yang terkena korban luapan lumpur. Menurutnya, tidak ada orang yang tahu bahwa dirinya membayar tanah warga Sidoarjo sebesar 20 kali lipat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). "Saya sudah mengeluarkan Rp 9 Triliun dari kantong pribadi untuk membayar tanah warga tersebut", akunya.<sup>314</sup>

Kontroversi proses penggantian aset tanah dan bangunan milik korban bencana yang hancur sebagai akibat bencana semburan lumpur di Sidoarjo dapat dirangkum dalam tabel berikut.

**Tabel 6.2. Kontroversi Penggantian Aset Tanah dan Bangunan**

Pihak	Istilah Penggantian
<b>Korban Bencana</b>	Menyebut sebagai ganti rugi karena tidak sesuai dengan nilai kerugian yang diderita dampak bencana yang muncul (kesehatan, sosial, psikologis, pekerjaan, dsb.).
<b>Pemerintah/ PT LBI</b>	Menyebut sebagai ganti untung karena nilai penggantian 20 kali lipat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sumber: Hasil Penelitian

### 3. Kontroversi Sosok ARB Antara Pahlawan dan Perusak (Penjahat)

Nama PT LBI tidak bisa dilepaskan dari sosok Aburizal Bakrie (ARB), karena saham dari PT LBI saat ini dimiliki oleh keluarga Bakrie (Bakrie Group). Warga korban bencana berpendapat bahwa PT LBI harus bertanggungjawab atas bencana semburan lumpur yang diakibatkan oleh kesalahan teknis saat melakukan pengeboran. Bagi warga penyebab lumpur lapindo adalah karena faktor pengeboran yang salah. Dengan demikian, pihak PT LBI memiliki kewajiban dan harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah dampak semburan lumpur tersebut.

Oleh karena itu, sasaran kekecewaan dan kemarahan korban bencana Lumpur Lapindo diarahkan kepada sosok ARB. Aburizal Bakrie (ARB) adalah merupakan simbol pihak yang harus dilawan secara kolektif. Gambar atau patung ARB dijadikan sebagai spirit tindakan kolektif (gerakan sosial) dalam melawan ketidakadilan atas warga korban bencana Lumpur Lapindo. Sebagian kelompok warga korban bencana lumpur Lapindo berpandangan bahwa ARB merupakan sosok di balik tragedi bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Namun, Aburizal Bakrie menyatakan bahwa PT LBI tidak bersalah atas terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan ganti rugi dengan cara membeli tanah dan bangunan warga lantaran "titah ibundanya". Menurut Aburizal Bakrie, pihak PT LBI sudah dinyatakan tidak bersalah oleh pihak MA, dengan demikian keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Hanya saja, karena "sang ibu" memerintahkan Aburizal Bakrie untuk membeli tanah dan bangunan, maka dia mengaku mematuhi.<sup>315</sup>

Aburizal Bakrie selanjutnya menyatakan bahwa sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan dana untuk penyelesaian

---

<sup>313</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/15/078390362/1cal-Bayar-Tanah-Warga-Lapindo-Demi-Titah-Ibu>.

<sup>314</sup> <http://www.kaskus.co.id/post/5200de963f42f41000002>

<sup>315</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/15/078390362/1cal-Bayar-Tanah-Warga-Lapindo-Demi-Titah-Ibu>.

kasus Lapindo di APBN. Sebab yang menjadi tanggung jawab pihak PT LBI adalah membeli tanah warga yang masuk dalam PAT, sementara itu di luar area peta terdampak menjadi tanggung jawab pemerintah.<sup>316</sup>

Adanya penetapan pihak pengadilan yang menyatakan bahwa peristiwa bencana semburan lumpur panas di Sidoarjo merupakan bencana alam sehingga pihak pemerintah dan PT LBI dinyatakan tidak bersalah, menyebabkan tidak adanya kewajiban hukum khususnya bagi pihak PT LBI untuk bertanggung jawab dalam upaya mengatasi berbagai dampak sosial-kemasyarakatan yang muncul sebagai akibat dari bencana semburan lumpur tersebut. Meskipun pihak pengadilan memutuskan bahwa pihak PT LBI tidak bersalah, namun demikian pihak PT LBI dinyatakan masih memiliki kewajiban moral untuk melakukan upaya-upaya dalam mengatasi berbagai dampak sosial-kemasyarakatan tersebut.

Dengan demikian, keterlibatan PT LBI dalam upaya mengatasi berbagai dampak bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo melalui bentuk pembayaran jual beli, hanya sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab moral saja. Aburiazal Bakrie (ARB) sebagai personafikasi dari Group Bakrie yang memiliki PT LBI menyatakan bahwa keterlibatan pihak PT LBI dalam proses jual beli aset tanah dan bangunan milik korban bencana Lumpur Lapindo dasarnya adalah karena panggilan kemanusiaan saja.

Karena itu, pihak PT LBI meminta agar warga korban bencana Lumpur Lapindo tidak melakukan aksi-aksi yang konfrontatif terhadap PT LBI apalagi menghujat ARB, yang justru seharusnya dipandang sebagai “pahlawan” bagi korban bencana lumpur di Sidoarjo. Pihak PT LBI meminta agar penyebutan istilah bencana Lumpur Lapindo (Lula) diganti dengan istilah bencana Lumpur Sidoarjo (Lusi) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007. Kontroversi terkait dengan penilaian apakah ARB (PT LBI) sebagai pahlawan atau perusak lingkungan dapat dirangkum dalam tabel berikut.

---

<sup>316</sup> Lihat: <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/08/087395533/Duit-APBN-untuk-Lapindo-Kata-Ical-Itu-Tanggung-Jawab-Pemerintah>.

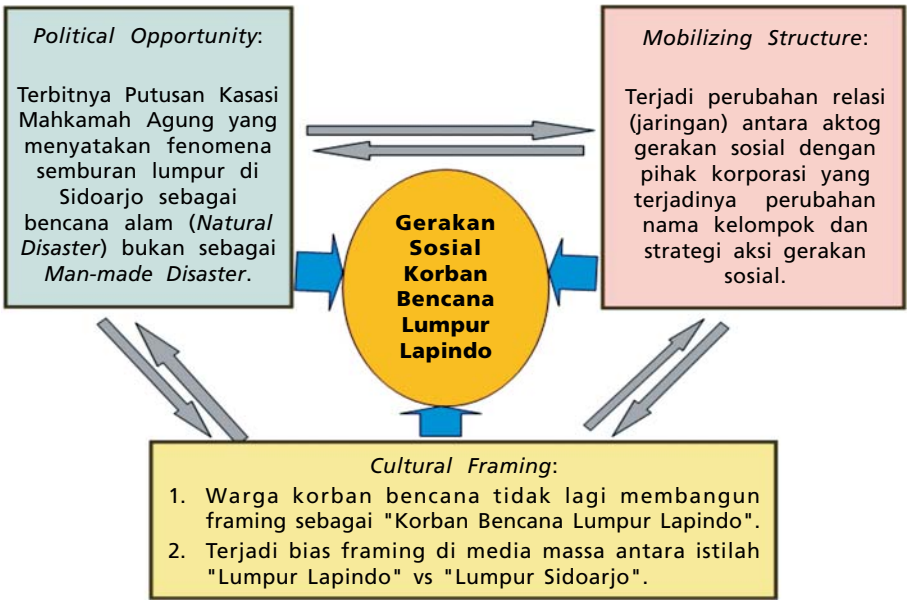


Tabel 6.3. Kontroversi Penilaian atas Sosok ARB (PT LBI)

Pihak	Istilah Penggantian
Korban Bencana	Memandang ARB (PT LBI) sebagai perusak lingkungan.
PT LBI (ARB)	Menganggap ARB (PT LBI) sebagai pahlawan dan pihak yang sangat peduli dan bertanggung jawab atas nasib korban bencana.

Sumber: Hasil Penelitian

Selanjutnya kondisi aspek *political opportunity*, *mobilizing structure*, dan *cultural framing* yang terjadi diperiode Ketiga gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo digambarkan sebagai berikut.



Gambar 6.1. *Political Opportunity, Mobilizing Structure, dan Cultural Framing pada Periode Ketiga Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo*

E. Simpulan

Pada periode ketiga ini, merupakan periode dimana Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami penurunan (*declining*). Pada periode ini faktor peluang/kesempatan politik

(*political opportunity*) yang mendasari terjadinya penurunan kekuatan gerakan sosial sebagai akibat dari munculnya putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) bahwa semburan lumpur di Sidoarjo sebagai bencana alam, dimana pihak Pemerintah dan PT LBI dinyatakan tidak bersalah. Keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) ini sebagai keputusan final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Pada periode ini terjadi perubahan struktur penggerak (*mobilizing structure*) korban bencana Lumpur Lapindo yang ditandai dengan adanya perubahan nama dan strategi kelompok korban bencana Lumpur Lapindo. Secara resmi nama kelompok korban bencana Lumpur Lapindo mengalami perubahan dengan tidak lagi mencantumkan kata "Lumpur Lapindo". Nama kelompok GKLL yang semula merupakan singkatan dari Gabungan Korban Lumpur Lapindo, kemudian berubah menjadi Gabungan Korban Luapan Lumpur. Sedangkan kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap) berubah nama menjadi kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak). Sementara strategi aksikelompok Gerakan Sosial juga berubah dari strategi konfrontatif menjadi strategi kooperatif. Menurunnya kekuatan Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo juga ditandai dengan adanya relasi pertukaran kekuasaan antara pemimpin korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI. Sebagai konsekuensi dari perubahan nama dan strategi kelompok, maka pemimpin kelompok Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo mendapatkan keuntungan kekuasaan politik dan keuntungan kesempatan bisnis.

Berkaitan dengan proses *culturalframing*, pada periode ini korban bencana Lumpur Lapindo secara formal tidak lagi menyebut diri mereka sebagai korban bencana Lumpur Lapindo. Hal ini nampak dari perubahan nama kelompok yang tidak lagi mencantumkan istilah "Lumpur Lapindo". Pada periode ini juga terjadi bias *framing* yang ditandai dengan munculnya pertarungan *culturalframing* antara istilah korban bencana "Lumpur Lapindo (Lula)" dengan istilah korban bencana "Lumpur Sidoarjo (Lusi)". *Cultural Framing* sebagai korban bencana "Lumpur Lapindo" direduksi menjadi korban bencana "Lumpur Sidoarjo".

Dalam konteks ini maka dapat dinyatakan bahwa pihak korporasi (PT LBI) sebagai pihak yang diuntungkan baik dari aspek *political opportunity*, *mobilizing structure*, maupun dari aspek *cultural framing*.

## Penutup

### A. Pemetaan Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo

Gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) di Sidoarjo muncul dan berkembang melalui suatu proses yang dinamis. Dari paparan sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka peta dan dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dapat dibagi ke dalam tiga periodisasi, yakni: Periode Pertama; sebagai fase munculnya ide (gagasan) aksi pra-Gerakan Sosial; Periode Kedua, sebagai fase munculnya gerakan sosial; dan Periode Ketiga, sebagai fase penurunan (*declining*) dan bias gerakan sosial. Penjelasan gambaran pemetaan gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Periode Pertama gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo terjadi dalam kurun waktu antara 29 Mei 2006 hingga April 2007. Pada periode ini merupakan waktu dimana awal terjadinya bencana Lumpur Lapindo hingga terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 8 April 2007. Pada periode pertama ini dapat dikatakan sebagai fase munculnya ide (gagasan) aksi pra-Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo belum terbentuk;

*Kedua*, periode Kedua Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo terjadi dalam kurun waktu antara tanggal 8 April 2007 hingga April 2009. Periode ini merupakan fase proses pemantapan untuk munculnya aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Peristiwa penting yang terjadi pada periode Kedua ini adalah dibentuknya organisasi (kelompok) korban bencana Lumpur Lapindo, yakni kelompok Gabungan Korban Lumpur Laindo (GKLL) dan kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap); dan

*Ketiga*, periode Ketiga Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo terjadi dalam kurun waktu antara tanggal 3 April 2009 hingga Desember 2014. Pada periode Ketiga ini, dinamika Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami bias dan penurunan (*declining*).

## **B. Dinamika Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Gambaran dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo didasarkan atas aspek peluang/kesempatan politik (*political opportunity*), struktur mobilisasi (*mobilizing structure*), dan pembingkaihan kultural (*cultural framing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Periode Pertama*; merupakan periode munculnya ide (gagasan) untuk aksi pra-gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Pada periode ini faktor peluang politik (*political opportunity*) yang mendasari munculnya aksi tindakan pra-gerakan sosial adanya adanya kekecewaan dan ketidakpercayaan korban bencana Lumpur Lapindo terhadap pemerintah dan PT LBI dalam upaya penanganan semburan lumpur panas, serta muncul perasaan ketidakadilan pada diri korban bencana atas respons dan kebijakan pemerintah dan PT LBI atas penanganan proses pengungsian.

Struktur penggerak masih dilakukan secara sporadis dan lokal dengan basis komunitas lingkungan pemukiman (tempat tinggal), seperti RT, RW dan Desa karena pada periode ini kelompok (organisasi) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo belum terbentuk. Pada periode ini belum muncul kesadaran bahwa korban bencana Lumpur Lapindo harus mengorgisir diri untuk membangun

kekuatan kolektif dalam memperjuangkan nasib mereka. Pada fase ini tindakan kolektif yang dilakukan oleh korban bencana Lumpur Lapindo berupa: (1) tuntutan penutupan semburan lumpur dan penanggulan aliran lumpur agar tidak masuk ke wilayah pemukiman warga; (2) tuntutan besaran nilai ganti rugi atas aset tanah dan bangunan milik warga yang hancur tergenang oleh lumpur; dan (3) tuntutan adanya payung (jaminan) hukum terkait proses pembayaran ganti rugi. Struktur mobilisasi pada periode ini juga didukung oleh kekuatan koalisi LSM yang tergabung dalam "Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo" yang melakukan advokasi berupa gugatan hukum ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan PT LBI.

Secara eksplisit korban bencana Lumpur Lapindo belum menyebut dan merasa bahwa mereka sebagai korban bencana Lumpur Lapindo, sehingga proses *culturalframing* sebagai korban bencana Lumpur Lapindo belum dibangun. Namun, proses *culturalframing* sebagai korban bencana Lumpur Lapindo justru dimunculkan oleh pihak luar, yakni dari kalangan LSM yang menyebut sebagai "Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo" yang dimotori oleh YLBHI dan Walhi.

*Periode Kedua*; merupakan periode munculnya Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Faktor peluang/kesempatan politik (*political opportunity*) yang penting yang mendasari munculnya Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14/2007 terkait kebijakan penanganan dampak bencana lumpur. Korban bencana Lumpur Lapindo merasa tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil atas substansi dari Peraturan Presiden Nomor 14/2007. Salah satu substansi dari Peraturan Presiden Nomor 14/2007 tersebut yang dianggap tidak adil adalah mengatur tentang relasi jual-beli antara korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI. Dalam relasi jual-beli ini, pihak korban bencana Lumpur Lapindo diposisikan sebagai penjual aset tanah dan bangunan yang hancur tergenang lumpur, sementara pihak PT LBI diposisikan sebagai pembeli. Dalam proses jual-beli tersebut, pihak korban bencana Lumpur Lapindo harus menunjukkan bukti otentik berupa sertifikat tanah dan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Struktur mobilisasi ditandai dengan dibentuknya kelompok (organisasi) korban bencana Lumpur Lapindo, yakni kelompok Gabungan Korban Bencana Lumpur Lapindo (GKLL) dan kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap). Dibentuknya kelompok (organisasi) korban bencana Lumpur Lapindo ini sebagai respons ketidakpercayaan korban bencana Lumpur Lapindo terhadap pihak pemerintah, PT LBI, dan pihak LSM. Melalui strategi aksi yang bersifat konfrontatif, korban bencana Lumpur Lapindo mengajukan tuntutan, yakni: (1) tuntutan terkait dengan alat bukti yang sah sebagai pengganti sertifikat dan IMB dalam proses jual-beli; dan (2) tuntutan terkait skema (mekanisme) pembayaran jual-beli.

Sementara dalam proses *Cultural Framing*, korban bencana Lumpur Lapindo membangun *framing* bahwa mereka sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo" yang secara resmi dicantumkan dalam nama kelompok korban bencana Lumpur Lapindo. Selain tercantum dalam nama kelompok, *Cultural Framing* sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo" juga diproduksi melalui berbagai simbol, gambar, dan mendramatisir situasi dan kondisi sebagai korban bencana Lumpur Lapindo.

*Periode Ketiga*; merupakan periode dimana Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami penurunan (*declining*). Pada periode ini faktor peluang/kesempatan politik (*political opportunity*) yang mendasari terjadinya penurunan kekuatan gerakan sosial sebagai akibat dari terbitnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) bahwa semburan lumpur di Sidoarjo sebagai bencana alam, dimana pihak Pemerintah dan PT LBI dinyatakan tidak bersalah. Keputusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) ini sebagai keputusan final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

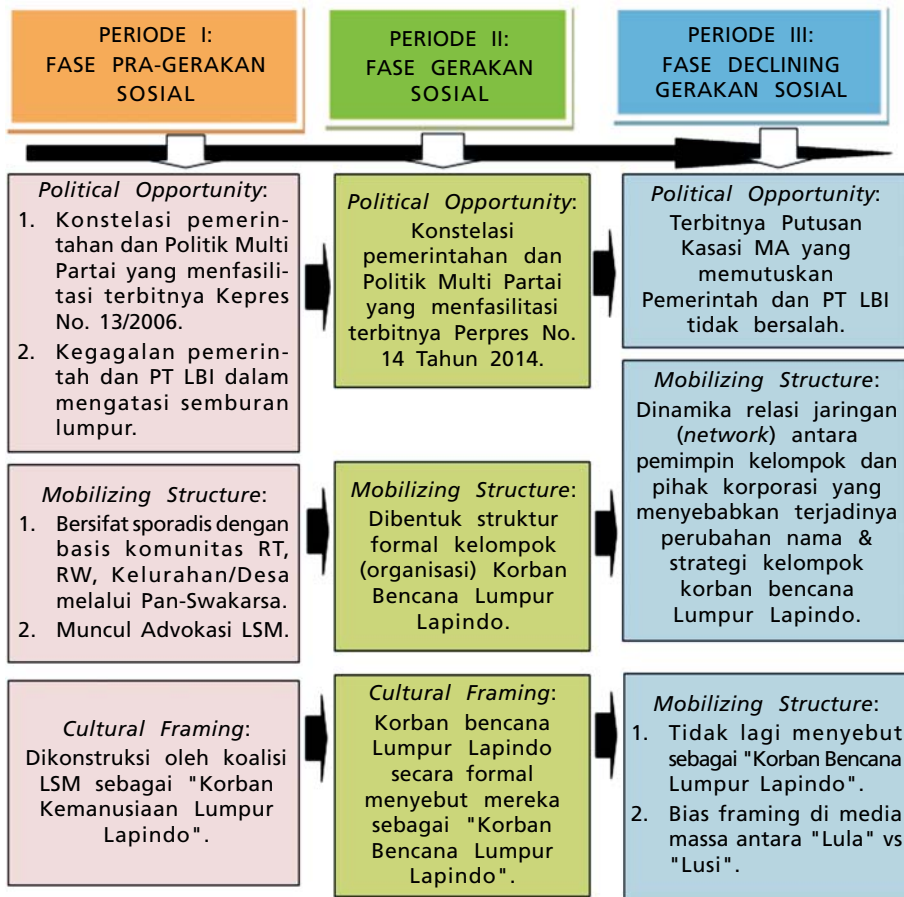
Pada periode ini terjadi perubahan struktur penggerak korban bencana Lumpur Lapindo yang ditandai dengan adanya perubahan nama dan strategi kelompok korban bencana Lumpur Lapindo. Secara resmi nama kelompok korban bencana Lumpur Lapindo mengalami perubahan dengan tidak lagi mencantumkan kata "Lumpur Lapindo". Nama kelompok GKLL yang semula merupakan singkatan dari "Gabungan Korban Lumpur Lapindo", kemudian berubah menjadi "Gabungan Korban Luapan Lumpur".

Sedangkan kelompok “Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo” (Pagarekorlap) berubah nama menjadi kelompok “Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak” (Pagarekontrak). Sementara strategi aksi kelompok Gerakan Sosial juga berubah dari strategi konfrontatif menjadi strategi kooperatif. Menurunnya kekuatan Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo juga ditandai dengan adanya relasi pertukaran kekuasaan antara pemimpin korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI. Sebagai konsekuensi dari perubahan nama dan strategi kelompok, maka pemimpin kelompok Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo mendapatkan keuntungan kekuasaan politik dan keuntungan kesempatan bisnis.

Berkaitan dengan proses *cultural framing*, pada periode ini korban bencana Lumpur Lapindo secara formal tidak lagi menyebut diri mereka sebagai “Korban Bencana Lumpur Lapindo”. Hal ini nampak dari perubahan nama kelompok yang tidak lagi mencantumkan istilah “Lumpur Lapindo”. Pada periode ini juga terjadi bias *framing* yang ditandai dengan munculnya pertarungan *cultural framing* di media massa antara istilah korban bencana “Lumpur Lapindo (Lula)” dengan istilah korban bencana “Lumpur Sidoarjo (Lusi)”. *Cultural Framing* sebagai korban bencana “Lumpur Lapindo” direduksi menjadi korban bencana “Lumpur Sidoarjo”.

Dalam konteks ini maka dapat dinyatakan bahwa pihak korporasi (PT LBI) sebagai pihak yang diuntungkan baik dari aspek *political opportunity*, *mobilizing structure*, maupun dari aspek *cultural framing*. Secara ringkas dinamika aspek *political opportunity*, *mobilizing structure*, dan *cultural framing* dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 7.1. Dinamika Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Selanjutnya secara lebih rinci dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo yang menekankan pada dimensi: (1) Konstelasi politik; (2) Seting regulasi kebijakan; (3) Organisasi gerakan sosial; (4) Pemimpin (aktor) gerakan sosial; (5) Dukungan asistensi/fasilitasi eksternal; (6) Dukungan sumberdaya finansial; (7) Strategi gerakan sosial; (8) Basis partisipan gerakan sosial; dan (9) Konstruksi identitas kolektif, dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Konstelasi Politik

Sebagaimana sudah dijelaskan pada BAB III poin C, bahwa dalam mengkaji dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur

Lapindo tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang mendasari lahirnya kebijakan pemerintah dalam merespons terjadinya bencana Lumpur Lapindo. Peristiwa bencana Lumpur Lapindo terjadi pada saat pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I, periode pemerintahan SBY-JK tahun 2004-2009, Aburizal Bakrie (ARB) menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (21 Oktober 2004 s/d 7 Desember 2005), kemudian berpindah posisi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (7 Desember 2005 s/d 20 Oktober 2009). Pada periode pertama pemerintahan Presiden SBY ini, Partai Golkar menjadi salah satu partai pendukung pemerintah. Pada tahun 2009, dalam Munas VIII Partai Golkar di Riau, ARB berhasil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2014. Meskipun pada Pemilu Presiden 2009 Partai Golkar mendukung pasangan JK-Wiranto, namun pada masa era pemerintahan Presiden SBY kedua, yakni pada periode 2009-2014, posisi Partai Golkar adalah menjadi partai pendukung pemerintah dimana Partai Golkar mendapat jatah antara lain sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) yang dijabat oleh HR. Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Peran ARB baik sebagai Menko Kesra maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam pemerintahan Presiden SBY sangat penting terutama dalam melahirkan kebijakan pemerintah, termasuk dalam konteks kebijakan pemerintah terkait bencana Lumpur Lapindo. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Bab II, bahwa saham PT LBI sebesar 50% dikuasai oleh PT Energy Mega Persada (PT EMP) milik Grup Bakrie. Oleh karena itu dapat dipahami apabila kebijakan pemerintah terkait penyelesaian bencana Lumpur Lapindo lebih banyak menguntungkan pihak PT LBI.

## **2. Seting Regulasi Kebijakan**

Aspek peluang/kesempatan politik (*political opportunity*) yang mendasari munculnya aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo adalah terkait dengan dominasi kebijakan pemerintah dalam memberikan izin eksplorasi migas di kawasan blok brantas kepada pihak PT LBI dan regulasi kebijakan yang terkait dengan penyelesaian dampak bencana Lumpur Lapindo. Dinamika dimensi

regulasi kebijakan pemerintah dalam konteks arena bencana Lumpur Lapindo meliputi:

Pada periode *pertama*, faktor peluang/kesempatan politik (*political opportunity*) yang mendasari munculnya ide (gagasan) aksi pra-gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo adalah berupa dimensi regulasi kebijakan pemerintah yang memberikan ijin eksplorasi migas kepada PT LBI yang mengakibatkan terjadinya bencana Lumpur Lapindo. Dalam konteks kebijakan penanganan dampak bencana Lumpur Lapindo, ide (gagasan) aksi pra-gerakan sosial terkait dengan kebijakan pemerintah berupa Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLs). Tugas Timnas PSLs disebutkan dalam bagian Ketiga dari Kepres tersebut, yakni: "Timnas mempunyai tugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi: (a) penutupan semburan lumpur; (b) penanganan luapan lumpur; dan (c) penanganan masalah sosial". Dengan demikian, tugas penutupan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur yang semula ditangani oleh pihak PT LBI kemudian diambil alih oleh Timnas PSLs. Namun ternyata upaya Timnas PSLs dalam menutup semburan lumpur juga tidak berhasil.

Pada periode *kedua*; regulasi kebijakan yang mendorong munculnya fase pemantapan dan konsolidasi aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo adalah terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Terdapat beberapa poin penting terkait isi dari Perpres Nomor 14 Tahun 2007 yakni: (1) Dibentuk suatu badan, yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai pengganti Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (Timnas PSLs). Tugas utama BPLS adalah menangani upaya penanggulangan Lumpur, menangani luapan lumpur, dan menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo; (2) Peta Area Terdampak (PAT) Lumpur Sidoarjo dibagi menjadi dua wilayah PAT, yakni wilayah dalam PAT dan wilayah luar PAT, dimana untuk wilayah dalam PAT tanggung jawab penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT LBI,

sedangkan untuk wilayah luar PAT tanggung jawab penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah; (3) mekanisme penggantian aset tanah dan bangunan milik warga yang tergenang lumpur diatur melalui mekanisme jual-beli dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah; (4) proses pembayaran jual-beli dilakukan secara bertahap dimana 20% dibayarkan dimuka dan sisanya sebesar 80% dibayar paling lambat dalam kurun waktu 2 tahun; dan (5) Pemerintah secara resmi menyebut istilah Lumpur Sidoarjo (Lusi) bukan Lumpur Lapindo (Lula).

Pada periode *ketiga*; Kondisi peluang/kesempatan politik yang mendasari dinamika Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo pada periode Ketiga ini ditandai oleh keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 3 April 2009, yang memutuskan bahwa peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo sebagai bencana alam, bukan sebagai bencana industri atau karena faktor manusia (*man-made disaster*).

### **3. Organisasi Gerakan Sosial**

Pada periode pertama, organisasi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo belum terbentuk. Tindakan kolektif korban bencana Lumpur Lapindo masih bersifat sporadis dengan basis komunitas lokal seperti RT, RW, dan Desa, yang dikoordinir oleh Pam-Swakarsa masing-masing desa. Sementara pada periode kedua, organisasi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo sudah terbentuk, yakni organisasi (kelompok) Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) dan kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap). Sedangkan pada periode ketiga, terjadi re-organisasi gerakan sosial korban Lumpur Lapindo dimana terjadi perubahan nama dari nama kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) menjadi kelompok Gabungan Korban Luapan Lumpur (GKLL) dan dari nama kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo (Pagarekorlap) menjadi kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak). Pada periode ketiga ini juga terjadi friksi dan perpecahan dalam kelompok gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo.

#### 4. Pemimpin (Aktor) Gerakan Sosial

Pada periode pertama pemimpin (aktor) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo adalah tokoh masyarakat yang berasal dari komunitas masyarakat lokal masing-masing RT, RW, dan Desa. Sementara pada periode kedua, pemimpin (aktor) gerakan sosial adalah pemimpin organisasi (kelompok) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo, seperti GKLL dan Pagarekorlap yang dipilih oleh korban bencana Lumpur Lapindo. Sedangkan para periode ketiga terjadi bias kepentingan pemimpin (aktor) gerakan sosial dan munculnya ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap pemimpin (aktor) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo.

#### 5. Dukungan Asistensi (Fasilitasi) Eksternal

Pada periode pertama gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo, muncul dukungan advokasi, fasilitasi dan asistensi dari LSM. Sementara pada periode kedua muncul ketidakpercayaan (*distrust*) korban bencana Lumpur Lapindo terhadap peran advokasi LSM, kemudian LSM mulai menarik diri. Upaya korban bencana Lumpur Lapindo dalam mencari dukungan dari pihak eksternal bergeser dari pihak LSM kepada para tokoh politisi dan akademisi perseorangan. Sedangkan pada periode ketiga, dukungan dari pihak LSM sudah tidak ada dan dukungan dari para tokoh perseorangan juga mulai berkurang.

#### 6. Dukungan Sumberdaya Finansial

Pada periode pertama, dukungan dana gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo diperoleh iuran pribadi tokoh/pemimpin komutias lokal dan fasilitasi LSM. Sementara pada periode kedua, dukungan dana diperoleh dari iuran anggota kelompok korban bencana Lumpur Lapindo. Sedangkan pada periode ketiga, sumberdaya finansial gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo mulai berkurang.

#### 7. Strategi Gerakan Sosial

Pada periode pertama, strategi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo menggunakan strategi komfrontatif. Sementara pada periode kedua, strategi gerakan sosial menggunakan strategi

konfrontatif-Negosiatif. Sedangkan pada periode ketiga, strategi gerakan sosial menggunakan strategi kooperatif-akomodatif.

## **8. Basis Partisipan Gerakan Sosial**

Pada periode pertama, basis partisipan aksi tindakan kolektif (pra-gerakan sosial) korban bencana Lumpur Lapindo adalah warga masyarakat masing-masing RT, RW, dan Desa yang terkena genangan aliran luapan Lumpur Lapindo yang dikoordinir oleh Pam-Swakarsa masing-masing Desa. Sementara pada periode kedua, basis partisipan gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo adalah seluruh anggota kelompok korban bencana Lumpur Lapindo yang dikoordinir oleh kelompok GKLL dan Pagarekorlap. Sedangkan pada periode ketiga, terjadi polarisasi partisipan, dimana solidaritas dan militansi partisipan gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo mulai menurun.

## **9. Konstruksi Identias Kolektif**

Pada periode pertama, belum muncul kesadaran internal sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo". Identitas kolektif sebagai korban bencana Lumpur Lapindo dikonstruksi oleh LSM (eksternal). Sementara pada periode kedua, Identias kolektif sebagai "Korban bencana Lumpur Lapindo" dikonstruksi secara internal atas kesadaran warga korban bencana. Sedangkan pada periode ketiga, terjadi bias antara konstruksi sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo" dan "Korban Bencana Lumpur Sidoarjo".

Dari uraian penjelasan tersebut diatas, maka gambaran dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 7.1. Dinamika Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo**

Aspek	Dimensi	Fase Gerakan Sosial		
		Fase I	Fase II	Fase III
Peluang/ Kesempatan Politik ( <i>Political Opportunity</i> )	Konstelasi Pemerintahan dan Politik	Relasi antara ARB dan SBY dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid I yang melatarbelakan giterbitnya Keputusan Presiden (Kepres) No. 13 Tahun 2006.	Relasi antara ARB dan SBY dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid I yang melatarbela- kangiterbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2007.	Relasi ARB sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan SBY sebagai Presiden yang melatarbelakangi terbitnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) tanggal 3 April 2009.
	Seting Regulasi Kebijakan	Terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) No. 13 Tahun 2006.	Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2007.	Terbitnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) tanggal 3 April 2009.
Struktur Mobilisasi ( <i>Mobilizing Structure</i> )	Organisasi Gerakan Sosial	Organisasi Gerakan sosial belum terbentuk. Basis tindakan kollektif adalah komunitas RT, RW, dan Desa dalam bentuk Pam-Swakarsa.	Dibentuk Organisasi (Kelompok) Gerakan Sosial, yakni: GKLL dan Pagarekorlap.	Terjadi Re- organisasi dan Disorganisasi Gerakan Sosial. Terjadi friksi antar organisasi (kelompok).
	Pemimpin (Aktor) Gerakan Sosial	Pemimpin bersifat sektoral pada masing- masing komunitas masyarakat lokal RT, RW, Desa.	Muncul pemimpin formal organisasi (kelompok) Gerakan Sosial yang berasal dari tokoh masyarakat lokal.	Bias kepentingan pemimpin organisasi (kelompok) gerakan sosial. Muncul ketidakpercayaan (distrust) terhadap pemimpin.
	Dukungan Asistensi/ Fasilitasi Eksternal	Muncul dukungan advokasi, fasilitasi dan asistensi dari LSM.	Muncul ketidak percayaan (distrust) terhadap LSM. LSM menarik diri. Upaya mencari duku- ngan kepada para tokoh perseorangan.	Tidak ada dukungan, asistensi, dan fasilitasi dari LSM.

Lanjutan Tabel 7.1.

	Dukungan Sumber daya Finansial	Sumber dana dari iuran pribadi tokoh/pemimpin komunitas lokal dan fasilitasi LSM.	Sumber dana diperoleh dari iuran internal anggota organisasi (kelompok) gerakan sosial.	Kekuatan sumber dana internal berkurang.
	Strategi Gerakan Sosial	Konfrontatif	Konfrontatif-Negosiatif	Kooperatif-Akomodatif.
	Basis Partisipan	Anggota Pam-Swakarsa.	Seluruh korban Bencana Lumpur Lapindo.	Terjadi polarisasi partisipan. Solidaritas dan militansi partisipan menurun.
Pembingkaihan Kultural ( <i>Cultural Framings</i> )	Konstruksi Identitas Kolektif	Belum muncul kesadaran internal sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo". Identitas kolektif sebagai korban bencana Lumpur Lapindo dikonstruksi oleh LSM (eksternal).	Identitas kolektif sebagai "Korban bencana Lumpur Lapindo" dikonstruksi secara internal atas kesadaran warga korban bencana.	Terjadi bias antara konstruksi sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo" dan "Korban Bencana Lumpur Sidoarjo".

### C. Kesimpulan

Peta dan dinamika aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dapat dibagi ke dalam tiga periode, yakni: (1) Periode Pertama yang terjadi dalam kurun waktu 29 Mei 2006 hingga April 2007. Pada periode ini merupakan waktu dimana awal terjadinya bencana Lumpur Lapindo hingga terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 8 April 2007. Periode pertama ini merupakan fase munculnya ide (gagasan) pra-gerakan sosial; (2) Periode Kedua yang terjadi dalam kurun antara tanggal 8 April 2007 hingga April 2009, dimana periode ini merupakan fase pematangan dan konsolidasi munculnya aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo; dan (3) Periode Ketiga yang terjadi dalam kurun waktu antara tanggal 3 April 2009 hingga



Desember 2014, yang merupakan fase penurunan (*declining*) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo.

Berdasarkan data diuraikan pada Bab-Babsebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*; Pemerintah (negara) dan pihak korporasi (PT LBI) melakukan tindakan dominasi dalam kebijakan pengelolaan (eksplorasi) sumberdaya Migas di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang mengakibatkan terjadinya bencana sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi korban bencana.

Bentuk dominasi pemerintah (negara) dan korporasi (PT LBI) dalam arena peristiwa bencana Lumpur Lapindo, meliputi:

1. Kebijakan pemerintah dalam memberikan ijin eksplorasi Migas di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo melanggar penggunaan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga melanggar Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kasus bencana lumpur Lapindo yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
3. Masyarakat di sekitar Porong, khususnya masyarakat Desa Renokenongo, melihat adanya proses yang tidak transparan dalam proyek eksplorasi Migas yang dilakukan oleh PT LBI. Semula perwakilan dari pihak PT LBI menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembelian tanah warga oleh PT LBI diperuntukkan bagi pengembangan kawasan peternakan ayam, bukan untuk lokasi pengeboran minyak dan gas (Migas);
4. Bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo menjadi arena produksi kemiskinan dan ketidakberdayaan bagi warga yang ada di wilayah Kecamatan Porong, dan sekitarnya, yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo. Menurut penjelasan beberapa warga, pada umumnya korban bencana Lumpur Lapindo kehidupannya menjadi miskin dan tidak berdaya; dan

5. Dominasi pemerintah atas korban bencana Lumpur Lapindo tercermin juga dalam kebijakan pemerintah terkait penyelesaian permasalahan dampak bencana Lumpur Lapindo. Salah satu konsekuensi dari terbitnya payung (jaminan) hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembayaran ganti rugi bagi korban bencana Lumpur Lapindo adalah ketentuan yang mengatur relasi antara warga korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI dan pemerintah menjadi relasi antara penjual-pembeli (relasijual-beli). Warga korban bencana Lumpur Lapindo harus menunjukkan bukti-bukti otentik, seperti sertifikat dan bukti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) agar bisa mendapatkan ganti rugi dari pihak PT LBI dan pemerintah.

Dalam konteks ini maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah dan PT LBI merupakan agen dominasi, sementara korban bencana Lumpur Lapindo sebagai subyek dominasi, dan kebijakan pemerintah yang memberikan ijin eksplorasi migas kepada pihak PT LBI yang mengakibatkan terjadinya bencana Lumpur Lapindo sebagai situasi dan kondisi *dominating*.

*Kedua*; Aksi gerakan sosial korban Bencana Lumpur Lapindo dapat dipetakan kedalam tiga periode, yakni: (1) Periode pertama, periode ini merupakan fase munculnya ide (gagasan) pra-gerakan sosial. Periode Pertama ini terjadi dalam kurun waktu 29 Mei 2006 hingga April 2007. Pada periode ini merupakan waktu dimana awal terjadinya bencana Lumpur Lapindo hingga terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 8 April 2007; (2) Periode Kedua, dimana periode ini merupakan fase pematangan dan konsolidasi munculnya aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Periode kedua ini terjadi dalam kurun antara tanggal 8 April 2007 hingga April 2009; dan (3) Periode Ketiga, merupakan fase penurunan (*declining*) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Periode ketiga ini terjadi dalam kurun waktu antara tanggal 3 April 2009 hingga Desember 2014.

*Ketiga*; Dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo berdasarkan aspek peluang/kesempatan politik (*political opportunity*), struktur penggerak (*mobilizing structure*), dan pembingkai kultural (*cultural framing*), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Periode Pertama; Aspek Peluang/Kesempatan Politik (*Political Opportunity*) ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2006, serta kegagalan pemerintah dan PT LBI dalam mengatasi (menutup) semburan lumpur. Sementara, aspek Struktur Penggerak (*Mobilizing Structure*) masih bersifat sporadis dengan basis komunitas RT, RW, dan Desa yang dikoordinir oleh Pam-Swakarsa masing-masing desa. Selain itu *Mobilizing Structure* juga didukung oleh pihak LSM. Sedangkan aspek Pembingkai Kultural (*Cultural Framing*) ditandai dengan munculnya identitas kolektif sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo" yang dikonstruksi oleh pihak LSM, dimana warga korban bencana belum menyadari dan belum menganggap bahwa mereka sebagai "korban bencana Lumpur Lapindo".
2. Periode Kedua; Aspek Peluang/Kesempatan Politik (*Political Opportunity*) ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2014 dan adanya ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap pihak LSM. Sementara aspek *Mobilizing Structure* ditandai dengan dibentuknya kelompok (organisasi) korban bencana Lumpur Lapindo. Sedangkan aspek *Cultural Framing* dikonstruksi oleh korban bencana sendiri dimana secara formal mereka menyebut sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo" yang dimunculkan dalam nama kelompok (organisasi) korban bencana Lumpur Lapindo.
3. Periode Ketiga; Aspek Peluang/Kesempatan Politik (*Political Opportunity*) ditandai dengan terbitnya putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa pihak pemerintah dan PT LBI dinyatakan tidak bersalah. Sementara aspek *Mobilizing Structure* ditandai dengan terjadinya re-organisasi kelompok korban bencana Lumpur Lapindo dimana terdapat perubahan nama dan strategi kelompok. Sedangkan aspek *Cultural Framing* ditandai dengan kondisi dimana korban bencana secara formal tidak lagi mengkonstruksi bahwa mereka sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo". Pada periode ketiga ini juga ditandai oleh adanya bias konstruksi antara "Korban Bencana Lumpur Lapindo (Lula)" dengan "Korban Bencana Lumpur Sidoarjo (Lusi)".

Ringkasnya, gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo muncul atas inisiatif dan peran advokasi dari pihak LSM. Namun inisiatif dan peran advokasi pihak LSM tersebut ternyata tidak berhasil, sehingga menyebabkan munculnya ketidakpercayaan (*distrust*) dari korban bencana terhadap pihak LSM. Korban bencana Lumpur Lapindo kemudian mengorganisir diri untuk membangun gerakan sosial dalam menuntut ganti-rugi atas aset tanah dan bangunan yang hancur tergenang lumpur. Gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami puncak kekuatan ketika terbentuknya kelompok (organisasi) gerakan sosial. Pada perkembangan berikutnya, kekuatan gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami proses pelemahan. Proses pelemahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan diantara para aktor pemimpin kelompok (organisasi) sehingga menyebabkan munculnya friksi antar-kelompok (organisasi) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo, dan adanya kooptasi dari kekuatan politik dan korporasi.

#### **D. Implikasi Teoritis**

Mengacu kepada hasil studi ini selanjutnya dapat dinyatakan beberapa catatan sebagai refleksi teoritis, sebagai berikut:

*Pertama*; Perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald tentang tiga aspek penting dalam studi gerakan sosial, yakni aspek: (1) Peluang-peluang politik (*Political opportunities*); (2) Struktur penggerak (*Mobilizing structures*); dan (3) Pembingkai kultural (*Cultural framing*), merupakan analisis komprehensif dalam mengkaji tentang gerakan sosial. Ketiga aspek yang ditawarkan oleh McAdam, McCarthy, dan Zald dalam mengkaji gerakan sosial tersebut merupakan varian dari tiga teori utama yang berkembang dalam studi gerakan sosial, yakni: teori proses politik (*political process theory*), teori mobilisasi sumberdaya (*resources mobilizing theory*), dan teori identitas kolektif (*identity-oriented theory*).

Menurut perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald mengisyaratkan bahwa gerakan sosial sebagai suatu tindakan yang rasional yang melibatkan aspek *political opportunity*, *mobilizing structure*, dan *cultural framings*. Oleh karena itu, gerakan sosial akan melahirkan perubahan struktur dan perubahan kultur. Proses dan dinamika

gerakan sosial lebih banyak diwarnai dan didominasi oleh aspek *mobilizing structure*. Perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald nampaknya mengindikasikan bahwa kekuatan aspek *political opportunity*, *mobilizing structure*, dan *cultural framing* harus dalam kondisi yang seimbang sebagai suatu kesatuan dalam suatu gerakan sosial. Artinya suatu gerakan sosial akan berhasil, yakni terjadinya perubahan struktur dan perubahan kultur, apabila aspek *political opportunity*, *mobilizing structure*, dan *cultural framing* dalam kondisi seimbang dan saling berhubungan (inter-koneksi). Meskipun secara teoritis ketiga aspek tersebut, yakni *political opportunity*, *mobilizing structure*, dan *cultural framings*, bisa diintegrasikan yang saling melengkapi, namun secara praktis dalam studi gerakan sosial di Indonesia, khususnya dalam studi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo, ketiga aspek tersebut tidak menunjukkan relasi yang seimbang. Proses dan dinamika gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo lebih banyak diwarnai dan didominasi oleh aspek *mobilizing structure*.

*Kedua*; Aksi gerakan sosial berlangsung secara bertahap dan dinamis. Dalam penelitian ini, dinamika aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dapat dipetakan kedalam tiga periodisasi gerakan, yakni periode pertama yang merupakan fase pra-gerakan sosial, periode kedua sebagai fase munculnya gerakan sosial, dan periode ketiga sebagai fase penurunan (*declining*) aksi gerakan sosial. Kondisi dan situasi *political opportunity*, *mobilizing structure*, dan *cultural framing* dalam setiap periode fase (tahap) gerakan sosial ternyata berbeda dan berkembang sesuai dengan konteksnya. Keadaan seperti ini tidak disinggung oleh McAdam, McCarthy, dan Zald ketika menguraikan perspektif teoritiknya.

*Ketiga*; Penelitian ini menemukan bahwa aktor pemimpin kelompok gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo memperoleh keuntungan politik dan bisnis. Dalam konteks ini, maka dapat dikatakan bahwa kelompok gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo dijadikan sebagai instrumen (alat) untuk memperoleh keuntungan bagi aktor pemimpin gerakan sosial. Keadaan seperti ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan (*declining*) kekuatan aksi gerakan sosial. McAdam, McCarthy, dan Zald juga tidak menjelaskan tentang

bagaimana dan faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu gerakan sosial mengalami penurunan (*declining*).

Penjelasan terkait dengan mengapa suatu gerakan sosial mengalami penurunan (*declining*) bisa mengacu kepada pandangan Macionis. Menurut Macionis, (1999: 623)<sup>317</sup> paling tidak terdapat lima alasan mengapa suatu gerakan sosial mengalami penurunan (*declining*), yakni: (1) Aksi suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan sosial tersebut dianggap telah berhasil dalam mencapai tujuannya (*Success*); (2) Suatu gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi (*Failure due to Organizational Weakness or Internal Strife*); (3) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya ko-optasi para pemimpin gerakan (*Co-optation of Leaders*); (4) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya tekanan (*Repression*), terutama dari pihak eksternal; dan (5) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut terbentuk ke dalam pengarus-utamaan (*Establishment within mainstream*), dimana gerakan sosial dapat diterima ke dalam bagian dari suatu sistem, sehingga tidak ada tantangan atas status quo.

*Keempat*; Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo diwarnai oleh peran aktif dari aktor pemimpin, dimana aktor pemimpin gerakan sosial tersebut berasal dari tokoh-tokoh pemimpin informal masyarakat setempat. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa aktor pemimpin memproduksi (melahirkan) aksi gerakan sosial, bukan sebaliknya gerakan sosial memproduksi (melahirkan) aktor pemimpin. Namun demikian, gerakan sosial merupakan wahana yang dapat mengembangkan kapasitas aktor pemimpin. Aktor pemimpin gerakan sosial berperan aktif dalam melahirkan dinamika gerakan sosial baik dalam aspek *political opportunity*, *mobilizing structure*, dan *cultural framing*. Perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald memandang bahwa kemunculan dan perkembangan gerakan sosial lebih banyak dipengaruhi oleh faktor dan kondisi-kondisi struktur (sistem).

---

<sup>317</sup> Macionis, John J. 1999. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.

*Kelima*; Secara metodologi, perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald menggunakan pendekatan struktur (sistem) dalam melakukan analisis terhadap muncul dan berkembangnya gerakan sosial. Dalam pandangan Clark<sup>318</sup> pendekatan struktur ini disebutnya sebagai pendekatan institusional (*institutionalism*). Perbedaan pandangan yang mendasar dalam pendekatan institusional adalah dalam relasi antara *agents* dan *structures*, dimana pandangan pendekatan struktur (*structure-based approaches*) menyatakan bahwa agen dibentuk oleh struktur. Sementara pendekatan agen (*agency-centered approaches*) memandang bahwa institusi sebagai struktur dibentuk oleh individu-individu untuk kepentingan tujuannya.

Dalam kasus gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) di Sidoarjo, kemunculan dan berkembangnya gerakan sosial tidak hanya karena dipengaruhi faktor-faktor struktural saja, akan tetapi juga karena adanya peran aktif dari aktor-aktor pemimpin kelompok korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) dalam menciptakan peluang dan kesempatan, memobilisasi dan mengorganisir kekuatan kolektif dan sumberdaya, serta membentuk dan menciptakan *cultural framing* gerakan sosial.

## E. Agenda Studi Lanjutan

Dalam konteks studi gerakan sosial ke depan, beberapa agenda penelitian yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut:

*Pertama*; Dalam studi gerakan sosial perlu diintegrasikan antara pendekatan struktur (*structure-based approaches*) dan pendekatan agen (*agency-centered approaches*) sebagai bentuk dualitas analisis yang saling melengkapi. Oleh karena itu, ke depan, dalam studi gerakan sosial pendekatan struktural (*structure-based approaches*) yang ditawarkan oleh McAdam, McCarthy, dan Zald akan lengkap apabila diintegrasikan dengan pendekatan agensi (*agency-centered approaches*). Sebagaimana dinyatakan Clark bahwa antara pendekatan struktur (*structure-based approaches*) dan pendekatan agen (*agency-centered approaches*) dapat diintegrasikan. Selama

---

<sup>318</sup> Clark, Willial Roberts. 1998. Agents and Structure: Two Views of Preferences, Two Views of Institutions. *International Studies Quarterly*, Vol. 42, No. 2 (Jun., 1998), pp. 245-270.

ini kajian mengenai hubungan negara dan masyarakat banyak yang terjebak dalam logika dualisme dimana satu elemen menjadi determinan bagi elemen yang lainnya. Dualisme itu dalam bentuk struktur menentukan agensi (pelaku) atau agensi (pelaku) menentukan struktur. Dalam studi gerakan sosial, seharusnya antara pendekatan struktur (*structure-based approaches*) dan pendekatan agen (*agency-centered approaches*) dipandang sebagai bentuk dualitas yang saling melengkapi bukan dipandang sebagai bentuk dualisme yang kontradiktif;

*Kedua;* Menarik untuk dikaji terkait bagaimana posisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam konteks relasi antara kekuatan sosial (*social power*), kekuatan negara (*state power*), dan kekuatan korporasi/pasar (*corporate/market power*).

Sementara, bagi pihak-pihak yang tertarik dengan studi tentang fenomena bencana Lumpur Lapindo atau fenomena tindakan kolektif (gerakan sosial) korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, maka studi selanjutnya bisa difokuskan antara lain kepada hal-hal berikut ini:

*Pertama;* Mengingat bahwa bencana lumpur Lapindo telah memproduksi kemiskinan bagi warga masyarakat yang ada di wilayah PAT dan di luar PAT, maka perlu diteliti lebih jauh tentang besaran, luasan dan dampak perubahan kehidupan warga korban bencana Lumpur Lapindo pasca-bencana, termasuk bagaimana strategi korban lumpur Lapindo membangun kehidupan sosial yang baru. Mengingat dampak bencana Lumpur Lapindo memiliki dimensi yang cukup luas dan massif, maka dipandang perlu juga untuk dilakukan penelitian secara komprehensif dan lintas disiplin.

*Kedua;* Bencana Lumpur Lapindo telah menghancurkan sebuah identitas sosial dan peradaban manusia di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana warga korban lumpur Lapindo membangun kembali identitas sosial di tempat yang baru?.

*Ketiga;* Banyak rumor dan desas-desus yang muncul khususnya di kalangan warga korban bencana Lumpur Lapindo yang berkaitan dengan penggunaan dan peruntukkan kawasan Porong dan sekitarnya pasca-bencana. Maka perlu dilakukan studi lebih



lanjut terkait dengan disain pengembangan kawasan Porong dan sekitarnya pasca bencana Lumpur Lapindo; dan

*Keempat*; Fenomena bencana Lumpur Lapindo (Lula) syarat dengan kepentingan politik dan ekonomi. Oleh karena itu penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan "Politik-Ekonomi Manajemen Bencana Lumpur Lapindo".

# Daftar Pustaka

## **Buku:**

- Abercrombie, Nicholas; Hill, Stephen; & Turner, Bryan S. 2010. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akbar, Ali Azhar. 2012. *Konspirasi SBY-Bakrie*. Jakarta: INDOPETRO Publishing.
- Alexander, Jeffrey C. 1998. *Real Civil Society: Dilemmas of Institutionalization*. London: SAGE Publications, Ltd.
- Althusser, Louis. 2008. *Tentang Ideologi: Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnold, Hugh J.; & Feldman, Daniel C. 1986. *Organizational Behavior*. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Babbie, Eral. 2008. *The Basics of Social Research*. Belmont, USA: Thomson Wadsworth.
- Baker, Gideon. 2002. *Civil Society and Democratic Theory: Alternative Voices*. London: Routledge.
- Batubara, Bosman & Utomo, Paring Waluyo. 2012. *Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo*. Yogyakarta: INSITPress.

- Beach, Michael. 2010. *Disaster Preparedness and Management*. Philadelphia: F.A. Davis Company.
- Berg, Bruce L. 2007. *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Burrage, Michael. 2008. *Class Formation, Civil Society and The State: A Comparative Analysis of Russia, France, the US and England*. New York: Palgrave Macmillan.
- Carwright, Dorwin; dan Zander, Alvin. 1968. *Group Dynamics: Research and Theory*. New York: Harper & Row Publishers.
- Chaskin, Robert J.; Brown, Prudence; Venkatesh, Sudhir; dan Vidal Avis. 2002. *Building Community Capacity*. New York: Aldine De Gruyter.
- Chesters, Graeme; & Welsh, Ian. 2006. *Complexity and Social Movement: Multitudes at the Edge Chaos*. Oxon: Routledge.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. New Delhi: SAGE Publications.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crossley, Nick. 2002. *Making Sense of Social Movements*. Philadelphia: Open University Press.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Darlington, Yvonne; & Scott, Dorothy. 2002. *Qualitative Research in Practice: Stories from the Field*. Wrows Nest, Australia: Allen & Unwin.
- Della Porta, Donatella; & Diani, Mario. 2006. *Social Movements an Introduction*. Malden: Blackwell Publishing.
- Denzin, Norman K.; & Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research* (terj.). Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Diani, Mario; & McAdam, Doug (eds.). 2003. *Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action*. Oxford: Oxford University Press.

- Dieter Opp, Karl. 2009. *Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis*. Oxon: Routledge.
- Drake, Philip. 2012. *Composing Disaster: Nature, Politics and Indonesia's Mud Volcano. A Dissertation Submitted to the Graduate Division of the University Hawai'i at Manoa in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor Philosophy*. University of Hawai'i: Hawai'i.
- Elliott, Jane. 2005. *Using Narrative Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publications.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fakih, Mansour. 2005. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fakih, Mansour. 2010. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Febriasih, Happy Budi (peny.). 2009. *Bisnis dan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Friedman, Elisabeth Jay; Hochstetler, Kathryn; & Clark, Ann Marie. 2005. *Sovereignty, Democracy, and Global Civil Society: State-Society Relations at UN World Conference*. Albany: State University of New York Press.
- Girling, John. 2004. *Social Movements and Symbolic Power: Radicalism, Reform and The Trial of Democracy in France*. New York: Palgrave MacMillan.
- Given, Lisa M. (ed.). 2008. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (Volumes 1 & 2). Los Angeles: A SAGE Reference Publications.
- Greene, Shepard. 2002. *Sociology and You*. Glencoe: McGraw-Hill.
- Haralambos, Michael; & Holborn, Martin. 1994. *Sociology: Themes and Perspectives*. London: CollinsEducational.
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heroepoetri, Arimbi. 2011. *Pengabdian Dari Mula: Laporan Pemetaan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Bencana Luapan Lumpur di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur*. Jakarta: Komnas Perempuan.

- Hollway, W.; & Jefferson, T. 2000. *Doing Qualitative Research Differently: Free Association, Narrative and The Interview Method*. London: SAGE Publication.
- Howell, Jude; & Pearce, Jenny. 2002. *Civil Society & Development: A Critical Exploration*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Horton, Paul B.; & Hunt, Chester L. 1984. *Sociology*. Tokyo: McGraw-Hill Book Company.
- Johnston, Hank., & Klandermans, Bert (eds.). 1995. *Social Movements and Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Jupp, Victor (ed.). 2006. *The Sage Dictionary of Social Research Methods*. London: SAGE Publications.
- Kalof, Linda.; Dan, Amy; & Dietz, Thomas. 2008. *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- Kaufman, Michael; & Alfonso, HaroldoDilla (eds.). 1997. *Community Power and Grassroots democracy: The Transformation of Social Life*. London: Zed Books.
- Klandermans, Bert; &Roggeband, Conny (eds.). 2007. *Handbook of Social Movements Across Disciplines*. New York: Springer Science Business Media, LLC.
- Klandermans, Bert; &Staggenbog, Suzanne (eds.). 2002. *Methods of Social Movement Research*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Larana, Enrique; Johnston, Hank; &Gusfield, Joseph R. 1994. *New Social Movement: From Ideology to Identity*. Philadelphia: Temple University Press.
- Locher, David A. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Macionis, John J. 1999. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Manalu, Dimpos. 2009. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Maimunah, Siti. 2002. *Negara Tambang dan Masyarakat Adat: Perspektif Ham dalam Pengelolaan Pertambangan yang Berbasis Lingkungan & Keaarifan Lokal*. Malang: Intrans Publishing.
- Marvasti, Amit B. 2004. *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. New Delhi: SAGE Publications.
- McAdam, Doug; Tarrow, Sydney; & Tilly, Charles. 2004. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McAdam, Doug; McCarthy, John D.; & Zald, Mayer N. 2004. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marczyk, G.; DeMatteo, D.; & Festinger, D. 2005. *Essentials of Research Design and Methodology*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Sosial* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marvasti, Amir B. 2004. *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. London: SAGE Publications.
- Miles, Matthew B.; & Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Milofsky, Carl. 1988. *Community Organizations: Studies in Resource Mobilization and Exchange*. New York: Oxford University Press.
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Mas'ood, Mohtar. 2003. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McNally, Mark; & Schwarzmantel, John (eds.). 2009. *Gramsci and Global Politics: Hegemony and Resistance*. Oxon: Routledge.
- Meyer, David S.; Whittier, Nancy; & Robnett, Belinda (eds.) 2002. *Social Movements: Identity, Culture, and the State*. Oxford: Oxford University Press.
- Moghadam, Valentine M. 2009. *Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Neuman, W. Lawrence. 2007. *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.

- Ngadisah. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Raja.
- Olson, Mancur. 1965. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambiidge: Harvard University Press.
- Owens, Lynn. 2009. *Cracking Under Pressure: Narrating the Decline of the Amsterdam Squatters' Movement*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Patria, Nezar, & Arief, Andi. 1999. *Anronio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perkins, John. 2007. *Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional* (Terjemahan: Confessions of An Economic Hit Man). Jakarta: UFUK Press.
- Petras, James; & Veltmeyer, Henry. 2005. *Social Movements and State Power: Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador*. London: Pluto Press.
- Praselia, Heru; & Batubara, Bosman (eds.). 2010. *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*. Depok: DESANTARA.
- Pratt, Jeff. 2003. *Class, Nation and Identity: The Anthropology of Political Movements*. London: Pluto Press.
- Price, Jammie; Straus, Roger A.; & Breese, Jefrey R. 2009. *Doing Sociology: Case Studies in Sociological Practice*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Purdue, Derrick (ed.). 2007. *Civil Societies and Social Movements: Potentials and Problems*. Oxon: Routledge.
- Quah, Stella R., & Sales, Arnaud (eds.). 2000. *The International Handbook of Sociology*. London: SAGE Publication. Ltd.
- Rais, Mohammad Amien. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Ritzer, George; & Smart, Barry. 2001. *Handbook of Social Theory*. London: SAGE Publications.
- Ritzer, George; & Goodman, Douglas J. 2009. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: KreasiWacana.
- Robbins, Stephen P. 1988. *Essentials of Organizational Behavior*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

- Romano, David. 2006. *The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization, and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Salim, Agus (peny.). 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, James. C. 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale University Press.
- Shigetomi, Shinichi; Makino, Kumiko; & Elgar, Edward (eds.). 2009. *Protest and Social Movements in the Developing World*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Silaen, Victor. 2006. *Gerakan Sosial Baru: Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir*. Yogyakarta: IRE Press.
- Silverman, David; & Marvasti, Amir. 2008. *Doing Qualitative Research: A Comprehensive Guide*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Singh, Rajendra. 2001. *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. New Delhi: SAGE publications India, Ltd.
- Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru* (Terj.). Yogyakarta: Resist Book.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2007. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Snow, David A.; Soule, Sarah A.; & Kriesi, Hauspeter (eds.). 2004. *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis dan Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soenyono. 2008. *Gerakan Sosial masyarakat Miskin Perkotaan: Political Opportunities, Mobilizing Structure, dan Cultural Framing*. Surabaya: InsanCendekia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.



- Spencer, Metta. 1982. *Foundations of Modern Sociology*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Stewart, Charles; Smith, Craig Allen; & Denton Jr., Robert E. 2007. *Persuasion and Social Movements*. Illinois: Waveland Press, Inc.
- Stolley, Kathy S. 2005. *The Basics of Sociology*. Westport: Greenwood Press.
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendar, E., & Winarni, YB. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: AKATIGA.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Sukmana, Oman. 2003. *Dasar-dasar Psikologi Lingkungan*. Malang: UMM Press.
- Sukanto. 2012. *Tindakan Kolektif dan Identitas: Studi Gerakan Sosial Korban Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo*. Ringkasan Disertasi: PPS Unair Surabaya.
- Suwondo, Kutut; Dirdjosanjoto; & Fernandez, Joe. 2010. *Otonomi Daerah: Ada & Untuk Siapa?*. Salatiga: Percik.
- Tandon, Rajesh; & Mohanty, Ranjita. 2002. *Civil Society and Governance*. New Delhi: Samskriti.
- Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movements: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. New York: Newbery Award Records, Inc.
- Triwibowo, Darmawan. 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.
- Turner, Jonathan H. 1998. *The Structure of Sociological Theory*. Belmont, CA.: Wadsworth Publishing Company.
- Varma, S.P. 1987. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyudi. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press.

- Wasserman, Stanley; & Faust, Katherine. 1994. "Social Network Analysis in the Social and Behavioral Sciences". *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press. pp. 1–27. ISBN 9780521387071.
- Wiguna, I Putu A.; Citrosiswyo, W., & Widodo, A. (eds.). 2009. *Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo*. Surabaya: PSKB ITS.
- Woodside, Arch G. 2010. *Case Study Research: Theory, Methods, and Practice*. Wagon Lane, Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.
- Zanden, James W. Vander. 1988. *The Social Experience: An Introduction to Sociology*. New York: Random House.

### **Jurnal:**

- Atkinson, Miriam; & Mulrnnan, Monica E. 2009. Local Protest and Resistance to the Rupert Diversion Project, Northern Quebec. *Atic*, Vol. 62, No. 4 (Dec. 2009), pp. 468-480.
- Batista, Israel. 1994. *Civil Society: A Paradigm or a new Slogan?*. *Ecumenical Review*. Vol. 46, Issue 1 (Jan., 1994), p. 12-20.
- Bendor, Jonathan; and Mookherjee, Dilip. 1987. Institutional Structure and the Logic of Ongoing Collective Action. *The American Political Science Review*, Vol. 81, No. 1 (Mar., 1987), pp. 129-154.
- Benford, Robert D.; & Snow, David A. 2000. *Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 26 (2000), p.611-639.
- Bevington, Douglas; & Dixon, Chris. 2005. *Movement-Relevant Theory: Rethinking Social Movement Scholarship and Activism*. *Social Moevment Studies*, Vol. 4, No. 3 (December, 2005), p. 185-208.
- Buechler, Steven M. 1995. *New Social Movement Theories*. *The Sociological Quarterly*, Vol. 36, No. 3 (Summer, 1995), p. 441-464.

- Buechler, Steven M. 1993. *Beyond Resource Mobilization? Emerging Trends in Social Movement Theory. The Sociological Quarterly*, Vol. 34, No. 2 (May, 1993), pp. 217-235.
- Chanddhoke, Neera. 2007. *New Social Movements Theories. The Sociological Quarterly*, Vol. 36, No. 3 (Summer., 1995), p. 441-464.
- Clark, Willial Roberts. 1998. Agents and Structure: Two Views of Preferences, Two Views of Institutions. *International Studies Quarterly*, Vol. 42, No. 2 (Jun., 1998), pp. 245-270.
- Cook, Karen S. 1977. Exchange and Power in Networks of Interorganizational Relations. *The Sociological Quarterly*, Vol. 18, No. 1, Special Issue: Organization Analysis: Critique and Innovation (Winter, 1977), pp. 62-82.
- Cook, Karen S.; and Emerson, Richard M. 1978. Power, Equity and Commitment in Exchange Networks. *American Sociological Review*, Vol. 43, No. 5 (Oct., 1978), pp. 721-739.
- Cook, Karen S.; Emerson, Richard M.; Gillmore, Mary R.; and Yamagishi, Toshio. 1983. The Distribution of Power in Exchange Networks: Theory and Experimental Results. *American Journal of Sociology*, Vol. 89, No. 2 (Sep., 1983), pp. 275-305
- Curtis, Russell L., Jr.; & Zurcher, Louis A., Jr. 1974. Social Movements: An Analytical Exploration of Organizational Forms. *Social Problems*, Vol. 21, No. 3 (1974), pp. 356-370.
- De Santa Ana, Julio. 1994. *The Concept of Civil Society. Ecumenical Review*. Vol. 46, Issue 1 (Jan., 1994), p 3-11.
- Della Porta, Donatella. 2008. *Research on Social Movements and Political Violence. Published Online: 15 July 2008*. Springer Science + Business Media, LLC.
- Dvorakova, Vladimira. 2008. *Civil Society and Social Movements in Latin America and Central and Eastern Europe: A Comparativ Approach. TenMund, Fortaleza*. V.4, n.7 (Jul/Dez., 2008), p. 334-351.
- Dweyer, F. Robert; & Walker, Orville C., Jr. 1981. Bargaining in an Asymmetrical Power Structure. *Journal of Marketing*, Vol. 45, No. 1 (Winter, 1981), pp. 104-115.

- Emerson, Richard M. 1976. Social Exchange Theory. *Annual Review of Sociology*, Vol. 2 (1976), pp. 335-362.
- Ethridge, Marcus E. 1987. Collective Action, Public Policy, and Class Conflict . *The Western Political Quarterly*, Vol. 40, No. 4 (Dec., 1987), pp. 575-592.
- Gale, Richard P. 1986. *Social Movement and The State: The Environmental Movement, Countermovement, and Government Agencies. Sociological Perspectives*, Vol. 29, No. 2 (April, 1986), p. 2002-240.
- Gotham, Kevin Fox. *Political Opportunity, Community Identity, and the Emergence of a Local Anti-Expressway Movement. Social Problems*, Vol. 46, No. 3 (Aug., 1999), pp. 332-354.
- Gulati, Ranjay. 1998. Alliances and Networks. *Strategic Management Journal*, Vol. 19, No. 4, Special Issue: Editor's Choice (Apr., 1998), pp. 293-317.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2005. Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 9, Nomor 1 (Juli, 2005), h.1-22.
- Halton, Eugene Rochber. 1982. *Situation, Structure, and the Context of Meaning. The Sociological Quarterly*, vol. 23, No. 4, p. 455-457.
- Hannigan, John A. 1985. *Alain Touraine, Manuel Castells and Social Movement Theory: A Critical Appraisal. The Sociological Quarterly*, Vol. 26, No. 4 (Winter, 1985), p. 435-454.
- Hollander, Jocelyn A.; & Einwohner, Rachel L. 2004. Conceptualizing Resistance. *Sociological Forum*, Vol 19, No. 4 (Dec., 2004), pp. 533-554.
- Hollinger, David A. 2006. From Identity to Solidarity. *Daedalus*, Vol. 135, No. 4, On Identity (Fall, 2006), pp. 23-31.
- Jacek Szmataka, Jacek; John Skvoretz, John; Tad Sozanski, Tad; & Mazur, Joanna. 1998. Conflict in Networks. *Sociological Perspectives*, Vol. 41, No. 1 (1998), pp. 49-66.
- Jenkins, J. Craig. 1983. *Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements. Annual Review of Sociology*, Vol. 9 (1983), pp. 527-553.
- Lawler, Edward J. 1992. Power Processes in Bargaining. *The Sociological Quarterly*. Vol. 33, No. 1 (Spring, 1992), pp. 17-34.

- Lovaglia, Michael, J.; Skvoretz, John; Willer, David; and Markovsky, Barry. 1995. Negotiated Exchanges in Social Networks. *Social Forces*, Vol. 74, No. 1 (Sep., 1995), pp. 123-155.
- Lovett, Frank . 2009. Domination and Distributive. *The Journal of Politics*, Vol. 71, No. 3 (July 2009), pp. 817-830.
- Lovett, Francis N. 2001. Domination: A Preliminary Analysis. *The Monist*, Vol. 84, No. 1, Civic Republicanism and Political Philosophy (JANUARY 2001 ), pp. 98-112.
- Lucas, Jeffrey W.; Younts, C. Wesley; Lovaglia, Michael J.; and Markovsky, Barry. 2001. Lines of Power in Exchange Networks. *Social Forces*, Vol. 80, No. 1 (Sep., 2001), pp. 185-214.
- Kanter, Rosabeth Moss. 1968. Commitment and Social Organization: A Study of Commitment Mechanisms in Utopian Communities. *American Sociological Review*, Vol. 33, No. 4 (Aug., 1968), pp. 499-517.
- Klandermans, Bert. 1993. *A Theoretical Framework for Comparisons of Social Movement Participation*. *Sociological Forum*, Vol. 8, No. 3 (Sept., 1993), p.383-402.
- Klandermans, Bert. 1984. *Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory*. *American Sociological Review*, Vol.49, No. 5 (Oct., 1984), pp. 583-600.
- Klandermans, Bert, Jose Manuel Sabucedo, Mauro Rodriguez, dan Marga de Weerd. 2002. Identity Processes in Collective Action Participation: Farmers' Identity and Farmers' Protest in the Netherlands and Spain. *Political Psychology*, Vol. 23, No. 2 (Jun., 2002), pp. 235-251.
- Malena, Carmen; & Heinrich, Volkhart Finn. 2007. *Can We Measure Civil Society? A Proposal Methodology for International Comparative Research*. *Development in Practice*, Vol. 17, No. 3 (Jun., 2007), p. 338-352.
- Markovsky, Barry; Willer, David; and Patton, Travis. 1988. Power Relations in Exchange Networks. *American Sociological Review*, Vol. 53, No. 2 (Apr., 1988), pp. 220-236.
- McCarthy, John D., & Zald, Mayer N. 1977. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, Vol. 82, No. 6 (May, 1977), pp. 1212-1241.

- Meyer, JP, dan Allen, NJ. 2007. A Three Component conceptualization of organizational commitment: Some methodological considerations. *Human Resource Management Review*, Vol. 1, pp. 61-98.
- Novenanto, Anton. 2009. "The Lapindo Case" by Mainstream Media. *Indonesian Journal of Social Sciencies*, Volume 1 No. 3, July-September 2009.
- Oliver, Pamela E. 1993. *Formal Models of Collective Action*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 19 (1993), pp. 271-300.
- Passy, Florence; & Giugni, Marco. 2001. Social Network and Individual Perception: Explaining Differential Participation in Social Movements. *Sociological Forum*, Vol. 15, No. 1 (Mar., 2001), pp.
- Pichardo, Nelson A. 1997. *New Social Movements: A Critical Review*. *Annual Review of Sociology*, vol. 23 Issue 1, p.411.
- Pichardo, Nelson A. 1988. *Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations*. *The Sociological Quarterly*, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1988), pp. 97-110.
- Polleta, Francesca; and James M. Jasper. 2001. Collective Identity and Social Movement. *Annual Review of Sociology*, Vol. 27, 283-305.
- Raval, R.K. 1972. An Essay on 'Phenomenology'. *Philosophy and Phenomenological Research*, Vol. 33, No. 2 (Dec., 1972), pp. 216-226.
- Rey, Cheryl; & Raju, Patricia. 1996. *Group Relative Deprivation: Cognitive Affective Components and Protest Orientation Among Indian South Africans*. *Journal of Social Psychology*. Vol. 136 Issue 5, p579-588.
- Rogalin, Christabel L.; Soboroff, Shane D.; and Lovaglia, Michael J. 2007. Power, Status, and Affect. *Sociological Focus*, Vol. 40, No. 2 (May 2007), pp. 202-220.
- Quah, Stella R., & Sales, Arnaud (eds). 2000. *The International Handbook of Sociology*. London: SAGE Publication. Ltd.
- Robinson, Ira E., Balkwell, James W., & Ward, Dawn McNeal. 1980. *Meaning and Behavior: An Empirical Study in Sociolinguistics*. *Social Psychology Quarterly*, Vol. 43, No. 2 (Jun., 1980), p. 253-258.

- Rose, Fred. 1997. *Toward a Class-Cultural Theory of Social Movements: Reinterpreting New Social Movements. Sociological Forum*, Vol. 12, No. 3 (Sept., 1997), p. 461-494.
- Santoro, Wayne A.; & McGuire, Gail M. 1997. *Social Movement Insiders: The Impact of Institutional Activists on Affirmative Action and Comparable Worth Policies. Social Problems*, Vol. 44, No. 4 (Nov., 1997), p. 503-519.
- Schutz, Aaron. 2004. Rethinking Domination and Resistance: Challenging Postmodernism. *Educational Researcher*, Vol. 33, No. 1 (Jan. - Feb., 2004), pp. 15-23.
- Sembiring, Julius. 2011. Tanah Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011. Hal. 237-429.
- Sementelli, Arthur J. 2007. Authority, Domination, and the Administrative State. *Administrative Theory & Praxis*, Vol. 29, No. 1 (Mar., 2007), pp. 115-131.
- Simpson, Brent; & Macy, Michael W. 2001. Collective Action and Power Inequality: Coalition in Exchange Networks. *Social Psychology Quarterly*, Vol. 64, No. 1 (Mar., 2001), pp. 88-100.
- Suharko. 2005. Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 8, Nomor 3 (Maret, 2005), h. 263-290.
- Sundar, K.R. Shyam. 2007. *Trade Union and Civil Society: Issues and Strategies. Indian Journal of Industrial Relations*, Vol. 42, No. 4 (Apr., 2007), p. 713-734.
- Syahyuti. 2006. Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro-Ekonomi*. Volume 24 No. 1, Juli 2006: 14-17.
- Tarrow, Sidney. 2008. *Charles Tilly and the Practice of Contentious Politics. Social Movement Studies*, Vol. 7, No. 3, (December 2008), p.225-246.
- Thye, Shane R.; Willer, David; and Markovsky, Barry. From Status to Power: New Models at the Intersection of Two. *Social Forces*, Vol. 84, No. 3 (Mar., 2006), pp. 1471-1495.
- Tilly, Charles. 1991. Domination, Resistance, Compliance... Discourse. *Sociological Forum*, Vol. 6, No. 3 (Sep., 1991), pp. 593-602.

- Tindall, D.B.. 2004. Social Movement Participaton Over Time: An Ego-Network Approach to Micro-Mobilization. *Sociological Fokus*, Vol. 37, No. 2, May 2004, pp. 163-184.
- Turner, Scott. 1998. *Global Civil Society, Anarchy and Governance: Assesing an Emerging Paradigm. Journal of Pace Research*, Vol. 35, No. 1 (Jan, 1998), p. 25-42.
- Useem, Bert. 1998. Breakdown Theories of Collective Action. *Annual Review of Sociology*, Vol. 24 (1998), pp. 215-238.
- Usman, Sunyoto. 2002. Civil Society di Indonesia: Suatu Tantangan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 5, Nomor 3 (Maret, 2002), h. 379-391.
- Wahlstrom, Mattias; & Peterson, Abby. 2006. *Between the State and the Maarket Expanding the Concepts of "Political Opportunity Structure"*. *ActaSociologica*, Vol. 49, No. 4 (Dec., 2006), p. 363-377.
- Whitmeyer, Joseph M. 1999. Interest-Network Structures in Exchange Networks. *Sociological Perspectives*, Vol. 42, No. 1 (Spring, 1999), pp. 23-47.
- Wieviorka, Michel. 2005. *After New Social Movements. Social Movement Studies*, Vol. 4, No. 1 (May, 2005), p. 1-19.
- Williams, Johnny E. 2002. *Linking Beliefs to Collective Action: Political Religious Beleiefs and the Civil Rights Movement. Sociological Forum*, Vol. 17, No. 2 (Jun., 2002), p. 203-222.
- Wright, S.C. & Lubensky, M. 2009. The struggle for social equality: Collective action versus prejudice reduction. In S. Demoulin, J. P. Leyens & J. F. Dovidio (Eds.), *Intergroup misunderstandings: Impact of divergent social realities* (pp. 291-310). New York: Psychology Press.
- Yamagishi, Toshio; Gillmore, Mary R.; and Cook, Karen S. 1988. Network Connections and the Distribution of Power in Exchange. *American Journal of Sociology*, Vol. 93, No. 4 (Jan., 1988), pp. 833-851.
- Zhao, Shanyang. 1996. *The Beginning of the End or the End of the Beginning? The Theory Construction Movement Revisited. Sociological Forum*, Vol. 11, No. 2 (Jun., 1996), p. 305-318.



Zomerren, Martijn Van. 2009. *Journal of Social Issues*, Vol. 65, No. 4, 2009, pp. 645-660.

### **Dokumen:**

Dewan Riset Daerah Jawa Timur. 2011. *Agenda Riset Daerah Provinsi Jawa Timur 2011-2014*.

Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2009. Badan Pusat Statistik dan Bappekab Sidoarjo, Mei 2010.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007, TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 26 APRILI 2007.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. LEMBARAN NEGARA 1960-104.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANGPENATAAN RUANG.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANGKETENAGAKERJAAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANGKESEHATAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009-2029.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN Kedua ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN Ketiga ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.



# Indeks

## A

Advokasi, 137, 171, 219, 251  
Aksi, 3, 91, 121, 137, 170, 225, 249  
Althusser, 13  
Apparatus, 13

## B

*Behaviour*, 36  
Bencana, 3, 50, 107, 137, 167, 215, , 249

## C

*Cash and Carry*, 143  
*Civil Society*, 2, 148  
COHRE, 125  
*Collective Action*, 14, 33  
*Collective Bargaining*, 203

*Collective Behaviour*, 36  
*Crossley*, 14  
*Cultural Framing*, 20, 164, 211, 238, 250, 252

## D

*Declining*, 41, 215  
*Discontent*, 30  
Dominasi, 3, 48, 134

## E

Eksplorasi, 3, 58, 107, 159, 204, 225  
ELSAM, 147, 188

## F

FKKBN, 188  
*Framing*, 164, 167, 238, 250  
Friksi, 194

**G**

Gerakan Sosial, 1  
 Gerbangkertosusila, 44, 105  
*Grievances*, 30  
 GSB, 14

**H**

*Huda Centre*, 179  
 Huffco, 108  
*Human Rights*, 2, 148

**I**

*Identity*, 14, 256  
*Ideological*, 11

**J**

Jatam, 62, 147

**K**

Ketidakadilan, 1, 86, 125, 166,  
 170  
 KTT, 190

**L**

Lapindo, 3, 43, 107, 137, 167,  
 215, 249  
 LSM, 8, 137, 167, 218, 251  
 Lula, 3, 43, 146, 167, 232, 249  
 Lusi, 7, 98, 150, 169, 238, 253

**M**

Macionis, 15, 267  
*Man-Made Disaster*, 5, 216, 257  
*Market Power*, 10, 269  
 Marxian, 12, 20, 198, 256

McCarthy, 20, 298, 256  
 Mobilisasi, 2, 137, 184, 250  
*Mobilizing Structure*, 10, 165,  
 211, 215, 250

**N**

*Natural Disaster*, 6, 246  
 Negara, 2, 86, 107, 140, 170,  
 218, 269  
*New Social Movements*, 14

**O**

*Opportunity*, 10, 20, 164, 168, 215  
*Opposition*, 19

**P**

*Political Opportunity*, 10, 20,  
 164, 168, 215  
*Political Process*, 14, 265  
*Proximate Opportunity Structure*,  
 24  
*Public Goods*, 15

**R**

*Relative Deprivation*, 23  
*Repressive*, 13  
*Resettlement*, 143, 223  
 RMT, 27

**S**

Setgab, 194, 230  
*Social Movements*, 3, 198  
*Social Power*, 1, 269  
*Solidarity*, 22  
*State Power*, 3, 269

**T**

*The Social System*, 24

**W**

Walhi, 58, 114, 137, 175, 216,  
251

**Y**

YLBHI, 96, 175, 137, 216, 291

# Tentang Penulis



**Oman Sukmana**, Lahir di Sumedang pada tanggal 09 Pebruari 1966. Menempuh pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD Bandung lulus tahun 1991; S-2 Psikologi Bidang Kajian Utama (BKU) Psikologi Sosial pada Program Pascasarjana UNPAD lulus tahun 1997; dan S-3 Sosiologi di Fisipol UGM lulus tahun 2016. Pada tahun 2013 mengikuti *Sandwich Programs pada Departement of Sociology and Anthropology, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Leiden University of Netherlands*. Sejak tahun 1991 menjadi dosen Kopertis VII Surabaya dpk pada FISIP UMM, pernah menjadi Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMM (1998-1999), Pembantu Dekan III FISIP UMM (1999-2009), Anggota PANWASLU Kabupaten Malang (2003-2004), dan Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fisip UMM (2014-2018). Saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI) untuk periode 2016-2018. Aktif menulis buku dan bahan ajar, kegiatan penelitian baik internal maupun eksternal, dan melaksanakan berbagai pengabdian pada masyarakat. Buku yang telah diterbitkan antara lain: *Etika Profesi Pekerjaan Sosial* (UMM Press, 1999), *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan* (Bayu Media, 2003), *Sosiologi dan Politik Ekonomi* (UMM Press, 2005), *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* (Intrans Publishing, 2014, Penulis Team), *Mozaik Kebijakan Sosial Politik* (FISIP UMM 2015, Penulis Team), serta *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Intrans Publishing, 2016). Prestasi yang pernah diraih antara lain sebagai Dosen Berprestasi FISIP UMM tahun 2008.